



Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunung Mas

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS

2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas nomor 325, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 325.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DAN

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Gunung Mas.
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
17. RPJMD Teknokratik adalah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebelum Kepala Daerah terpilih, berdasarkan pendekatan ilmiah dan analisis kondisi Daerah. Dokumen ini digunakan sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2025-2029; dan
 - b. pedoman Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun RKPD tahun 2026-2030.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

- a. Bab I. PENDAHULUAN;
- b. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V. PENUTUP.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

(1) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- a. indikator tujuan
 1. indeks infrastruktur;
 2. penurunan intensitas emisi gas rumah kaca;
 3. indeks pembangunan manusia;
 4. laju pertumbuhan ekonomi;
 5. produk domestik regional bruto per kapita;
 6. tingkat kemiskinan;
 7. indeks reformasi birokrasi; dan
 8. indeks daya saing Daerah.
- b. indikator sasaran
 1. rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan;
 2. indeks konektivitas wilayah;
 3. persentase desa mandiri;
 4. indeks kualitas lingkungan hidup;
 5. indeks risiko bencana;
 6. indeks pendidikan;

7. indeks kesehatan;
 8. indeks ketimpangan gender;
 9. indeks pembangunan kebudayaan;
 10. indeks pembangunan keluarga (ibangga);
 11. laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan;
 12. laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan;
 13. kontribusi produk domestik regional bruto Gunung Mas terhadap produk domestik regional bruto Kalimantan Tengah;
 14. gini rasio;
 15. tingkat pengangguran terbuka;
 16. nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 17. indeks pelayanan publik; dan
 18. indeks integritas nasional.
- (2) indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Bupati dan wakil Bupati periode 2025-2029.

Pasal 6

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai melalui pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam. Guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2026 sampai 2030.
- (2) RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman RKPD 2026 sampai 2030, meliputi:
 - a. pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - c. optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;

- d. optimalisasi pengentasan kemiskinan;
 - e. peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat;
 - f. peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - g. pengembangan agribisnis;
 - h. peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata;
 - i. percepatan reformasi birokrasi;
 - j. pelestarian kebudayaan Daerah; dan
 - k. peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan dan isu strategis daerah serta kemampuan riil keuangan Daerah.
- (4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. RPJMD teknokratik untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode kedua serta permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah;
 - b. RKPD tahun 2030 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode kedua dan/atau RPJMD Teknokratik.
- (2) Tata cara penyusunan RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah bersama Komisi Pemilihan Umum kepada seluruh partai politik.
- (4) RKPD tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun 2030.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal ...

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di kuala kurun
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 09,42/2025

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJMD digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029; bahan penyusunan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2025-2029, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi pelaku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 terdiri dari 8 bab dan 12 Pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	5
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	8
	1.5 Sistematika Penulisan	I	9
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	II	1
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	31
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	47
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	58
	2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah	II	77
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	78
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	115
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	120
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	145
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	145
	2.3.2 Isu Strategis	II	155
	2.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II	187
BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III	1
	3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi	III	1
	3.1.2 Misi	III	2
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III	4
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	35
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	35
	3.2.2 Program Pembangunan Daerah	III	46
	3.2.3 Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	III	52
	3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	65
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV	1
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV	44
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	44
	4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV	47
BAB V	PENUTUP	V	1
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V	2



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain	I	5
Gambar II.1	Peta Kabupaten Gunung Mas	II	2
Gambar II.2	Grafik Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	3
Gambar II.3	Peta Topografi (Kiri) dan Peta Kelerengan (Kanan) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021	II	4
Gambar II.4	Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021	II	5
Gambar II.5	Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021	II	7
Gambar II.6	Gambar Model Daya Dukung Air	II	14
Gambar II.7	Grafik Daya Dukung Air serta proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Gunung Mas	II	14
Gambar II.8	Model Daya Tampung Beban Pencemaran	II	15
Gambar II.9	Gambar Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran	II	15
Gambar II.10	Gambar Model Pengelolaan Persampahan	II	16
Gambar II.11	Grafik Peningkatan Sampah Rumah Tangga, Kapasitas Angkut dan TPA	II	17
Gambar II.12	Gambar Persentase Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Gunung Mas	II	17
Gambar II.13	Grafik Rasio Sampah Tidak Terangkut	II	18
Gambar II.14	Gambar Model Daya Dukung Pangan	II	18
Gambar II.15	Grafik Proyeksi Produksi Beras di Kabupaten Gunung Mas	II	18
Gambar II.16	Grafik Daya Dukung Pangan	II	19
Gambar II.17	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024	II	20
Gambar II.18	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023	II	21
Gambar II.19	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	22
Gambar II.20	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	23
Gambar II.21	Persentase Keluarga Dengan Akses Sanitasi Yang Layak Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	24
Gambar II.22	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	25
Gambar II.23	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	27
Gambar II.24	Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 (ribu jiwa)	II	29
Gambar II.25	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	35
Gambar II.26	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024	II	36



Gambar II.27	Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	37
Gambar II.28	Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	39
Gambar II.29	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	41
Gambar II.30	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	42
Gambar II.31	Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	43
Gambar II.32	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	44
Gambar II.33	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024	II	45
Gambar II.34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	50
Gambar II.35	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024	II	51
Gambar II.36	Pilar Adopsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022-2024	II	53
Gambar II.37	Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	56
Gambar II.38	Indeks Desa Membangun Kabupaten Gunung Mas	II	57
Gambar II.39	Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunung Mas	I	58
Gambar II.40	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	80
Gambar II.41	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	81
Gambar II.42	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	83
Gambar II.43	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	84
Gambar II.44	Komponen Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (%)	II	84
Gambar II.45	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	85
Gambar II.46	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	86
Gambar II.47	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	86
Gambar II.48	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	87
Gambar II.49	Perkembangan Belanja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	92



Gambar II.50	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	92
Gambar II.51	Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	93
Gambar II.52	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	93
Gambar II.53	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	94
Gambar II.54	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	95
Gambar II.55	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	99
Gambar II.56	Target Komposisi PAD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	125
Gambar II.57	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	II	125
Gambar II.58	Target Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	129
Gambar II.59	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	130
Gambar II.60	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	130
Gambar II.61	IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	148
Gambar II.62	Pertumbuhan IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	148
Gambar II.63	Usia harapan Hidup Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	149
Gambar II.64	Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	150
Gambar II.65	Kontribusi PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	151
Gambar II.66	Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	152
Gambar II.67	Tingkat Kemiskinan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	153
Gambar II.68	Indeks Gini Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	153
Gambar II.69	Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah	II	162
Gambar II.70	Gambaran Kinerja Perumdam Maruang Duhung	II	188
Gambar III.1	Keselarasan Visi Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Nasional	III	2
Gambar III.2	Keselarasan Misi Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Asta Cita	III	3
Gambar III.3	Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Gunung Mas	III	36
Gambar III.4	Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Tengah Pada RPJMN 2025-2029	III	66



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	2
Tabel II.2	Panjang Sungai Di Kabupaten Gunung Mas	II	5
Tabel II.3	Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Gunung Mas	II	6
Tabel II.4	Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas	II	8
Tabel II.5	Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024	II	9
Tabel II.6	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah	II	10
Tabel II.7	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tewah	II	11
Tabel II.8	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Miri	II	11
Tabel II.9	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Sepang Simin	II	12
Tabel II.10	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Jakatan Raya	II	12
Tabel II.11	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Talaken	II	13
Tabel II.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020 – 2024	II	24
Tabel II.13	Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	27
Tabel II.14	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas (Ribuan Jiwa) Tahun 2024	II	28
Tabel II.15	Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	31
Tabel II.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024	II	32
Tabel II.17	Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II	33
Tabel II.18	Tabel Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, P0, P1, dan P2 Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	34
Tabel II.19	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	38
Tabel II.20	Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024	II	40
Tabel II.21	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	45
Tabel II.22	Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	46
Tabel II.23	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023	II	47
Tabel II.24	Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	48
Tabel II.25	Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	49



Tabel II.26	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	51
Tabel II.27	Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024		52
Tabel II.28	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	55
Tabel II.29	Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	56
Tabel II.30	Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	59
Tabel II.31	Kondisi Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	60
Tabel II.32	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar Penyusunnya Tahun 2022-2024	II	60
Tabel II.33	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	61
Tabel II.34	Capaian Indikator SPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	75
Tabel II.35	Skala interval Otonomi Fiskal	II	78
Tabel II.36	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024	II	79
Tabel II.37	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)	II	89
Tabel II.38	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam juta)	II	97
Tabel II.39	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II	100
Tabel II.40	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	106
Tabel II.41	Rasio Lancar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	111
Tabel II.42	Rasio Hutang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	112
Tabel II.43	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	113
Tabel II.44	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	113
Tabel II.45	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	115
Tabel II.46	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	116
Tabel II.47	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	118



Tabel II.48	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	II	119
Tabel II.49	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	119
Tabel II.50	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam jutaan)	II	126
Tabel II.51	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (dalam juta)	II	133
Tabel II.52	Proyeksi APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (dalam juta)	II	136
Tabel II.53	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	141
Tabel II.54	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	143
Tabel II.55	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	143
Tabel II.56	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	144
Tabel II.57	Highlight Intervensi dan lokasi Prioritas Kalimantan Tengah	II	168
Tabel II.58	Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas 2025-2029	II	183
Tabel II.59	Data BUMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2025	II	
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030	III	4
Tabel III.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	III	9
Tabel III.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas	III	14
Tabel III.4	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas	III	36
Tabel III.5	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	III	37
Tabel III.6	Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	III	45
Tabel III.7	Program Prioritas Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	III	47
Tabel III.8	Keterkaitan Program Strategis KDH dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Gunung Mas	III	52
Tabel IV.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2030	IV	2
Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	IV	45



Tabel IV.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten IV 48
Gunung Mas Tahun 2025-2030



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik geografis didominasi oleh wilayah perbukitan dan hutan tropis yang lebat. Terletak di wilayah tengah pulau Kalimantan, kabupaten ini memiliki potensi alam yang melimpah seperti sumber daya mineral, kayu, dan kekayaan flora-fauna khas hutan hujan tropis. Letak geografis ini menjadikan Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu daerah yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan wisata cagar alam (*ecotourism*) dan wisata budaya yang masih perlu dikembangkan untuk mampu mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Keunikan Kabupaten Gunung Mas terletak pada kehidupan masyarakatnya yang masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi Dayak. Upacara adat Tiwah yakni ritual penghantaran roh leluhur ke alam baka yang masih sering dilaksanakan dengan khidmat dan menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan. Selain itu, rumah betang sebagai simbol kehidupan komunal dan gotong royong masyarakat Dayak, masih dapat ditemukan dan dijadikan ikon kultural yang merepresentasikan kearifan lokal. Dalam aspek budaya dan kekhasan, Kabupaten Gunung Mas juga dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai spiritual dan filosofi hidup yang selaras dengan alam. Masyarakatnya hidup dengan semangat Huma Betang, yakni falsafah kebersamaan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama maupun antar suku.

Pembangunan Kabupaten Gunung Mas mempunyai tujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan strategi yang terencana, pemerintah daerah berupaya menciptakan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Dalam hal ini, penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi sangat penting sebagai pedoman utama bagi perangkat daerah dalam merumuskan program-program prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan

jangka menengah yang substansinya saling berkaitan. Penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, peraturan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Dengan dilantikannya Bapak Jaya S. Monong S.E., M.Si., sebagai Bupati dan Ibu Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si., sebagai Wakil Bupati pada tanggal 20 februari tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas berkomitmen untuk segera mewujudkan visi dan misi pembangunan dengan menyusun dokumen RPJMD 2025-2029. Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu *Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, Holistik-Tematik, Integratif, Spasial*. Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) Penetapan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. RPJMD menjadi pedoman dalam arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Gunung Mas menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses



penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



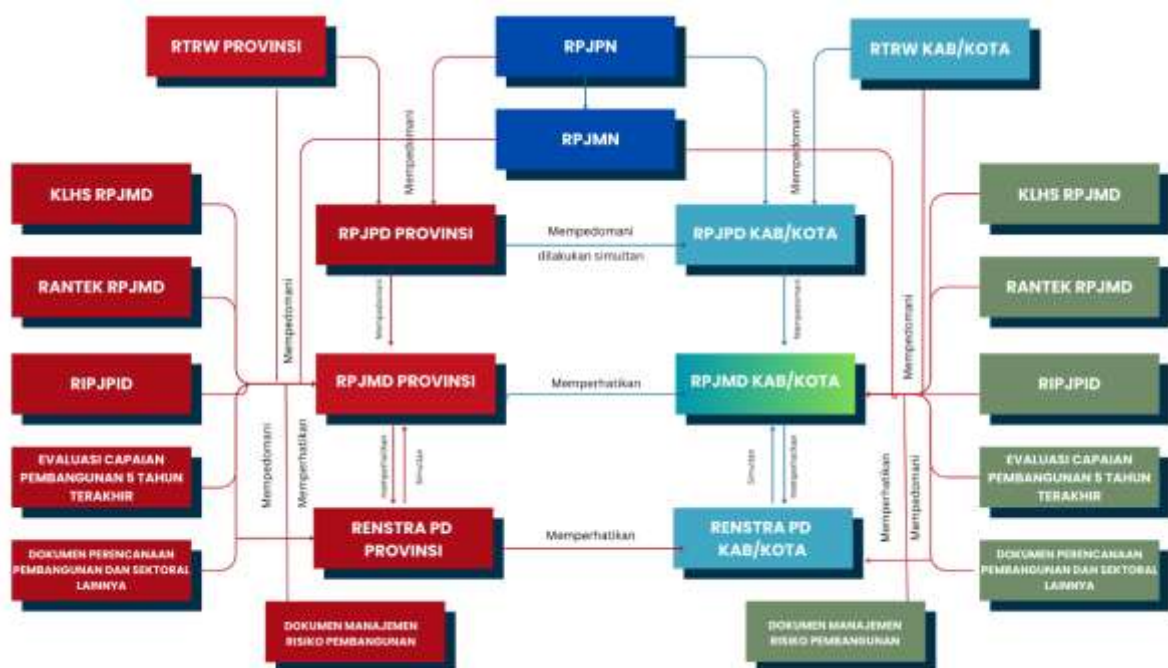
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas nomor 325, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 325.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1.

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan keterkaitan antar dokumen perencanaan yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terletak pada sinergi antara tujuan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen strategis 5 (lima) tahun di tingkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memiliki agenda prioritas yang terangkum dalam Asta Cita, yang mencakup penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap agenda nasional. Sinergi ini memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga mendukung visi nasional dalam menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 terletak pada keterpaduan dan sinergi kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dengan arah pembangunan provinsi. RPJMD Kabupaten Gunung Mas sebagai panduan pembangunan daerah 5 (lima) tahun harus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini melibatkan penyesuaian prioritas, program, dan kegiatan di Kabupaten Gunung Mas agar

sesuai dengan kerangka pembangunan yang dirumuskan di tingkat provinsi. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 juga perlu memastikan keterpaduan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan menyelaraskan kebijakan, antara Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih harmonis, efektif, dan inklusif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat di tingkat lokal maupun regional.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat arah, visi, misi, serta sasaran pokok pembangunan daerah selama dua dekade mendatang. RPJPD menjadi fondasi dan bingkai strategis bagi seluruh tahapan pembangunan lima tahunan yang dijabarkan melalui RPJMD. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 merupakan implementasi awal dari tahapan pertama RPJPD, yang secara operasional bertugas mengawal pencapaian sasaran jangka panjang melalui prioritas pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi instrumen kebijakan kepala daerah, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menerjemahkan arah pembangunan jangka panjang menjadi program, kegiatan, dan indikator yang terukur dan realistis. Memahami hal tersebut, RPJMD merupakan pelaksanaan RPJPD pada tahap I, sehingga integrasi antara RPJPD dan RPJMD terletak pada kesinambungan arah pembangunan serta konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan. Tanpa integrasi yang kuat, pembangunan daerah berisiko mengalami disorientasi, inefisiensi, atau bahkan stagnasi. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD 2025–2029 Kabupaten Gunung Mas harus merujuk pada visi dan tahapan pencapaian RPJPD, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan lima tahunan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan jangka panjang daerah. Integrasi ini juga menjadi wujud dari tata kelola perencanaan yang sistematis, visioner, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Gunung Mas yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Gunung Mas

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas harus memiliki keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah. RTRW sebagai dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi acuan utama dalam mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunung Mas agar pembangunan yang dirancang dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 harus merujuk pada arahan RTRW dalam menetapkan lokasi dan prioritas pembangunan, baik untuk pengembangan sektor unggulan maupun untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, RTRW juga berfungsi untuk mengintegrasikan aspek tata ruang dengan

program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, seperti pengembangan kawasan, desa, dan infrastruktur transportasi. Dengan menyelaraskan RPJMD dengan RTRW, Kabupaten Gunung Mas dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tidak hanya berjalan secara terencana tetapi juga sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

e. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas.

f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas harus mampu mengintegrasikan rekomendasi KLHS-RPJMD. Sehingga penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian rekomendasi dari KLHS dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode 5 (lima) tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kabupaten Gunung Mas. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RIPJPID harus selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakomodir dokumen rencana sektoral pembangunan. Sehingga rekomendasi atau masukan kebijakan pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan



harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan atau perencanaan sektoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam merancang dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas program, dan menentukan target pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui strategi dan kebijakan pembangunan yang operasional dan terarah, serta merancang program-program kerja yang dapat diimplementasikan secara nyata.
- 2) Menjamin adanya keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional, seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN.
- 3) Memberikan arahan yang jelas dalam penggunaan sumber daya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
- 4) Menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dirancang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- 5) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan keberhasilan pembangunan secara akuntabel dan transparan.
- 6) Menyerap kebutuhan, potensi, serta aspirasi masyarakat lokal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan atau keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Gunung Mas secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan permasalahan dan isu strategis.



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memberikan arahan transisi untuk memastikan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Di dalamnya juga tercantum panduan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 agar sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

Semenjak Kabupaten Gunung Mas ditetapkan sebagai wilayah administrasi, pelaksanaan pembangunan dilakukan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan pemeratakan pembangunan sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik. Pembangunan Kabupaten Gunung Mas juga dilakukan ke depan selama periode pembangunan 2025-2029 dimana perlu disusun perencanaan pembangunan yang valid dan relevan berbasis data dan informasi pembangunan yang tersaji pada gambaran umum kondisi daerah.

Gambaran umum kondisi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan hasil kinerja pembangunan di Kabupaten Gunung Mas oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Gunung Mas yang dilihat dari ke empat aspek tersebut.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pada posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas.

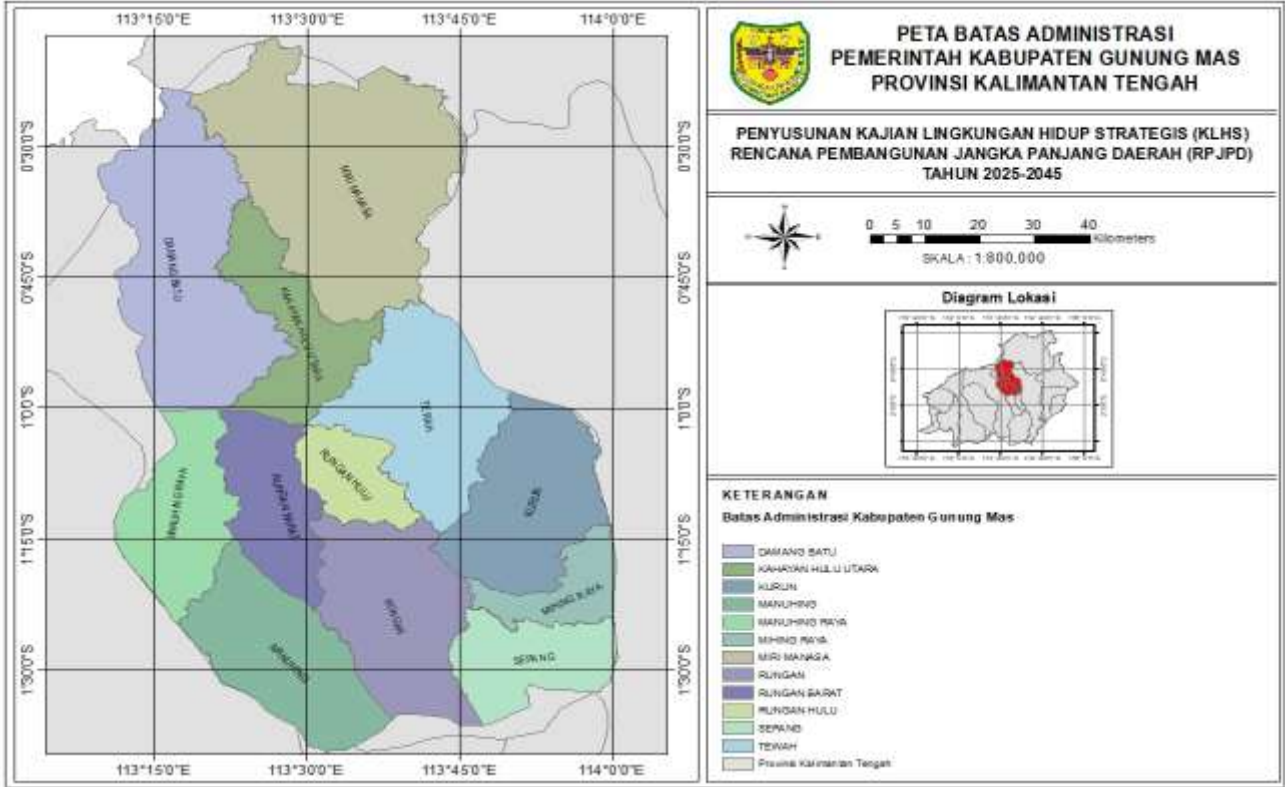
1. Geografis

Wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024, memiliki total luas wilayah mencapai 9.317,115 km². Kecamatan Damang Batu memiliki luas terbesar, yakni 1.824,038 km² atau 19,6% dari total wilayah kabupaten, diikuti oleh Miri Manasa dengan 1.405,197 km² (15,1%). Kecamatan dengan luas terkecil adalah Rungan Barat, hanya 347,091 km² atau 3,7% dari luas kabupaten. Kurun, sebagai ibu kota Kabupaten Gunung Mas, mencakup 772,049 km² atau 8,3% dari total luas. Beberapa kecamatan lain seperti Tewah (9,2%) dan Rungan (10,5%) juga memiliki cakupan wilayah yang cukup besar.



Data ini menunjukkan bahwa luas wilayah di Kabupaten Gunung Mas tidak merata, dengan beberapa kecamatan memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya:

Gambar II.1
Peta Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Peta Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025

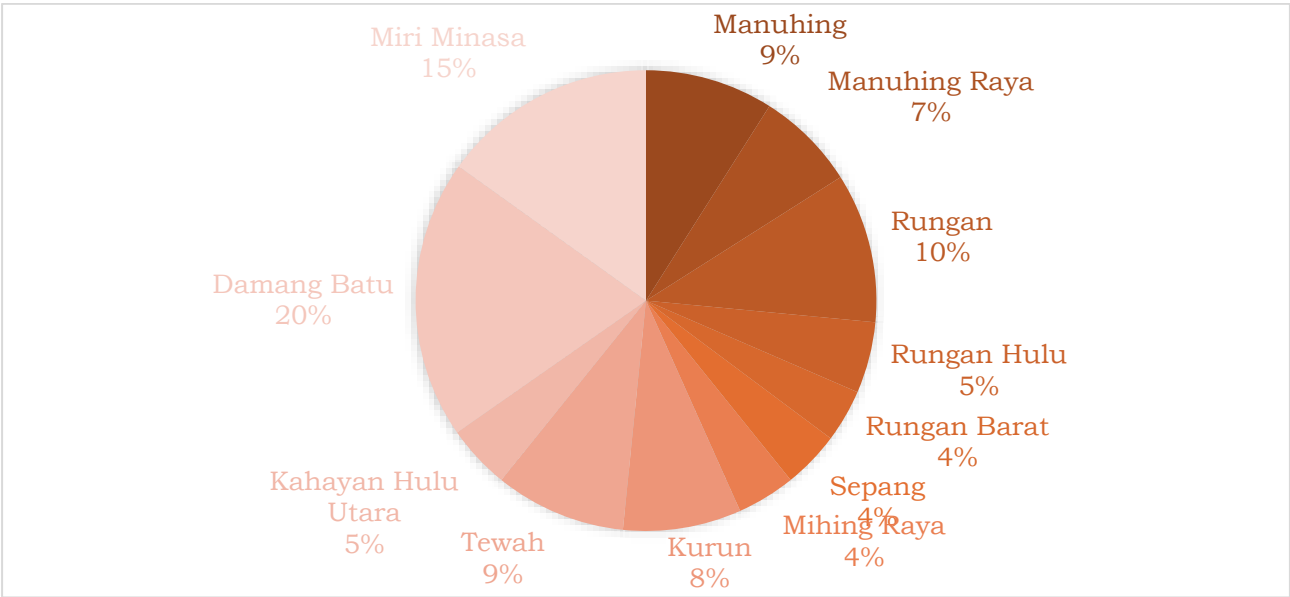
Tabel II.1
Data Wilayah Administratif
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Manuhing	Tumbang Talaken	839,056	9
Manuhing Raya	Tehang	654,627	7
Rungan	Jakatan Raya	977,442	10,5
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	468,570	5
Rungan Barat	Rabambang	347,091	3,7
Sepang	Sepang Simin	368,765	4
Mihing Raya	Kampuri	383,743	4,1
Kurun	Kuala Kurun	772,049	8,3
Tewah	Tewah	854,330	9,2
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	422,206	4,5
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1.824,038	19,6
Miri Minasa	Tumbang Napoi	1.405,197	15,1
Gunung Mas		9.317,115	100

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025



Gambar II.2
Grafik Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024



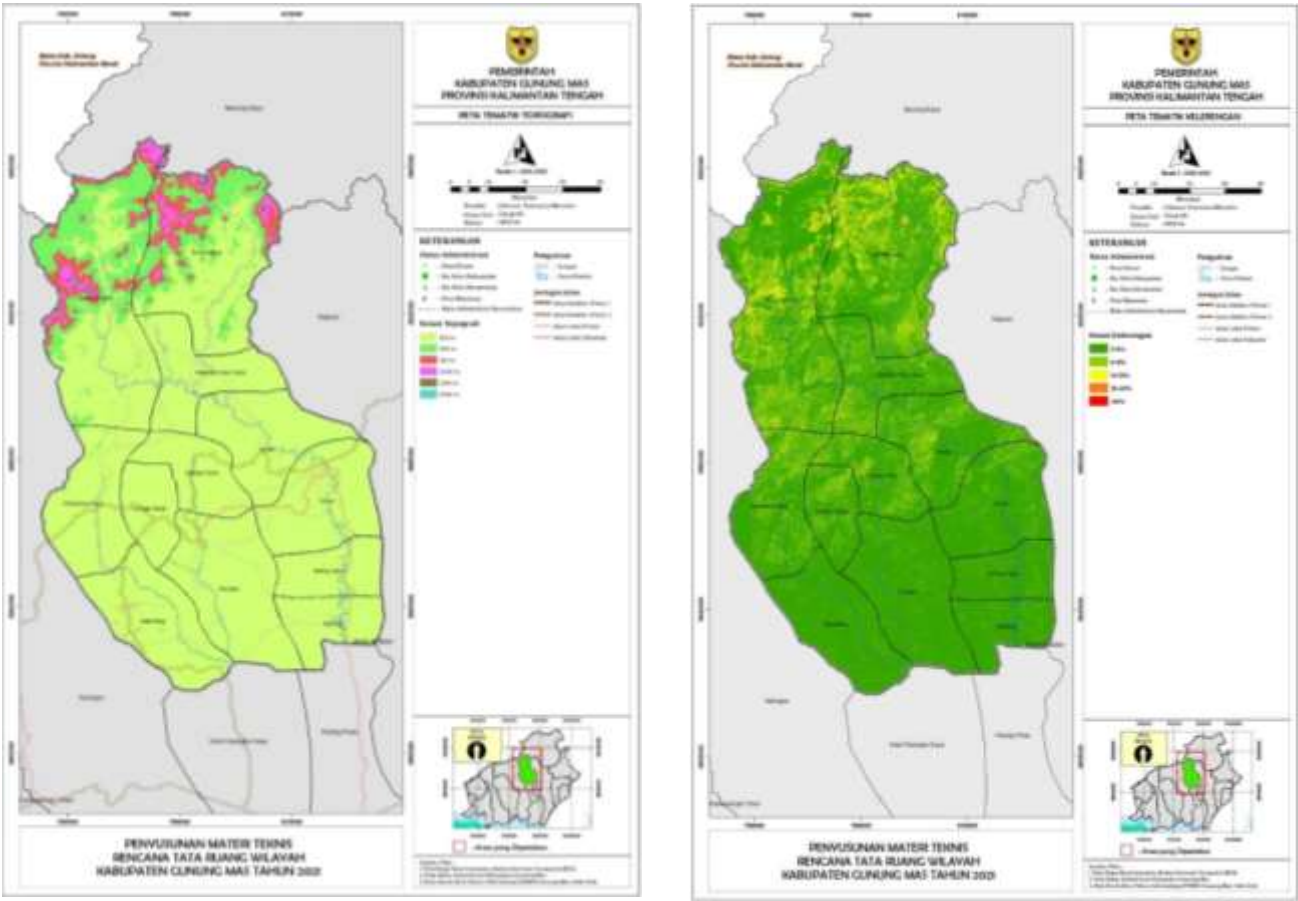
Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

2. Topografi

Secara umum kondisi topografi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan 8°-15° serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15°-25°.
2. Wilayah bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan, selain itu juga daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan ada empat jalur sungai yang masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing dan Sungai Miri serta anak-anak sungai lainnya.

Gambar II.3
Peta Topografi (Kiri) dan Peta Kelerengan (Kanan)
Kabupaten Gunung Mas



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Dilihat dari topografinya luas lahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas didominasi lahan dengan kondisi topografi 0-250 m seluas 768.761,62 Ha (82,28%) dan interval 250-500 m seluas 102.173,68 Ha (10,94%). Adapun kondisi kelerengan dominan dengan kelerengan 0-8% seluas 677.676,60 Ha (72,53%) dan interval 212.153,52 Ha (22,71%) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Kondisi topografi, kondisi kontur dan kondisi kelerengan di wilayah Kabupaten Gunung Mas di tampilan pada gambar di atas.

3. Hidrologi

Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten yang sebagian wilayahnya bergantung pada pemanfaatan sungai. Di Kabupaten Gunung Mas terdapat 3 (tiga) cabang sungai yang langsung bermuara ke Sungai Kahayan, yaitu Sungai Rungan, Sungai Miri, dan Sungai Manuhing. Kecamatan yang dilintasi oleh sungai tersebut adalah Manuhing, Manuhing raya, Rungan, Rungan Hulu, Sepang, Mihing Raya, Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa

Rincian panjang Sungai utama di Kabupaten Gunung Mas seperti pada tabel berikut:

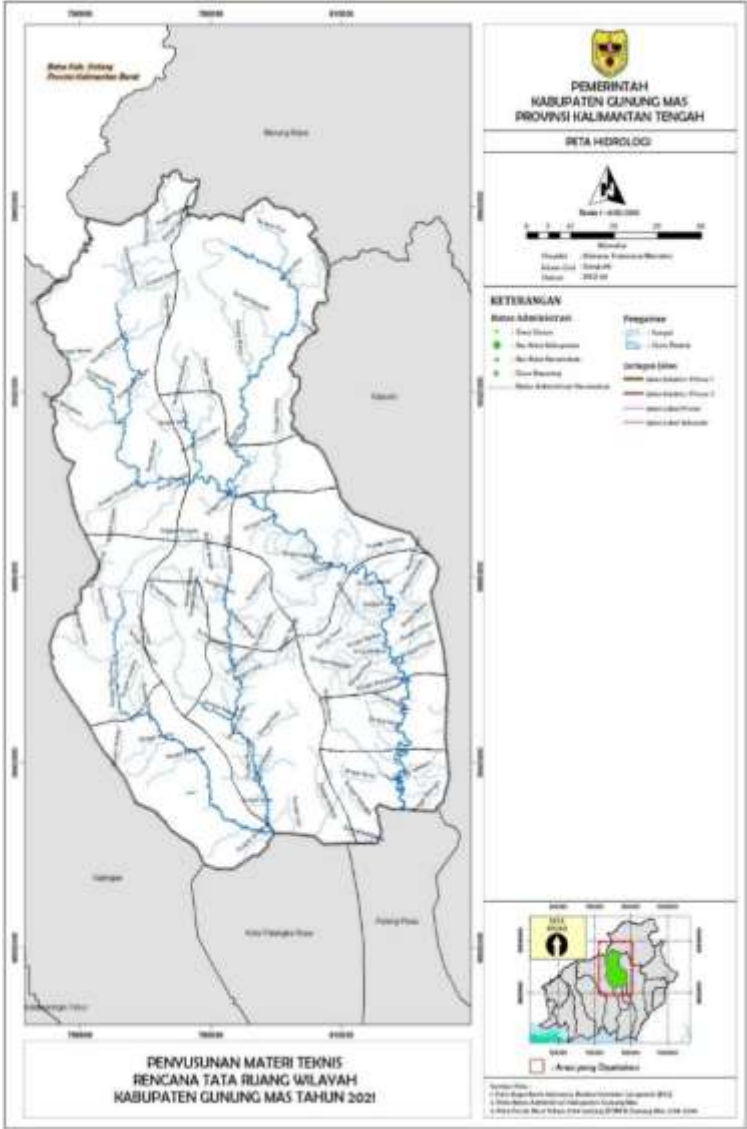


Tabel II.2
Panjang Sungai Di Kabupaten Gunung Mas

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Kecamatan yang Dilintasi
1	Manuhing	± 28,75	Manuhing, Manuhing raya
2	Rungan	± 86,25	Rungan, Rungan Hulu
3	Kahayan	± 600	Sepang, Mihing Raya, Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu
4	Miri	± 20	Miri Manasa

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Gambar II.4
Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Hasil pengukuran status kualitas air sungai di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 dan 2021 yang diambil di beberapa titik sungai berdasarkan kriteria mutu air pada Peraturan Pemerintah 82/2001 kelas II didapatkan sebagai berikut:



Tabel II.3
Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Kabupaten Gunung Mas

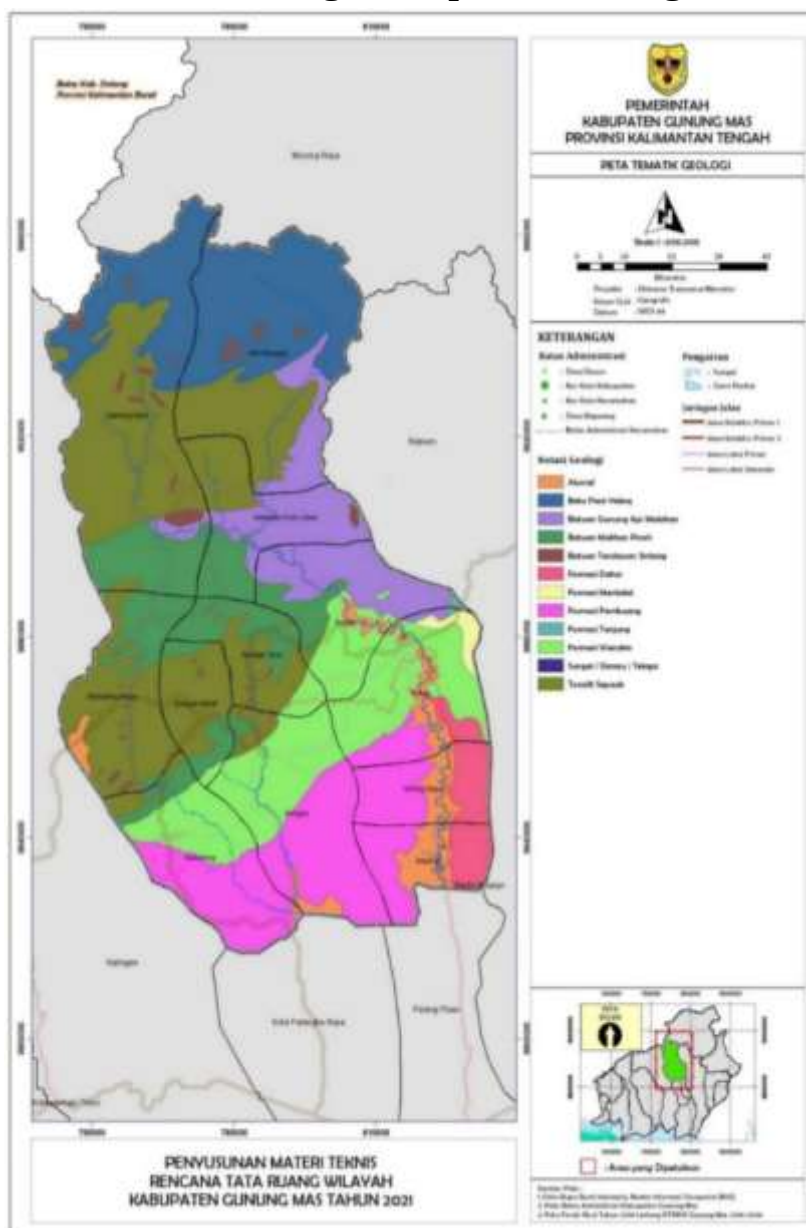
Nama Sungai	Titik Sampling	Indeks Polusi		Kriteria Mutu Air	
		2020	2021	2020	2021
Miri	Napoi	5,57	1,89	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Desa Siruk	4,19	1,83	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Tumbang Lapan	3,83	4,03	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Kahayan	Teluk Kanduri	2,91	1,56	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Tewah	2,96	3,42	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Sepang	2,92	4,31	Cemar Sedang	Cemar Ringan
	Tumbang Talaken	3,43	2,48	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Manuhing	Luwuk Tukau	5,14	8,84	Cemar Ringan	Cemar Sedang
	Takaras	4,38	2,01	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Bereng Malaka	2,76	8,78	Cemar Ringan	Cemar Sedang
Rungan	Guhung	4,14	7,09	Cemar Ringan	Cemar Sedang
	Rawai				
	Tumbang Rahuyan	3,08	8,77	Cemar Sedang	Cemar Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ± 110 cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah Aluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik Kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

Gambar II.5
Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Kondisi Geologi Kabupaten Gunung Mas terdiri atas 11 (sebelas) formasi geologi diantaranya, yaitu:

- a. Formasi Tonalit Sepauk (*Kls*)
Formasi Tonalit Sepauk merupakan batuan granitan berkomposisi tonalit, diorit dan granodiorit hingga mozoit, yang berumur kurang lebih 8,7 juta tahun.
- b. Formasi Batu Malihan Pinoh (*PzTRp*)
Formasi Malihan Pinoh merupakan batuan fillit, sekis, kuarsit dan ganes, yang secara umum berasal dari batu lumpur, dengan umur diperkirakan trias.
- c. Fomasi Endapan Aluvium (*Qa*)
Formasi endapan aluvium berasal dari batuan pasir kuarsa, kerikil, dan bongkah yang berasal dari batuan metamorf yang bersifat granit dan kuarsit lepas.
- d. Formasi Batu Pasir Haloq (*Teh*)



- Formasi batu pasir haloq terdiri atas batu pasir kuarsa, batu pasir sela kuarsa, batu pasir kerikilan, jarang batu lanau, batu lumpur, batu gamping.
- e. Formasi Mentemoui (*Teme*)
Formasi Mentemoui terdiri atas batu pasir pada bagian bawah dan batu pasir arkosa pada bagian atas yang berbutir halus hingga kasar. Selain itu terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung. Formasi ini berumur eosen – oligosen.
 - f. Formasi Tanjung (*Tet*)
Formasi ini terdiri atas perselingan batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat dan sebagian bersifat gampingan.
 - g. Formasi Warukin (*Tmw*)
Formasi ini terdiri atas batu pasir, batu pasir tufan, gampingan, batu lanau, dan batu lempung. Formasi ini berumur kurang lebih Miosen.
 - h. Formasi Montalat (*Tomm*)
Formasi ini terdiri atas batu pasir kuarsa, gampingan, batu lanau, serpih dan batubara dan berumur Oligosen.
 - i. Formasi Terobosan Sintang (*Toms*)
Formasi ini merupakan terobosan korok, rentas andesit dan basal dengan umur Miosen Awal.
 - j. Batuan Gunung Api Malasan (*Tomv*)
Formasi ini terdiri atas breksi gunung api, tuf, aglomerat, dan lava andesit. Formasi ini berumur Miosen Awal dan diendapkan di lingkungan litoral.
 - k. Formasi Dahor (*TQd*)
Formasi dahor terdiri atas batuan konglomerat coklat kehitaman, batu pasir, batu lempung karbonan. Formasi ini diduga berumur Pliosen-Plistosen.

Tabel II.4
Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas

Formasi Geologi	Luas	Persen
Aluvial	36079,09	3,86
Batu Pasir Haloq	140231,47	15,01
Batuan Gunung Api Malahan	88496,09	9,47
Batuan Malihan Pinoh	104121,95	11,15
Batuan Terobosan Sintang	9539,62	1,02
Formasi Dahor	28335,47	3,03
Formasi Mentalat	5690,58	0,61
Formasi Pembuang	132004,5	14,13
Formasi Tanjung	901,71	0,1
Formasi Warukin	134124,09	14,36
Sungai / Danau / Telaga	3596,29	0,38
Tonalit Sepauk	251085,09	26,88
Jumlah	934205,95	100

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas

5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Gunung Mas memiliki iklim tropis dengan temperatur rata-rata di tahun 2024 sebesar 27,03°C hingga 28,30°C. Namun jika dilihat dari minimumnya, suhu di Kabupaten Gunung Mas sempat mencapai 21,50°C pada bulan Juni dan September. Sedangkan suhu maksimum berada pada bulan



September juga dengan maksimal suhu mencapai 35,70°C. Dari sisi kelembaban udara, di Kabupaten Gunung Mas secara rata-rata berada pada kelembaban 78,00%-87,00%.

Kecepatan angin di Kabupaten Gunung Mas secara umum berada pada rata-rata 2,00 knot dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 1.007,00 mbar hingga 1.010,20 mbar. Adapun curah hujan selama tahun 2024, tertinggi berada di bulan Maret dengan jumlah curah hujan mencapai 488,00 mm/tahun dan jumlah hari hujan terbanyak selama 31 hari di bulan Agustus, Oktober dan Desember.

Tabel II.5
Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Rata-rata Kecepatan Angin (knot)	Rata-rata Tekanan Udara (mbar)	Jml Curah Hujan (mm/thn)	Jml Hari Hujan (hari)
Januari	27,44	84,00	2,00	1.008,90	242,70	22
Februari	27,90	83,00	2,00	1.009,50	456,00	24
Maret	27,85	83,00	2,00	1.008,60	488,00	22
April	28,18	83,00	2,00	1.007,00	222,60	16
Mei	28,37	84,00	2,00	1.007,10	329,00	16
Juni	27,47	84,00	2,00	1.008,60	99,60	18
Juli	27,03	84,00	2,00	1.009,10	77,80	28
Agustus	27,40	81,00	2,00	1.010,20	120,80	31
September	28,30	78,00	2,00	1.009,60	154,20	30
Oktober	28,12	79,00	2,00	1.010,00	195,80	31
November	27,96	82,00	2,00	1.008,20	416,50	30
Desember	27,23	87,00	1,00	1.008,10	421,10	31

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034 tanggal 12 Agustus 2014, wilayah Kabupaten Gunung Mas terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu konsep pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan pengelompokan ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu wilayah dan antar wilayah pengembangan. Agar terwujud pola pelayanan yang terpadu dan pemerataan dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah, maka Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. SWP 1 dengan pusat pengembangan di Kota Kuala Kurun. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Tewah dan Kecamatan Mihing Raya dan Sepang, di samping sebagai pusat pelayanan kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi SWP ini sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah.



- 2. SWP 2 dengan pusat pengembangan di Kota Jakatan Raya. Wilayah termasuk ke dalam SWP ini adalah Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing dan Manuhing Raya. Fungsi wilayah adalah sebagai wilayah kabupaten bagian barat, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- 3. SWP 3 dengan pusat pengembangan di Kota Tumbang Miri. Wilayah yang termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Wilayah ini relatif memiliki sumber daya alam yang sebagian diarahkan untuk menjadi fungsi lindung.

Adapun rincian pengembangan wilayah dan arah pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan indikasi programnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel II.6
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibukota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun)	Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendidikan	Pengembangan Jalan arteri primer
		Perekonomian jasa Kabupaten dan Regional	Kesehatan	Pengembangan prasarana lingkungan
		Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan Jasa	Peribadatan	Pengembangan fasilitas perdagangan & jasa
		Pusat Jasa Pendukung Kegiatan Perekonomian (Pengolahan & Pemasaran)	Perdagangan/ Pemasaran	Pengembangan fasilitas Pendidikan & kesehatan
		Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tengah KALTENG	Permukiman	Pengembangan kawasan pariwisata
		Pariwisata	Optimalisasi Bandar Udara Kuala Kurun	
			Pertambangan	



Tabel II.7
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tewah

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Tewah	Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota Hierarki I (PKW)	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan Kolektor Primer
		Pusat permukiman Pedesaan di seluruh Kecamatan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
			Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
			Pertambangan	
			Industri	

Tabel II.8
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Miri

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Tumbang Miri	Pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan kolektor primer
		Pusat pengumpul hasil bumi	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Distributor barang dan jasa skala regional	Perkebunan dan Kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
			Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
			Pertambangan	Optimalisasi Pelabuhan Sungai
				Pengembangan industri



Tabel II.9
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Sepang Simin

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Sepang Simin	Pusat pemukiman	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan kolektor primer
		Pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Pusat pengumpul hasil bumi	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Industri pengolahan hasil pertanian	Perkebunan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Distributor barang dan jasa skala regional	Kehutanan	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
			Pertambangan	Pengembangan industri

Tabel II.10
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Jakatan Raya

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Jakatan Raya	Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hierarki I (PKW)	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan arteri primer
		Pusat pemukiman pedesaan di seluruh kecamatan	Perumahan	Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Pusat pengumpul hasil bumi	Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
		Distributor barang dan jasa skala regional	Pertambangan	Pengembangan industri



Optimalisasi
Pelabuhan
sungai

Tabel II.11
Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Talaken

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Tumbang Talaken	Pusat pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan arteri primer
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Pusat pengumpul hasil bumi	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Distributor barang dan jasa skala regional	Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan & Kesehatan
				Pengembangan industri

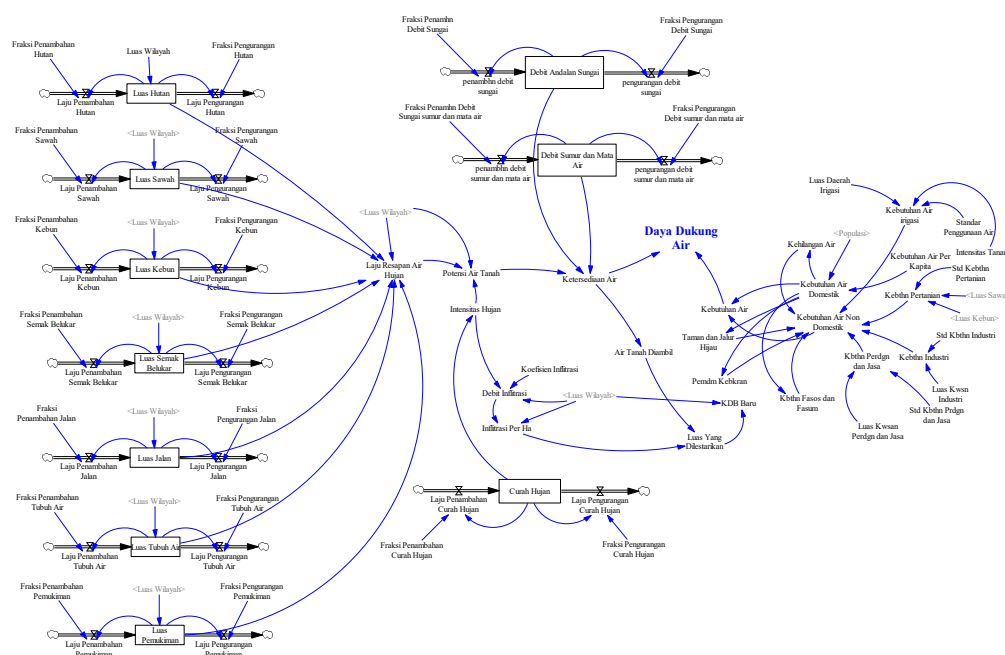
Sumber: Laporan Akhir RTRW Gunung Mas, 2014

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada.

1. Daya Dukung Air

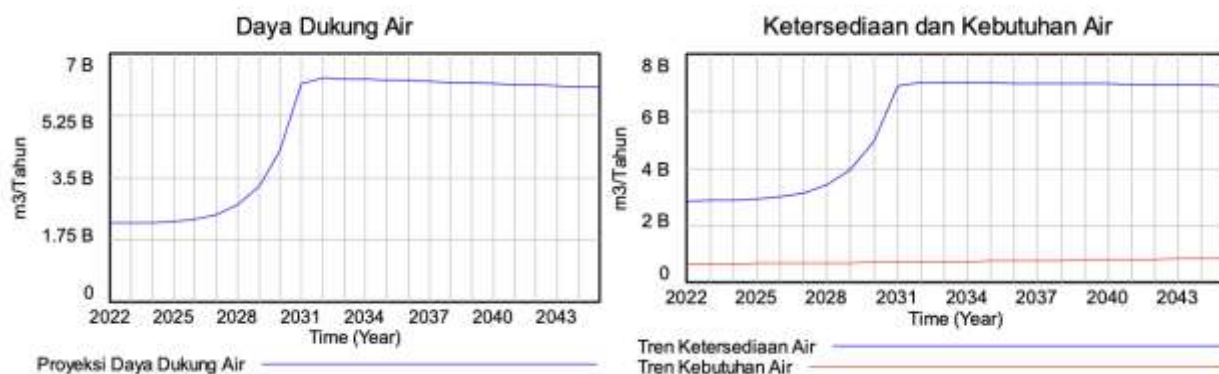
Gambar II.6
Gambar Model Daya Dukung Air



Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

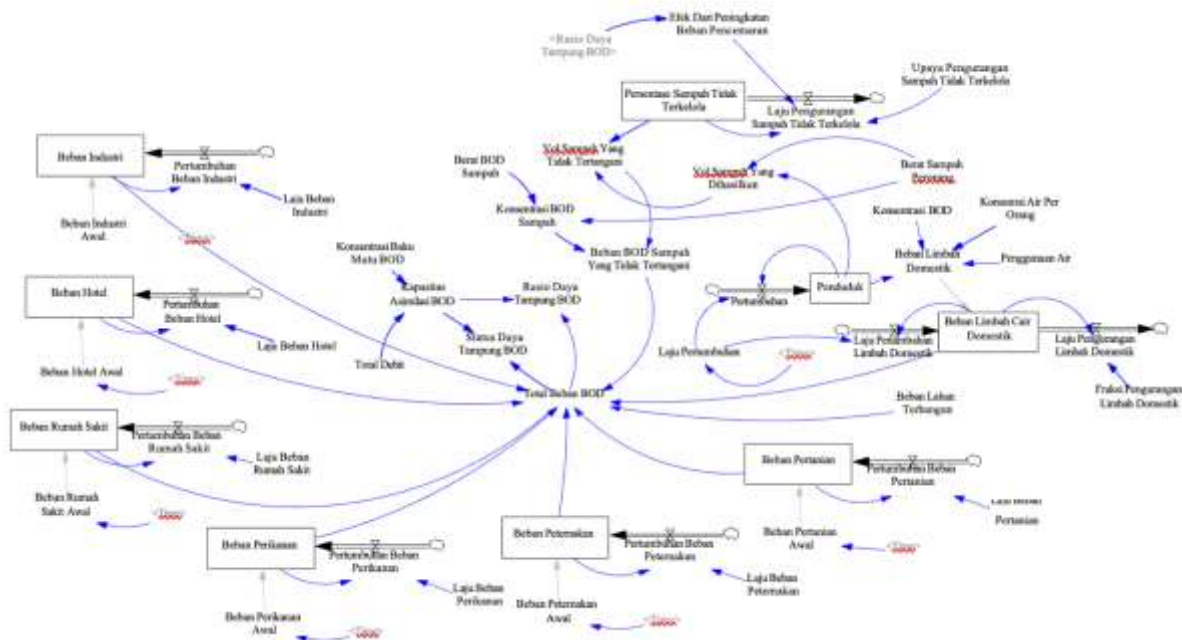
Selain perhitungan juga dikembangkan model daya dukung air berdasarkan pemodelan sistem dinamis yang diintegrasikan dengan metode *euler*. Di dalam model tersebut dipertimbangkan ketersediaan air yang berasal dari potensi air tanah, debit andalan sungai, sumur dan mata air. Selain itu juga dipertimbangkan kebutuhan air yang berasal dari kebutuhan domestik dan non domestik. Hasilnya didapat daya dukung air di Kabupaten Gunung Mas bernilai positif yang artinya ketersediaan air masih melimpah sehingga masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Hasil dari proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air sampai dengan tahun 2045 seperti pada gambar di bawah juga menunjukkan ketersediaan air masih melimpah dalam memenuhi kebutuhan air baik dari domestik maupun non domestik.

Gambar II.7
Grafik Daya Dukung Air serta proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air di
Kabupaten Gunung Mas



2. Daya Tampung Beban Pencemaran

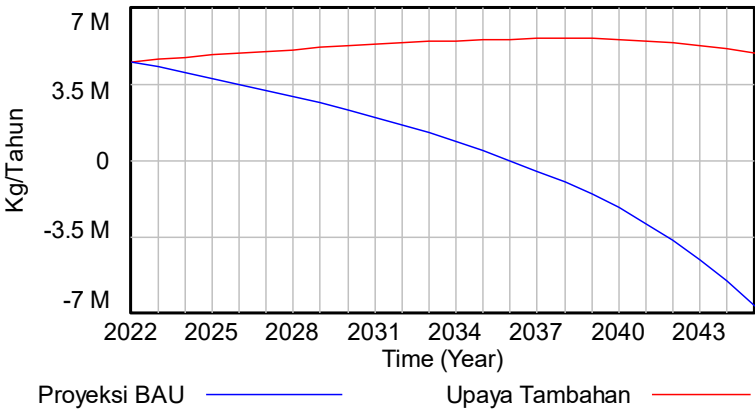
Gambar II.8
Model Daya Tampung Beban Pencemaran



Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

Model daya tampung beban pencemaran dilakukan dengan permodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode euler. Di dalam model tersebut dipertimbangkan sumber-sumber pencemar khususnya *Biological Oxygen Demand* (BOD) yang umumnya merupakan parameter yang selalu diukur dalam berbagai standar kualitas air. Sumber-sumber pencemaran tersebut antara lain dari sampah tidak terkelola, limbah domestik, perikanan, peternakan, perkebunan, rumah sakit, hotel dan industri. Dalam model terebut masih terdapat data-data yang belum didapat yakni terkait industri, hotel dan rumah sakit sehingga masih diperlukan perbaikan dikemudian hari. Namun demikian dari data-data yang tersedia diharapkan sudah dapat menggambarkan daya tampung beban pencemaran di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan data dan model yang disusun didapat beban pencemaran terbesar berasal dari sampah yang tidak tertangani dan limbah cair domestik. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan beban pencemaran dari peternakan dimana peningkatan jumlah ternak tanpa adanya pengolahan limbah tentu akan meningkatkan debit BOD.

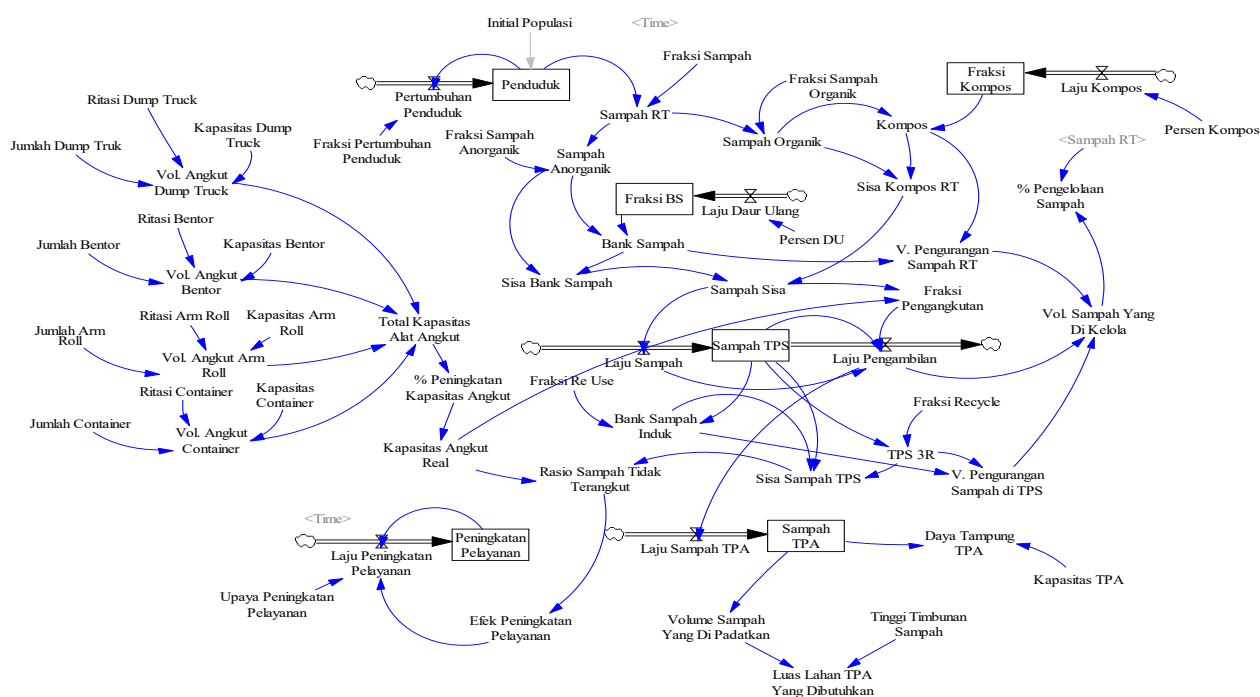
Gambar II.9
Gambar Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran



Proyeksi daya tampung beban pencemaran dari tahun 2022-2045 pada gambar di atas menunjukkan penurunan dimana nilai awal positif dan pada tahun 2036 diproyeksikan menjadi negatif akibat peningkatan penduduk dan sampah yang tidak terkelola serta industri lainnya. Dari hasil tersebut diperlukan upaya tambahan untuk menjaga daya tampung beban pencemaran tetap positif. Upaya tambahan yang diperlukan khususnya pada pengurangan sampah tidak terkelola sebesar 5%, pengurangan limbah domestik 3% dan penurunan laju beban peternakan sebesar 14%.

3. Pengelolaan Persampahan

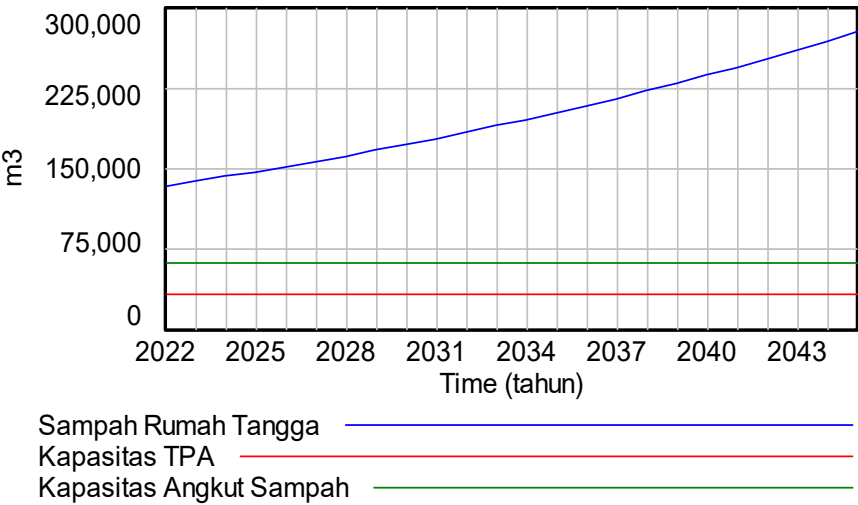
Gambar II.10
Gambar Model Pengelolaan Persampahan



Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

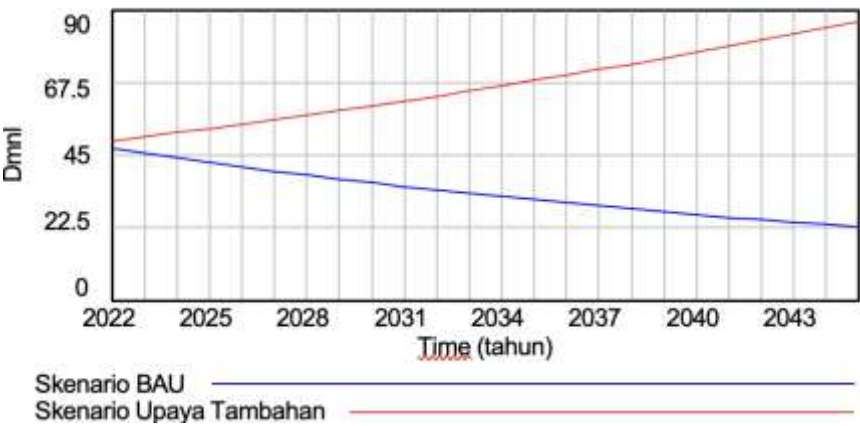
Model status pengelolaan persampahan dilakukan dengan permodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode *euler*. Di dalam model tersebut mempertimbangkan sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas, pengelolaan sampah baik organik dan anorganik, kapasitas tempat pembuangan akhir, sisa sampah di tempat pembuangan sementara, serta kapasitas angkut sampah dalam melayani masyarakat. Dari hasil model tersebut, secara real infrastruktur pelayanan baik kapasitas TPA dan kapasitas angkut sampah masih jauh dibandingkan proyeksi sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti pada gambar di bawah. Hal ini terlihat dari grafik antara peningkatan sampah rumah tangga, kapasitas angkut dan kapasitas TPA yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan upaya tambahan dalam pengelolaan persampahan.

Gambar II.11
Grafik Peningkatan Sampah Rumah Tangga, Kapasitas Angkut dan TPA

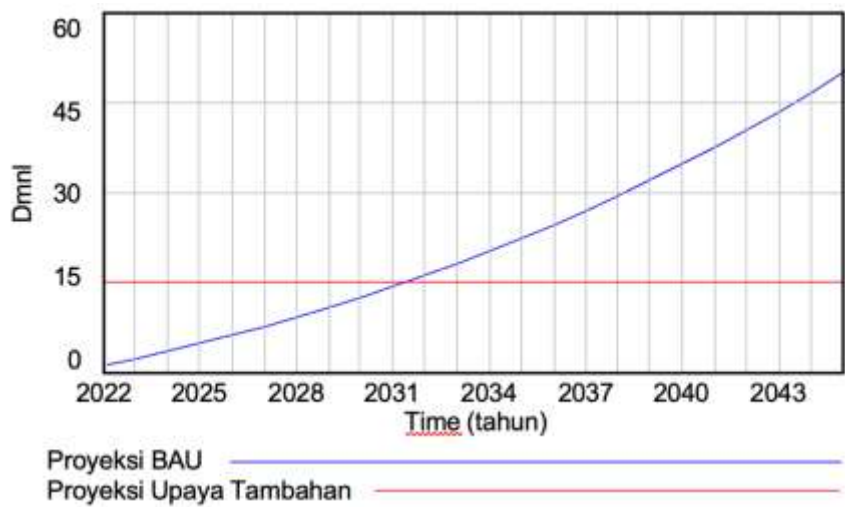


Gambar persentase pengelolaan persampahan menunjukkan sampah yang dikelola oleh kabupaten Gunung Mas, pada kondisi saat ini hanya sekitar 46% sampah yang dikelola oleh Kabupaten Gunung Mas dan diproyeksikan akan terus menurun seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tidak adanya pengelolaan sampah organik dan anorganik. Dalam kasus ini untuk meningkatkan persentase pengelolaan sampah melebihi 80% diperlukan upaya tambahan berupa pemanfaatan kembali sampah anorganik dengan upaya 2% dan komposting sampah organik sebesar 3%. Selain itu dalam menurunkan rasio sampah tidak terangkut diperlukan peningkatan pelayanan dalam pengangkutan persampahan yang merata di Kabupaten Gunung Mas sebesar 20% seperti ditunjukkan pada grafik rasio sampah tidak terangkut.

Gambar II.12
Gambar Persentase pengelolaan persampahan di Kabupaten Gunung Mas



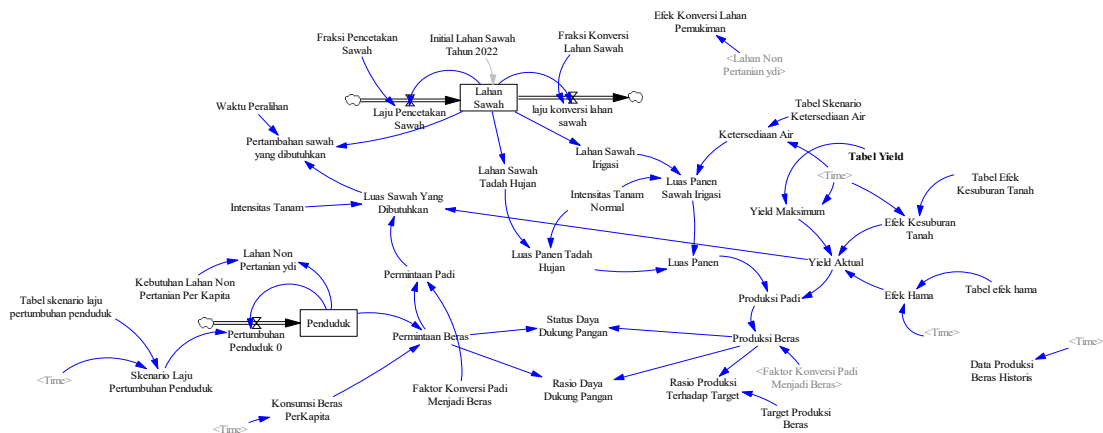
Gambar II.13
Grafik Rasio Sampah Tidak Terangkut



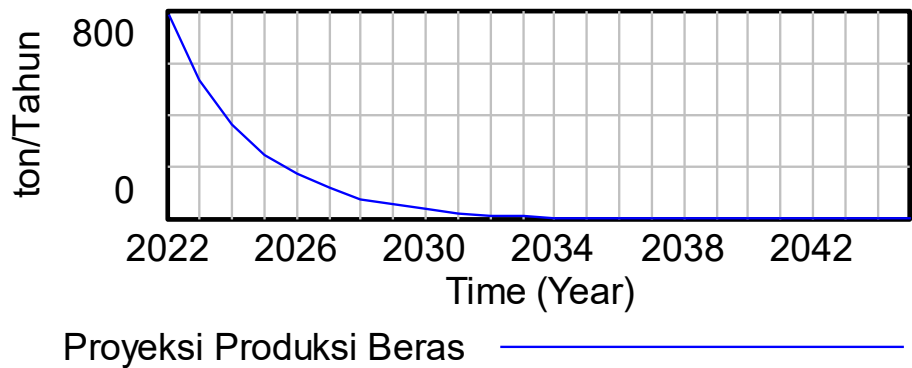
4. Daya Dukung Pangan

Model daya dukung pangan dilakukan dengan pemodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode *euler*. Di dalam model tersebut mempertimbangkan produksi dan permintaan beras berdasarkan pertumbuhan penduduk dan konsumsi beras per kapita. Dalam produksi beras yang dipertimbangkan adalah pertumbuhan luas lahan sawah, konversi padi menjadi beras serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padi. Hasil dari model tersebut menunjukkan proyeksi produksi beras terus menurun yang juga tercermin dari data tren luas sawah yang semakin lama semakin kecil

Gambar II.14
Gambar Model Daya Dukung Pangan

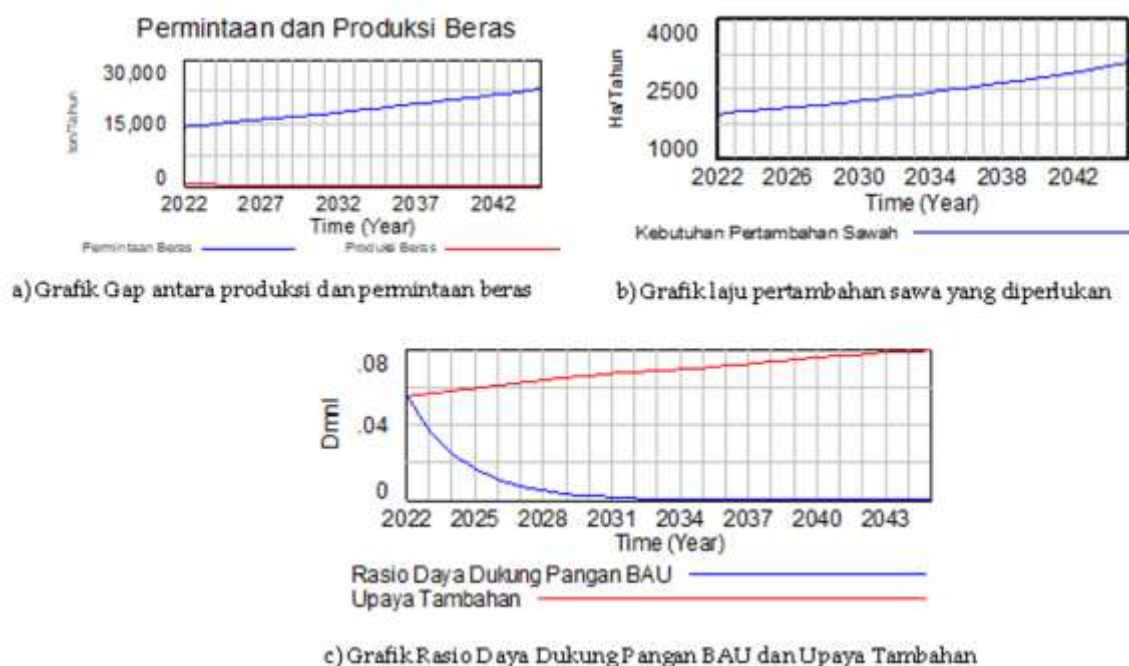


Gambar II.15
Grafik Proyeksi Produksi Beras di Kabupaten Gunung Mas



Penurunan produksi beras tersebut tentu akan mengakibatkan gap antara permintaan dan produksi beras semakin besar, sehingga Kabupaten Gunung Mas bergantung dari produksi beras diluar kabupaten dengan jumlah yang besar seperti pada grafik antara produksi dan permintaan beras pada Gambar 6.11(a). Hal tersebut juga tercermin dari rasio daya dukung pangan dibawah satu. Untuk mengatasi hal tersebut secara keseluruhan diperlukan peningkatan produksi beras melalui pencetakan sawah pada tahap awal sebesar 1.947 ha/tahun dan terus meningkat. Upaya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan rasio daya dukung pangan minimal sebesar 42%, hal ini menggambarkan diperlukan usaha yang sangat besar dalam mengatasi masalah pangan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Dari hasil tersebut Kabupaten Gunung Mas yang memiliki daya dukung air yang tinggi dapat dimanfaatkan dalam mendukung daya dukung pangan.

Gambar II.16
Grafik Daya Dukung Pangan



2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

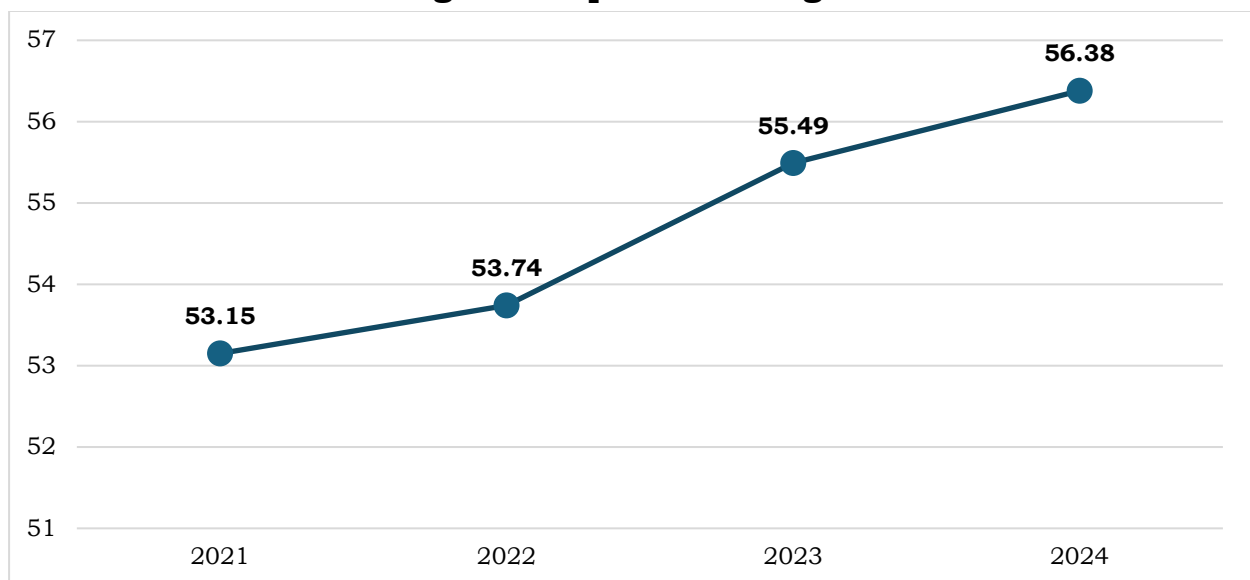
Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional hingga individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik secara jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Hal ini juga harus sejalan dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, guna menjamin kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi memerlukan pendekatan sistemik lintas sektor, yang mencakup upaya peningkatan produksi pangan domestik, stabilisasi ketersediaan dan akses pangan di berbagai tingkatan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Selain itu, kebijakan ekonomi makro yang stabil juga sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pasokan dan harga pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 berada pada angka 56,38 dengan peringkat 462 secara nasional. Peringkat ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar yang harus diatasi di

wilayah ini. Beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi rendahnya indeks tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi dan distribusi pangan, rendahnya kapasitas produksi pertanian lokal, serta kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan aman. Selain itu, tantangan geografis serta keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan lintas sektor juga dapat menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh. Upaya perbaikan secara menyeluruh dan terintegrasi perlu dilakukan, baik dari sisi produksi, distribusi, konsumsi, maupun penguatan kelembagaan pangan di tingkat daerah.

Gambar II.17

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2022-2025

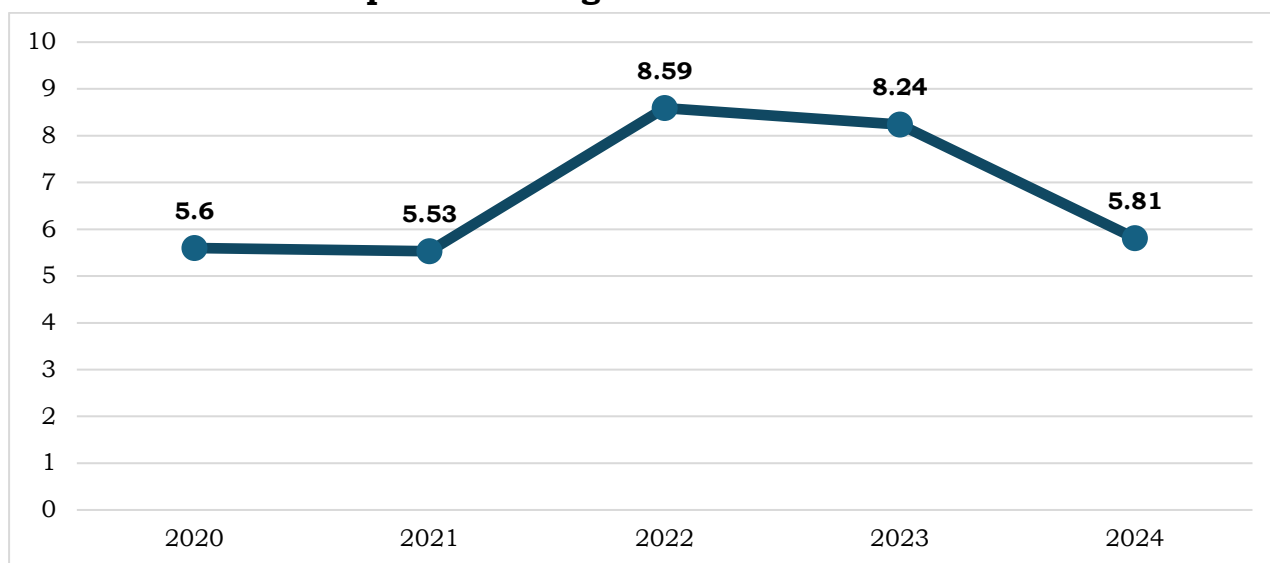
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk suatu wilayah yang diperkirakan tidak memperoleh asupan energi makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum harian. Indikator ini sangat bermanfaat dalam memantau kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan intervensi pemerintah untuk mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi. Semakin rendah angka PoU, semakin baik pula kondisi ketahanan pangan suatu daerah karena menandakan bahwa lebih banyak penduduk yang telah mampu mengakses pangan yang cukup secara kuantitatif.

Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren yang sempat mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan kembali menurun hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, PoU tercatat sebesar 5,6 persen dan sedikit menurun menjadi 5,53 persen pada tahun 2021. Meski demikian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan hingga mencapai 8,59 persen, sebelum akhirnya berhasil ditekan kembali menjadi 5,81 persen pada tahun 2024. Meningkatnya PoU pada tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain gangguan distribusi pangan akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, serta rendahnya produktivitas pertanian lokal pada saat yang bersamaan.

Rendahnya daya beli masyarakat dan kurangnya edukasi gizi juga turut memperburuk akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Namun,

penurunan PoU pada tahun 2024 menjadi sinyal positif atas perbaikan akses dan konsumsi pangan di daerah ini. Meskipun demikian, upaya untuk menurunkan angka PoU secara berkelanjutan masih perlu terus diperkuat melalui intervensi yang lebih terintegrasi, seperti penguatan produksi pangan lokal, perbaikan infrastruktur distribusi, peningkatan literasi gizi masyarakat, serta perluasan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan demikian, ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Mas dapat terjaga dan akses terhadap pangan yang layak bagi seluruh masyarakat semakin merata.

Gambar II.18
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

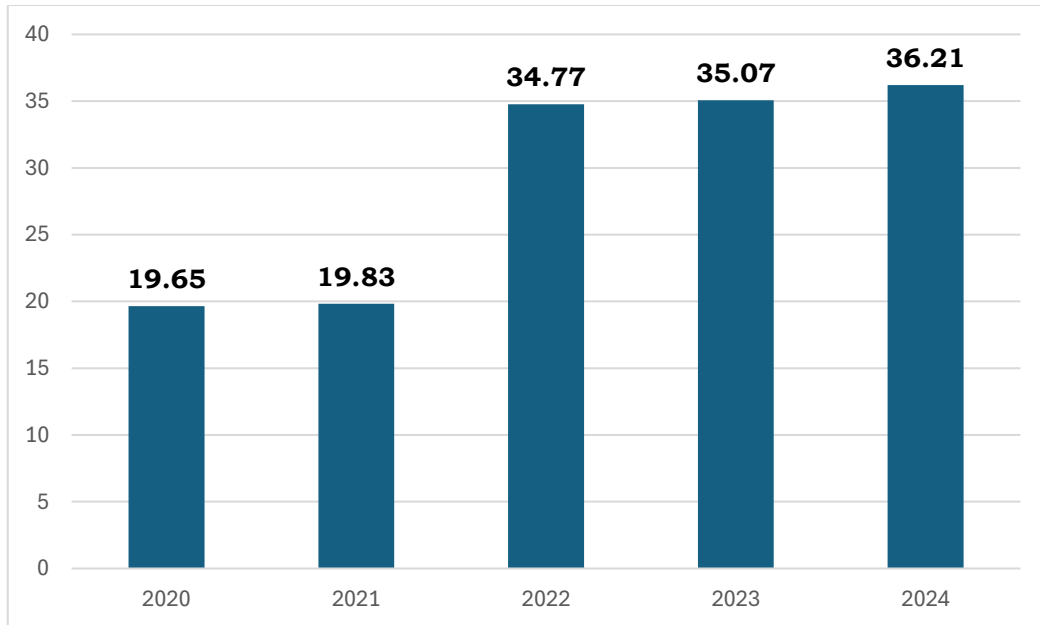
Akses air minum bersih adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh air yang layak konsumsi dalam jumlah cukup, secara berkelanjutan, dan tanpa risiko pencemaran, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Akses ini mencakup ketersediaan sumber air yang dapat dijangkau dengan mudah, terjamin kualitasnya, serta memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Akses penduduk terhadap air minum yang lebih baik di Kabupaten Gunung Mas meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, cakupan akses tercatat masih rendah, yakni sebesar 19,65 persen, dan hanya mengalami sedikit peningkatan pada 2021 menjadi 19,83 persen. Namun, kenaikan cukup tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 34,77 persen, menunjukkan adanya intervensi kebijakan atau penyediaan infrastruktur ketahanan air minum yang lebih baik sehingga meningkatkan kualitas sistem penyediaan air perpipaan. Adapun tren peningkatan berlanjut di tahun-tahun berikutnya, yakni sebesar 35,07 persen pada 2023 dan mencapai 36,21 persen pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas layanan air bersih perpipaan kepada masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam pemerataan akses di seluruh wilayah. Capaian ini juga mengindikasikan perlunya keberlanjutan program peningkatan kapasitas jaringan, perbaikan kualitas pelayanan, serta dukungan pembiayaan terhadap



penyediaan air minum layak dapat terwujud secara lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar II.19
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)

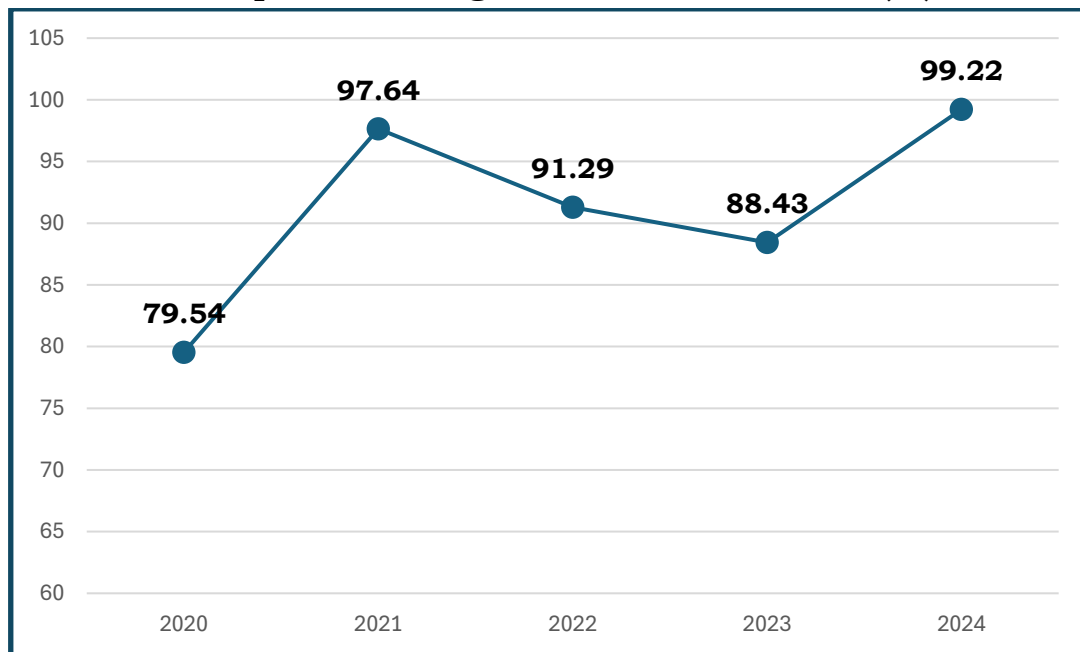


Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Kebutuhan pembangunan kelistrikan bagi Kabupaten Gunung Mas merupakan aspek fundamental dalam mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketersediaan listrik yang andal, merata, dan terjangkau tidak hanya dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi berkembangnya sektor pendidikan, kesehatan, industri kecil, dan pelayanan publik. Di banyak daerah, khususnya wilayah terpencil dan tertinggal, keterbatasan infrastruktur kelistrikan masih menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas dan akses terhadap layanan dasar.

Secara umum, terjadi perkembangan jangkauan akses masyarakat terhadap fasilitas listrik, meskipun sempat terjadi fluktuasi pada akses kelistrikan oleh masyarakat pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2020, akses listrik tercatat sebesar 79,54 persen, yang kemudian melonjak tajam pada tahun 2021 menjadi 97,64 persen. Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam penyediaan infrastruktur kelistrikan, baik dari sisi jaringan distribusi maupun ketersediaan daya. Namun, tren tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 91,29 persen dan 88,43 persen. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya gangguan layanan, keterbatasan pasokan, atau penambahan wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Meskipun demikian, pada tahun 2024, akses listrik kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 99,22 persen, yang menunjukkan upaya pemulihan dan perluasan layanan kelistrikan yang berhasil.

Gambar II.20
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan suatu wilayah secara keseluruhan. IKLH mencakup tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ketiga komponen ini mencerminkan kualitas sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan manusia. IKLH bermanfaat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan, memantau tren kualitas lingkungan dari waktu ke waktu, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data IKLH Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi capaian dari tahun ke tahun sebagai dampak perubahan metodologi penghitungan. Pada tahun 2020, IKLH berada di angka 76, kemudian menurun menjadi 69,80 pada tahun 2021, dan terus mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 68,82 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 70,58, sebelum kembali menurun ke angka 69,33 pada tahun 2024. Komponen yang paling stabil dan tinggi adalah Indeks Kualitas Udara, dengan peningkatan signifikan dari 89 (2020) menjadi 92,82 (2024). Sebaliknya, Indeks Kualitas Air menunjukkan tren penurunan, dari 46 (2020) menjadi 42,86 (2024), yang dapat menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah ini. Indeks Kualitas Tutupan Lahan relatif stabil meski sedikit menurun di tahun 2023, lalu naik kembali di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas udara cukup baik dan tutupan lahan terjaga, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas air sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologi secara keseluruhan.



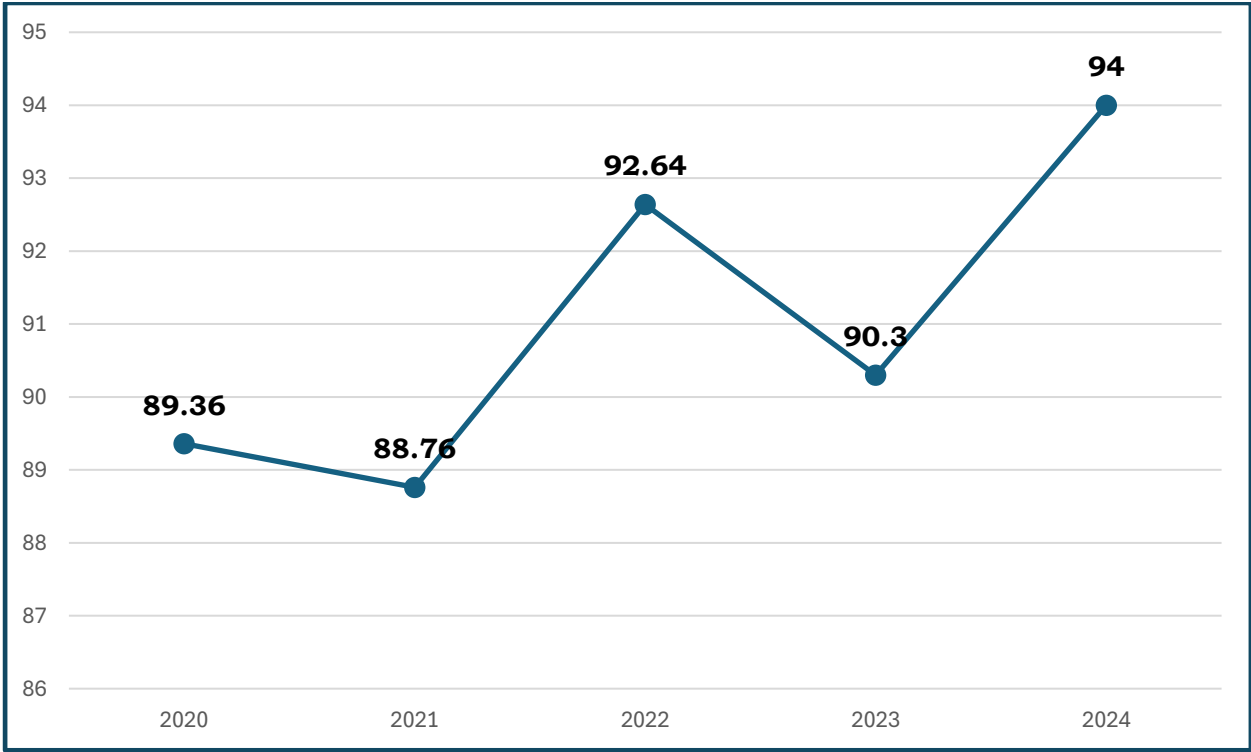
Tabel II.12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020 – 2024

Komponen IKLH	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	46	50,00	46,67	50,00	42,86
Indeks Kualitas Udara	89	87,65	87,85	89,64	92,82
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90	71,25	71,25	70,66	71,31
IKLH	76	69,8	68,82	70,58	69,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, 2025

Selain dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kualitas lingkungan hidup juga dapat diukur melalui indikator akses sanitasi layakoleh rumah tangga. Akses terhadap sanitasi yang layak merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan. Berdasarkan data di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024.

Gambar II.21
Persentase Keluarga Dengan Akses Sanitasi Yang Layak
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, 2025

Pada tahun 2020, cakupan akses sanitasi yang layak oleh keluarga di Gunung Mas berada pada angka 89,36 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 88,76 persen pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan signifikan dengan lonjakan capaian hingga 92,64 persen, menunjukkan adanya kebijakan yang efektif dalam penyediaan fasilitas sanitasi dasar. Meskipun demikian, capaian kembali menurun di tahun 2023 menjadi 90,3 persen, sebelum kembali meningkat tajam dan mencapai angka tertinggi sebesar 94 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memperluas akses terhadap sanitasi yang layak bagi masyarakat, meskipun fluktuasi dalam capaian menunjukkan perlunya penguatan aspek

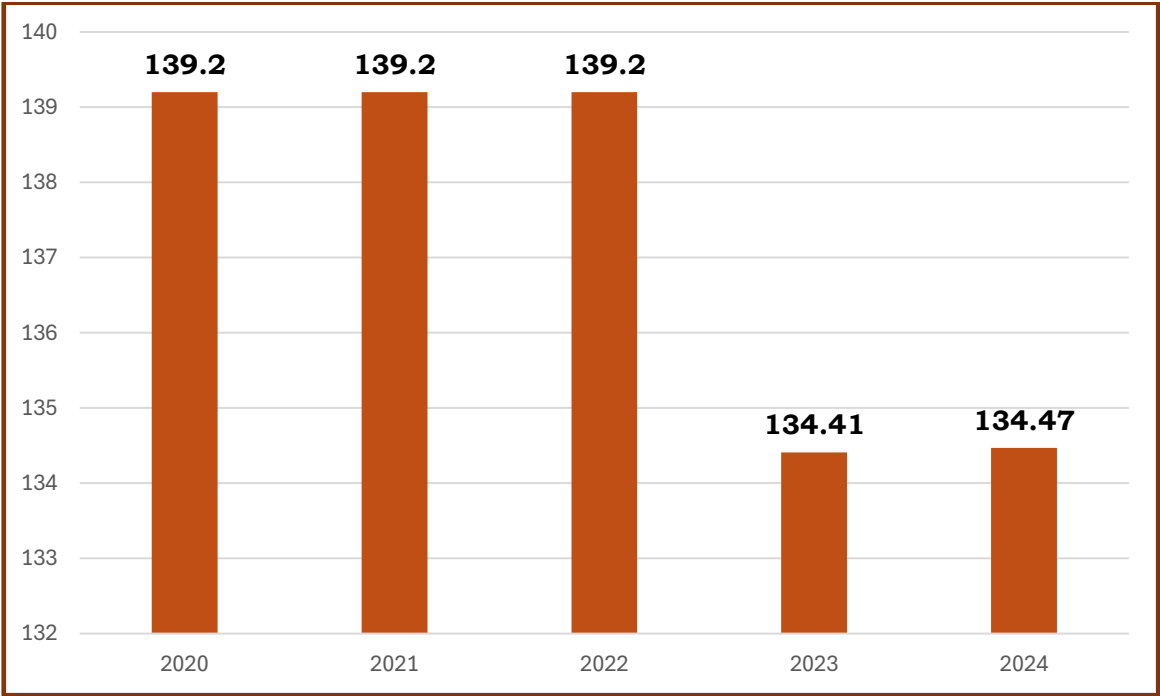


keberlanjutan, perawatan fasilitas, serta edukasi masyarakat untuk menjaga kualitas sanitasi.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikembangkan oleh BNPB disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Bahaya dihitung berdasarkan kemungkinan kejadian suatu bencana secara spasial, frekuensi, dan kekuatannya, seperti gempa, banjir, dan letusan gunung api. Kerentanan mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang membuat suatu wilayah rentan terhadap bencana. Sementara itu, kapasitas mencerminkan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana, diukur melalui tujuh prioritas seperti kebijakan, perencanaan, sistem informasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan.

Gambar II.22
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Selama tiga tahun pertama (2020–2022), indeks berada pada angka yang sama yaitu 139,2, yang mengindikasikan tingkat risiko bencana yang tergolong tinggi dan cenderung stagnan tanpa perbaikan signifikan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam menjadi 134,41, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengurangan risiko bencana, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pembangunan infrastruktur tanggap bencana, serta edukasi masyarakat. Penurunan tersebut sedikit terkoreksi di tahun 2024, dengan kenaikan tipis menjadi 134,47, yang meskipun tidak signifikan, tetap mencerminkan stabilitas upaya mitigasi risiko. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan pergeseran positif menuju kondisi yang lebih tangguh terhadap bencana. Namun demikian, angka indeks yang masih berada di atas 130 menunjukkan bahwa Kabupaten Gunung Mas tetap berada pada zona risiko menengah-tinggi, sehingga diperlukan penguatan lanjutan dalam perencanaan

tata ruang berbasis mitigasi bencana, pemantapan sistem peringatan dini, serta keterlibatan masyarakat dalam membangun ketangguhan wilayah.

2.1.1.7 Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah

1. Kependudukan

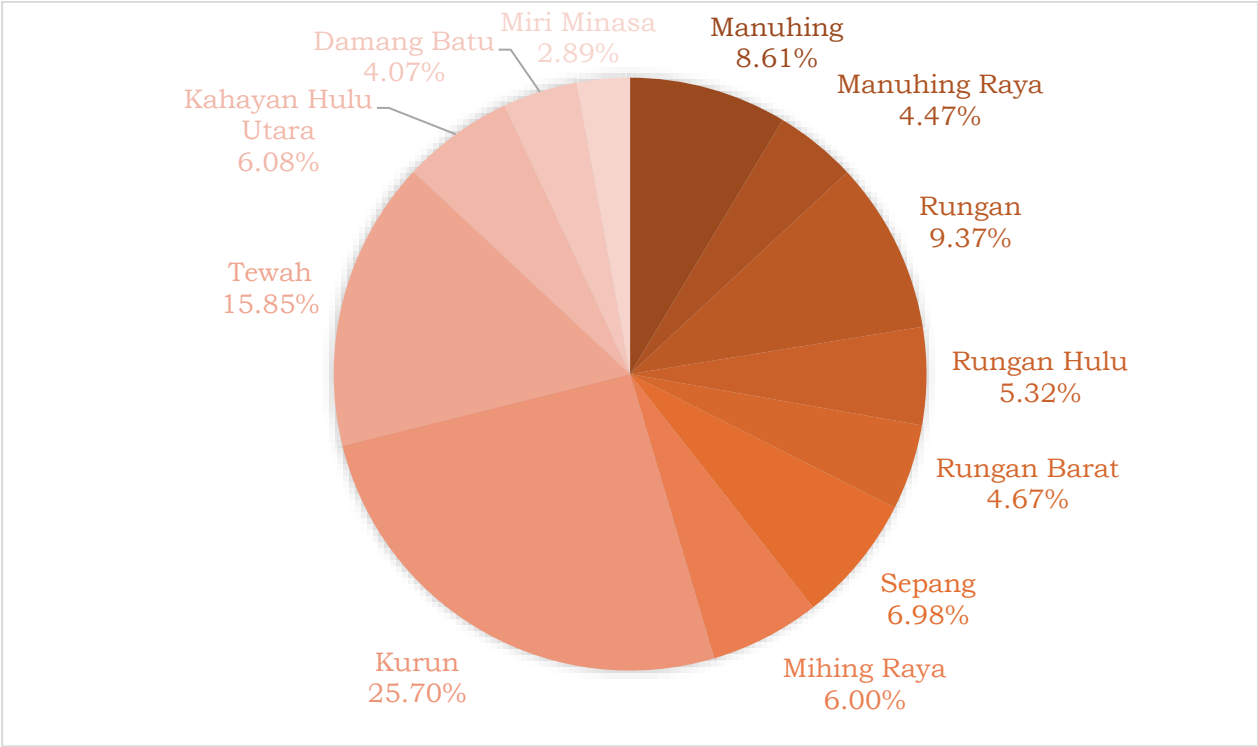
Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 berdasarkan data BPS mencapai 145,53 ribu jiwa, terdiri dari 76,40 ribu laki-laki dan 69,13 ribu perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 111. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2023 ke 2024 tercatat sebesar 1,89 persen, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dalam satu tahun terakhir. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kurun (37,4 ribu jiwa), Kecamatan Tewah (23,07 ribu jiwa), Kecamatan Rungan (13,63 ribu jiwa), dan Kecamatan Manuhing (12,54 ribu jiwa), yang menempati posisi empat teratas dalam jumlah populasi di Kabupaten Gunung Mas.



Gambar II.23
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Tabel II.13
Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Manuhing	12,54	8,61	2,86
2	Manuhing Raya	6,5	4,47	0,79
3	Rungan	13,63	9,37	1,58
4	Rungan Hulu	7,75	5,32	1,02
5	Rungan Barat	6,8	4,67	0,39
6	Sepang	10,16	6,98	3,23
7	Mihing Raya	8,73	6	3,23
8	Kurun	37,4	25,7	2,88
9	Tewah	23,07	15,85	1,24
10	Kahayan Hulu Utara	8,85	6,08	0,32
11	Damang Batu	5,93	4,07	2,13
12	Miri Minasa	4,2	2,89	0,32
Gunung Mas		145,534	100	1,95

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

2. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan populasi yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 135,37 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan menjadi 138,40 ribu jiwa pada tahun 2021, kemudian naik lagi



menjadi 142,30 ribu jiwa pada tahun 2022, 142,83 ribu jiwa di tahun 2023, dan mencapai 145,53 ribu jiwa pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dan positif dalam lima tahun terakhir, yang menandakan adanya dinamika kependudukan yang perlu dikelola secara tepat agar dapat menjadi potensi pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Analisis kependudukan dapat dilihat dari piramida penduduk yang merupakan gambaran dari struktur penduduk berdasarkan karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Gunung Mas, menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Gunung Mas berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Di satu sisi pertumbuhan penduduk ini merupakan modal dasar pembangunan yang cukup potensial, namun di sisi lain juga mengandung permasalahan yang cukup krusial apabila pertumbuhannya tidak dikendalikan.

Tabel II.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Gunung Mas (Ribu Jiwa) Tahun 2024

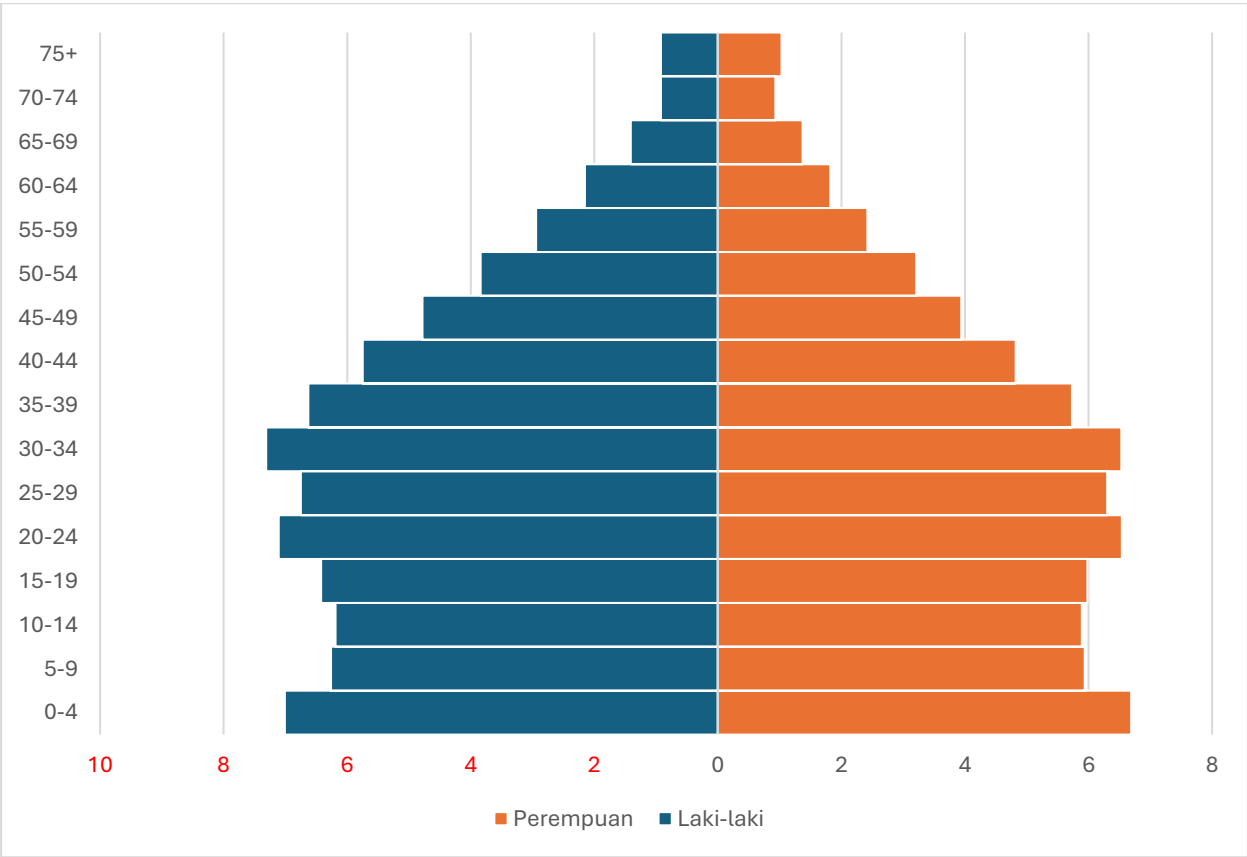
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7,01	6,69	13,7
5-9	6,26	5,94	12,2
10-14	6,19	5,89	12,07
15-19	6,42	5,98	12,4
20-24	7,11	6,54	13,66
25-29	6,75	6,3	13,05
30-34	7,31	6,53	13,84
35-39	6,63	5,73	12,36
40-44	5,75	4,82	10,57
45-49	4,78	3,94	8,72
50-54	3,84	3,21	7,05
55-59	2,94	2,42	5,36
60-64	2,15	1,82	3,97
65-69	1,41	1,37	2,78
70-74	0,92	0,93	1,86
75+	0,92	1,03	1,95
2024	76,4	69,13	145,53
2023	75,0	67,7	142,83
2022	74,9	67,3	142,30
2021	72,9	65,4	138,40
2020	71,3	63,9	135,37

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025



Salah satu langkah antisipasi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat adalah menggugah kesadaran masyarakat dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada keluarga usia produktif untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam pemantapan dan peningkatan program Keluarga Berencana (KB).

Gambar II.24
Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

3. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya serta keberagaman masyarakat adat yang masih kuat menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka. Keberadaan masyarakat adat di wilayah ini menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah dan warisan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat adat yang hidup di Kabupaten Gunung Mas dan memiliki keberagaman budaya serta tradisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suku Dayak Ngaju: Suku Dayak Ngaju merupakan kelompok etnis mayoritas di Kabupaten Gunung Mas. Mereka memiliki budaya yang kaya dan khas, terutama dalam hal bahasa, sistem kepercayaan (seperti Kaharingan), adat istiadat, serta seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan. Kehidupan masyarakat Dayak Ngaju erat kaitannya dengan alam dan hutan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kepercayaan dan pola hidup mereka.
2. Suku Dayak Ot Danum: Suku ini juga merupakan bagian dari masyarakat Dayak yang mendiami wilayah Kabupaten Gunung Mas. Mereka memiliki dialek bahasa sendiri, serta berbagai tradisi unik seperti upacara adat dan teknik bercocok tanam tradisional. Suku Dayak Ot Danum dikenal dengan

- rumah betang (rumah panjang) sebagai bentuk tempat tinggal komunal yang mencerminkan nilai kebersamaan.
3. Suku Jawa dan Bali: Selain masyarakat Dayak, terdapat pula komunitas pendatang seperti suku Jawa dan Bali yang telah lama bermukim di Kabupaten Gunung Mas. Mereka datang melalui program transmigrasi dan membawa serta kebudayaan mereka sendiri, seperti dalam bentuk seni pertunjukan, adat istiadat, dan praktik keagamaan.
 4. Suku-suku Minoritas Lainnya: Kabupaten Gunung Mas juga dihuni oleh kelompok etnis lain seperti suku Madura, Bugis, dan Banjar, yang meskipun jumlahnya tidak sebesar kelompok utama, turut menyumbangkan warna dalam keberagaman budaya daerah ini.

Masyarakat adat di Kabupaten Gunung Mas terus berupaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai leluhur, termasuk dalam hal agama lokal (seperti Kaharingan), adat istiadat, sistem sosial tradisional, dan pengelolaan sumber daya alam secara arif. Keberadaan mereka menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan budaya lokal.

Pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung hak-hak masyarakat adat, seperti pengakuan wilayah adat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Namun demikian, tantangan seperti modernisasi, ekspansi perkebunan, penebangan hutan, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, serta penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka.

4. Proyeksi Demografi Kabupaten Gunung Mas

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Gunung Mas hingga tahun 2030, diproyeksikan terjadi kenaikan jumlah penduduk secara bertahap hingga mencapai 161,46 ribu jiwa di tahun 2030. Adapun rasio jenis kelamin mengalami penurunan namun masih di atas 100 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk, namun dari sisi rasio ketergantungan, terjadi peningkatan ketergantungan antara usia non produktif terhadap penduduk usia produktif. Meskipun begitu, angka ketergantungan masih di bawah 50, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunung Mas berada pada jendela Bonus Demografi.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM



sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Bonus demografi juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel II.15
Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	148,23	150,94	153,61	156,26	158,87	161,46
Laki-laki	77,69	79,05	80,36	81,64	82,92	84,16
Perempuan	70,54	71,89	73,25	74,62	75,95	77,30
Rasio Jenis Kelamin	110,14	109,96	109,71	109,41	109,18	108,87
Kepadatan Penduduk	15,91	16,20	16,49	16,77	17,05	17,33
Rasio Ketergantungan	44,15	44,22	44,32	44,43	44,60	44,77
Kelompok Umur (Ribuan Jiwa)						
0–14	38,50	39,03	39,56	40,08	40,61	41,13
15–64	102,83	104,66	106,44	108,19	109,87	111,53
65+	6,90	7,25	7,61	7,99	8,39	8,80

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025, data diolah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan sekaligus indikator keberhasilan dalam setiap proses pembangunan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta jaminan perlindungan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah, terdapat beberapa pembahasan dalam melihat kesejahteraan masyarakat seperti kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Keseluruhan pembahasan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, membuka lapangan kerja yang produktif, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal. Kesejahteraan ekonomi tercermin dari meningkatnya pendapatan per kapita, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta tumbuhnya sektor-sektor unggulan daerah. Berikut penjabaran kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam aspek kesejahteraan masyarakat.



1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas mengalami perubahan setiap tahunnya dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,39 persen, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pertumbuhan meningkat menjadi 5,09 persen pada 2021 dan terus naik secara signifikan menjadi 6,47 persen pada 2022, menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,25 persen, dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,48 persen. Meskipun mengalami perlambatan di beberapa tahun, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan menunjukkan pergerakan positif seiring dengan upaya pemulihan dan pengembangan sektor ekonomi unggulan.

Tabel II.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB atas dasar Harga Berlaku	PDRB atas dasar Harga Konstan (2010=100)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2024	9761,7	4412,2	4,48
2023	8620	4222,9	4,25
2022	8135,3	4050,9	6,47
2021	7173,2	3804,7	5,09
2020	6275	3620,4	3,39

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan berdasarkan harga berlaku, yaitu harga pada tahun penghitungan, serta harga konstan, yakni harga yang mengacu pada tahun dasar penghitungan. Kabupaten Gunung Mas memiliki perekonomian yang bergantung pada sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan, karena karakteristik wilayahnya yang mendukung kegiatan tersebut. Meskipun pertumbuhan PDRB bersifat naik turun, secara tren terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2025, distribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan 33,05 persen, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sektor konstruksi juga berkontribusi cukup besar, yakni 12,63 persen, dan terus menunjukkan peran signifikan selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, sektor pertambangan yang pada periode 2020–2022 memiliki kontribusi tinggi, seperti 13,69 persen pada 2020, terus mengalami penurunan hingga hanya 8,33 persen pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya lokasi pertambangan emas di Kabupaten Gunung Mas, yang berdampak pada menurunnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Menyadari bahwa sumber daya tambang



semakin lama dapat habis, pemerintah daerah kini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengajarkan praktik usaha pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai alternatif sumber mata pencaharian agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas mencerminkan dominasi sektor primer dan adanya pergeseran kontribusi antar sektor ekonomi yang perlu diantisipasi demi keberlanjutan ekonomi daerah.

Tabel II.17
Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,2	30,86	29,56	31,69	33,05
2	Pertambangan/Penggalian	13,69	13,08	13,86	8,66	8,33
3	Industri Pengolahan	8,28	8,24	8,2	8,52	8,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,35	0,35	0,37	0,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
6	Konstruksi	11,88	11,9	11,96	12,79	12,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,08	9,59	9,93	10,2	9,98
8	Transportasi dan Pergudangan	1,8	1,79	1,89	2,07	2,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,54	1,66	1,7	1,65
10	Informasi dan Komunikasi	1,23	1,34	1,39	1,44	1,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,52	0,56	0,6	0,57
12	Real Estate	2,96	2,83	2,76	2,9	2,69
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	6,9	6,42	5,86	6,1	6,25
15	Jasa Pendidikan	7,79	7,37	7,79	8,39	8,24
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,5	3,8	3,84	4,16	4,03
17	Jasa Lainnya	0,29	0,27	0,27	0,3	0,29
Distribusi PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Angka kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari



sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non- makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Selama periode 5 (lima) tahun ini garis kemiskinan cenderung meningkat/naik tiap tahunnya, yang mana mempengaruhi juga jumlah Penduduk miskin tiap tahunnya yang ikut naik. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2020–2024, garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari Rp438.881 pada tahun 2020 menjadi Rp562.332 pada tahun 2024. Seiring dengan itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 5,78 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 4,75 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,29 ribu jiwa dengan persentase 5,35 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 6,70 ribu jiwa atau 5,64 persen, dengan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp479.550. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok serta tantangan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin sedikit menurun menjadi 6,55 ribu jiwa dengan persentase 5,47 persen, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, di tahun 2024, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 6,86 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,68 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya garis kemiskinan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, serta faktor ekonomi seperti kenaikan harga barang dan biaya hidup.

Tabel II.18
Tabel Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, P0, P1, dan P2 Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Tahun	Garis kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2024	562.332	6,86	5,68	0,48	0,09
2023	526.341	6,55	5,47	0,49	0,06
2022	479.550	6,70	5,64	0,99	0,26
2021	456.984	6,29	5,35	0,53	0,10
2020	438.881	5,78	4,75	0,75	0,21

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas 2025

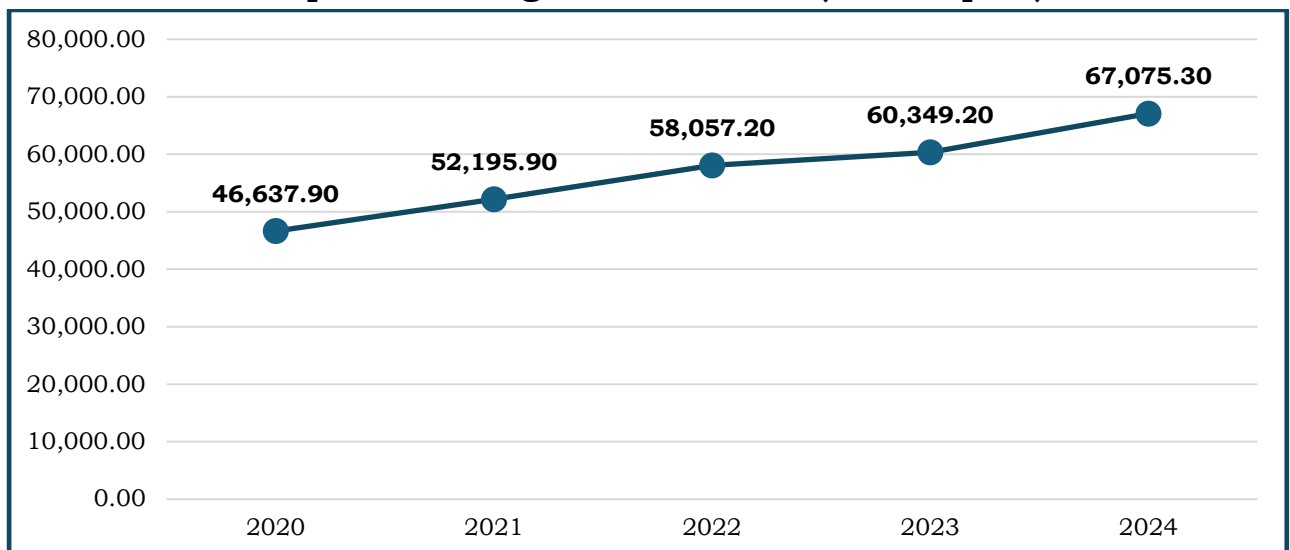
Indeks Kedalaman Kemiskinan-P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan P2

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara umum, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan hingga tahun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat ketimpangan ekonomi dan tingkat keparahan kemiskinan secara perlahan mulai berkurang.

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan distribusi pendapatan yang sesungguhnya. Di Kabupaten Gunung Mas, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 46.637,90 juta rupiah, kemudian mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 76.075,30 juta rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Gunung Mas. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan dan distribusi ekonomi di wilayah tersebut.

Gambar II.25
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

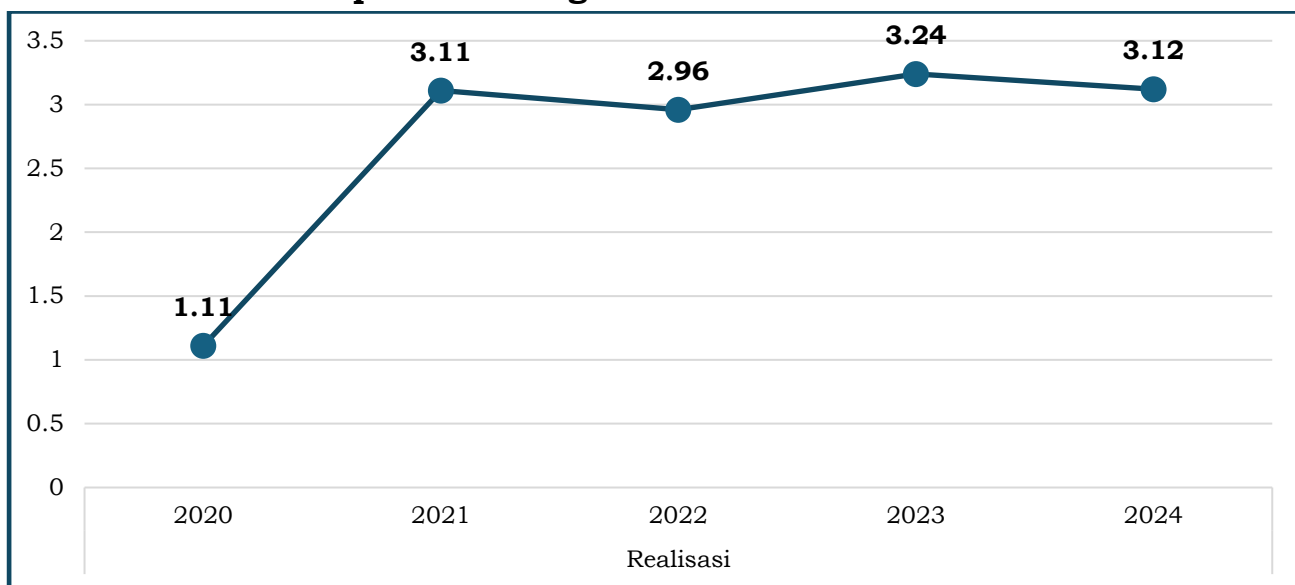
Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan tingkat pendapatan rumah tangga, yang menjadi faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan

sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT digunakan untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu wilayah, karena semakin rendah tingkat pengangguran umumnya mencerminkan adanya peningkatan dalam penyediaan lapangan kerja dan kestabilan ekonomi masyarakat. Tingginya TPT sering kali menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, serta mencerminkan tantangan dalam hal kompetensi tenaga kerja dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan bimbingan usaha.

Di Kabupaten Gunung Mas, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi dengan pola meningkat selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 1,11 persen, namun meningkat tajam menjadi 3,11 persen pada tahun 2021, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial. Pada tahun 2022, angka ini sedikit membaik menjadi 2,96 persen, namun kembali naik menjadi 3,24 persen pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun sedikit ke 3,12 persen di tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemulihan ekonomi, tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai masih cukup besar dan memerlukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun begitu, tingkat pengangguran di Kabupaten Gunung Mas tergolong rendah, namun perlu diperhatikan kembali terkait kualitas tenaga kerja dan produktivitasnya untuk memberi dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.26
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

5. Indeks Gini

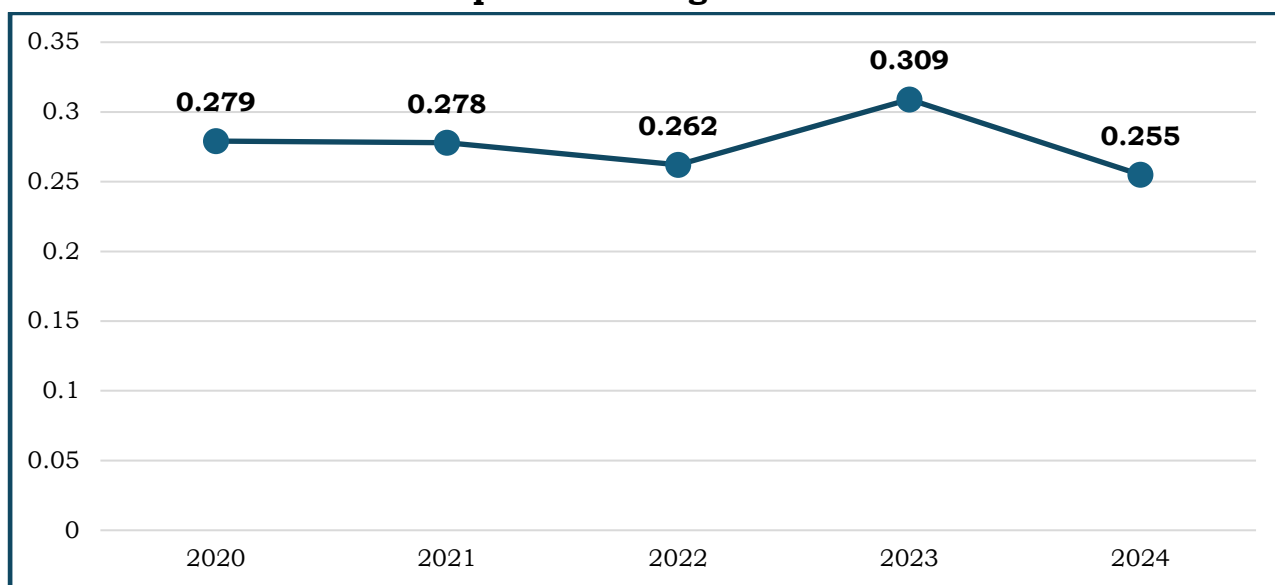
Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini berkisar

antara 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok). Indeks Gini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena semakin rendah nilai indeks tersebut, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut, yang berarti kesejahteraan masyarakat secara umum lebih baik dan kesenjangan ekonomi lebih kecil.

Di Kabupaten Gunung Mas, capaian Indeks Gini selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,279, kemudian sedikit menurun ke 0,278 pada tahun 2021, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah yaitu 0,262 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan ke angka 0,309, sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 0,255 di tahun 2024. Kenaikan tajam pada tahun 2023 dapat mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat pada tahun tersebut yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana sebagian kelompok masyarakat lebih cepat pulih dibandingkan kelompok lainnya. Adapun penurunan indeks pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pemerataan ekonomi atau bantuan sosial mulai menunjukkan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan.

Gambar II.27

Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

6. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan



dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024, meskipun masih berada dalam kategori sedang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2020, IPM Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 72,00, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 73,88 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah beberapa kabupaten lain di Kalimantan Tengah, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dari sisi indikator penyusun, umur harapan hidup meningkat dari 72,99 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,58 tahun pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 11,78 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,1 tahun pada tahun 2024, menunjukkan semakin banyaknya peluang pendidikan bagi generasi muda. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah yang naik dari 9,14 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,37 tahun pada tahun 2024, menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas semakin lama mengenyam pendidikan formal. Selain itu, pengeluaran per kapita terus meningkat, dari Rp10.793 ribu/kapita pada tahun 2020 menjadi Rp11.902 ribu/kapita pada tahun 2024, yang menunjukkan daya beli masyarakat semakin membaik. Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Gunung Mas mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meskipun masih diperlukan kebijakan yang lebih strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel II.19
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,99	73,04	73,09	73,31	73,58
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,78	11,9	11,91	12,05	12,10
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,14	9,18	9,24	9,25	9,37
Pengeluaran per Kapita (000 Rp/Kapita)	10.793	10.809	10.990	11462	11902
IPM	72,00	72,22	72,50	73,18	73,88

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

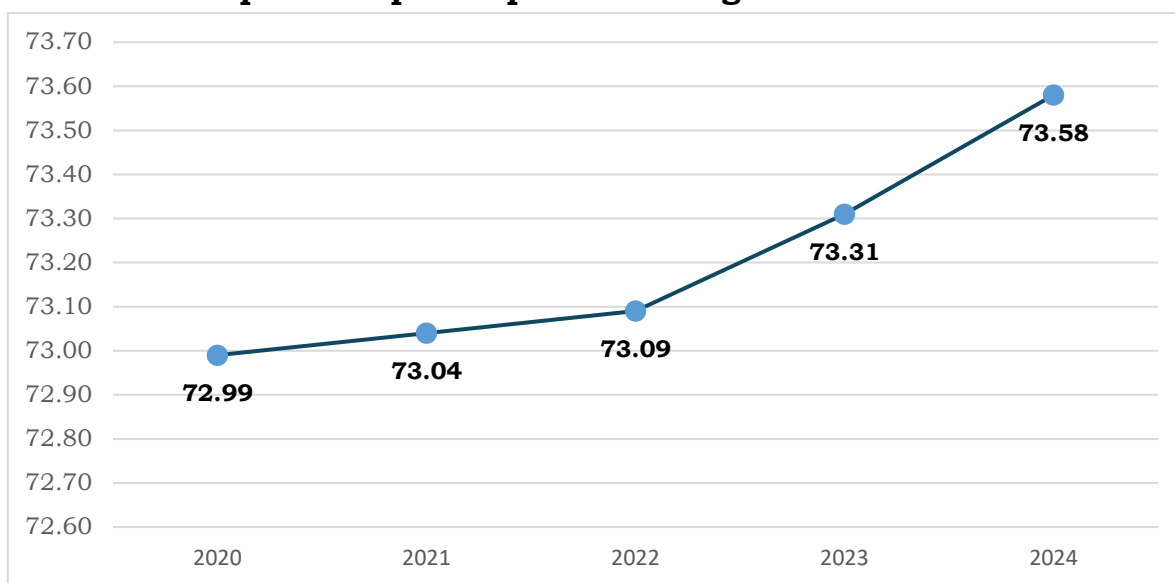
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat

sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2020, dari 72,99 tahun menjadi 73,58 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun, dengan asumsi pola kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, pola hidup yang lebih baik, serta kesadaran masyarakat dan akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar II.28

Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Selama periode 2020–2024, indikator pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan berbagai perbaikan signifikan. Angka kematian ibu menurun dari 117 menjadi 110 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi juga turun dari 7 menjadi 4,9 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi stunting mengalami penurunan drastis dari 22,87 persen di tahun 2020 menjadi 10,39 persen di tahun 2024, mencerminkan peningkatan intervensi gizi dan kesehatan anak. Sementara itu, angka gizi buruk tetap rendah, meski meningkat dari 0,074 persen (2022) menjadi 2 persen (2023 dan 2024).

Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Gunung Mas sedikit menurun dari 2,57 menjadi 2,34, yang sejalan dengan peningkatan *Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)* dari 74,22 persen menjadi 72,03 persen meskipun sempat fluktuatif. Selain itu, *unmet need* (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) menurun drastis dari 16,1 persen menjadi 5,25 persen, dan pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat hampir 10 kali lipat dari 2,57 persen menjadi 23,20 persen. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kemajuan nyata dalam layanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian kelahiran, serta penurunan beban gizi buruk di Kabupaten Gunung Mas. Tren perbaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi pemerintah daerah di sektor kesehatan, meskipun masih diperlukan perhatian



khusus terhadap stabilitas angka gizi buruk dan upaya menjaga konsistensi cakupan pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang.

Tabel II.20
Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	117	183	135	175	110
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	7	11	5	5,3	4,9
Prevalensi Stunting (%)	22,87	20,6	18,34	16,37	10,39
Angka Gizi Buruk (%)	1	1.03	0,074	2	2
Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,57	2,57	2,42	2,34	2,34
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)	74,22	84	57,85	73,37	72,03
Unmeet Need (%)	16,1	8,57	17,13	6,50	5,25
Perserta Pengguna MKJP (%)	2,57	16	8,8	29,60	23,20

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas P2KBP3A Kabupaten Gunung Mas, 2024

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas memperlihatkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperasn sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

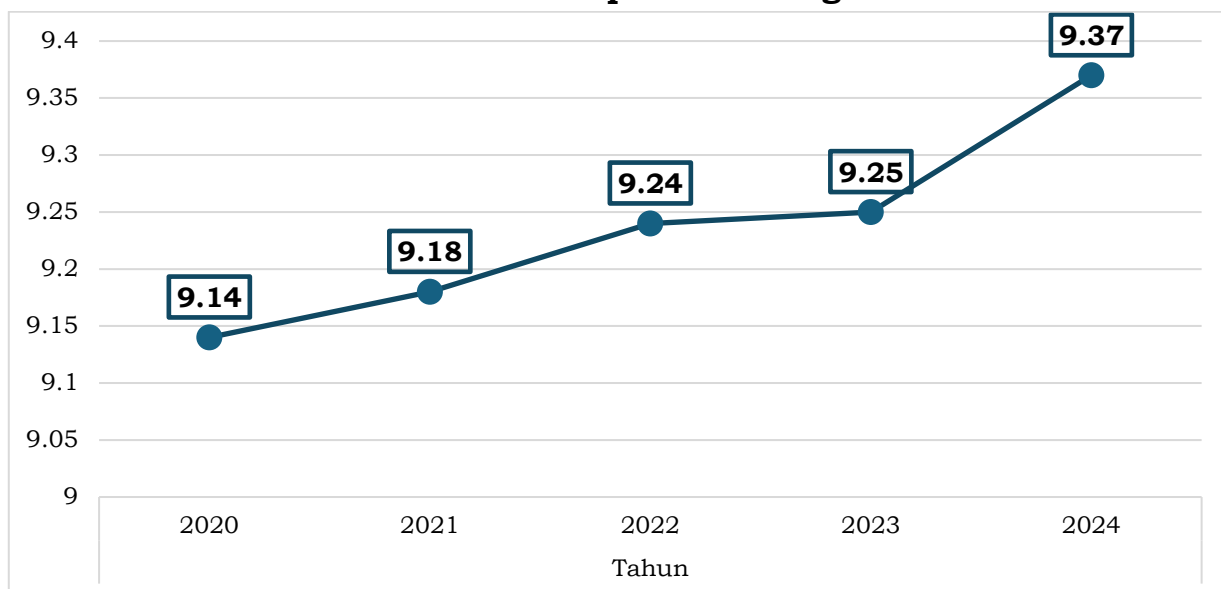
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 9,14 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,37 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Gunung Mas telah mengenyam pendidikan selama 9,37 tahun pada tahun 2024, setara dengan kelas 1 SMA semester 1. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam data berikut:

Gambar II.29

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

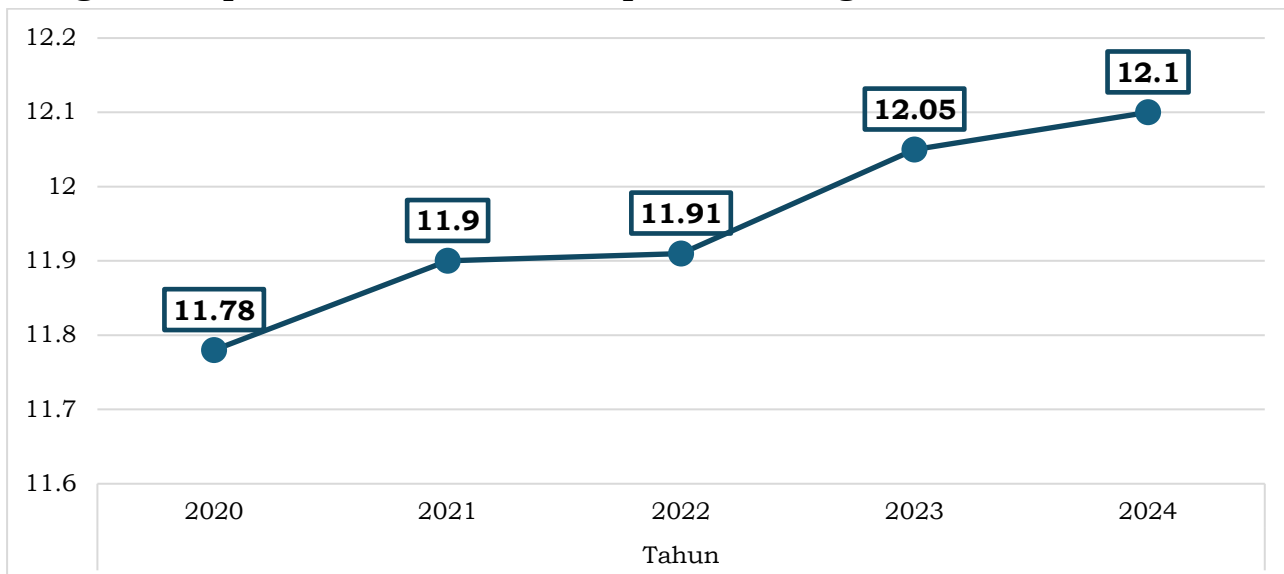
2. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 mencapai 12,1 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berusia 7 tahun pada saat ini, memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga setara dengan jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan telah memasuki perguruan tinggi. Tingginya angka HLS ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih baik. Namun, untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan peningkatan fasilitas pendidikan yang memadai guna mendukung kualitas pembelajaran dan meningkatkan daya saing individu di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar II.30

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



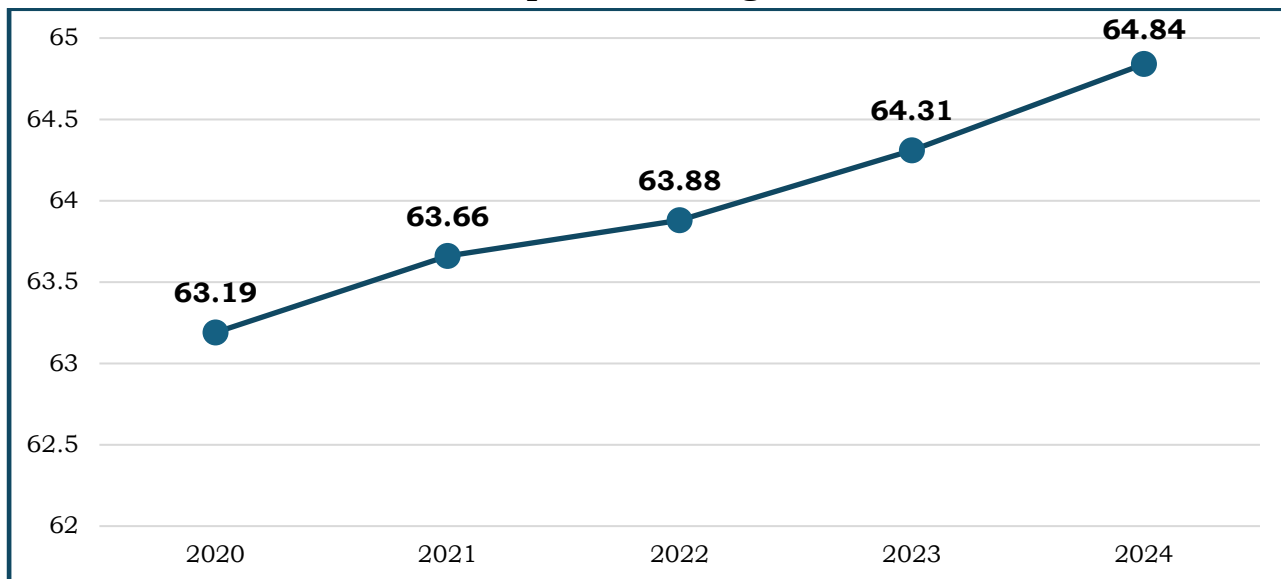
Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

3. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah

Indeks pendidikan merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, indeks pendidikan berada di angka 63,19 dan meningkat menjadi 63,66 pada 2021. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 63,88, kemudian naik ke 64,31 pada tahun 2023, dan mencapai titik tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir di angka 64,84 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran, meskipun masih dibutuhkan strategi lanjutan untuk mempercepat akselerasi kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Gambar II.31
Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



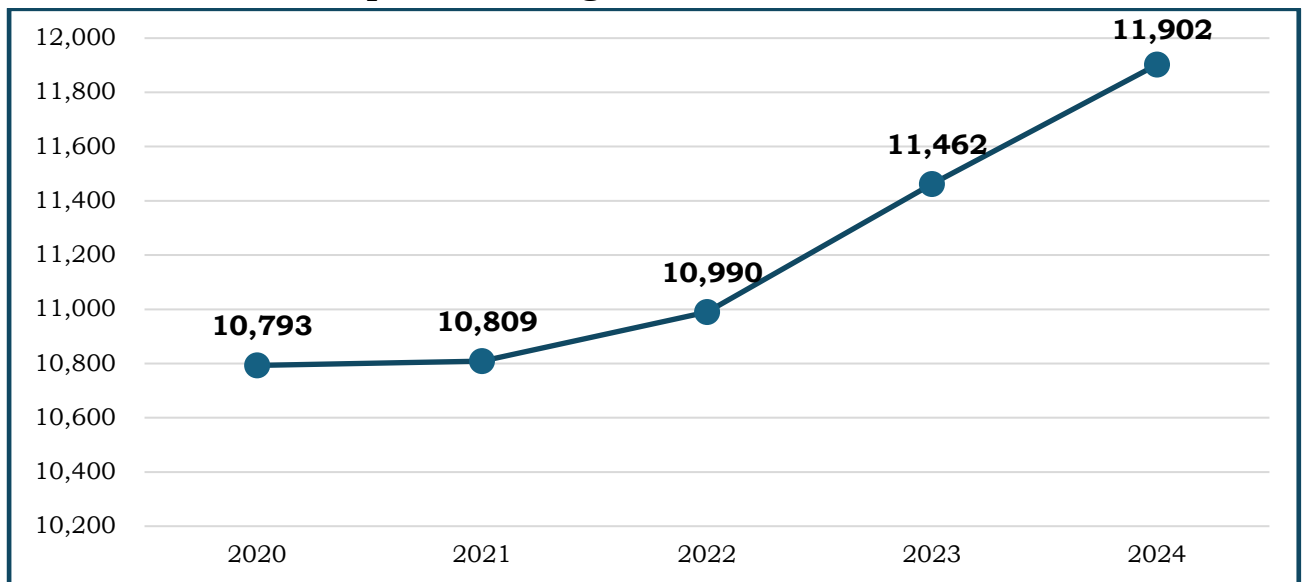
Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas (data diolah), 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satu indikator untuk menilai efektivitas perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, adalah peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, pengeluaran rata-rata per kapita mencerminkan total biaya konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.

Di Kabupaten Gunung Mas, pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan tren peningkatan dari Rp10.793 ribu/kapita/tahun pada tahun 2020, menjadi Rp11.902 ribu/kapita/tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga dapat mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar II.32
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga dapat mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

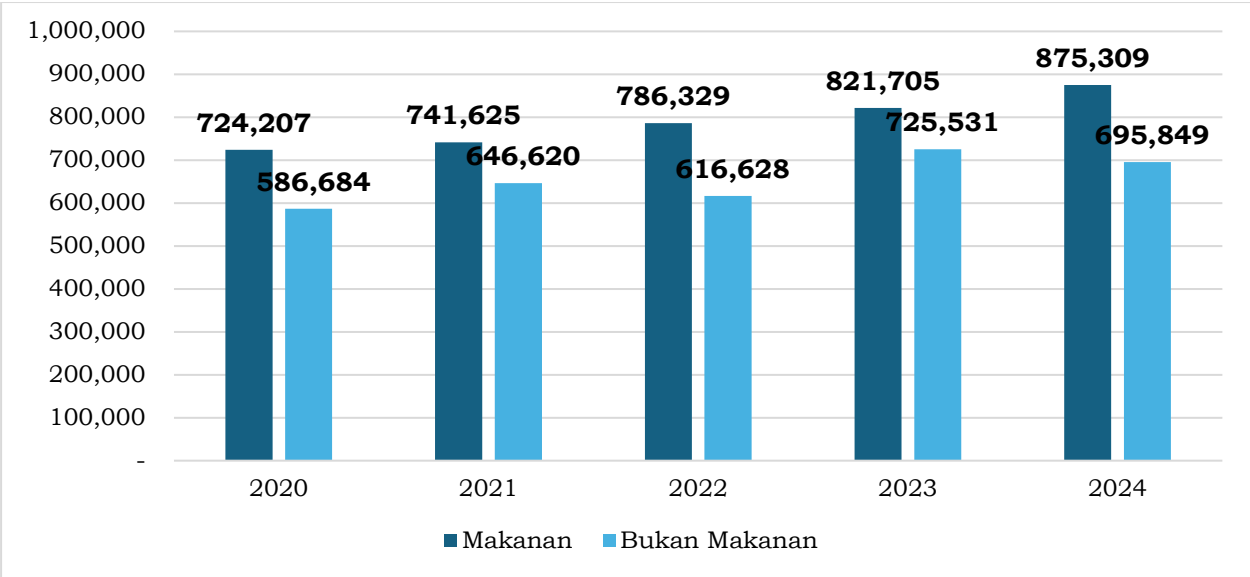
Penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata memiliki pendapatan yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan pengeluaran di atas 500.000 rupiah per bulan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, konsumsi baik untuk makanan maupun non-makanan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2020-2024, pengeluaran konsumsi per kapita untuk makanan terus mengalami kenaikan dari Rp724.207 pada tahun 2020 menjadi Rp875.309 pada tahun 2024. Sementara itu, pengeluaran untuk non-makanan juga meningkat dari Rp586.684 pada tahun 2020 menjadi Rp695.849 pada tahun 2024. Meskipun pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi dibandingkan dengan non-makanan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, termasuk untuk kebutuhan di luar makanan.

Selain itu, meskipun nominal pengeluaran untuk makanan lebih besar, porsi konsumsi non makanan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas mulai mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain di luar makanan, seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. Pergeseran ini mencerminkan adanya peningkatan



kesejahteraan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju standar hidup yang lebih baik seiring pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar II.33
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Tabel II.21
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	724.207	741.625	786.329	821.705	875.309
Bukan Makanan	586.684	646.620	616.628	725.531	695.849
Proporsi (%)					
Makanan	55,24	53,42	56,05	53,11	55,71
Bukan Makanan	44,75	46,58	43,95	46,89	44,29

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Masyarakat yang berkebudayaan maju ditandai dengan upaya pelestarian, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai budaya lokal yang berkelanjutan. Di Kabupaten Gunung Mas, indikator pembangunan kebudayaan selama tahun



2020–2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah budaya daerah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya mengalami penurunan signifikan, dari 20 budaya pada tahun 2020 dan tahun 2021, menjadi hanya 2 pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat, dari 28 pada tahun 2021 menjadi 229 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetapan formal warisan budaya menurun, namun upaya pelestarian kekayaan budaya lokal justru meningkat tajam, menandakan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan ekspresi budaya masyarakat.

Tabel II.22
Indikator Pembangunan Kebudayaan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	20	20	11	11	2
Jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	NA	28	43	45	229

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesenjangan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Berdasarkan data dari BPS Nasional, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gunung Mas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan stabil dengan peningkatan bertahap, meskipun terdapat sedikit penurunan di akhir periode pada salah satu indikator. Indeks Pemberdayaan Gender tercatat sebesar 88,20 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 89,29 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun ke angka 88,74 pada tahun 2024. Sementara itu, IPG



terus menunjukkan perkembangan positif dari 92,09 di tahun 2020 menjadi 92,40 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pembangunan kesetaraan gender, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

Tren positif juga terlihat dari capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG yang lebih rendah mengindikasikan ketimpangan gender yang lebih kecil, sehingga penting untuk memastikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak hanya menysar aspek akses, namun juga mencakup peran dan kualitas keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Capaian IKG Kabupaten Gunung Mas menunjukkan penurunan dari 0,560 pada tahun 2020 menjadi 0,549 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan menjadi masing-masing 0,572 dan 0,574. Meskipun mengalami kenaikan, namun secara umum IKG masih berada dalam kategori sedang.

Data ini mengindikasikan bahwa pembangunan gender di Kabupaten Gunung Mas telah bergerak ke arah yang semakin setara, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek pemberdayaan. Penurunan IDG pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi produktif perlu terus dioptimalkan. Sementara IPG yang terus meningkat memberikan sinyal positif bahwa perempuan memiliki akses yang semakin merata terhadap layanan dasar dan peluang pembangunan. Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, dibutuhkan kebijakan afirmatif dan program yang responsif gender secara konsisten di berbagai sektor, disertai dengan pemantauan ketimpangan agar transformasi menuju keadilan gender dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II.23
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	88,2	88,22	89,15	89,29	88.74
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,09	91,99	92,18	92,38	92,40
Indeks Ketimpangan Gender (%)	0,560	0,553	0,549	0,572	0,574

Sumber: BPS Nasional, 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia



Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Pada tahun 2024, angka beban ketergantungan di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 47,03, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 44,15. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif masih menanggung beban sekitar 47 penduduk tidak produktif, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Penurunan angka ketergantungan ini mengidentifikasikan adanya pergeseran demografi yang berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi, karena proporsi penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bergantung pada mereka. Hal ini memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat jika diimbangi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif.

Tabel II.24
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia <15 tahun	36,4	36,6	37,1	37,4	37,97
Jumlah penduduk usia >64 tahun	5,5	5,9	6,46	6,28	6,59
Jumlah penduduk usia tidak produktif	41,9	42,5	43,56	43,68	44,56



Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	90,2	95,78	98,76	99,09	100,98
Rasio ketergantungan	46,45	49,99	46,09	44,15	47,03

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2021-2025 (data diolah)

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi difokuskan sebagai pendorong utama untuk menjaga sekaligus mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Inovasi diposisikan tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi dalam memperkuat struktur ekonomi daerah secara jangka menengah maupun panjang. Melalui pemanfaatan teknologi tepat guna serta penguatan ekosistem riset dan pengembangan, Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperluas nilai tambah, serta mendorong transformasi ekonomi daerah menuju model yang lebih modern dan berdaya saing.

Dalam kerangka akselerasi pembangunan ekonomi daerah, strategi berbasis hilirisasi menjadi langkah penting yang diambil Kabupaten Gunung Mas, khususnya dengan mengembangkan potensi unggulan lokal. Hilirisasi, sebagai proses pengolahan sumber daya menjadi produk bernilai lebih tinggi, diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya hilirisasi, komoditas-komoditas lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki pasar lebih luas dan nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini membuka peluang pertumbuhan industri lokal, memperluas lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas, sektor industri pengolahan pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,28% dan tetap pada angka yang sama di tahun 2024, menunjukkan kestabilan meskipun sempat naik turun di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami sedikit penurunan dari 1,66% pada tahun 2020 menjadi 1,65% pada tahun 2024. Secara umum, kedua sektor menunjukkan kontribusi yang relatif stabil dengan fluktuasi ringan selama 5 (lima) tahun terakhir.

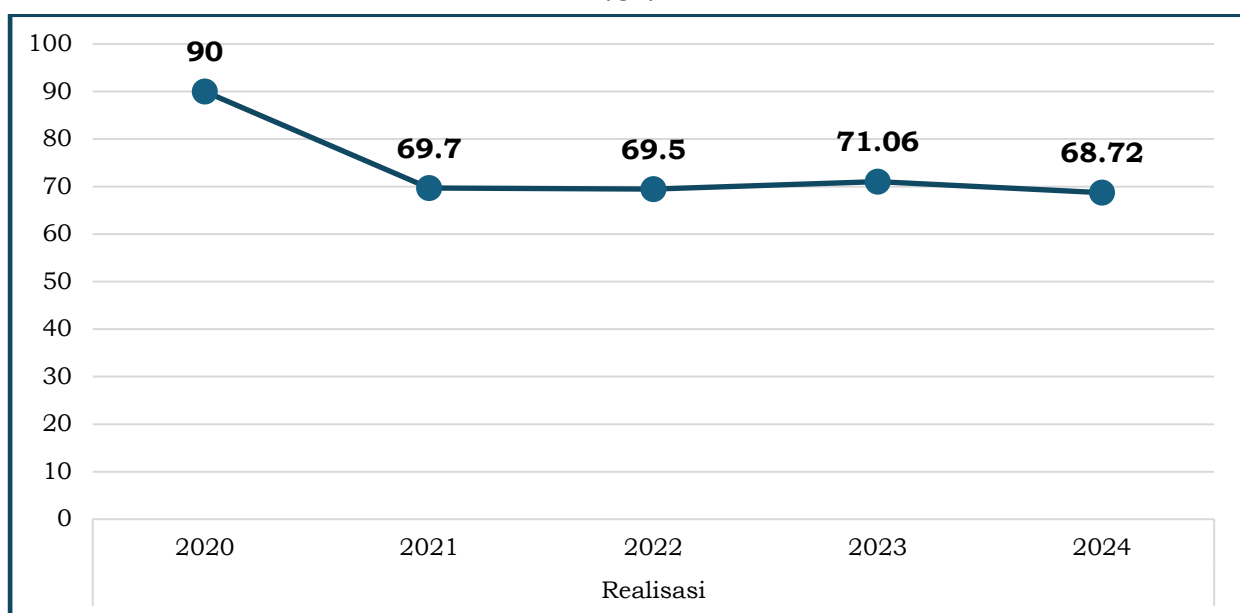
Tabel II.25
Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Rasio PDRB atas Dasar Harga Berlaku	2020	2021	2022	2023*	2024**
Industri Pengolahan	8,28	8,24	8,2	8,52	8,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,54	1,66	1,7	1,65

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK di Kabupaten Gunung Mas juga menunjukkan dinamika yang menarik. TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 90%, namun mengalami penurunan drastis menjadi 69,7% di tahun 2021 dan sedikit menurun lagi menjadi 69,5% pada 2022. Tahun 2023 mencatat kenaikan menjadi 71,06%, namun pada 2024 kembali menurun ke angka 68,72%. Fluktuasi TPAK ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika angkatan kerja, baik dari sisi minat untuk bekerja, peluang kerja yang tersedia, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

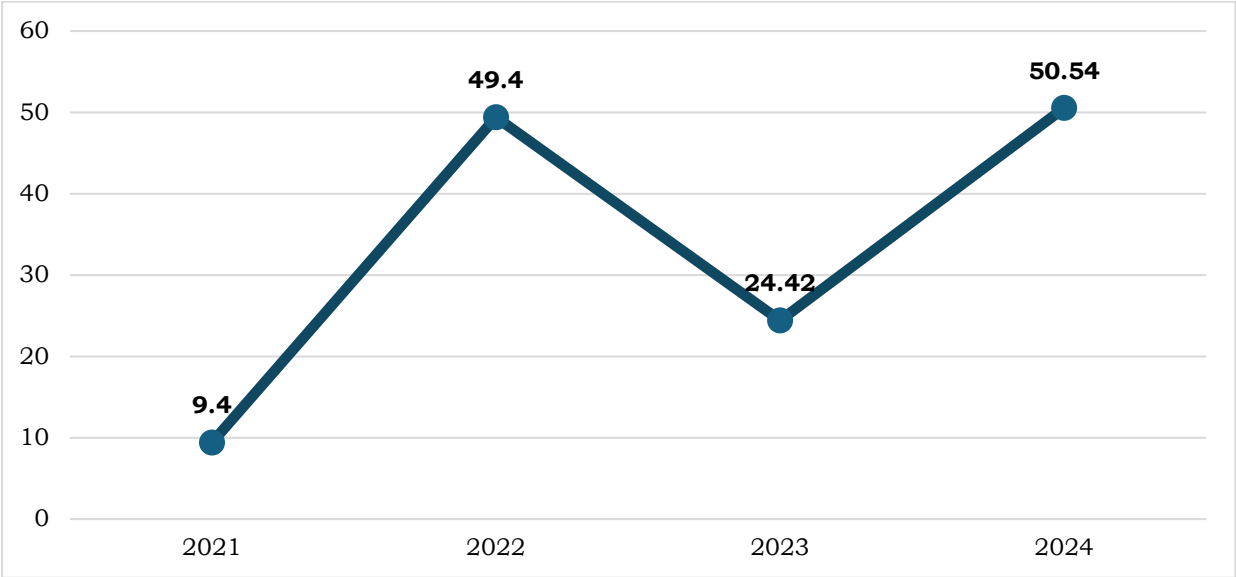
Gambar II.34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, capaian tahun 2021 sebesar 9,4 dan tahun 2023 sebesar 24,42 masih tergolong kurang inovatif. Namun, capaian tersebut meningkat signifikan pada tahun 2022 sebesar 49,4 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 50,54 yang masuk dalam kategori inovatif. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa tingkat inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kebijakan, komitmen pemerintah daerah, serta efektivitas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Kenaikan capaian di tahun 2022 dan tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan perencanaan inovasi dan implementasi program yang lebih terarah.

Gambar II.35
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022-2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Gunung Mas terus didorong dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor ini mengalami pergerakan yang dinamis sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan mencapai 3,42 persen, meningkat di tahun-tahun berikutnya dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 7,21 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi perlambatan dengan hanya mencapai 2,18 persen.

Meskipun mengalami perlambatan pada sisi pertumbuhan, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas justru mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 29,20 persen dan terus meningkat hingga mencapai 33,05 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi sektor andalan dalam struktur ekonomi daerah. Kenaikan kontribusi ini mengindikasikan adanya penguatan sektor primer dalam perekonomian lokal, meskipun pertumbuhan tahunan tidak selalu tinggi. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2024 dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem atau ketidakstabilan harga komoditas, namun sektor ini tetap memberikan fondasi kuat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel II.26
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,42	4,97	5,21	7,21	2,18
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	29,20	30,86	29,56	31,69	33,05



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing di era global. Melalui penerapan teknologi digital, sistem administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang melalui platform *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), dan berbagai inovasi teknologi. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga berperan penting dalam mempercepat konektivitas antar wilayah yang mendukung distribusi informasi, barang, dan jasa. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, transformasi digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan berkualitas secara lebih luas, seperti melalui pembelajaran daring dan layanan kesehatan berbasis teknologi (*telemedicine*). Penerapan pembangunan berbasis digital juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dan mendorong solusi yang ramah lingkungan.

Bagi Kabupaten Gunung Mas, transformasi digital menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah. Melalui digitalisasi, potensi wilayah dapat dioptimalkan, pelayanan publik diperbaiki, serta akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat diperluas. Hal ini akan mendorong inklusi sosial dan ekonomi, serta memperkuat posisi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan adaptif di era digital.

Perkembangan sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunung Mas selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun tetap memberikan kontribusi positif terhadap struktur perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi sektor ini sempat mencatat angka yang tinggi pada tahun 2020 (18,43 persen) dan 2021 (21,45 persen), yang kemungkinan didorong oleh adaptasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital selama pandemi COVID-19. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 14,19 persen, dan terus melemah pada 2023 menjadi hanya 3,45 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2024 pertumbuhan kembali meningkat menjadi 5,35 persen, menunjukkan adanya pemulihan dan stabilisasi sektor ini, yang bisa jadi dipengaruhi oleh upaya penguatan infrastruktur digital dan peningkatan adopsi TIK yang telah dilakukan pemerintah daerah.

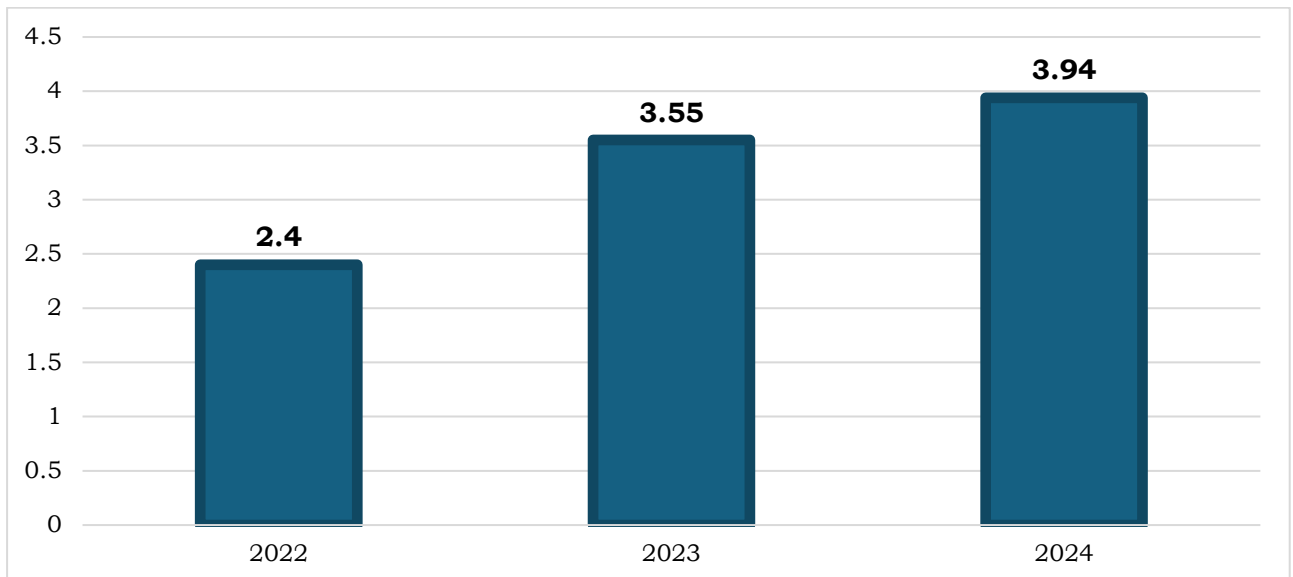
Tabel II.27
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	18,43	21,45	14,19	3,45	5,35
Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	1,23	1,34	1,39	1,44	1,35

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Sementara itu, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari kategori informasi dan komunikasi tetap menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 1,23 persen dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 1,44 persen pada 2023. Namun, pada tahun 2024 kontribusinya sedikit menurun menjadi 1,35 persen. Meskipun kontribusinya terhadap total PDRB belum dominan, sektor ini memiliki peran strategis sebagai penunjang bagi pertumbuhan sektor lain, seperti perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya strategi penguatan digitalisasi daerah yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan daya saing jangka panjang melalui investasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia digital.

Gambar II.36
Pilar Adopsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022-2024



Sumber: BRIN, 2025

Berkaitan dengan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, data capaian Pilar 3: Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada IDSD Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, nilai pilar ini berada pada angka 2,40 dan meningkat menjadi 3,55 pada 2023. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana capaian Adopsi TIK mencapai angka 3,94. Peningkatan ini menggambarkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung konektivitas, komunikasi, serta akses informasi yang lebih luas dan merata.

Pada tahun 2024, pencapaian Adopsi TIK diperkuat oleh beberapa indikator utama. Pengguna telepon seluler mencatat skor tertinggi dengan nilai 4,95, menunjukkan tingginya penetrasi perangkat komunikasi dasar di masyarakat. Indikator pengguna internet mencapai skor 3,86, menandakan semakin meningkatnya akses dan penggunaan internet untuk aktivitas sehari-hari. Namun, nilai jangkauan jaringan 4G masih relatif lebih rendah di angka 2,99, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan infrastruktur

jaringan di wilayah tertentu. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunung Mas terus berupaya memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Transformasi digital di Kabupaten Gunung Mas juga dapat dilihat dari infrastruktur pendukung melalui pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang berfungsi sebagai penguat sinyal dan jaringan komunikasi. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 72 BTS telah beroperasi di wilayah ini. Keberadaan infrastruktur tersebut menjadi indikator penting dalam memperluas jangkauan akses telekomunikasi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, serta mendorong konektivitas digital yang lebih merata. Kehadiran BTS turut mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik, pendidikan daring, dan aktivitas ekonomi digital, sehingga memperkuat posisi Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif.

Namun demikian, kemajuan tersebut masih menghadapi tantangan, di antaranya adalah keberadaan 17 titik blankspot pada tahun 2023 yang mencerminkan masih adanya kesenjangan infrastruktur digital, terutama di daerah pedalaman, tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Kondisi ini menegaskan perlunya percepatan pemerataan pembangunan TIK agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari transformasi digital. Secara keseluruhan, capaian 72 BTS yang telah dibangun dan masih adanya 17 titik blankspot menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, upaya percepatan dan pemerataan infrastruktur digital tetap menjadi agenda strategis yang harus diprioritaskan untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Gunung Mas.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui net ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi pendorong utama dalam struktur ekonomi daerah dengan andil yang cukup besar, yaitu mencapai 45,49 persen pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 50,13 persen. Sementara itu, net ekspor barang dan jasa masih menunjukkan kontribusi negatif terhadap PDRB, meskipun membaik dari -21,02 persen di tahun 2020 menjadi -7,64 persen pada tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan, PMTB sempat mengalami kontraksi pada masa pandemi di tahun 2020 sebesar -1,82 persen, namun bangkit signifikan hingga tumbuh mencapai 10,04 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pulihnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan investasi setelah terdampak pandemi, meskipun perbaikan pada sektor ekspor masih berlangsung secara bertahap.



Tabel II.28
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,82	3,96	2,19	4,16	10,04
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,13	48,44	44,98	46,15	45,49
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-21,02	-14,03	-8,01	-8,10	-7,64

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

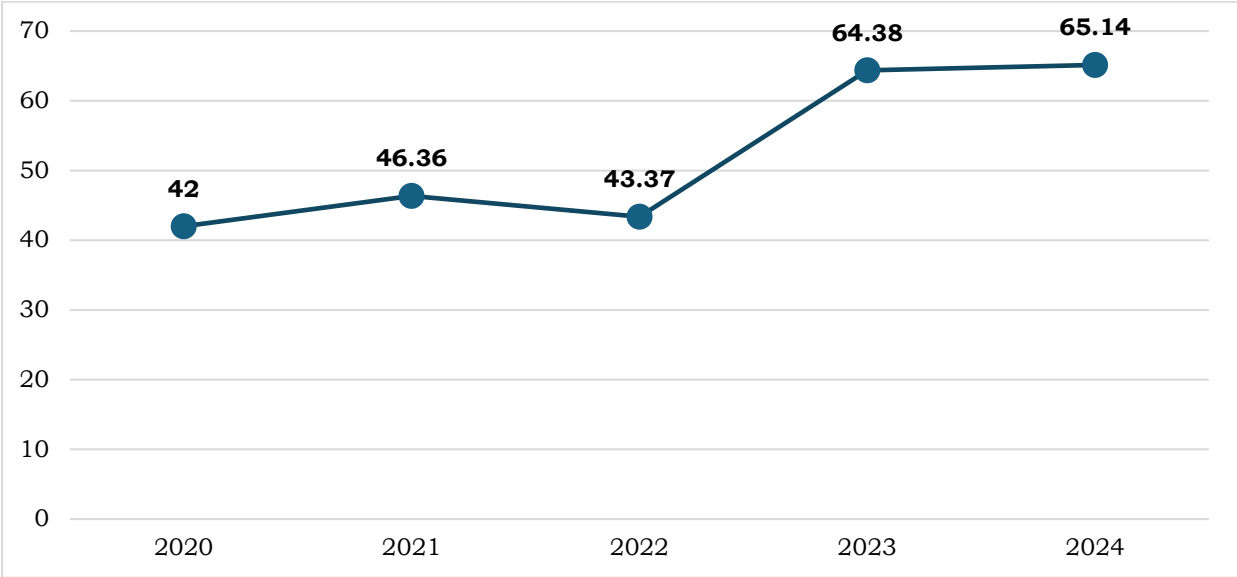
Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

Salah satu indikator untuk melihat pembangunan perkotaan maupun perdesaan adalah indeks kualitas infrastruktur. Indikator ini akan melihat sejauh mana ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Di Kabupaten Gunung Mas, pencapaian indeks kualitas infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks kualitas infrastruktur berada pada angka 42, kemudian meningkat menjadi 46,36 di tahun 2021. Namun, sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,37 sebelum akhirnya melonjak tajam di tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 64,38 dan 65,14.

Peningkatan tajam yang terjadi sejak tahun 2023 mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mulai menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata, baik di kawasan terpadu perkotaan maupun wilayah pedesaan yang sebelumnya terisolasi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan akses layanan dasar yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terus membaik ini diharapkan menjadi pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing wilayah, serta menciptakan ruang hidup yang lebih layak dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.



Gambar II.37
Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, 2025

Pada tahun 2023, panjang jalan dengan permukaan teraspal di Kabupaten Gunung Mas tercatat sepanjang 274,863 km. Jika ditinjau dari kondisi jalan, terdapat 237,506 km jalan dalam kondisi baik, 9,691 km dalam kondisi sedang, 94,3 km dalam kondisi rusak, dan 2,483 km dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan panjang jalan dengan permukaan aspal yang juga diiringi dengan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, yakni mencapai 283,339 km. Sementara itu, jalan dalam kondisi rusak tercatat tetap sebesar 2,483 km, namun terjadi lonjakan signifikan pada panjang jalan dengan kondisi rusak berat yang mencapai 480,474 km. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian infrastruktur jalan dalam kondisi baik meningkat, masih terdapat tantangan besar terkait perawatan dan peningkatan kualitas jalan yang rusak berat.

Tabel II.29
Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

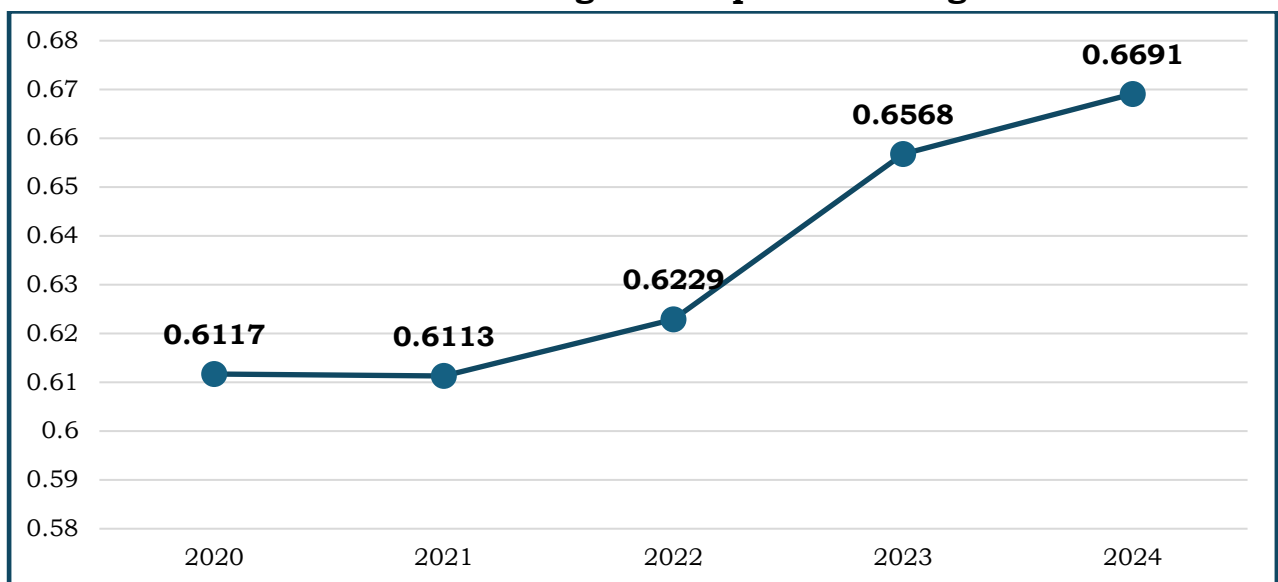
Keadaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	226,752	231,16	259,928	274,863	283,339
Kerikil	101,578	366,03	135,092	126,293	119,078
Tanah	408,712	2,970	339,477	332,711	331,560
Tidak Dirinci	-	-	4,495	4,495	5,015
Jumlah	738,992	738,99	738,99	738,99	738,99
Kondisi Jalan					
Baik	187,157	184,9	218,759	237,506	245,726
Sedang	82,787	113,06	11,029	9,691	10,309
Rusak	260,553	286,44	2,283	2,483	2,483
Rusak Berat	208,495	154,59	506,921	489,282	480,474
Jumlah	738,992	738,99	738,992	738,992	738,992

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka, 2020-2025

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menilai tingkat kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama: ketahanan

sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. IDM digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan desa serta identifikasi status desa mulai dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2025), capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IDM tercatat sebesar 0,6117 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,6113 pada 2021. Namun, tren berbalik naik pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian 0,6229 pada 2022, meningkat signifikan menjadi 0,6568 pada 2023, dan mencapai 0,6691 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, serta menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambar II.38
Indeks Desa Membangun Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

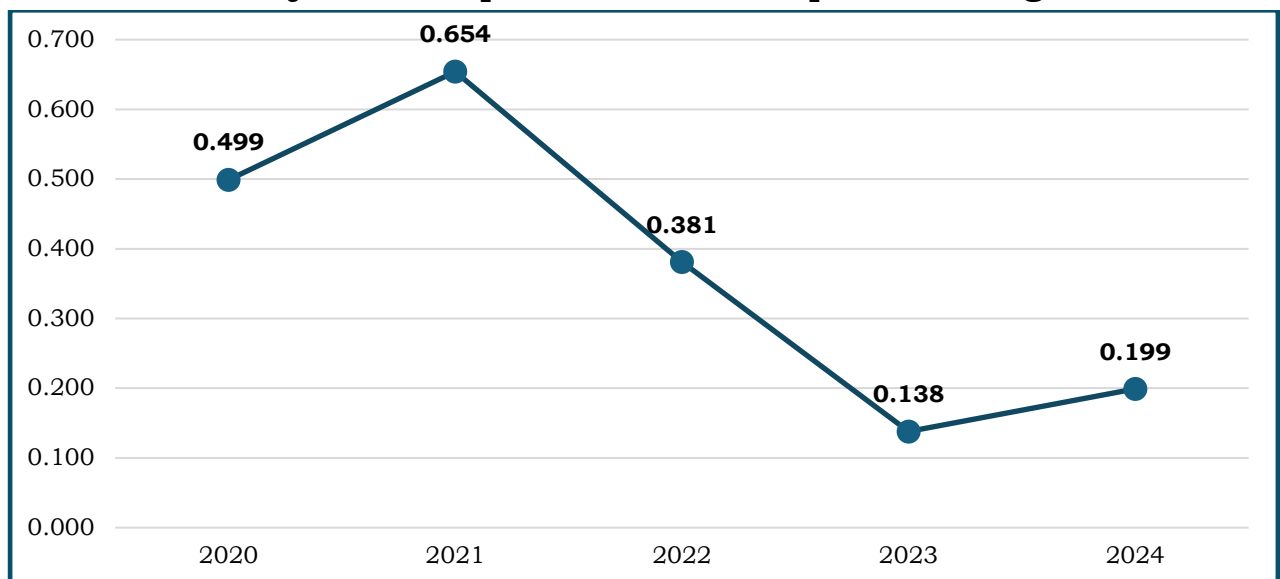
Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal serta menjaga kestabilan moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan yang pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Stabilitas ini menjadi fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil yang ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang dikelola secara efektif, pemerintah memiliki ruang kebijakan yang lebih luas untuk menyusun dan menjalankan program pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Kondisi ini juga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif di daerah.

Dalam kerangka tersebut, Rasio Pajak terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Gunung Mas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang berubah-ubah dari tahun ke tahun.

Peningkatan rasio pada tahun 2021 terjadi karena penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, meskipun PDRB terus meningkat, pertumbuhan pajak berjalan lebih lambat sehingga menyebabkan penurunan rasio. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, disebabkan oleh menurunnya penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap berlangsung. Pada tahun 2024, rasio kembali menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB.

Perubahan rasio tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak agar sejalan dengan perkembangan ekonomi. Rasio yang masih relatif rendah mengindikasikan bahwa kontribusi sektor perpajakan terhadap aktivitas ekonomi daerah belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan fiskal secara berkelanjutan.

Gambar II.39
Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunung Mas



Sumber: BKAD dan BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencerminkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, serta didasarkan pada pertukaran informasi yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu sebesar 51,66 pada



tahun 2022 dan naik menjadi 54,77 pada tahun 2023 dengan kategori CC. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukkan tren positif, dari 81,66 pada tahun 2023 menjadi 83,93 pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat penurunan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 62,14 pada tahun 2023 menjadi 61,63 pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,96 dan meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 2,74 dengan kategori baik yang mengindikasikan meningkatnya pemanfaatan dan pelayanan berbasis teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan Gunung Mas.

Tabel II.30
Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi	60	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	NA
Nilai SAKIP	B	B	B	B (62,14)	B (61,63)
Indeks SPBE	NA	NA	1,96	2,31	2,74
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,53	84,25 (baik)	81,06 (Baik)	81,66 (baik)	83,93 (sangat Baik)
Indeks Integritas Nasional	NA	74,5	71,34	NA	NA
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Setda dan Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gunung Mas selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang kurang optimal. Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan daerah (perda) tercatat tertinggi pada tahun 2020 sebesar 50 persen, namun menurun drastis menjadi 4 persen pada 2021 dan meningkat kembali menjadi 16,66 persen di tahun 2022. Tidak tersedianya data pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya kelemahan dalam pencatatan atau pelaporan, yang berpotensi menghambat proses evaluasi dan perbaikan kebijakan. Penurunan angka pelanggaran ini bisa jadi mencerminkan peningkatan kepatuhan masyarakat, namun juga perlu dianalisis lebih dalam terkait efektivitas pengawasan dan penegakan perda di lapangan.

Pada sisi lain, penyelesaian tindak pidana menunjukkan tren capaian yang cukup baik. Pada tahun 2020, persentase penyelesaian mencapai 91,2 persen, namun turun menjadi 43,03 persen pada 2021. Angka ini kemudian melonjak drastis pada 2022 hingga mencapai 107,89 persen, yang berarti terdapat penyelesaian terhadap kasus-kasus sebelumnya. Tahun 2023 dan 2024



mencatat penyelesaian masing-masing sebesar 84,76 persen dan 72,41 persen. Capaian ini menunjukkan respons yang cukup efektif dari aparat penegak hukum, meskipun terdapat penurunan pada dua tahun terakhir. Untuk menjaga kinerja ini, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar lembaga, perbaikan sistem pelaporan, serta penguatan kelembagaan hukum agar penyelesaian tindak pidana dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel II.31
Kondisi Kemanan dan Ketertiban di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	50,00	4,00	16,66		
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	91,2	43,03	107,89	84,76	72,41

Sumber: BPS dan Satpol PP Kabupaten Gunung Mas, 2021-2024

2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 2,55 pada tahun 2022 menjadi 3,27 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan daerah, khususnya pada pilar institusi yang menjadi pilar dengan capaian tertinggi selama dua tahun terakhir, yaitu sebesar 4,07 pada tahun 2023 dan naik menjadi 4,34 pada tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2022, pilar dengan capaian tertinggi adalah dinamisme bisnis dengan nilai 5, yang menunjukkan kekuatan sektor usaha dan iklim bisnis yang kondusif saat itu. Namun demikian, pilar sistem kapabilitas inovasi konsisten menjadi yang terendah sepanjang tahun 2022 hingga tahun2024 dengan nilai berturut-turut sebesar 0,54; 0,67; dan 0,64. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola dan sektor bisnis mengalami kemajuan, kapasitas daerah dalam menghasilkan dan mengelola inovasi masih perlu mendapatkan perhatian serius agar daya saing daerah dapat meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel II.32
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar Penyusunnya
Tahun 2022-2024

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	4,21	4,07	4,34
Pilar Infrastruktur	2,35	1,41	2,29



Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Adopsi TIK	2,4	3,55	3,94
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,79	3,51	3,67
Pilar Kesehatan	3,85	3,89	3,83
Pilar Keterampilan	3,07	3,37	4,1
Pilar Pasar Produk	2,37	2,45	3,28
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,4	2,95	2,9
Pilar Sistem Keuangan	1,37	0,42	2,78
Pilar Ukuran Pasar	0,25	3,7	3,72
Pilar Dinamisme Bisnis	5	1,52	3,71
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,54	0,67	0,64
Indeks Daya Saing Daerah	2,55	2,63	3,27

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan melaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.33
Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
1. Pendidikan					
Angka Melek Huruf (%)	100	99,4	99,82%	99,84	99,84
Angka Partisipasi Kasar					
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	90	57,78	100	31,03	33,74
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	116	112,21	112,24 / 112	109,65	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	101	89,23	81,74 / 82,24	94,71	100
Angka Partisipasi Murni					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	100	99,12	99,98 / 97,86	99,79	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	84,78	79,12	80,20 / 81,28	81,5	100
Perbandingan Siswa dan Guru SD/MTs	1:12	1:11,1	1:10	1:10	1:10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	108	99,73	102	98,49	98,26
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	1:130	1:130	1:20	1:115	1:74
SMP/MTs					
Perbandingan siswa dan guru SMP/MTs	1:11	1:11,04	1:10	1:11	1:11



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah (%)	102	95,23	102	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	1:130	1:125	1:130	1:120	
Pendidikan Menengah					
Rasio siswa terhadap guru	1:20	1:11	1:20	1:20	1,20
Angka Partisipasi Sekolah (%)	55	61,92	65	62,13	60,61
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	50	55	60	60	
Fasilitas Pendidikan					
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	27,5	22	32		
Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	35	40	45		
Angka Harapan Lama Sekolah	12,41	11,90	11,91	12,05	
Rata-rata Lama Sekolah	9,26	9,18	9,24	9,25	9,37
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83	87	1278 Guru		1871
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94	95	595 Guru		790
Angka Kelulusan					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
2. Kesehatan					
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72,99	73,04	73,09	73,31	73,58
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	117	183	135	175	110
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	7	11	5	5,3	4,9
Angka Stunting (%)	22,87	20,6	18,34	16,37	10,39
Angka Gizi Buruk (%)	1	1.03	0,074	2	2
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
Persentase anggaran Kesehatan terhadap APBD (%)	11,16	13,38	10	10	10
Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100	100	100	100	100
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)	100	100	50	50	100
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada FKTP (%)	61,69	62,15	62,9	41,55	65
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada Pada RS Milik Pemerintah Daerah (%)	66,18	45,06	65	59,25	66,19



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	77,23	65,52	89,18	100	100
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksinasi Esensial (%)	94,12	90	94	95	95
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	9	11	9	10	9,8
Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)	28	35	38	20	28,0
Rasio Dokter Gigi (per 100.000 penduduk)	2	1	1	1	1
Rasio Perawat (per 100.000 penduduk)	332	332	455	294	343,7
Rasio Bidan (per 100.000 penduduk)	185	191	259	222	205,8
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat (per 100.000 penduduk)	7	13	16	7	14,7
Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan (per 100.000 penduduk)	10	9	12	8	9,8
Rasio Nutrisonis (per 100.000 penduduk)	19	26	28	24	25,2
Rasio Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (per 100.000 penduduk)	20	30	41	18	23,8
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium medik (per 100.000 penduduk)	21	25	35	18	29,4
Persentase Sarana air minum yang memenuhi syarat (%)	38,10	97,5	36,6	46,15	2,2
Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak (%)	89,36	88,76	92,64	90,3	94,0
Persentase desa yang melaksanakan STBM (%)	100	100	100	100	100
Persentase desa /kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	47,24	47,24	48,03	50,39	50,4
Jumlah Rumah Tangga yang ber - PHBSS (rumah tangga)	4495	2393	14133	5204	
Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	84,06	92,84	94,81	99,79	100
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin (%)	30	31,06	57,1	70	80,10
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	91,93	100,28	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Balita (%)	74,21	82,96	86,84	89,16	99,79
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	77,66	56,2	87,93	98,22	98,49
Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	30,49	50,6	86,64	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	78,59	50,57	95,78	93,75	93,94



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (%)	46,06	76,39	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (%)	238,89	102,86	100	100	100
Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (%)	125,56	119,77	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang terduga TB (%)	78,53	55	52,16	86,06	91,49
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	52,55	63	75,67	98,76	91,12
Angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk)	34	9	11,76	195	102
Angka kesakitan API (<i>Annual Parasite Incidence</i>) Malaria (per 1.000 penduduk)	0,19	0,14	0,059	0,08	0,017
Jumlah kasus kronis filariasis (kasus)	0	0	0	0	0
Persentase kejadian Luar Biasa (KLB)	0	100	0,19	0	0
Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	86,61	55,9	77,2	62,2	61,2
Persentase penerapan KTR (%)	59	70,58	65	0	99
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (unit)	2 RS dan 17 PUSKESMAS	2 RS dan 17 PUSKESMAS	1 RS & 17 Puskesmas)	2 RS dan 17 PUSKESMAS	2 RS dan 17 PUSKESMAS
Cakupan kunjungan rawat jalan (%)	15,35	25,3	9,51	12,99	45,7
Cakupan kunjungan rawat inap (%)	1,79	1,6	2,85	1,3	3,4
Jumlah RSUD kabupaten yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib) (unit)	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Angka Kematian umum/ <i>Gross Death Rate (GDR)</i> di RS (per 1.000 pasien keluar)	18,23	35,47	25,63	21,66	22,96
Angka Kematian Murni/ <i>Nett Death Rate (NDR)</i> di RS (per 1.000 pasien keluar)	3,4	19,61	9	7,09	7,82
Tingkat Keterisian Tempat Tidur/ <i>Bed Occupation Rate (BOR)</i> di RS (%)	15,72	35,47	25,60	25,84	36,12
Angka Penggunaan Tempat Tidur/ <i>Bed Turn Over (BTO)</i> (kali)	26,55	35	29	26	38,48
Tenggang Perputaran Tempat Tidur/ <i>Turn Of Interval (TOI)</i> di RS (hari)	11,59	7	9	10,41	6,08



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata - rata lama pasien dirawat / <i>Avarage Length of Stay (ALOS)</i> di RS (hari)	3,17	3	2	2,63	2,44
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20	20	20	20	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7,492	7,506	7,520	7,530	7,530
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	37,75	39,18	30,24	33,63	34,65
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	78	75,33	87,23	72,02	73,2
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	55,6	61,47%	57,12	57,97	58,65
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	23,37	0%	0,43	3,33	2,90
Persentase penanganan sampah (%)	20	8%	72,7	16,66	64.50
Rasio Rumah Layak Huni	33,65	40,50	74,97	91,79	92,04
Pemukiman Layak Huni (Ha)	7.100	7524	7524	7524	7.500
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737.935	689	689,492	689,492	689,492
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	27	25,32	30,24	33,63	34,65
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	6	7	8,5/40,63 %	26,38	9,21
Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 desa	3 Desa	3 Desa	3	3
Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 desa	3 Desa	6 Desa	3	3
Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik (%)	20	25%	78,91	83	84,20
Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	55	60	65	70	75
Rasio elektrifikasi	77,19	76,97%	76,1	88,43	95,55
4. Perumahan dan Pemukiman					
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	14.844	18.000	18.076	19.100	20.460
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Layak (%)	39	82,2	57,12	57,97	58,65
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Aman (%)	1,8	2	2	2	2
Rumah Layak Huni (unit)	26.241	61	74,97/22.233	27.220	27.296
Persentase Desa yang memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak Huni (%)	27,50	32,50	33,00	35,00	37,50
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan (%)	0,81	0,01	0,01	0,01	0,01



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,98	0,03	0,03	0,03	0,03
Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15	15	15	15	15
RT mempunyai akses air minum jaringan perpipaan (%)	19,65	19,83	34,77	35,07	36,21
RT mempunyai akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	55,08	67,54	65,23	58,61	58,61
5. Ketertiban dan Ketentraman Umum					
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (kegiatan)	2 kegiatan	2 KEGIATAN (98,34%)	1 KEGIATAN (50%)	2 kegiatan	1 kegiatan
Kegiatan Pembinaan politik daerah (kegiatan)	1 kegiatan	3 KEGIATAN (97,92%)	1 KEGIATAN (33,33%)	1 kegiatan	1 kegiatan
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	50	4,00%	16,66%		
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	91,2	43,03%	107,89%	84,76 %	72,41%
Jumlah tindak pidana	55	91	124	151	174
6. Sosial					
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58,13	78,81%	78,34	99,79	100
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	2,5	2,6%	4,5	100,00	81,42
B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar					
1. Ketenagakerjaan					
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	90	69,70%	69,53	71,60	68,72
Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,11	3,11/1,13	2,96	3,24	3,12
Jumlah lulusan S1/S2/S3 (orang)	1.402	1.412	1.084	864	2.496
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,92	98,93	76,17	98,92	98,93
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	89,33	88,2	89,15	89,29	
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,34	92,09	92,18	92,61	
iBangga	na	51	data belum publish	59,76	62
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (%)	na	39	2,58	68,42	100,00
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	na	60	59,78	59,78	



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Kabupaten Layak Anak (skor)	na	283,30	214,55		
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	na	100	100	100	100
Rasio KDRT (%)	na	0,015	0,005	0,007	0,006
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	100	100
3. Ketahanan Pangan					
Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)	1	1	0	1	0
4. Pertanahan					
Persentase pembebasan tanah yang diselesaikan tepat waktu	65	0	33,33	100	85
Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Tahun (sertifikat)	29	61	38	35	14
Jumlah sertifikat yang diterbitkan tahun bagi masyarakat miskin tepat waktu (sertifikat)	28	0	0	0	5250
Jumlah desa lokasi Prona (desa)	20	27	11	14	16
5. Lingkungan Hidup					
Jumlah duta lingkungan (orang)	2	0	0	0	-
Jumlah adiwiyata (sekolah)	11	0	9	9	0
Pencemaran status mutu air (%)	32,5	43,33	46,67	50	Indeks kualitas air (ika) 42.86
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	85	240	22	100	100
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	Tidak ada Kasus Lingkungan (100)	100	Tidak ada Kasus Lingkungan (100)
Persentase perusahaan/wajib usaha yang menerapkan aturan penanganan limbah (%)	80	47,39	14	95	14
Persentase Standar Baku Mutu Udara (%)	85	89,45	87,85	89,64	92.82
Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)	65	50	46,67	50	42,86
Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)	93,25	87,53%	87,85%	89,64	92,82
Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	66,5	71%	71,25%	70,66	71,31
6. Kependudukan dan Catatan Sipil					
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
				si SIAK)	
Persentase keluarga yang memiliki akta perkawinan (%)	26,39	8,60%	45,24%	25,58	27,79%
persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	65,43	61%	99,71%	98,84	98,30%
Persentase jumlah penduduk yang memilki KTP Elektronik (e-KTP) (%)	78,56	96%	90,65%	94,27	96,40%
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	114	114	114	114	114
Jumlah musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	72	12	72	72	72
Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	1	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ Covid -19)	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ Covid -19)	1	0
Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang terlatih	373	0	373	373	373
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	5	0	5	7	8
8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
Total Fertility Rate (TFR) (%)		2,57	2,42	2,34	2,34
Modern Contarceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)		84	57,85	73,37	72,03
Unmeet Need (%)		8,57	17,13	6,50	5,25
Perserta pengguna MKJP (%)		16	8,8	29,60	23,20
Cakupan keluarga punya balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (PKB) (%)		50	15,8	30,78	114
Prevalensi Stunting (%)		20	18,34	16,37	12,90
Cakupan Remaja dalam pusat Informasi dan Konseling (BKR dan PIK-R) (%)		30	30 (30/12*100=250)	3,91	30
kelompok BKL yang terbina		1	40	51	52
Cakupan Akseptor KB Anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) (%)		49	70	82	74
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)		2	2,58	1,93	2,265
9. Perhubungan					
Jumlah Bandara (buah)	1	1	1	1	1
10. Komunikasi dan Informatika					



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	17	0	20	25	25
Cakupan layanan telekomunikasi (Km2)	4.508	55	5.000	9.744	9.900
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	75,57	83,69	78,41	82,38	81,76
Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	42,86	53,87	62,44	75,42	74,32
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	72,57	7%	9,88%	17,97	17,97
11. Koperasi dan UMKM					
Koperasi aktif (%)	65	90	88	89	89,24
Jumlah UMKM (unit)	2.985	3.059	3.227	3.663	5.237
Jumlah Industri (industri)	325	325	371	439	417
Jumlah pasar Desa/Kecamatan (desa/kelurahan)	4	4	4	3	3
Persentase koperasi yang modal dan SHU Meningkat (%)	36	8	8,08	6,18	6,02
Persentase UMKM yang modal dan omzet meningkat (%)	67,5	67,5	70	73	73,2
12. Penanaman Modal					
Jumlah Investor PMDN dan PMA (investor)	55	60	62	62	62
Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu (%)	80	80	80	100	100
Lamanya hari proses perizinan (hari)	9	9	9	8	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	83	81,24	85	85,25	83,93
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan (%)	100	100	100	100	100
Nilai Investasi Daerah (Triliun Rp)	5,2	5,3	0,267	1,172	1,208
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	15	10%	25%	33,78	5,86
13. Kepemudaan dan Olahraga					
Jumlah klub olahraga (buah)	2	31	14	2	2
Jumlah gedung olahraga (Unit)	1	-	3	10	10
Jumlah organisasi pemuda (buah)	86	68	43	116	116
Jumlah organisasi olahraga (buah)	1	-	1	18	17
Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	-	-	-	-
Jumlah lapangan olahraga (buah)	211	-	148	291	291
Jumlah mendali (buah)	98	94	0	32	8
14. Statistik					



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	ada	Ada	Ada (BPS)	Ada	Ada
Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	ada	Ada	Ada (BPS)	Ada	Ada
Tersedianya Sistem data dan Statistik yang terintegrasi	ada	Ada	Ada (SIDAT)	Ada (sidat)	Ada (sidat)
15. Persandian					
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)			12,11	77	60,83
16. Kebudayaan					
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	3	1	3	5	5
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (buah)	1	1	1	1	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan (buah)	25	25	25	25	25
Jumlah Grup Kesenian (buah)	26	28	33	26	26
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1	1	1
Jumlah penghargaan kebudayaan (buah)	3	0	0	4	4
17. Perpustakaan					
Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	1	1
Jumlah Perpustakaan umum	40	40	1	1	1
Jumlah perpustakaan sekolah :					
-SD/MI	166		77	104	104
-SMP/MTs	56		38	52	52
-SMA/MA	13		13	15	15
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	50	50	50	50	50
Jumlah perpustakaan rumah ibadah	1	0	--	0	0
Jumlah anggota	1.600	143	52	460	309
Jumah pengunjung	4.500	365	2.072	2.199	4
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	32.000	36.554	30.424	31.324	33.024
18. Kearsipan					
Pengelolaan arsip secara baku :					
a. Umum	110	120	120	130	130
b. Pemerintahan	110	120	110	125	125
c. Politik	75	85	75	95	95
d. Keamanan dan ketertiban	75	85	75	90	90
e. Kesejahteraan rakyat	65	75	95	90	90
f. Perekonomian	85	95	85	100	100
g. Pekerjaaaan umum	95	105	115	110	110
h. Pengawasan	105	115	100	120	120
i. Kepegawaian	105	105	115	120	120
j. Keuangan	120	135	130	140	140
C.Fokus Layanan Urusan Pilihan					



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pariwisata					
Kunjungan Wisata (Jiwa)	11.000	10.524	19.689	14.000	14.000
Jumlah objek wisata daerah (buah)	27	28	20	29	29
PDRB Sektor Pariwisata (%)	14,5%	1	6,48	18,5	18,5
PDRB Sektor Pariwisata (Milyar Rp)	30	1	1,17		
2. Pertanian					
Persentase PDRB Sektor Pertanian (%)	33,5	30,88	29,56	31,69	33,05
PDRB Sektor Pertanian (dalam Milyar Rp)	1.982,68	2 215,3	2.404,5	2.731,100	3.226,100
Produksi komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura:					
a. Padi (ton)	2.775	2.540	3.064	560,7	756,93
-Padi Sawah (Ton)	1.556	1.240	340	237,6	159,43
-Padi Ladang (Ton)	1.219	1.300	2.724	323,1	597,50
b. Jagung (Ton)	1.470	895	400	258	321,00
c. Ubi Kayu (ton)	156,00	2.090	177	137,5	194,81
Tanaman Hortikultura:					
a. Cabe Rawit (Ton)	16	207,4	42,0	23,4	5,89
b. Kacang Panjang (ton)	6	176	50	30,88	10,25
c. Durian (Ton)	255	355	395	223	220,00
d. Pisang (Ton)	6	450	20	26	30,00
e. Rambutan (Ton)	10	75	18	20	22,00
f. Nenas (Ton)	11	500	40	44	46,00
Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Pangan Dan Hortikultura					
a. Padi (Kwintal/Ha)	23	33	52	52	
-Padi Sawah (Kwintal/Ha)	25	31	32	32	35,00
-Padi Ladang (Kwintal/Ha)	21	2	20	20	20,00
b. Jagung (Kwintal/Ha)	30	32	35	40	40,00
c. Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	32	38	39	39	39,00
Tanaman Hortikultura:					
a. Cabe Rawit (Kwintal/Ha)	5	6,1	6,0	11,0	9,00
b. Kacang Panjang (Kwintal/Ha)	1	3	1	11	9,00
c. Durian (Kwintal/Ha)	44	48	68	11	12,00
d. Pisang (Kwintal/Ha)	29	30	125	6	7,00
e. Rambutan (Kwintal/Ha)	5	6	60	80	26,00
f. Nenas (Kwintal/Ha)	76	100	230	0,2	0,28
Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura					
a. Padi (Ha)	1.059	1.225	302	200,3	387,25
-Padi Sawah (Ha)	457	570	109	38,3	22,50
-Padi Ladang (Ha)	602	655	193	162	364,75
b. Jagung (Ha)	500	300	100	208,8	80,25
c. Ubi Kayu (Ha)	50	57	46	43	49,95
Tanaman Hortikultura:					
a. Cabe Rawit (Ha)	33	37	30	20,1	16,80
b. Kacang Panjang (Ha)	61	69	50	40,45	24,80
c. Durian (Ha)	59	74	95	165	5,27



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
d. Pisang (Ha)	2	15	11	375 (Rumpun)	0,33
e. Rambutan (Ha)	19	25	30	120 (Pohon)	1,02
f. Nenas (Ha)	2	5	6	52 (Rumpun)	0,34
Populasi Ternak					
Sapi (Ekor)	4.919	4.960	4.340	4.386	4.471
Kerbau (Ekor)	198	176	196	193	278
Kambing (Ekor)	530	539	551	554	554
Babi (Ekor)	39.463	14.807	15.205	15.375	18.651
Ayam Buras (Ekor)	86.894	86.186	87.429	88.561	88.784
Ayam Ras Pedaging (Ekor)	101.485	102.439	108.642	109.740	112.546
Ayam Ras Petelur (Ekor)	8.510	18.998	24.746	25.020	28.758
Itik (Ekor)	3.241	3.479	3.940	4.485	5.693
Produksi Ternak					
Sapi (Ton)	98	108	110	110,310	111,56
Kerbau (Ton)	5	5,3	6	6,995	5,69
Kambing (Ton)	1,1	1,1	1	1,300	1,25
Babi (Ton)	255	377,899	380	417,327	410,33
Ayam Buras (Ton)	49	50	55	55,693	58,74
Ayam Ras Pedaging (Ton)	426	459	461	462,410	488,78
Itik (Ton)	2	3	4	4,182	1,34
Produksi Telur					
Ayam Buras (Ton)	31	31	33,10	33,388	35,46
Ayam Petelur (Ton)	16,55	65,83	69,73	43,877	71,78
Pengembangan/ Perluasan Area Perkebunan					
Karet (Ha)	68,378	68,388	68,38	68	68,422
Kelapa Sawit (Ha)	72.760	72.780	72,78	75	72,961
Produksi Komoditi Perkebunan					
Karet (Ton)	20,263	20,276	20,28	20,32	20,330
Kelapa Sawit tbs (Ton)	100,334	102,127	107,87	108,93	102,614
Produktivitas Komoditi Perkebunan					
Karet (Ton/Ha)	0,30	0,30	0,48	0,32	0,33
Kelapa Sawit (Ton/Ha)	1,45	1,65	1,44	1,59	1,64
3. Kehutanan					
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	2750	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Pembangunan KPHP (Unit)	1	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
				provin si	
Pembangunan TAHURA	1	1	1	1	1
Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	1	0	urusan provinsi	urusa n provin si	urusan provinsi
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat/HTR (unit)	1	0	urusan provinsi	urusa n provin si	urusan provinsi
Luas kawasan tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya (Ha)	12	103,03	103,03	37,65	30 Ha
5. Perdagangan					
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8.95	9,59*	9,93**	10,20	9,98
6. Perindustrian					
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,50	8,24	8,20	8,52	8,28
Pertumbuhan Industri (%)	50	70	-0,02		8,95
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	300	140	12 KELOMP OK		50
7. Kelautan dan Perikanan					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (Ton)	5.200,6 3	1.022,70	1.320,98	1.255, 17	1.312,95
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	41,4	29,30	31,40	32,00	34,30
Peningkatan produksi benih ikan (ribek) ekor	165.757	87.539	173.240	141.51 7	105.800
Peningkatan produksi hasil pengolahan (Ton)	30,1	20,66	28,3	27	33,018
8.Transmigrasi					
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	93,22	75,7	75	75	75
9. Penanggulangan Bencana					
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	4	4	15	25	25
Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam) (Jam)	2	2	1,5	2	2
Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	100	100	100	100	100
10. Energi dan Sumber Daya Mineral					
Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	658.350 .000.00 0	381.200.0 00.000		746	
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	79,54	97,64	91,29	88,43	99,22



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Berlistrik (desa)	108	127	104	111	127
D. Urusan Penunjang					
1. Perencanaan Pembangunan					
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD (%)	100	98	100	100	100
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan turunannya (%)	100	100	100	100	100
2. Keuangan					
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
Indeks Persepsi Korupsi	NA	Data Belum Tersedia	34	2,9	
Survei Penilaian Integritas (%)		74,5	71,34	71,34	
3. Reformasi Birokrasi					
Nilai Reformasi Birokrasi	62,5	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	
Nilai SAKIP	--	---	61,78 (B = baik)	62,14	B (61,63)
Level Kapabilitas	Level 3	Level 2	Level 2 (2,43)	level 3	level 3
Level Maturitas	Level 3	Level 2	Level 3 (3,019)	level 3	level 3
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,45 (baik)	84,25 (baik)	81,06 (baik)	81,66 (baik)	83,93 (sangat Baik)
Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B	B	B

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber di lingkup pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan menjadi hak setiap warga negara untuk diperoleh secara minimal. SPM



ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan pendekatan yang berfokus pada: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif pada standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.34
Capaian Indikator SPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR SPM	REALISASI (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Pendidikan						
1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	10,45		100	100	99,06
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (APS)	68,30		100	100	99,41
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	59,72		100	96	99,48
Urusan Kesehatan						
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	60,64		94,81	99,79	98,98
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	25,03		57,1	70,09	80,38
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	67,82		100	100	98,28
4	Pelayanan kesehatan balita	61,48		86,84	89,16	98,69
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	9,90		87,93	98,22	95,76
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	19,78		86,64	100	98,42
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	72,91		95,78	93,75	92,19
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			100	100	96,78
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	235		100	100	97,33
10	Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	119,44		100	100	95,56
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	63,21		54,86	86,06	90,25
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	50,55		75,67	98,76	88,78
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						



1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	56,49		95	96,73	95
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	21,99		95	98,16	86,56
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	0		100	93,69	92,31
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten			100	98,98	92,31
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	84	6,67
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			100	97,35	95,00
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100	99,97	100
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100	96	100
Urusan Sosial						
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti				100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti				100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				100	98,46
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten				100	100

Sumber: RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang memainkan peran penting dalam menyediakan layanan dasar kepada penduduknya dan mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

Pemerintah daerah membuat rencana keuangan jangka menengah dan anggaran tahunan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Proses perencanaan dan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan dengan efisien dan efektif. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain keuangan daerah tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan hati-hati dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8% di tahun 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *the Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4%, jauh dari perkiraan awal (Januari tahun 2022) yang sebesar 4,4%. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari tahun 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1% pada tahun 2023 dan 2024. Sedangkan *World Bank* memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4% di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir.

Dari sisi domestik, inflasi yang diperkirakan relatif stabil, dampak dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 terhadap konsumsi masyarakat maupun

konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan tahun 2024. Perekonomian domestik diperkirakan masih tumbuh kuat pada tahun 2024 sebesar 5,2%.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai matriks keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya Provinsi dan Nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi pemerintahan daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.35
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan DOFD terjadi peningkatan dari 6,67% (2020) menjadi 7,89% (2021), kemudian dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024) relatif mengalami

tren negatif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah menurun cukup signifikan. Di tahun 2022 DOFD Kabupaten Gunung Mas mencapai 7,12% dan terus menurun hingga mencapai 3,06% di tahun 2023 lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 yaitu 4,07%. Dinamika fluktuasi peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang kurang signifikan. Walaupun dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas terus bergerak tetapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) masih berada di kategori ‘sangat kurang’. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber potensi keuangan daerahnya dan menekankan kebijakan belanja yang berorientasi peningkatan PAD. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.36
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	66.064.355.509	990.638.486.554	6,67
2	2021	85.105.385.510	1.078.818.220.819	7,89
3	2022	77.246.690.077	1.085.423.818.762	7,12
4	2023	35.992.250.833	1.176.119.496.935	3,06
5	2024	58.708.141.585	1.441.537.904.960	4,07
	Rata-Rata	64.623.364.703	1.154.507.585.606	5,60

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas akan dilihat dari kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

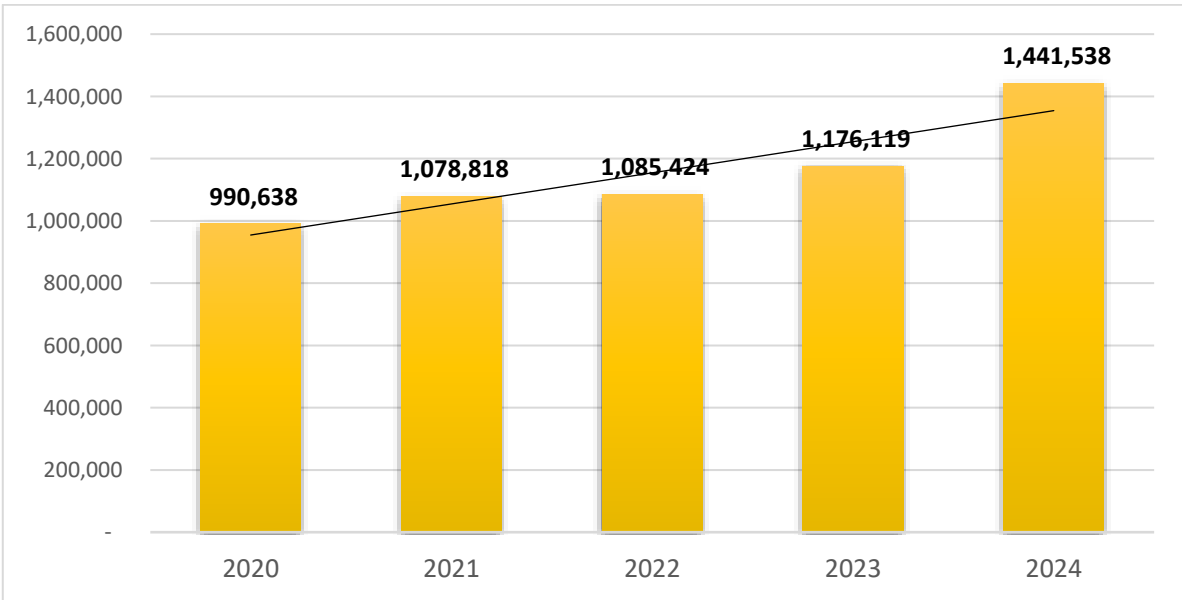
Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Gunung Mas terus mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,16% per tahun di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp990 miliar menjadi Rp1,441 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan transfer yang cukup signifikan.

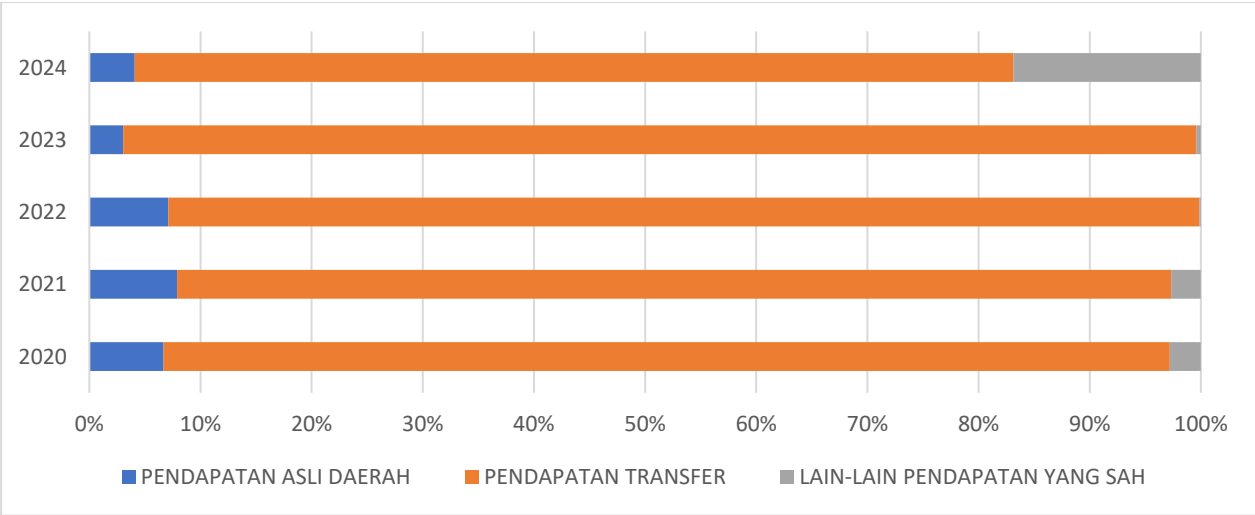
Gambar II.40
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024
(dalam jutaan)



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dimana pertumbuhannya secara berurutan sebesar 13,71% per tahun dan 16,90% per tahun. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kontraksi sampai -100% dari Rp16,132 miliar menjadi Rp0 yang disebabkan tidak adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan hibah di tahun 2023.

Gambar II.41
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pajak Barang dan Jasa Tertentu; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perkembangan pajak daerah mengalami tren negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,30% per tahun dari Rp31,303 miliar (2020) menjadi Rp19,377 miliar (2024). Peningkatan paling signifikan terjadi di tahun 2023 khususnya dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini juga menunjukkan adanya akselerasi penggalian pungutan pajak daerah yang berkualitas. Meskipun begitu dengan melihat nilainya yang relatif masih kecil, untuk lebih mengoptimalkan PAD dari Pajak Daerah ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak lainnya seperti pajak properti dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas. Retribusi daerah yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Pendapatan retribusi di Kabupaten Gunung Mas mengalami tren positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,65% per tahun dari Rp3,821 miliar (2020) menjadi Rp4,943 miliar (2024). Nilai retribusi ini terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya operasional pemungutan retribusi yang ada. Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

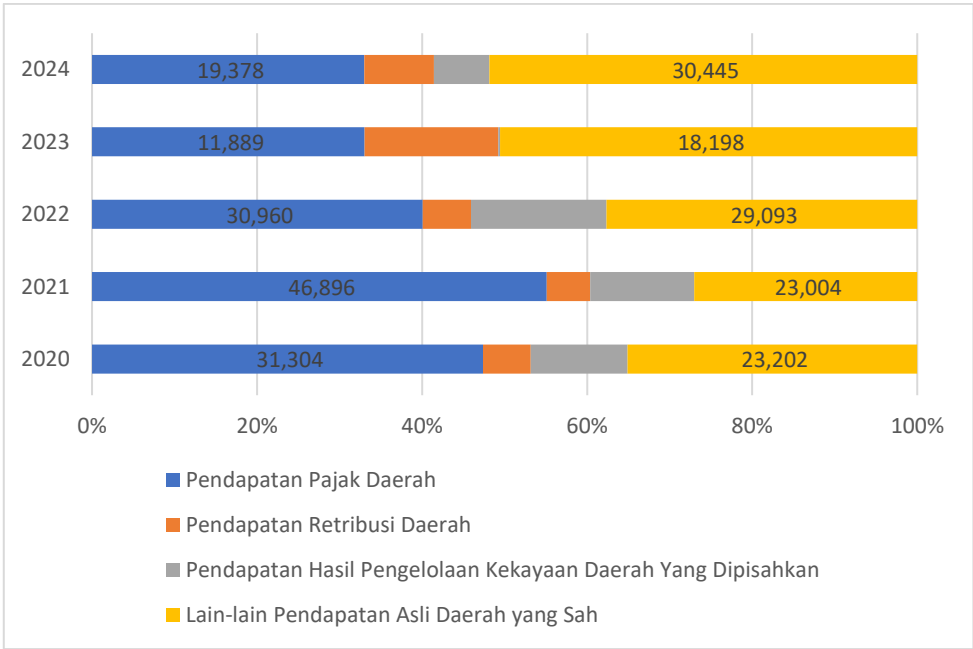
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -15,52% dari Rp7,738 miliar (2020) menjadi Rp3,942 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gunung Mas pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum. BUMD yang memberikan deviden. Untuk meningkatkannya maka kinerja BUMD perlu dikuatkan agar mampu menghasilkan laba yang meningkat secara signifikan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,03% dari Rp23,201 miliar (2020) menjadi Rp30,444 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di antaranya didorong oleh Jasa Giro, Pendapatan Bunga, dan Pendapatan BLUD. Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

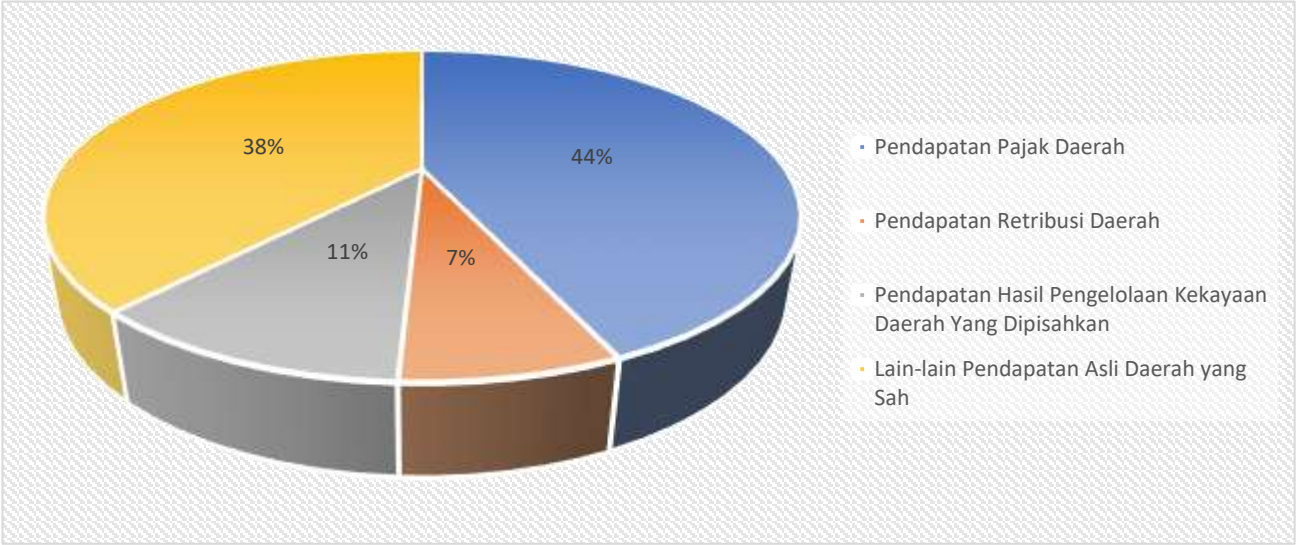
Gambar II.42
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa pendapatan pajak daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Gunung Mas. Secara rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 41% per tahun, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkontribusi rata-rata 40% per tahun, berikutnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi rata-rata 9,5% per tahun dan terakhir retribusi daerah kontribusinya sebesar 8,3% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan pajak daerah perlu lebih dikuatkan dengan penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari hasil retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Gambar II.43
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)

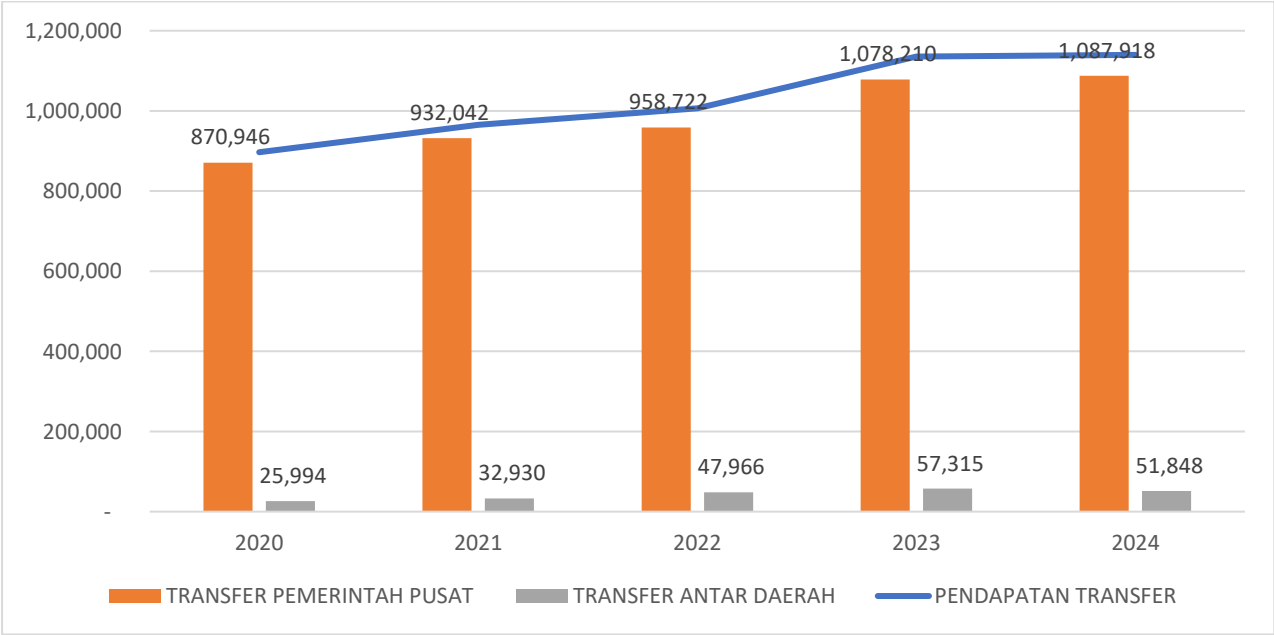


Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. transfer pemerintah pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar II.44
Komponen Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (%)

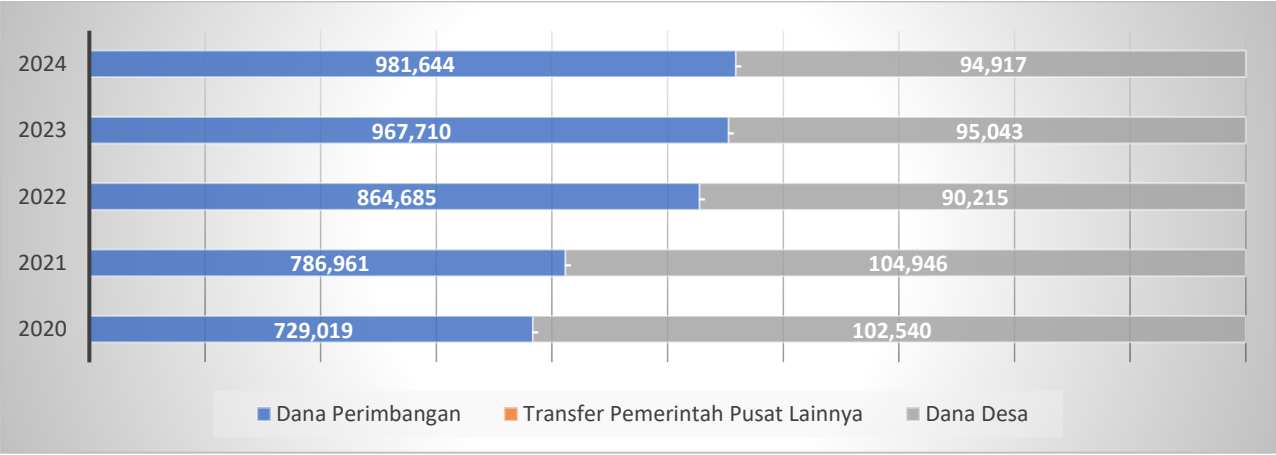


Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Gunung Mas mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,17% per tahun dari Rp896 miliar (2020) menjadi Rp1,139 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2024 karena relatif tingginya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari sumber Dana Perimbangan pada tahun tersebut

dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 96% Pendapatan transfer disumbang oleh transfer pemerintah pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan transfer pemerintah pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 92,5% adalah disumbang oleh dana perimbangan sisanya dari transfer pemerintah pusat lainnya dari pos dana penyesuaian dan dana desa.

Gambar II.45
Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)

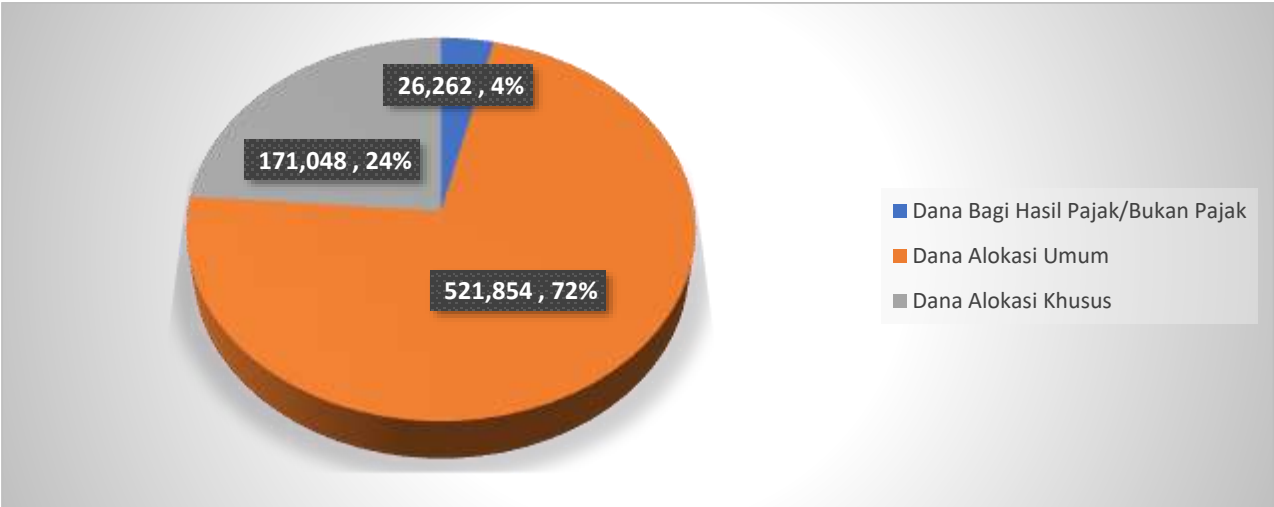


Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Perkembangan dana perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,72% dari Rp729 miliar di tahun 2020 menjadi Rp981 miliar di tahun 2024. Dari komponen pembentuk dana perimbangan itu sendiri tren Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) semua mengalami tren naik di mana secara berturut-turut tren kenaikannya sebesar 13,38% per tahun dari Rp15 miliar (2020) menjadi Rp25 miliar (2023), 1,17% per tahun dari Rp518 miliar (2020) menjadi Rp542 miliar (2024) dan 2,61% per tahun dari Rp145 miliar (2020) menjadi Rp160 miliar (2024). DAU masih menjadi kontributor terbesar pendapatan transfer pemerintah pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 60% kemudian DBH pajak/bukan pajak sebesar 34% dan sisanya DAK sebesar 6%.

Gambar II.46

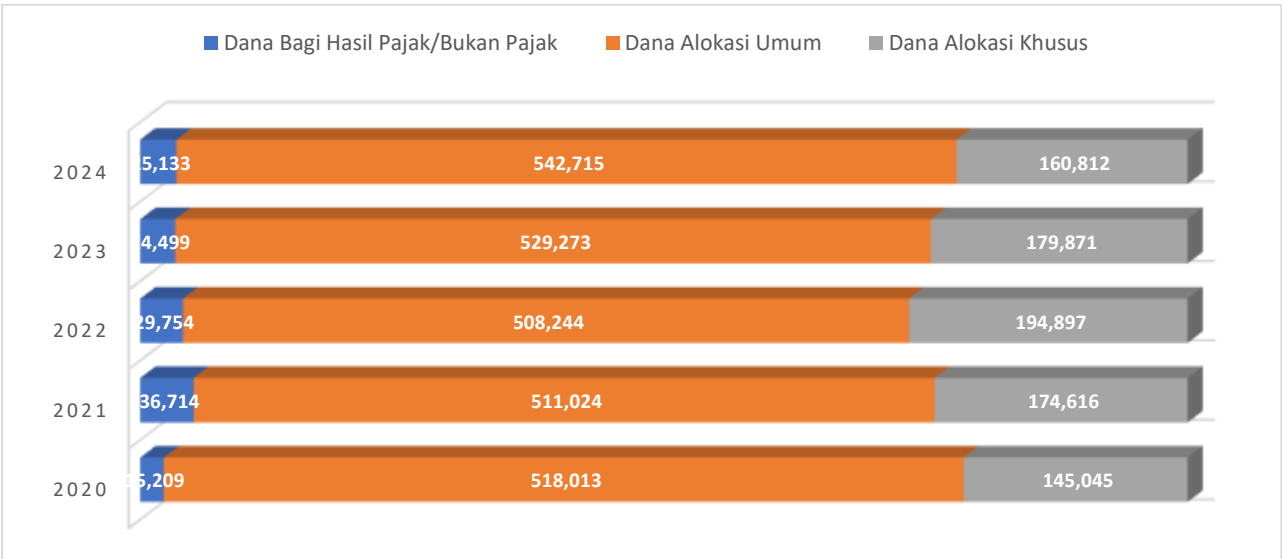
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Gambar II.47

Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



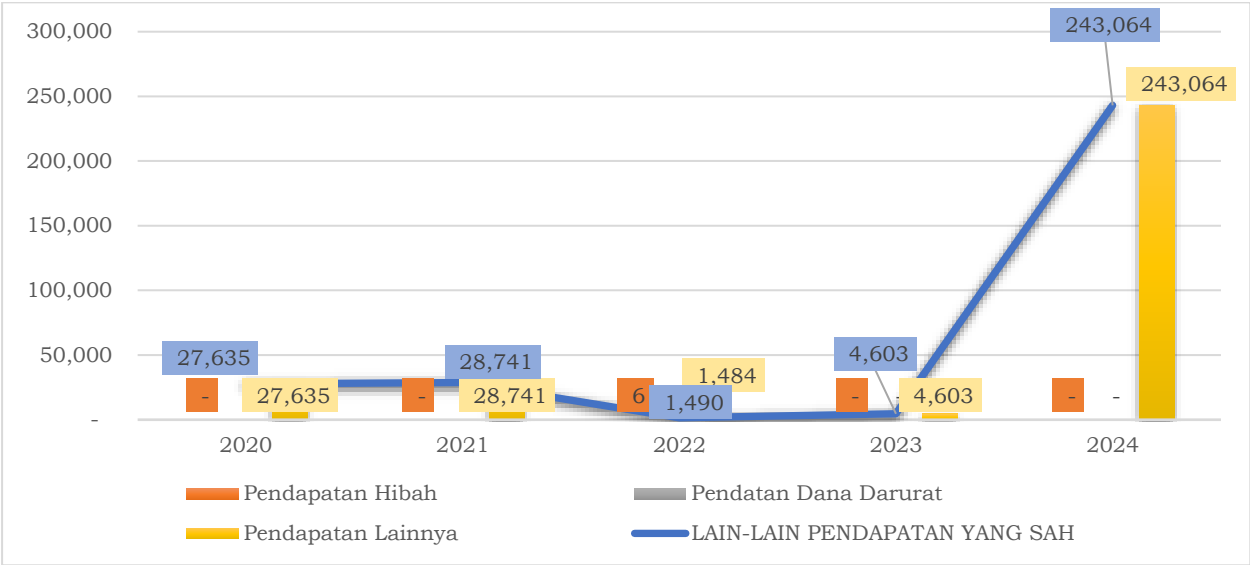
Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencatatkan nilai yang terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 72,21% dari Rp27,635 miliar (2020) menjadi Rp243,064 (2024). Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yang sebesar Rp16,132 miliar.

Gambar II.48
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan pendapat daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- a. Peningkatan efisiensi: pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Diversifikasi pendapatan: upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- c. Pembangunan infrastruktur: investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- d. Pengelolaan utang: manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
- e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- f. Pengembangan Sektor Ekonomi: mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
- g. Transparansi dan akuntabilitas: memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.



- h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.37

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	990.638	1.078.818	1.085.424	1.176.119	1.441.538	9,83
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.064	85.105	77.247	35.992	58.708	-2,91
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.304	46.896	30.960	11.889	19.378	-11,30
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.821	4.483	4.511	5.824	4.943	6,65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.738	10.723	12.684	81	3.942	-15,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.202	23.004	29.093	18.198	30.445	7,03
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	896.939	964.971	1.006.688	1.135.525	1.139.766	6,17
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	870.946	932.042	958.722	1.078.210	1.087.918	5,72
1.2.1.1	Dana Perimbangan	729.019	786.961	864.685	967.710	981.644	7,72
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	15.209	36.714	29.754	24.499	25.133	13,38
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	518.013	511.024	508.244	529.273	542.715	1,17
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	145.045	174.616	194.897	179.871	160.812	2,61
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	39.388	40.135	3.821	15.456	11.358	-26,72
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	102.540	104.946	90.215	95.043	94.917	-1,91
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	25.994	32.930	47.966	57.315	51.848	18,84
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	25.994	32.930	47.966	57.315	51.848	18,84
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.635	28.741	1.490	4.603	243.064	72,21
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	6	-	-	0,00
1.3.2	Pendatanan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	27.635	28.741	1.484	4.603	243.064	72,21

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

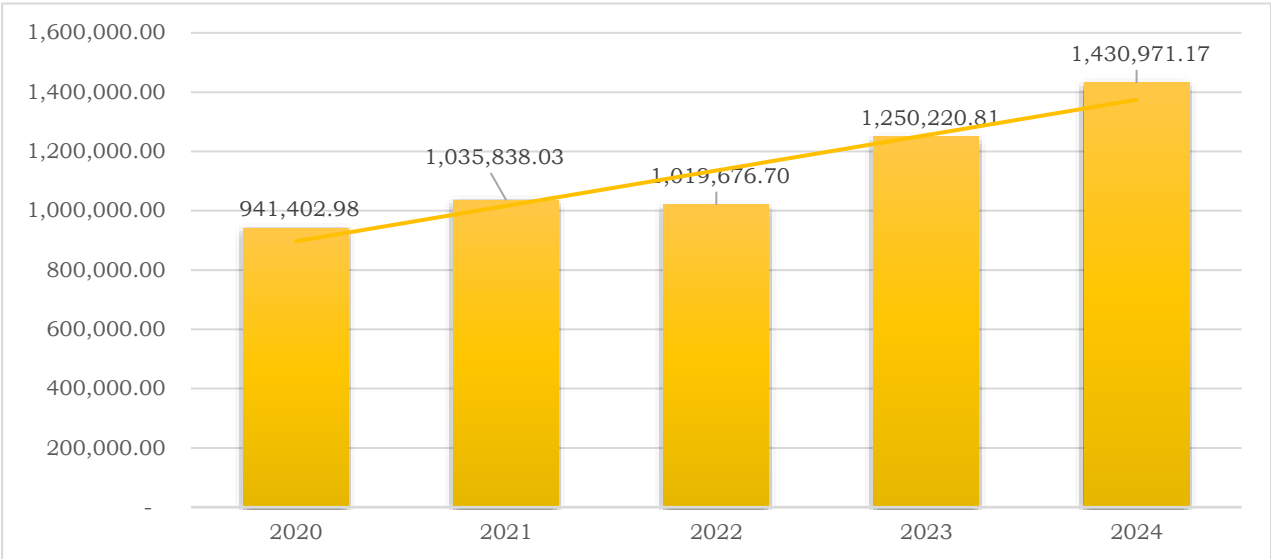
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja operasi
Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja modal
Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja tidak terduga
Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer
Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun trennya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,04% per tahun. Fluktuasi belanja daerah terjadi di tahun 2022 di mana realisasi Belanja Daerah di tahun 2021 mencapai Rp1.035 triliun namun menurun di tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.019 triliun dan kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp1.430 triliun di tahun 2024. Adapun peningkatan secara signifikan di tahun 2024 akibat peningkatan pendapatan daerah yang juga signifikan sehingga kemampuan belanjanya juga meningkat.

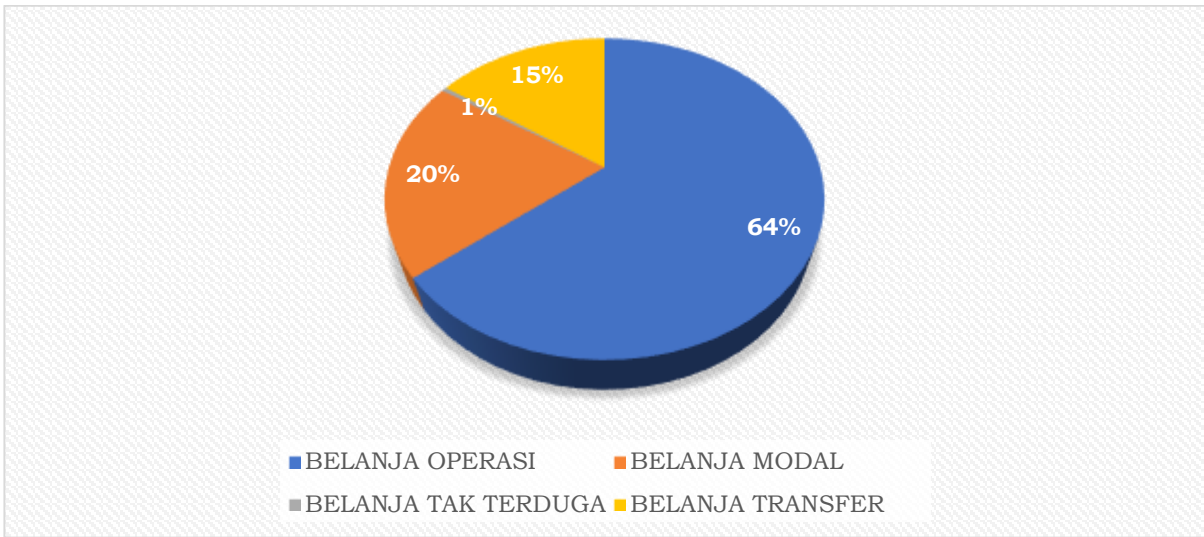
Gambar II.49
Perkembangan Belanja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, semua jenis belanja daerah mengalami tren naik dengan pertumbuhan rata-rata 63,94% per tahun (Belanja Operasi), 20,14% per tahun (Belanja Modal), 0,53% (Belanja Tak Terduga), dan 15,39% per tahun (Belanja Transfer). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 67% belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 18% digunakan untuk belanja modal, 14% digunakan untuk belanja transfer dan kurang dari 1% untuk belanja tak terduga. Melihat komposisi tersebut dengan tingginya ketergantungan fiskal daerah, maka kebijakan belanja daerahnya perlu bergeser ke arah yang mampu meningkatkan PAD. Belanja modal infrastruktur perlu ditingkatkan untuk menarik investasi dan memutar roda perekonomian dengan lebih cepat.

Gambar II.50
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

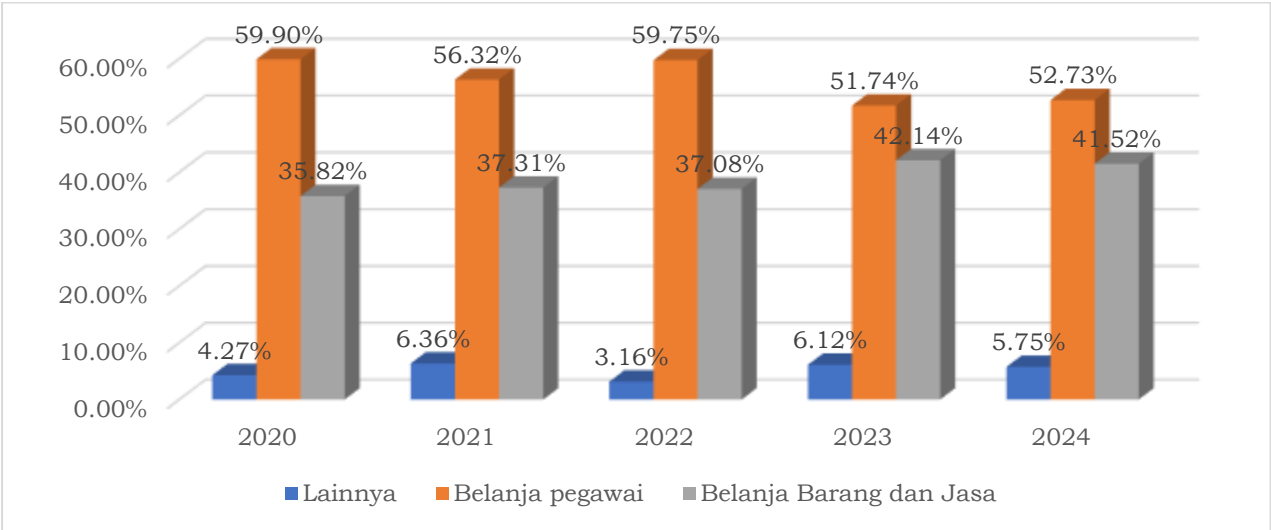


Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

- a. Belanja Operasi
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Gunung Mas telah tumbuh 13,35% per tahun dari Rp581 miliar (2020) menjadi Rp959 miliar (2024). Sebagian besar atau hampir separuh belanja operasi yang

ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar 52,73% dari total belanja operasi yang ada. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya secara rata-rata meningkat setiap tahun dari 35,82% (2020) menjadi 41,52% (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 7% dan tertinggi terjadi di tahun 2021 yang mencapai 6,36%.

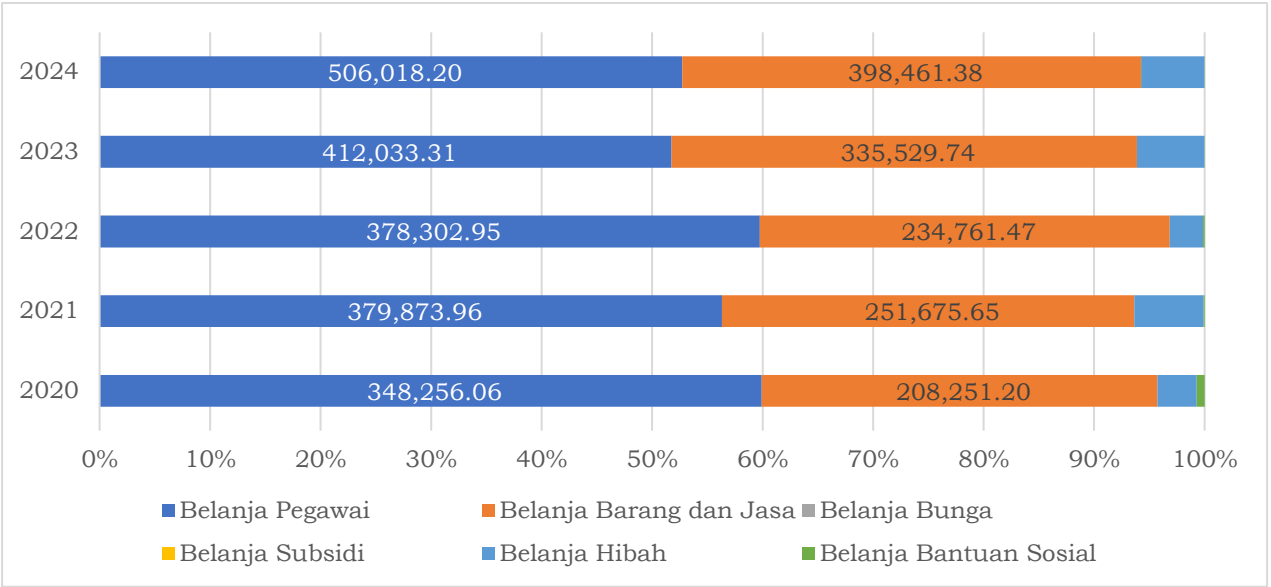
Gambar II.51
Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Secara proporsi belanja pegawai mengalami tren meningkat dan secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp348 miliar (2020) menjadi Rp506 miliar (2024). Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar II.52
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



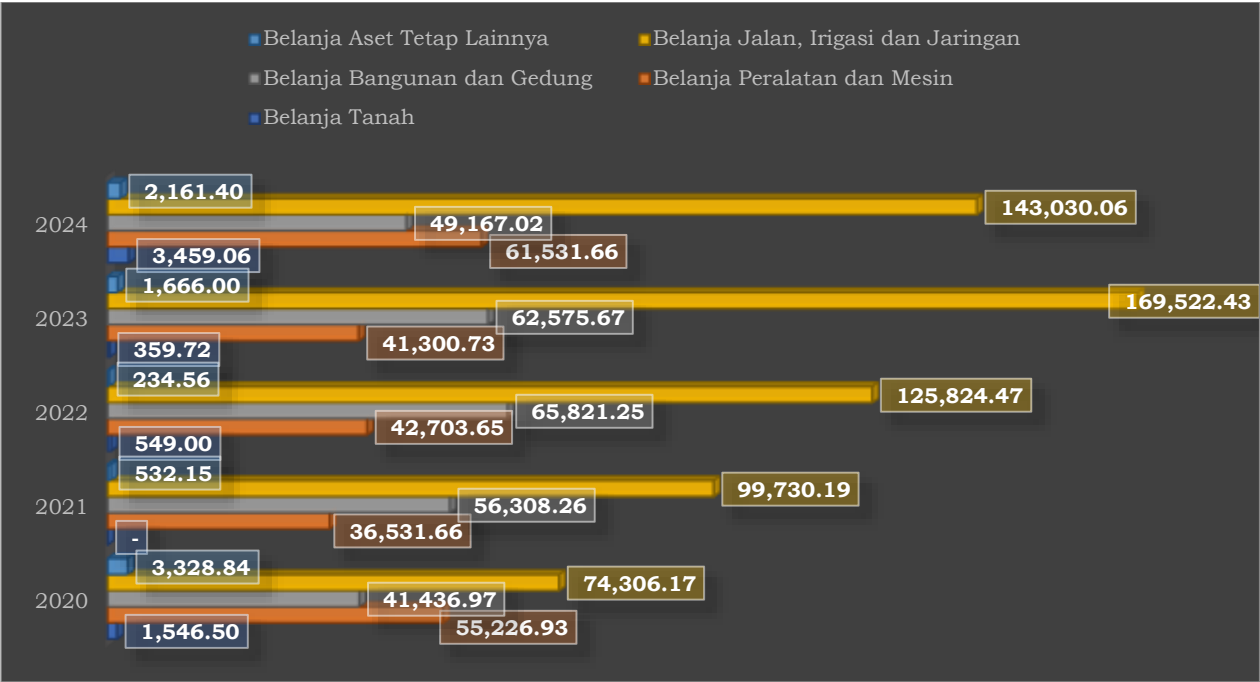
Sumber: BPKAD Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Gunung Mas mengalami tren naik cukup signifikan 10,28% per tahun dari Rp175 miliar (2020) menjadi Rp260 miliar (2024). Naiknya belanja modal tersebut disebabkan oleh naiknya hampir semua komponen belanja modal yaitu seperti Belanja Tanah (22,29% per tahun), Belanja Peralatan dan Mesin (2,74% per tahun), Belanja Bangunan dan Gedung (4,37% per tahun), Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (17,79%), dan Aset lainnya (43,47% per tahun) sementara Belanja Aset Tetap Lainnya mengalami kontraksi di mana rata-rata pertumbuhan -10,23% per tahun.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Gambar II.53
Perkembangan Struktur Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

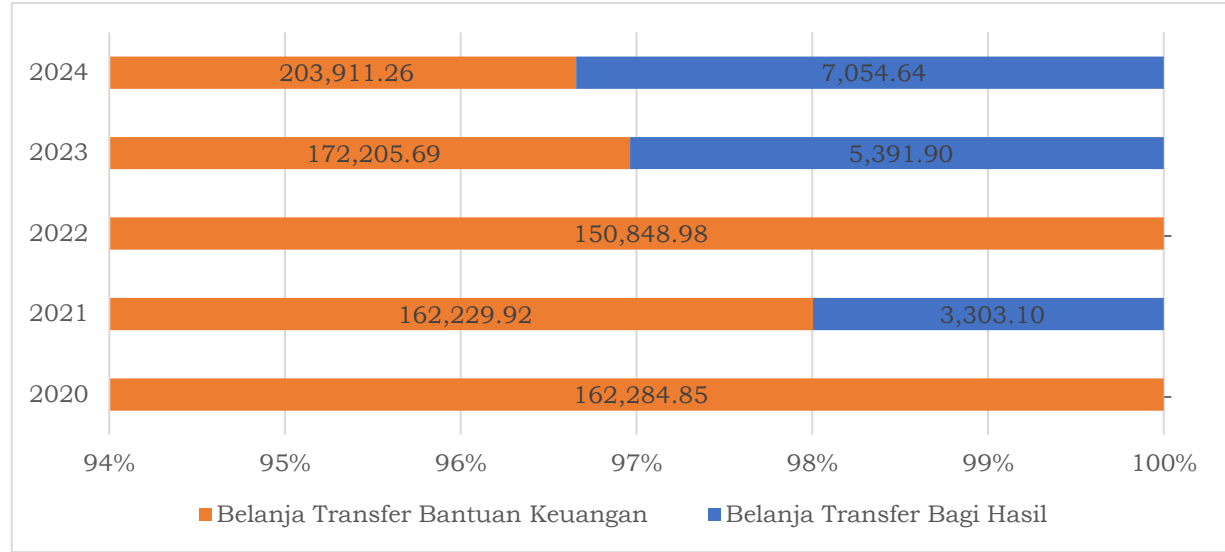
c. Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan sangat signifikan yaitu sebesar - 69,21% per tahun di mana tahun 2020 sebesar 21 miliar turun menjadi

196 juta pada tahun 2024. Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya. Oleh karena itu belanja tak terduga tahun 2021 tersebut dialokasikan untuk penanganan dan *recovery* Covid-19.

- d. Belanja Transfer
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Gunung Mas relatif naik sekitar 6,78% per tahun dari Rp162 miliar (2020) menjadi Rp210 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan dari Rp162 miliar (2020) menjadi Rp203 miliar (2024). Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 94% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk belanja transfer bantuan ke provinsi, transfer bantuan keuangan ke pemda lainnya dan transfer bantuan keuangan lainnya.

Gambar II.54
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 (lima) tahun terakhir defisit belanja hanya terjadi di tahun 2023 yang nilai defisitnya sebesar Rp74,101 miliar, disbanding dengan tahun-tahun yang lain yang mengalami surplus anggaran.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut antara lain:

- 1) Perencanaan anggaran yang cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 2) Transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas

yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

- 3) Pengadaan barang dan jasa yang efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 4) Pengelolaan utang yang bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- 5) Pengembangan pendapatan alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 6) Peningkatan efisiensi operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 7) Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.38

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	941.402,98	1.035.838,03	1.019.676,70	1.250.220,81	1.430.971,17	11,04
2.1	BELANJA OPERASI	581.357,37	674.464,66	633.097,03	796.281,12	959.681,37	13,35
2.1.1	Belanja Pegawai	348.256,06	379.873,96	378.302,95	412.033,31	506.018,20	9,79
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.251,20	251.675,65	234.761,47	335.529,74	398.461,38	17,61
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	19,45	
2.1.5	Belanja Hibah	20.720,60	42.304,05	19.168,80	48.514,56	54.903,25	27,58
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.129,51	611,00	863,81	203,50	279,10	-49,01
2.1.7	Belanja Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	175.845,41	193.102,26	235.510,76	276.129,60	260.126,93	10,28
2.2.1	Belanja Tanah	1.546,50	-	549,00	359,72	3.459,06	22,29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.226,93	36.531,66	42.703,65	41.300,73	61.531,66	2,74
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	41.436,97	56.308,26	65.821,25	62.575,67	49.167,02	4,37
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74,306.17	99.730,19	125.824,47	169.522,43	143.030,06	17,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.328,84	532,15	234,56	1.666,00	2.161,40	-10,23
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	377,84	705,06	777,73	43,47
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	21.915,34	2.738,08	219,93	212,50	196,97	-69,21
2.3.1	Belanja Tak Terduga	21.915,34	2.738,08	219,93	212,50	196,97	-69,21
2.4	BELANJA TRANSFER	162.284,85	165.533,02	150.848,98	177.597,59	210.965,90	6,78
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	3.303,10	-	5.391,90	7.054,64	28,78
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	2.820,09	-	4.952,49	6.114,42	29,43
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	439,41	940,22	113,97
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	483,01	-	-	-	-100,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	162.284,85	162.229,92	150.848,98	172.205,69	203.911,26	5,87
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	245,00	-	485,00	245,00	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	161.497,01	161.984,92	150.848,98	171.720,69	203.666,26	5,97
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	787,85	-	-	-	-	-100,00

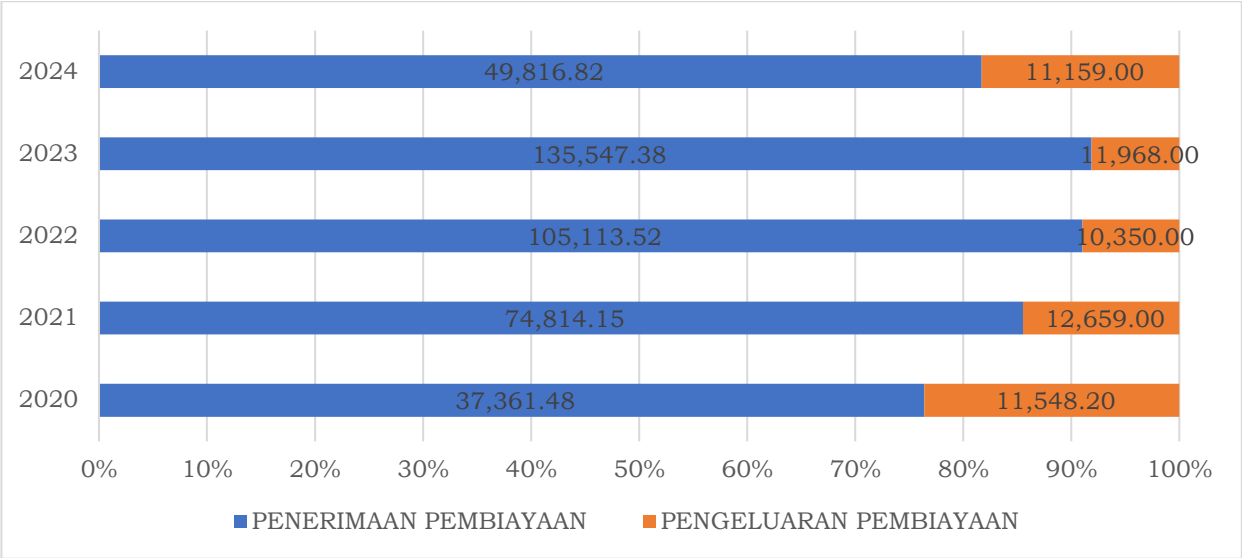
No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	SURPLUS / (DEFISIT)	49.235,50	42.980,19	65.747,12	(74.101,31)	10.566,74	-31,94

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan yaitu 10,62% per tahun dari Rp25,813 miliar (2020) menjadi Rp38,657 miliar (2024). Naiknya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA dari khususnya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA tahun 2020-2024 relatif mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan selama 5 (lima) tahun terakhir tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan apapun.

Gambar II.55
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.39

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	990.638,49	1.078.818,22	1.085.423,82	1.176.119,50	1.441.537,90	9,83
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.064,36	85.105,39	77.246,69	35.992,25	58.708,14	-2,91
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.303,50	46.896,17	30.959,64	11.888,73	19.377,83	-11,30
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.821,07	4.482,56	4.510,62	5.824,28	4.943,16	6,65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.738,22	10.722,71	12.683,80	81,15	3.942,20	-15,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.201,56	23.003,95	29.092,64	18.198,09	30.444,95	7,03
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	896.939,32	964.971,47	1.006.687,56	1.135.524,59	1.139.766,16	6,17
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	870.945,71	932.041,76	958.721,57	1.078.209,70	1.087.918,41	5,72
1.2.1.1	Dana Perimbangan	729.018,57	786.960,82	864.685,34	967.710,34	981.644,02	7,72
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	15.208,74	36.713,88	29.753,96	24.499,23	25.132,73	13,38
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	518.013,42	511.024,20	508.244,45	529.272,77	542.715,33	1,17
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	145.044,65	174.616,33	194.897,10	179.871,10	160.812,39	2,61
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	39.387,60	40.134,80	3.821,04	15.456,20	11.357,59	-26,72
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	102.539,54	104.946,14	90.215,18	95.043,16	94.916,80	-1,91
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	25.993,61	32.929,71	47.965,99	57.314,89	51.847,74	18,84
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	25.993,61	32.929,71	47.965,99	57.314,89	51.847,74	18,84
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.634,81	28.741,37	1.489,57	4.602,66	243.063,61	72,21
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	5,66	-	-	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	27.634,81	28.741,37	1.483,90	4,602.66	243.063,61	72,21
2	BELANJA	941.402,98	1.035.838,03	1.019.676,70	1.250.220,81	1.430.971,17	11,04
2.1	BELANJA OPERASI	581.357,37	674.464,66	633.097,03	796.281,12	959.681,37	13,35
2.1.1	Belanja Pegawai	348.256,06	379.873,96	378.302,95	412.033,31	506.018,20	9,79
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.251,20	251.675,65	234.761,47	335.529,74	398.461,38	17,61
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	19,45	#DIV/0!
2.1.5	Belanja Hibah	20.720,60	42.304,05	19.168,80	48.514,56	54.903,25	27,58
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.129,51	611,00	863,81	203,50	279,10	-49,01
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	175.845,41	193.102,26	235.510,76	276.129,60	260.126,93	10,28
2.2.1	Belanja Tanah	1.546,50	-	549,00	359,72	3.459,06	22,29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.226,93	36.531,66	42.703,65	41.300,73	61.531,66	2,74
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	41.436,97	56.308,26	65.821,25	62.575,67	49.167,02	4,37
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.306,17	99.730,19	125.824,47	169.522,43	143.030,06	17,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.328,84	532,15	234,56	1.666,00	2.161,40	-10,23
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	377,84	705,06	777,73	43,47
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	21.915,34	2.738,08	219,93	212,50	196,97	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	21.915,34	2.738,08	219,93	212,50	196,97	
2.4	BELANJA TRANSFER	162.284,85	165.533,02	150.848,98	177.597,59	210.965,90	6,78
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	3.303,10	-	5.391,90	7.054,64	28,78
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	2.820,09	-	4.952,49	6.114,42	29,43
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	439,41	940,22	113,97
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	483,01	-	-	-	-100,00



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	162.284,85	162.229,92	150.848,98	172.205,69	203.911,26	5,87
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	245,00	-	485,00	245,00	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	161.497,01	161.984,92	150.848,98	171.720,69	203.666,26	5,97
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	787,85	-	-	-	-	-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	49.235,50	42.980,19	65.747,12	(74.101,31)	10.566,74	-31,94
3	PEMBIAYAAN	25.813,28	62.155,15	94.763,52	123.579,38	38.657,82	10,62
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.361,48	74.814,15	105.113,52	135.547,38	49.816,82	7,46
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	37.360,48	74.814,15	105.113,52	135.547,38	49.816,82	7,46
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,00	-	-	-	-	-100,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	-	-	-	-	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.548,20	12.659,00	10.350,00	11.968,00	11.159,00	-0,85
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah;	11.548,20	12.659,00	10.350,00	11.968,00	11.159,00	-0,85
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.813,28	62.155,15	94.763,52	123.579,38	38.657,82	10,62

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 0,96% per tahun dari Rp2,008 triliun (2020) menjadi Rp2,086 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah aset tetap (0,12% per tahun), investasi jangka panjang (8,59% per tahun) dan Aset Lainnya (26,94% per tahun). Adapun jenis aset lancar justru mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -2,20% per tahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 84% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap khususnya berupa gedung dan bangunan dan jalan, irigasi. dan jaringan.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktuatif namun relatif mengalami tren menurun cukup signifikan sebesar -2,92% per tahun dari Rp3,2 miliar (2020) menjadi Rp2,8 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang jangka pendek lainnya yang trennya juga relatif menurun cukup signifikan sebesar dari Rp2,033 miliar (2020) menjadi Rp79,35 juta (2023).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa

mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,96% per tahun dimana pada tahun 2020 sebesar Rp2,005 triliun menjadi Rp2,083 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 sempat mengalami penurunan kemudian mulai naik secara konsisten tiap tahun dari tahun 2022-2024. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional di mana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.40

Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	67.630.319.375	95.287.867.372	124.159.056.220	38.395.026.101	40.943.078.910	(11,79)
Kas di Bendahara Penerimaan	2.400.559	8.348.500	5.030.500	35.530.428	2.041.500	(5,26)
Kas di Bendahara Pengeluaran	259.523.480	16.281.135				(100,00)
Kas di BLUD	4.450.930.230	7.501.105.918	10.659.694.173	6.952.304.799	5.040.676.316	3,16
Kas di Bendahara FKTP	2.318.323.776	2.116.959.998	722.808.950	4.070.787.115	364.888.475	(37,01)
Kas di Bendahara BOS	387.283.968	207.585.221	789.401	24.420.000	69.420.000	(34,93)
Kas Dana BOK Puskesmas					2.804.445.634	
Kas Lainnya		6.000	6.000	75.712	6.000	
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek			10.234.288.235			(100,00)
Piutang Pendapatan	16.063.308.379					(100,00)
Piutang Pajak		1.786.738.168	1.425.180.896	1.729.550.343	2.358.719.653	9,70
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>						
Piutang Retribusi		402.446.000	500.714.000	645.114.000	593.964.000	13,85
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>						
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		14.347.484.456	2.281.074.041	2.775.305.849	1.866.093.553	(49,33)



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		52.800.000	71.050.000			(100,00)
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>						
Piutang Transfer Antar Daerah		13.906.778.436		7.506.010.211	15.246.603.720	3,11
Piutang Lainnya	22.026.189.063	16.511.606.569	1.662.884.576	134.417.040	9.931.450	(85,43)
<i>Penyisihan Piutang</i>	(1.278.667.068)	(1.649.397.052)	(1.211.715.937)	(1.412.775.852)	(1.458.947.733)	3,35
Beban Dibayar Di Muka						
Persediaan	34.614.460.534	14.790.179.091	16.773.614.157	40.227.366.882	66.154.501.007	17,58
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				9.931.450		
Jumlah Aset Lancar	146.474.072.296	165.286.789.813	167.284.475.211	101.093.064.078	133.995.422.485	(2,20)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir						
<i>Penyisihan Investasi Jangka Panjang</i>						
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	80.282.221.262	89.357.063.103	96.757.484.738	104.734.137.906	111.611.133.251	8,59
Jumlah Investasi Permanen	80.282.221.262	89.357.063.103	96.757.484.738	104.734.137.906	111.611.133.251	8,59
Jumlah Investasi Jangka Panjang	80.282.221.262	89.357.063.103	96.757.484.738	104.734.137.906	111.611.133.251	8,59



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET TETAP						
Tanah	423.042.227.543	422.033.686.720	421.678.467.720	420.540.504.720	423.275.696.720	0,01
Peralatan dan Mesin	330.705.316.116	368.196.153.663	403.789.220.780	436.571.297.073	484.605.035.193	10,02
Gedung dan Bangunan	793.725.283.484	840.484.168.411	909.506.934.291	960.100.012.622	1.006.412.413.028	6,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.831.477.316.680	1.893.815.761.580	2.113.453.245.616	2.286.908.977.381	2.392.278.632.049	6,91
Aset Tetap Lainnya	34.540.004.179	35.483.616.825	36.656.365.379	38.179.968.034	40.547.904.964	4,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	18.598.993.787	82.877.227.879	58.136.212.299	12.370.552.658	9.008.890.097	(16,58)
Akumulasi Penyusutan	(1.681.865.512.137)	(1.904.732.804.910)	(2.161.247.375.266)	(2.396.943.059.038)	(2.597.651.554.832)	11,48
Jumlah Aset Tetap	1.750.223.629.652	1.738.157.810.167	1.781.973.070.819	1.757.728.253.449	1.758.477.017.219	0,12
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud	3.105.957.235	15.473.895.100,01	15.823.784.900	16.579.778.402	20.528.298.297	60,34
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>		(12.561.284.560)	(13.297.490.390)		(16.689.656.525)	7,36
Aset Lain-Lain	28.706.534.949	14.546.233.385	14.286.116.493	14.671.501.449	108.380.394.750	39,39
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>				(13.847.689.210)	(93.570.918.151)	61,23
Tagihan Jangka Panjang	9.931.450	78.000.000				



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Kas yang Dibatasi Penggunaannya					63.984.972.000	795,91
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>				236.938.772.000		(100,00)
Jumlah Aset Lainnya	31.822.423.634	17.536.843.925	16.812.411.003	254.342.362.641	82.633.090.371	26,94
JUMLAH ASET	2.008.802.346.843	2.010.338.507.007	2.062.827.441.771	2.217.897.818.074	2.086.716.663.326	0,96
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.814.697	2.042	71.556		
Pendapatan Diterima Di Muka	304.175.532	262.891.604	196.727.942	195.876.541	44.824.889	(30,91)
Utang Beban	878.487.431					(100,00)
Utang Belanja		11.654.046.242	45.294.588.644	2.824.509.634	2.811.085.936	(37,75)
Utang Bunga						
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.033.101.400	2.033.101.400		79.350.000		(100,00)
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah di terima di Muka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825	(2,92)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825	(2,92)
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	2.005.586.582.480	1.996.385.653.065	2.017.336.123.143	2.214.798.010.343	2.083.860.752.501	0,96
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	2.005.586.582.480	1.996.385.653.065	2.017.336.123.143	2.214.798.010.343	2.083.860.752.501	0,96
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.008.802.346.843	2.010.338.507.007	2.062.827.441.771	2.217.897.818.074	2.086.716.663.326	0,96

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut tidak likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun di sini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio *acid-test*. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 (dua) telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 sedikit berfluktuatif namun trennya semakin meningkat dari nilai 45,55 (2020) menjadi 46,92 (2024). Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Gunung Mas memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi dan semakin membaik. Untuk itu yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar tidak membesar atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024.

Tabel II.41
Rasio Lancar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	146.474.072.296	165.286.789.813	167.284.475.211	101.093.064.078	133.995.422.485
KEWAJIBAN LANCAR	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825
RASIO LANCAR	45,55	11,85	3,68	32,61	46,92

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity*

ratio. Debt to Equity Ratio (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,002 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2023-2024 di mana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,14% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2022 di mana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 2,26% dari total ekuitas yang ada. Adapun capaian rasio terakhir tahun 2024 senilai 0,001 atau nilai kewajiban yang ada sebesar 0,14% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu tahun 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Gunung Mas cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel II.42

Rasio Hutang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825
EKUITAS	2.005.586.582.480	1.996.385.653.065	2.017.336.123.143	2.214.798.010.343	2.083.860.752.501
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,002	0,007	0,023	0,001	0.001

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

b) Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (*Total Debt to Total Asset Ratio*)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya. Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 sedikit mengalami fluktuasi di mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2022 dengan nilai rasio 0,0221 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2023-2024 dengan nilai rasio 0,0014. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel II.43

Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825
AKTIVA	2.008.802.346.843	2.010.338.507.007	2.062.827.441.771	2.217.897.818.074	2.086.716.663.326
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0016	0,0069	0,0221	0,0014	0,0014

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn Over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi. Rasio tahun 2020 mencapai 0,038 dan menurun hingga 0,033 di tahun 2024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memanfaatkan aset tetapnya sedikit mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 dari Rp1,750 triliun nilai aset yang hanya mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp66,064 miliar atau 3,77% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2024 berkinerja sedikit menurun di mana ada peningkatan aset senilai Rp1,758 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp58,708 miliar atau 3,34% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.44

Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	66.064.355.509	85.105.385.510	77.246.690.077	35.992.250.833	58.708.141.585
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	1.750.223.629.652	1.738.157.810.167	1.781.973.070.819	1.757.728.253.449	1.758.477.017.219
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,038	0,049	0,043	0,020	0,033

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

b) Perputaran Total Aktiva (*Total Assets Turn Over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya rasio perputaran aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan negatif di mana rasio dari nilai rasio 0,033 di tahun 2020 menjadi 0,028 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 3,29% nilai nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 mengalami penurunan sehingga menghasilkan 2,81% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.

- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.45

Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	66,064,355,509	85,105,385,510	77,246,690,077	35,992,250,833	58,708,141,585
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2,008,802,346,843	2,010,338,507,007	2,062,827,441,771	2,217,897,818,074	2,086,716,663,326
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0.033	0.042	0.037	0.016	0.028

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan

rata-rata persentasenya sebesar 35,30%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2021 yang mencapai 36,73% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 35,09%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 37% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu pemerintah daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.46

**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)**

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2019	348.256,06	952.951,18	36,55%
2	2020	379.873,96	1.048.497,03	36,23%
3	2021	378.302,95	1.030.026,70	36,73%
4	2022	412.033,31	1.262.188,81	32,64%
5	2023	506.018,20	1.442.130,17	35,09%
Rata-Rata		404.896,90	1.147.158,78	35,30%

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2020-2024 meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,33% per tahun dari Rp568 miliar (2020) menjadi Rp783 miliar (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,79% dan belanja hibah sebesar 27,58%. Hal ini masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa

ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 2) **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 3) **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 4) **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 5) **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
- 6) **Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan:** Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.47

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	373.106,17	422.789,01	398.335,55	460.751,38	561.219,99	10,75
Belanja Pegawai	348.256,06	379.873,96	378.302,95	412.033,31	506.018,20	9,79
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	19,45	-
Belanja Hibah	20.720,60	42.304,05	19.168,80	48.514,56	54.903,25	27,58
Belanja Bantuan Sosial	4.129,51	611,00	863,81	203,50	279,10	(49,01)
Belanja Keuangan	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	162.284,85	165.533,02	150.848,98	177.597,59	210.965,90	8,42
Belanja Transfer Bagi Hasil	-	3.303,10	-	5.391,90	7.054,64	-
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	162.284,85	162.229,92	150.848,98	172.205,69	203.911,26	7,92
Belanja Tak Terduga	21.915,34	2.738,08	219,93	212,50	196,97	(69,21)
Pengeluaran Pembiayaan	11.548,20	12.659,00	10.350,00	11.968,00	11.159,00	(0,85)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah;	11.548,20	12.659,00	10.350,00	11.968,00	11.159,00	(0,85)
Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perurndang-Undangan	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	568.854,56	603.719,12	559.754,47	650.529,47	783.541,86	8,33

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran hanya terjadi pada tahun 2023-2024 di mana defisit riil pada tahun tersebut sebesar Rp-86 miliar dan Rp-592 juta. Sementara pada tahun 2020-2022 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.48
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	990.638,49	1.078.818,22	1.085.423,82	1.176.119,50	1.441.537,90
Dikurangi Realisasi:					
Belanja Daerah	941.402,98	1.035.838,03	1.019.676,70	1.250.220,81	1.430.971,17
Pengeluaran Pembiayaan	11.548,20	12.659,00	10.350,00	11.968,00	11.159,00
(Defisit Riil)	37.687,30	30.321,19	55.397,12	-86.069,31	-592,26

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2023 dapat ditutup oleh SiLPA pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp135 miliar dan 2024 sebesar Rp49 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

Tabel II.49
Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	37.360,48	74.814,15	105.113,52	135.547,38	49.816,82
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	37.360,48	74.814,15	105.113,52	135.547,38	49.816,82

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2029. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2029.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.

- 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2023 dan/atau target APBD tahun 2024.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Gunung Mas masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 diproyeksikan hanya tumbuh $\pm 2,67\%$ per tahun dari Rp1,28 triliun (2025) menjadi Rp1,46 triliun (2030). Nilai proyeksinya relatif sangat kecil mengingat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer khususnya dana Perimbangan masih sangat tinggi. Sehingga proyeksi pendapatannya ditargetkan agak rendah yang fokusnya di PAD. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan 0% atau flat sama nilai dengan angka realisasi tahun terakhir yaitu realisasi tahun 2023 ataupun tahun 2024.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar $-2,91\%$ per tahun, maka proyeksi PAD tahun 2025-2030 juga diproyeksikan tumbuh $\pm 5\%$ per tahun dari Rp111,7 miliar (2025) menjadi Rp142,56 miliar (2030). Berikut ini target seluruh komponen sumber PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah tumbuh 5% per tahun, Pendapatan Retribusi Daerah tumbuh 5%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh 5%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh 5% per tahun.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar $\pm 5\%$ per tahun dari Rp82,243 miliar (2025) menjadi Rp104,965 miliar (2030) juga

mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh -11,30% per tahun. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) **Penilaian Properti yang Akurat:** Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) **Peningkatan Kepatuhan:** Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) **Diversifikasi Sumber Pajak:** Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Gunung Mas. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) **Inisiatif Peningkatan Layanan:** Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) **Kemitraan Publik-Swasta:** Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) **Peninjauan Kembali Insentif Pajak:** Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) **Evaluasi Kebijakan Pajak:** Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) **Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:** Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan retribusi daerah tahun 2025-2030 ditargetkan tumbuh $\pm 5\%$ per tahun dari Rp19,165 miliar (2025) menjadi Rp24,46 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir sebesar 6,65% per tahun dengan capaian tertinggi ada di tahun 2023 yang sebesar Rp5,824 miliar dan sedikit menurun pada tahun 2024. Penurunan tersebut merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun

2022 di mana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan. Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

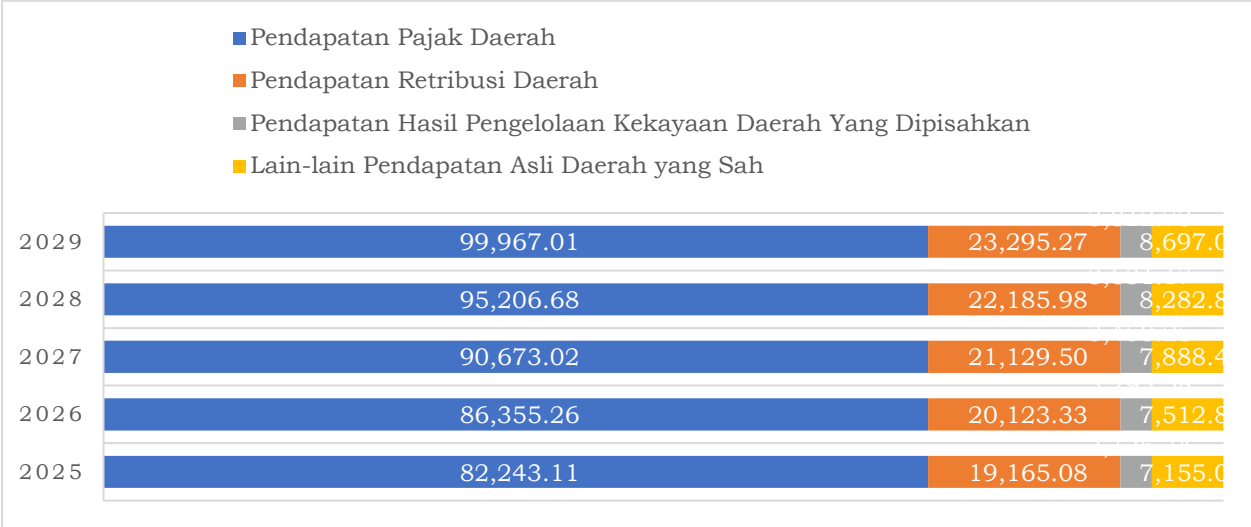
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 5\%$ per tahun dari Rp3,136 miliar (2025) menjadi Rp4,003 miliar (2030). Untuk mencapai target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.

- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kurun waktu tahun 2025-2030 ditargetkan naik $\pm 5\%$ per tahun dari Rp7,155 miliar (2025) menjadi Rp9,131 miliar (2030). Target ini masih realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar $\pm 7,03\%$ per tahun. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

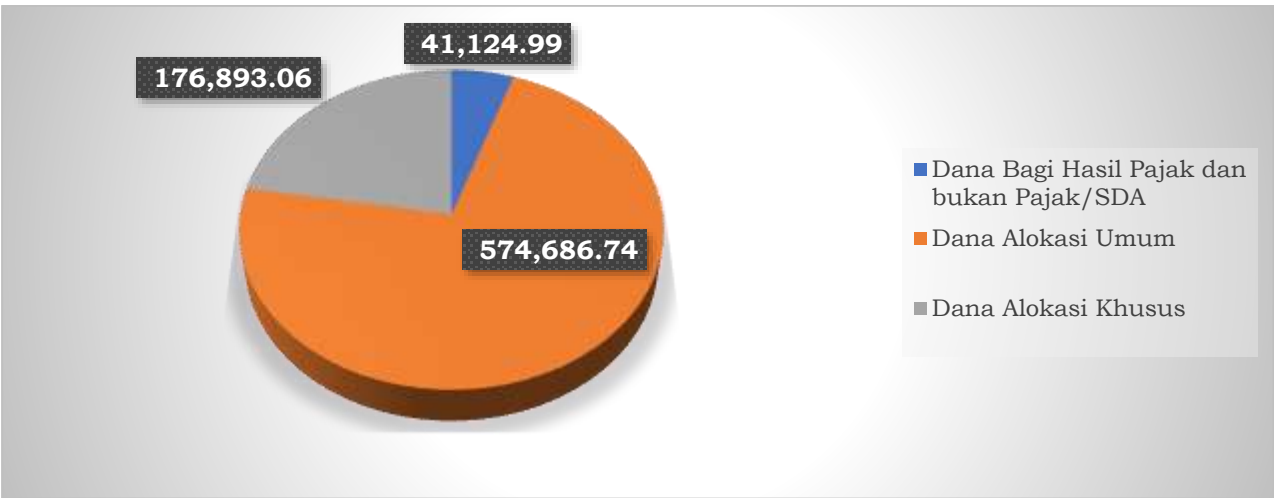
Gambar II.56
Target Komposisi PAD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas masih didominasi oleh sumber pendapatan transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi pendapatan transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan kata lain pertumbuhan transfer pemerintah pusat pertumbuhannya 0%. Komponen pendapatan transfer yang ditargetkan sedikit mengalami pertumbuhan adalah dari pendapatan transfer antar daerah dengan target pertumbuhan sebesar $\pm 10,5\%$ per tahun yang berasal dari sumber bagi hasil pajak. Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka secara keseluruhan pendapatan transfer ditargetkan hanya tumbuh sangat kecil yaitu sebesar $\pm 2,49\%$ per tahun dari Rp1,206 triliun (2025) menjadi Rp1,364 triliun (2030).

Gambar II.57
Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029



Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel II.50
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam jutaan)

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1,176,119.50	1,282,689.31	1,319,113.77	1,352,966.90	1,388,273.96	1,425,104.85	1,463,532.95
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35,992.25	111,700.00	117,285.00	123,149.25	129,306.71	135,772.04	142,560.65
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11,888.73	82,243.11	86,355.26	90,673.02	95,206.68	99,967.01	104,965.36
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5,824.28	19,165.08	20,123.33	21,129.50	22,185.98	23,295.27	24,460.04
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	81.15	3,136.74	3,293.58	3,458.25	3,631.17	3,812.73	4,003.36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18,198.09	7,155.07	7,512.83	7,888.47	8,282.89	8,697.03	9,131.89
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,135,524.59	1,138,368.90	1,169,208.36	1,197,197.24	1,226,346.83	1,256,712.39	1,288,351.89
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,078,209.70	1,098,193.90	1,114,768.23	1,140,035.10	1,166,326.59	1,193,691.14	1,222,179.57
1.2.1.1	Dana Perimbangan	967,710.34	998,162.29	1,006,106.25	1,026,507.91	1,047,690.92	1,069,691.56	1,092,547.89
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak/SDA	24,499.23	41,124.99	42,153.11	43,206.94	44,287.11	45,394.29	46,529.15
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	529,272.77	525,714.34	530,971.49	536,281.20	541,644.01	547,060.45	552,531.06
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	179,871.10	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	15,456.20	#REF!	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	95,043.16	92,670.85	97,304.39	102,169.61	107,278.09	112,641.99	118,274.09
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	57,314.89	40,175.00	54,440.13	57,162.14	60,020.24	63,021.25	66,172.32
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	57,314.89	40,175.00	54,440.13	57,162.14	60,020.24	63,021.25	66,172.32
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4,602.66	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	4,602.66	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Gunung Mas, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

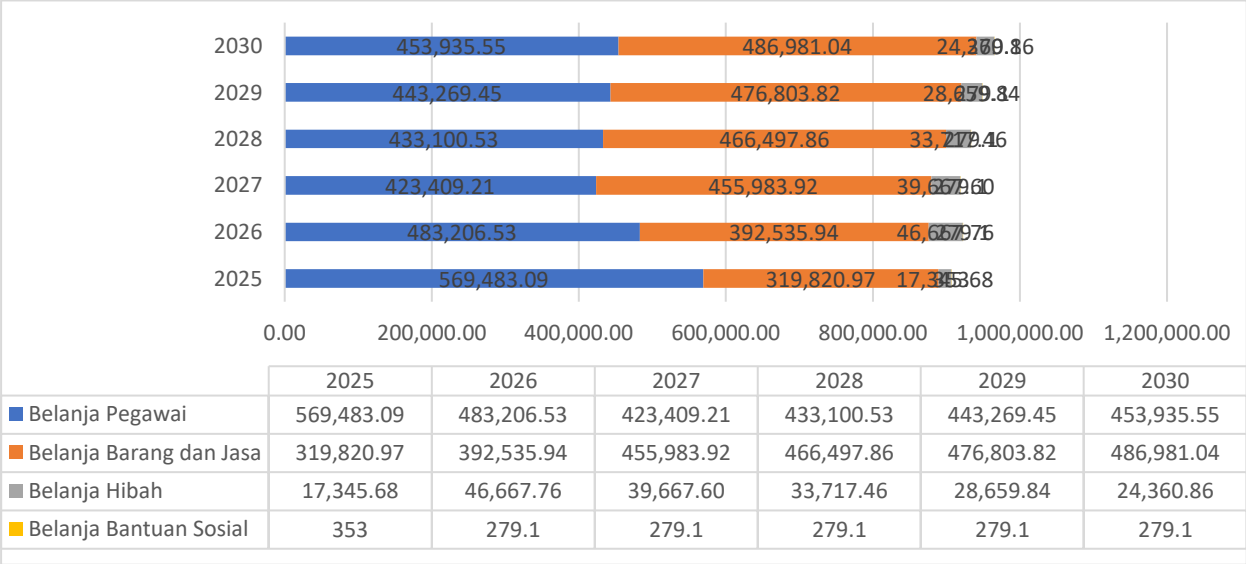
Belanja daerah Kabupaten Gunung Mas dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 1,98\%$ per tahun

dari Rp1,410 triliun (2025) menjadi Rp1,555 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi belanja daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yang tumbuh $\pm 11,04\%$ per tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Untuk belanja operasi secara agregat juga ditekan/diturunkan bahkan lebih kecil dibandingkan target APBD tahun 2024 namun lebih tinggi dari realisasi tahun 2023. Adapun belanja operasi mulai tahun 2025 akan ditargetkan sedikit menurun $-0,37\%$ per tahun dari Rp1,027 triliun (2025) menjadi Rp992,722 miliar (2030).

Gambar II.58
Target Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030
(dalam juta)

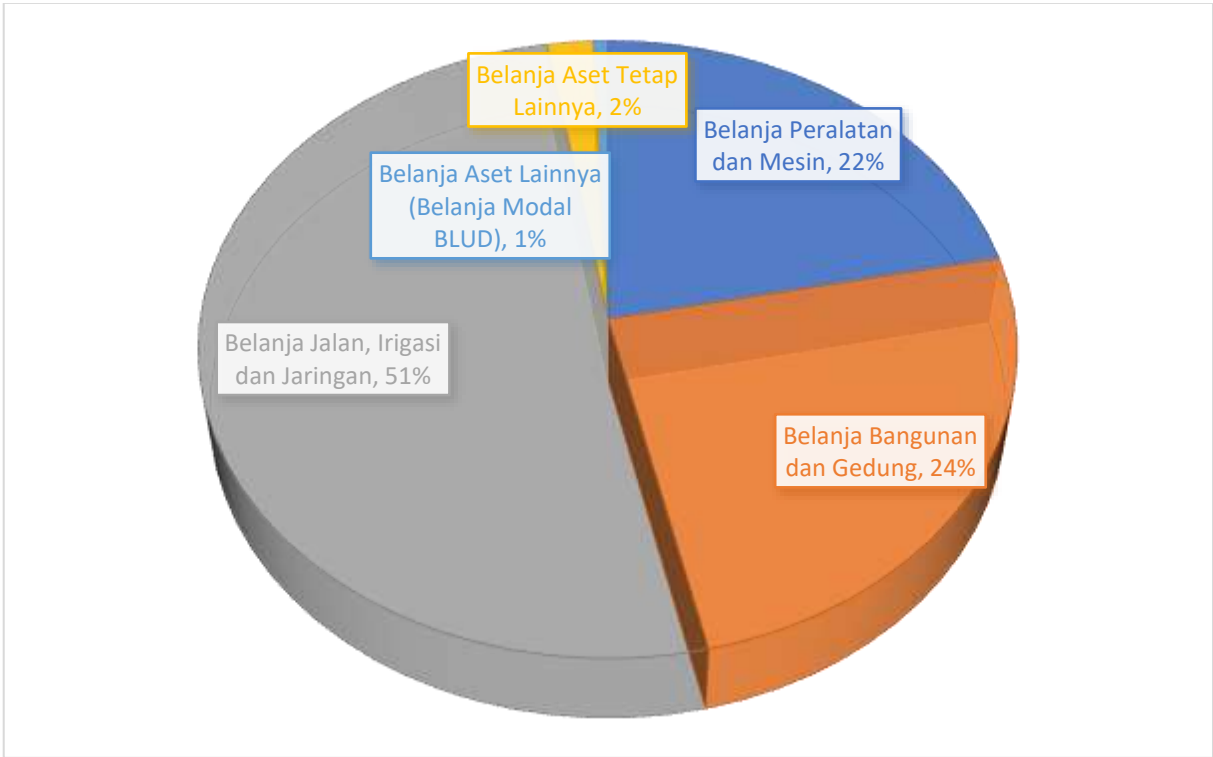


Sumber: Bappeda Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 11,70\%$ per tahun sebesar Rp276 miliar (2025) menjadi Rp308 miliar (2030). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalanan, irigasi dan jaringan (51%), kemudian belanja bangunan dan Gedung (24%), kemudian belanja peralatan dan mesin (22%), dan sisanya belanja aset tetap lainnya (2%). Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan/diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunan juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan gedung diarahkan pada bangunan dan gedung pelayanan publik seperti perkantoran, fasilitas umum, dan sejenisnya.

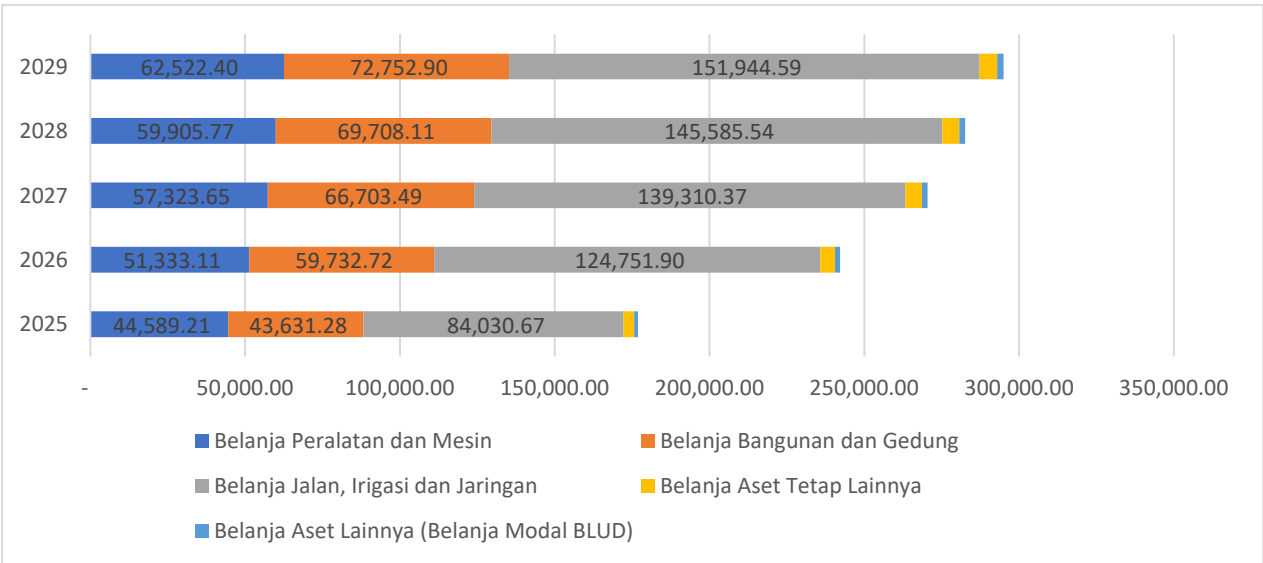
Secara rinci target tahunan komponen belanja modal dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar II.59
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030



Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Gambar II.60
Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)



Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Untuk belanja tak terduga tahun 2005-2030 ditargetkan konstan yaitu sebesar Rp1 miliar per tahun. Penggunaan belanja tak terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Untuk belanja transfer ditargetkan dengan pertumbuhan yang relatif konstan berdasarkan realisasi tahun 2023 yaitu konstan dari tahun 2025-2030 sebesar Rp11,25 miliar. Proyeksi peningkatan belanja transfer disebabkan oleh meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan yang diproyeksikan naik dari Rp185 miliar (2025) menjadi Rp217 miliar (2030) yang didasarkan pada formula minimal dana transfer ke desa dengan mempertimbangkan target pendapatan transfer yang juga konstan yaitu DAU, DBH Pajak dan Non Pajak/SDA, serta Pendapatan Dana Desa.

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) **Pengelolaan Anggaran yang Teliti:** Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kebijakan Penghematan Biaya:** Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) **Kolaborasi dan Konsolidasi:** Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.



- 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.51

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (dalam juta)

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA	1,250,220.81	1,351,791.99	1,370,590.11	1,401,364.04	1,433,668.44	1,467,564.87	1,503,118.53
2.1	BELANJA OPERASI	796,281.12	907,038.73	922,689.33	919,339.83	933,594.95	949,012.21	965,556.55
2.1.1	Belanja Pegawai	412,033.31	569,483.09	483,206.53	423,409.21	433,100.53	443,269.45	453,935.55
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335,529.74	319,820.97	392,535.94	455,983.92	466,497.86	476,803.82	486,981.04
2.1.5	Belanja Hibah	48,514.56	17,345.68	46,667.76	39,667.60	33,717.46	28,659.84	24,360.86
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	203.50	353.00	279.10	279.10	279.10	279.10	279.10
2.2	BELANJA MODAL	276,129.60	243,917.29	245,916.45	275,504.72	288,793.29	302,277.13	316,046.90
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	359.72	230.94	232.83	260.85	273.43	286.19	299.23
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41,300.73	44,810.15	35,340.76	39,592.90	41,502.60	43,440.37	45,419.23
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	62,575.67	35,538.55	35,829.83	40,140.82	42,076.95	44,041.53	46,047.78
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	169,522.43	158,466.93	169,602.40	190,008.68	199,173.47	208,472.94	217,969.60
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,666.00	3,560.48	3,589.66	4,021.56	4,215.54	4,412.36	4,613.36
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	705.06	1,310.24	1,320.98	1,479.92	1,551.30	1,623.73	1,697.69
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	212.50	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
2.3.1	Belanja Tak Terduga	212.50	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
2.4	BELANJA TRANSFER	177,597.59	189,585.96	190,672.03	194,953.20	199,447.28	204,162.84	209,108.95
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	5,391.90	8,655.82	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	4,952.49	8,224.31	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	439.41	431.51	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	172,205.69	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	485.00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	171,720.69	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74,101.31)	(69,102.67)	(51,476.34)	(48,397.14)	(45,394.48)	(42,460.01)	(39,585.58)

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan yang paling berkontribusi adalah besaran SiLPA. Nilai SiLPA kurun waktu 2025-2030 terus ditekan hingga tiap tahun mengalami penurunan -5% per tahun dari Rp69,102 miliar (2025) menjadi Rp40,725 miliar (2030).

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel II.52
Proyeksi APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1,176,119.50	1,282,689.31	1,319,113.77	1,352,966.90	1,388,273.96	1,425,104.85	1,463,532.95
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35,992.25	111,700.00	117,285.00	123,149.25	129,306.71	135,772.04	142,560.65
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11,888.73	82,243.11	86,355.26	90,673.02	95,206.68	99,967.01	104,965.36
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5,824.28	19,165.08	20,123.33	21,129.50	22,185.98	23,295.27	24,460.04
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	81.15	3,136.74	3,293.58	3,458.25	3,631.17	3,812.73	4,003.36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18,198.09	7,155.07	7,512.83	7,888.47	8,282.89	8,697.03	9,131.89
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,135,524.59	1,138,368.90	1,169,208.36	1,197,197.24	1,226,346.83	1,256,712.39	1,288,351.89
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,078,209.70	1,098,193.90	1,114,768.23	1,140,035.10	1,166,326.59	1,193,691.14	1,222,179.57
1.2.1.1	Dana Perimbangan	967,710.34	998,162.29	1,006,106.25	1,026,507.91	1,047,690.92	1,069,691.56	1,092,547.89
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak/SDA	24,499.23	41,124.99	42,153.11	43,206.94	44,287.11	45,394.29	46,529.15
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	529,272.77	525,714.34	530,971.49	536,281.20	541,644.01	547,060.45	552,531.06
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	179,871.10	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	15,456.20	#REF!	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	95,043.16	92,670.85	97,304.39	102,169.61	107,278.09	112,641.99	118,274.09



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	57,314.89	40,175.00	54,440.13	57,162.14	60,020.24	63,021.25	66,172.32
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	57,314.89	40,175.00	54,440.13	57,162.14	60,020.24	63,021.25	66,172.32
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4,602.66	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	4,602.66	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42
2	BELANJA	1,250,220.81	1,351,791.99	1,370,590.11	1,401,364.04	1,433,668.44	1,467,564.87	1,503,118.53
2.1	BELANJA OPERASI	796,281.12	907,038.73	922,689.33	919,339.83	933,594.95	949,012.21	965,556.55
2.1.1	Belanja Pegawai	412,033.31	569,483.09	483,206.53	423,409.21	433,100.53	443,269.45	453,935.55
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335,529.74	319,820.97	392,535.94	455,983.92	466,497.86	476,803.82	486,981.04
2.1.5	Belanja Hibah	48,514.56	17,345.68	46,667.76	39,667.60	33,717.46	28,659.84	24,360.86
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	203.50	353.00	279.10	279.10	279.10	279.10	279.10
2.2	BELANJA MODAL	276,129.60	243,917.29	245,916.45	275,504.72	288,793.29	302,277.13	316,046.90
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	359.72	230.94	232.83	260.85	273.43	286.19	299.23
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41,300.73	44,810.15	35,340.76	39,592.90	41,502.60	43,440.37	45,419.23



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	62,575.67	35,538.55	35,829.83	40,140.82	42,076.95	44,041.53	46,047.78
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	169,522.43	158,466.93	169,602.40	190,008.68	199,173.47	208,472.94	217,969.60
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,666.00	3,560.48	3,589.66	4,021.56	4,215.54	4,412.36	4,613.36
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	705.06	1,310.24	1,320.98	1,479.92	1,551.30	1,623.73	1,697.69
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	212.50	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
2.3.1	Belanja Tak Terduga	212.50	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
2.4	BELANJA TRANSFER	177,597.59	189,585.96	190,672.03	194,953.20	199,447.28	204,162.84	209,108.95
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	5,391.90	8,655.82	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	4,952.49	8,224.31	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	439.41	431.51	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	172,205.69	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	485.00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	171,720.69	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74,101.31)	(69,102.67)	(51,476.34)	(48,397.14)	(45,394.48)	(42,460.01)	(39,585.58)
3	PEMBIAYAAN	123,579.38	69,102.67	51,476.34	48,397.14	45,394.48	42,460.01	39,585.58



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135,547.38	69,102.67	61,476.34	58,397.14	55,394.48	52,460.01	49,585.58
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	135,547.38	69,102.67	61,476.34	58,397.14	55,394.48	52,460.01	49,585.58
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,968.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	11,968.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	123,579.38	69,102.67	51,476.34	48,397.14	45,394.48	42,460.01	39,585.58
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	49,478.07	-	-	-	0.00	-	(0.00)

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos belanja daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas tahun 2025-2030 akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar $\pm 1,78\%$ per tahun dari Rp850,530 miliar (2025) menjadi Rp923,231 miliar (2030).

Adapun rincian proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel II.53

Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Operasi	561,219.99	587,217.77	530,153.39	463,355.91	467,097.09	472,208.39	478,575.51
1.1	Belanja Pegawai	506,018.20	569,483.09	483,206.53	423,409.21	433,100.53	443,269.45	453,935.55
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	19.45	36.00	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	54,903.25	17,345.68	46,667.76	39,667.60	33,717.46	28,659.84	24,360.86
1.5	Belanja Bantuan Sosial	279.10	353.00	279.10	279.10	279.10	279.10	279.10
2	Belanja Transfer	210,965.90	189,585.96	190,672.03	194,953.20	199,447.28	204,162.84	209,108.95
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	7,054.64	8,655.82	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	203,911.26	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82
3	Belanja Tak Terduga	196.97	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
2.3.1	Belanja Tak Terduga	196.97	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
4	Pengeluaran Pembiayaan	11,159.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	11,159.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	783,541.86	788,053.73	742,137.72	679,875.40	688,377.29	698,483.92	710,090.60

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Analisis kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/sub kegiatan OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan tren menurun meskipun tidak terlalu signifikan. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp850,530 miliar, Rp888,913 miliar (2026), Rp895,455 miliar (2027), Rp903,445 miliar (2028), Rp912,742 miliar (2029) dan Rp923,231 miliar (2030). Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang menurun juga tiap tahun di mana perkembangan kemampuan pagu belanja OPD untuk tahun 2025 hingga tahun 2030 secara berturut-turut sebesar Rp1,199 triliun, Rp1,210 triliun, Rp1,235 triliun, Rp1,261 triliun, Rp1,288 triliun, dan Rp1,316 triliun.

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

- Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel II.54
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1,282,689.31	1,319,113.77	1,352,966.90	1,388,273.96	1,425,104.85	1,463,532.95
2.	Penerimaan Pembiayaan	69,102.67	61,476.34	58,397.14	55,394.48	52,460.01	49,585.58
	TOTAL PENERIMAAN						
	(Dikurangi):						
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	788,053.73	834,109.10	837,395.88	842,015.75	847,820.85	854,687.49
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	563,738.26	546,481.01	573,968.16	601,652.69	629,744.02	658,431.04

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Tabel II.55
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1.336.312,00	1.378.415,35	1.412.763,10	1.448.569,73	1.485.905,18	1.524.842,89
2.	Penerimaan Pembiayaan	69.102,67	50.000,00	47.500,00	45.125,00	42.868,75	40.725,31
	TOTAL PENERIMAAN	1.405.414,68	1.428.415,35	1.460.263,10	1.493.694,73	1.528.773,93	1.565.568,20
	(Dikurangi):						
3	Belanja Transfer	194.483,20	196.192,57	203.489,55	211.122,11	219.106,58	227.460,13
4	Belanja Tak Terduga	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.199.681,48	1.210.972,77	1.235.523,55	1.261.322,62	1.288.417,35	1.316.858,08

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)



Tabel II.56
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	1,150,956.03	1,168,605.78	1,194,844.55	1,222,388.24	1,251,289.34	1,281,603.45
2	Prioritas I	640,161.74	649,978.54	664,572.54	679,892.34	695,967.13	712,827.84
3	Prioritas II	345,286.81	350,581.73	358,453.36	366,716.47	375,386.80	384,481.03
4	Prioritas III	165,507.48	168,045.51	171,818.65	175,779.43	179,935.41	184,294.58
	JUMLAH	1,150,956.03	1,168,605.78	1,194,844.55	1,222,388.24	1,251,289.34	1,281,603.45

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif. Memahami hal tersebut dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut harus diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gunung Mas. Proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Gunung Mas, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional/global, nasional, regional dan isu dalam lingkup Kabupaten Gunung Mas, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah**

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas masih belum merata, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di beberapa wilayah. Beberapa daerah di pusat kota dan wilayah yang lebih mudah diakses cenderung mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur, sementara daerah-daerah di pedalaman dan pegunungan

seringkali terabaikan. Hal ini berdampak pada ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan akses terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta perhubungan. Berdasarkan data tahun 2024, kondisi panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan yang berada dalam kondisi rusak berat, yaitu sebesar 65% dari total panjang jalan. Sementara itu, jalan yang berada dalam kondisi baik hanya mencakup 33%, dan sisanya sebanyak 2% berada dalam kondisi sedang. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan di daerah ini masih memerlukan perhatian serius dan peningkatan kualitas, khususnya untuk memperbaiki jalan yang rusak berat demi mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat secara optimal.

Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan dengan permukaan tanah, yaitu sepanjang 331.560 kilometer, yang menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan masih berupa jalan tidak beraspal. Jalan dengan permukaan aspal menempati urutan kedua dengan panjang 283.339 kilometer, mencerminkan adanya pembangunan jalan permanen yang cukup signifikan. Sementara itu, jalan berpermukaan kerikil memiliki panjang 119.078 kilometer, dan jenis permukaan lainnya hanya mencakup 5.015 kilometer. Data ini menggambarkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan jalan beraspal, masih banyak jalan yang perlu ditingkatkan kualitas permukaannya untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, aksesibilitas antar wilayah kabupaten juga menjadi salah satu masalah utama yang perlu segera diselesaikan. Beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar desa atau kecamatan masih dalam kondisi yang kurang memadai, bahkan sebagian di antaranya terputus saat musim hujan. Hal ini menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa, yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau. Dalam jangka panjang, masalah aksesibilitas ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Gunung Mas. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara lebih adil dan merata. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang, dengan mengutamakan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dapat menghubungkan wilayah yang terisolasi. Dengan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Mas hingga saat ini masih belum optimal. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, baik dalam sektor kehutanan, pertanian, maupun pariwisata, pengelolaannya sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian alam. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, seperti pembalakan liar dan konversi lahan, turut memperburuk kualitas lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem, berkurangnya

daya dukung alam, dan berisiko pada bencana alam seperti longsor dan banjir. Di sisi lain, pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi masalah serius di Kabupaten Gunung Mas. Masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang memadai, memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak terstruktur ini mencemari sungai, tanah, dan udara, serta merusak kualitas hidup masyarakat sekitar. Tanpa adanya sistem yang baik dalam pengelolaan sampah, masalah lingkungan ini akan terus berkembang dan semakin sulit untuk diatasi. Hal ini terlihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 (69,33) yang mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 70,58. Melihat lebih dalam penurunan IKLH ini disebabkan adanya penurunan pada indeks kualitas air di tahun 2024 yang menurun menjadi 42,86 jika dibandingkan capaian tahun 2023 (50) dan indeks kualitas udara di tahun 2024 menjadi 82,82 padahal pada tahun 2023 mencapai 89,64.

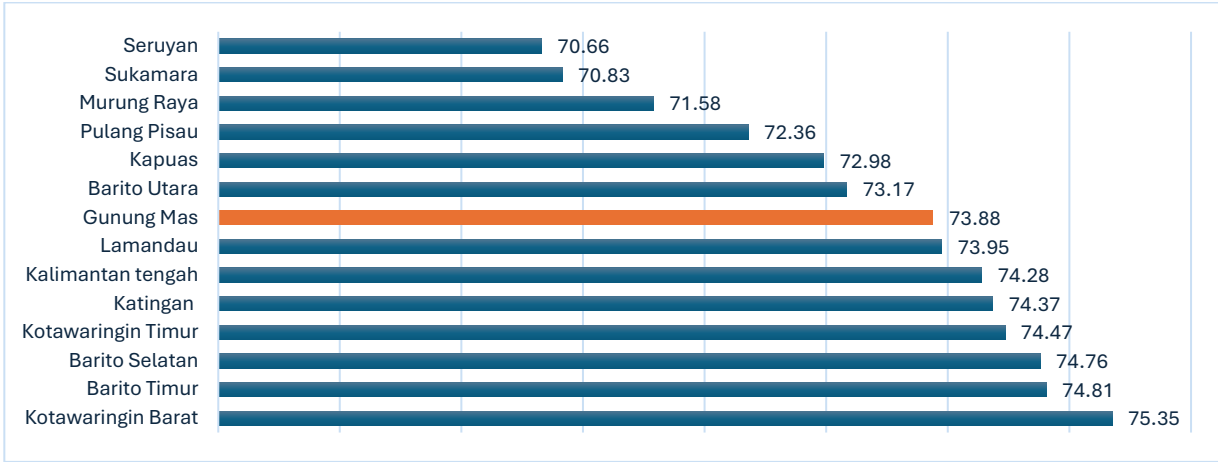
Dengan permasalahan ini, ke depannya perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program edukasi lingkungan yang lebih intensif, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan adalah langkah-langkah yang sangat penting. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pelestarian alam, Kabupaten Gunung Mas bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya tanpa merusak lingkungan untuk generasi yang akan datang.

3. Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasilnya belum optimal. Meskipun sejumlah program pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan, masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas, kurangnya akses ke pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Akibatnya, banyak generasi muda yang terhambat untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas mencapai angka 73,88, menempatkannya di posisi menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Gunung Mas cukup baik, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun masih berada di bawah beberapa kabupaten seperti Kotawaringin Barat (75,35) dan Barito Timur (74,81), IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah ditahun 2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.61

IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

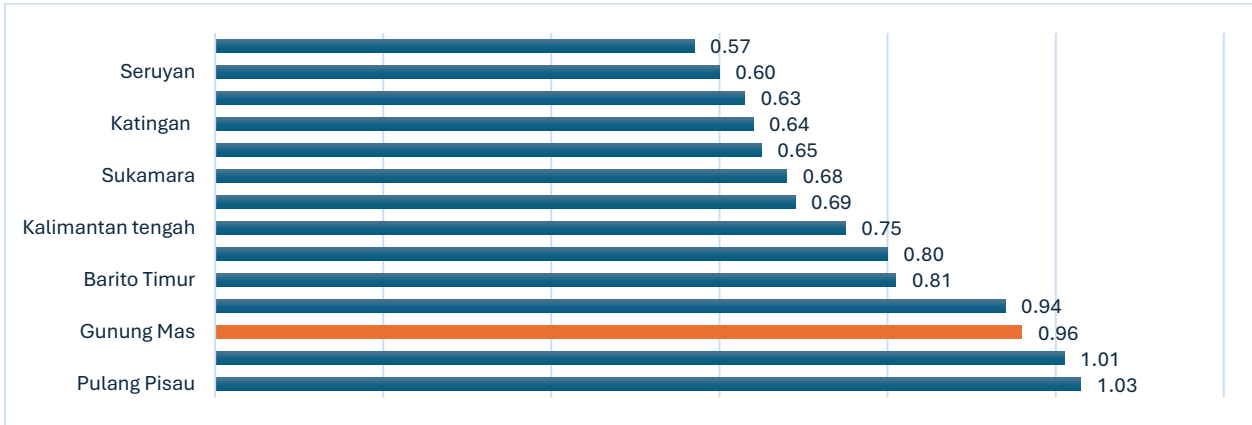


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 0,96%, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun kabupaten lain, Kabupaten Gunung Mas menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Barito Selatan (1,01%) dan Kabupaten Pulang Pisau (1,03%). Hal ini mengindikasikan masih perlu adanya peningkatan pertumbuhan IPM Kabupaten Gunung Mas dengan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Gambar II.62

Pertumbuhan IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

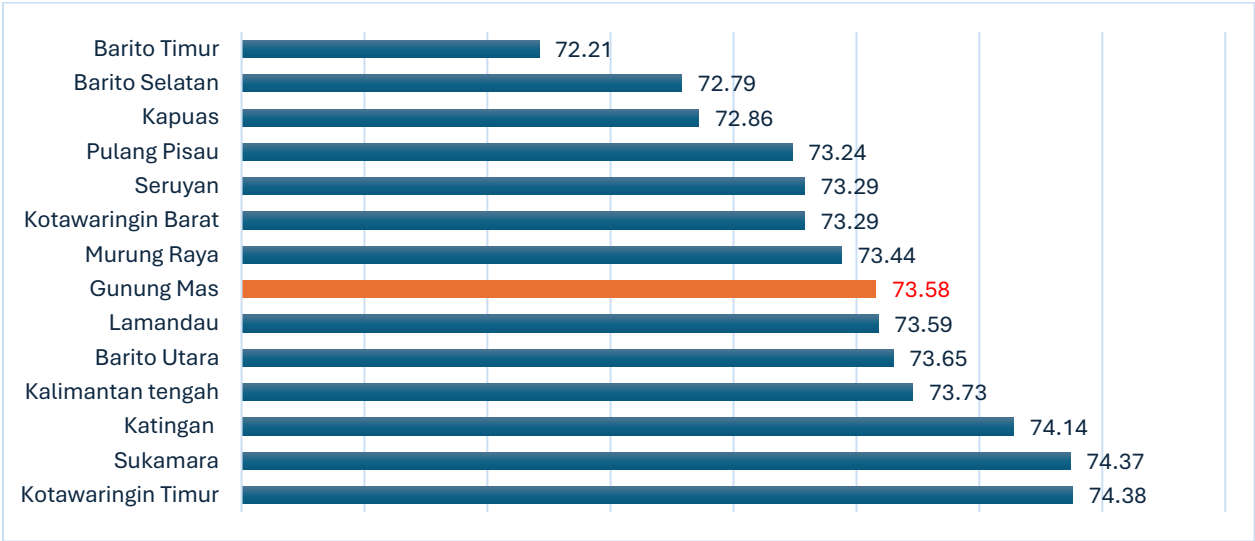


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Berdasarkan data capaian salah satu indikator komposit IPM yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas mencapai 9,37 tahun, yang menunjukkan angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Gunung Mas telah mengenyam pendidikan selama 9,37 tahun, setara dengan kelas 3 SMP semester 1. Hal ini mengindikasikan kualitas tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Gunung Mas relatif masih rendah.

Kemudian pada bidang kesehatan, pada tahun 2024 usia harapan hidup di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 73,58 tahun, capaian ini menempatkan Kabupaten Gunung Mas pada posisi menengah di antara kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, masih di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 73,73 tahun dan masih di bawah capaian Kabupaten Lamandau, seperti yang terlihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.63
Usia harapan Hidup Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat juga dari angka gizi buruk yang mengalami peningkatan di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan gizi buruk di Kabupaten Gunung mas masih belum optimal, yang pastinya hal ini mempengaruhi kualitas dan daya saing Masyarakat terutama terkait dengan kesehatan. Kemudian penilaian indeks daya saing daerah Kabupaten Gunung Mas pada pilar kesehatan di tahun 2024 (3,83) juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2023 (3,89). Selanjutnya kondisi kesehatan yang belum optimal juga terlihat pada angka kematian umum di tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 22,94 jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 21,66. Kemudian pada angka kematian murni juga mengalami peningkatan ditahun 2024 yang mencapai 7,82 jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 7,09. Selain itu capaian SPM pada bidang kesehatan juga beberapa belum mencapai 100%.

Menindaklanjuti permasalahan pembangunan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas, diperlukan serangkaian kebijakan dan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sektor pendidikan, fokus utama adalah pemerataan kualitas melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan ketersediaan fasilitas belajar yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Program afirmasi untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas di daerah sulit, pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan zaman, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi prioritas. Selain itu, perluasan akses pendidikan berkualitas pada jenjang menengah dan kejuruan yang sesuai dengan potensi daerah juga krusial. Di sektor kesehatan, upaya tindak lanjut meliputi peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, melalui penguatan fasilitas kesehatan primer dan penambahan tenaga kesehatan yang kompeten dan merata distribusinya. Program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang efektif, peningkatan gizi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan juga menjadi bagian penting dari solusi. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan organisasi

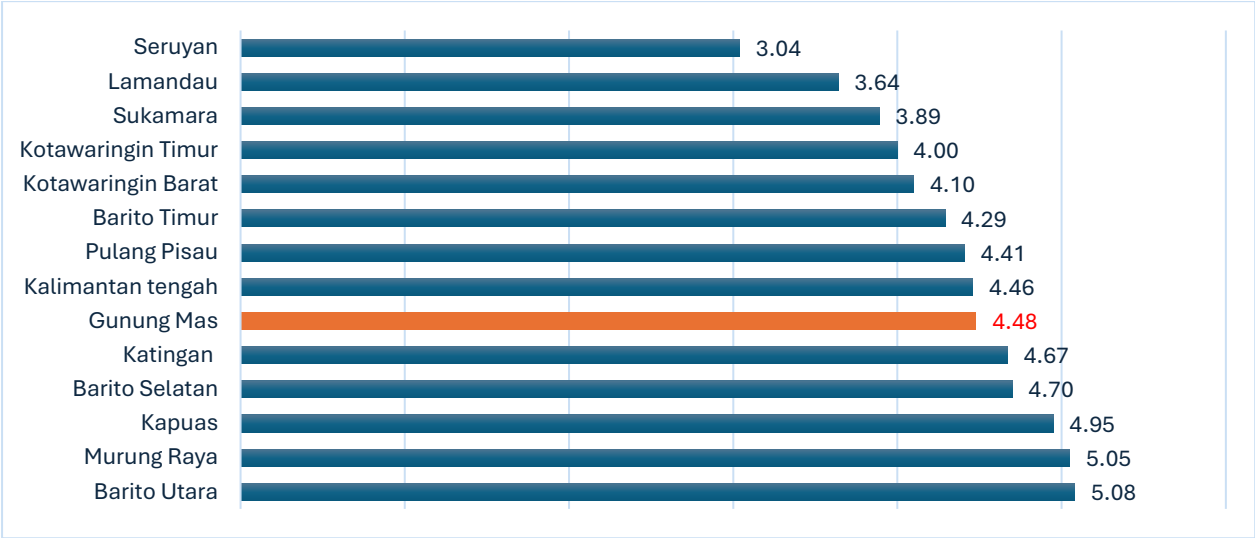


masyarakat, serta alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan tindak lanjut permasalahan pembangunan SDM di Kabupaten Gunung Mas.

4. **Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah**

Pengembangan perekonomian di sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas masih belum berjalan optimal meskipun daerah ini memiliki potensi alam yang cukup besar. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata seharusnya dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal, namun belum dikelola secara maksimal.

Gambar II.64
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

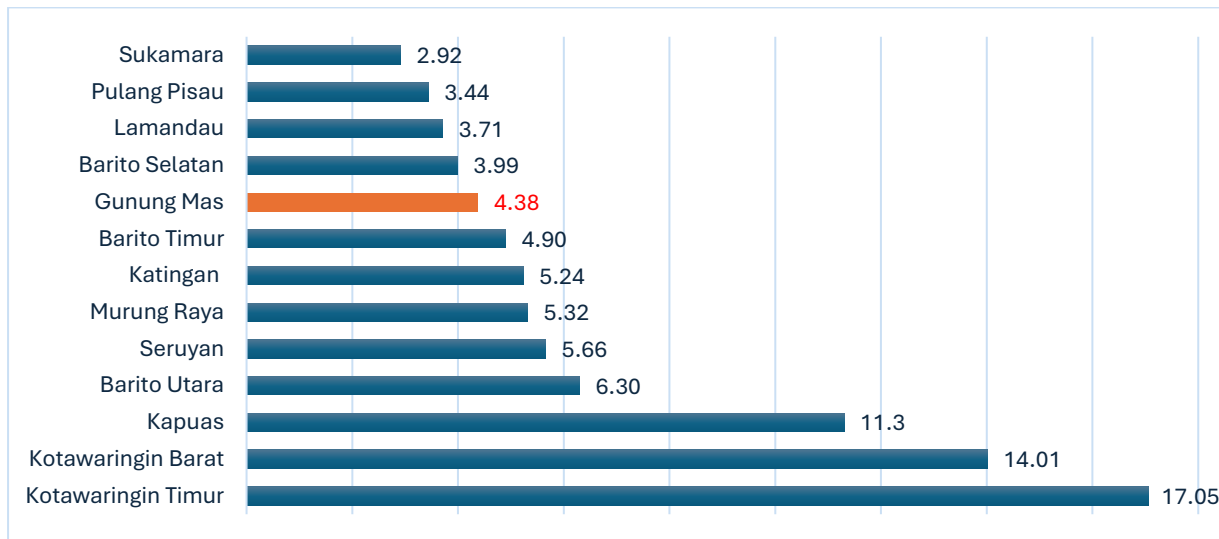


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Mas mencapai 4,48%, pertumbuhan ekonomi ini menempatkan Kabupaten Gunung Mas pada posisi menengah jika dibandingkan dengan kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Capaian ini mencerminkan adanya pergerakan ekonomi yang cukup stabil, yang kemungkinan didorong oleh sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan, atau pertambangan. Meskipun belum termasuk daerah dengan pertumbuhan tertinggi seperti Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas menunjukkan potensi positif untuk terus berkembang melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi daerah.

Gambar II.65

Kontribusi PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

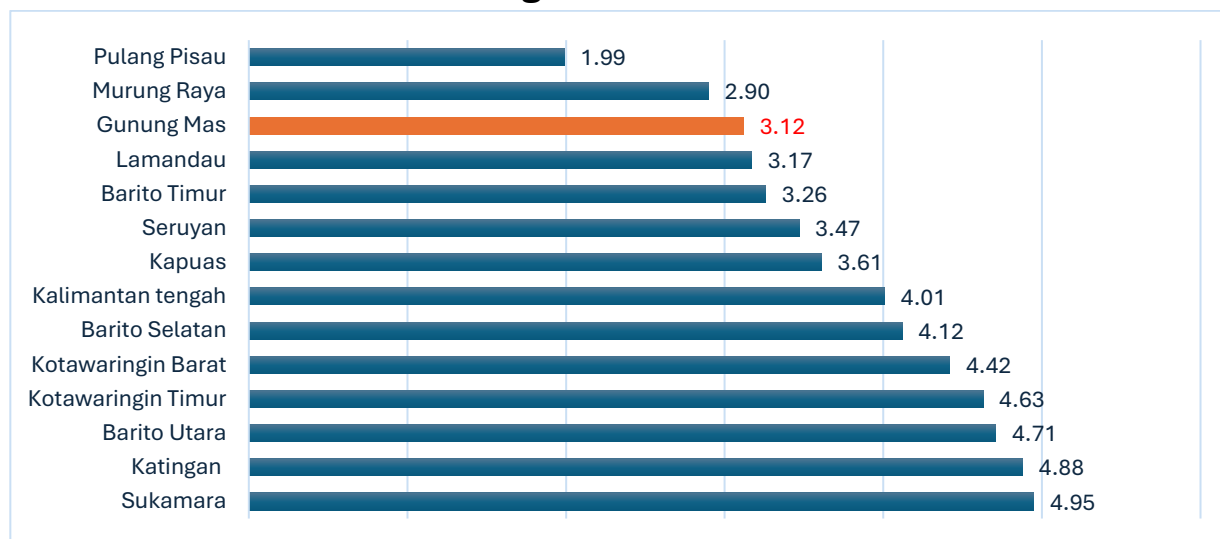
Pada tahun 2024, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Mas terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 4,38%. Angka ini menempatkan Kabupaten Gunung Mas di posisi menengah ke bawah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun belum menjadi kontributor utama seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (17,05%) atau Kabupaten Kotawaringin Barat (14,01%), kontribusi Kabupaten Gunung Mas tetap signifikan dan menunjukkan adanya peran aktif dalam mendorong perekonomian daerah. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki, terutama dari sektor-sektor sumber daya alam dan kegiatan ekonomi lokal yang terus berkembang. Dengan penguatan sektor strategis dan peningkatan investasi, kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas ke depannya masih berpeluang untuk ditingkatkan.

Potensi hasil bumi seperti kopi, karet, dan rempah-rempah yang bisa menjadi komoditas unggulan daerah belum diolah secara efisien, sehingga belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang memiliki berbagai destinasi alam menarik, namun belum terkelola dengan baik sehingga tidak bisa menarik banyak wisatawan yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Gunung Mas juga menjadi penghambat dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan. Banyak petani dan pelaku usaha yang masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam menjalankan usaha, yang menyebabkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Ditambah lagi, terbatasnya jaringan distribusi dan pemasaran yang menghubungkan produk-produk unggulan dengan pasar yang lebih luas, membuat produk-produk lokal sulit bersaing dengan produk dari daerah lain. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi daerah belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan.

Untuk mendorong pengembangan perekonomian sektor unggulan, diperlukan upaya yang lebih terencana dan terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Program-program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha, seperti pelatihan manajemen, teknologi pertanian, dan pengembangan produk olahan, sangat penting untuk meningkatkan daya saing

produk lokal. Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur yang mendukung distribusi hasil produk unggulan, serta mempromosikan potensi pariwisata dengan lebih agresif untuk menarik investor dan wisatawan. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas bisa berkembang lebih optimal, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, dan turut berkontribusi pada kesejahteraan daerah.

Gambar II.66
Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



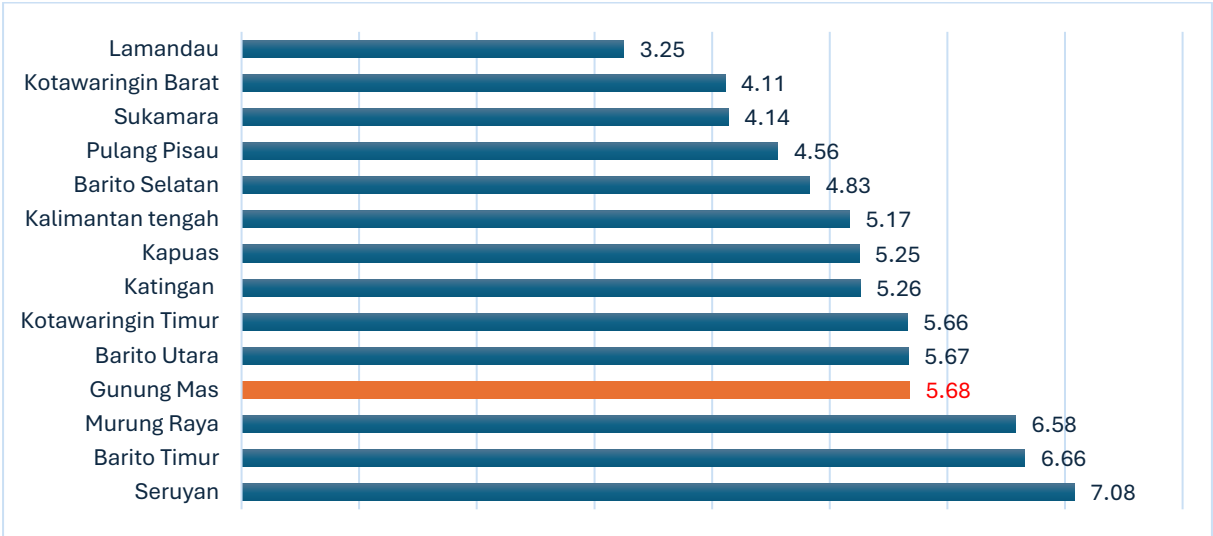
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 3,12%, menempatkan daerah ini dalam kategori menengah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan lapangan kerja. Hal ini mencerminkan perlunya upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal guna menekan angka pengangguran.

5. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih jauh dari optimal, meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan. ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat terlihat, di mana sebagian besar penduduk di daerah terpencil masih hidup dalam kondisi kurang memadai. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak menjadikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai turut memperburuk keadaan ini.

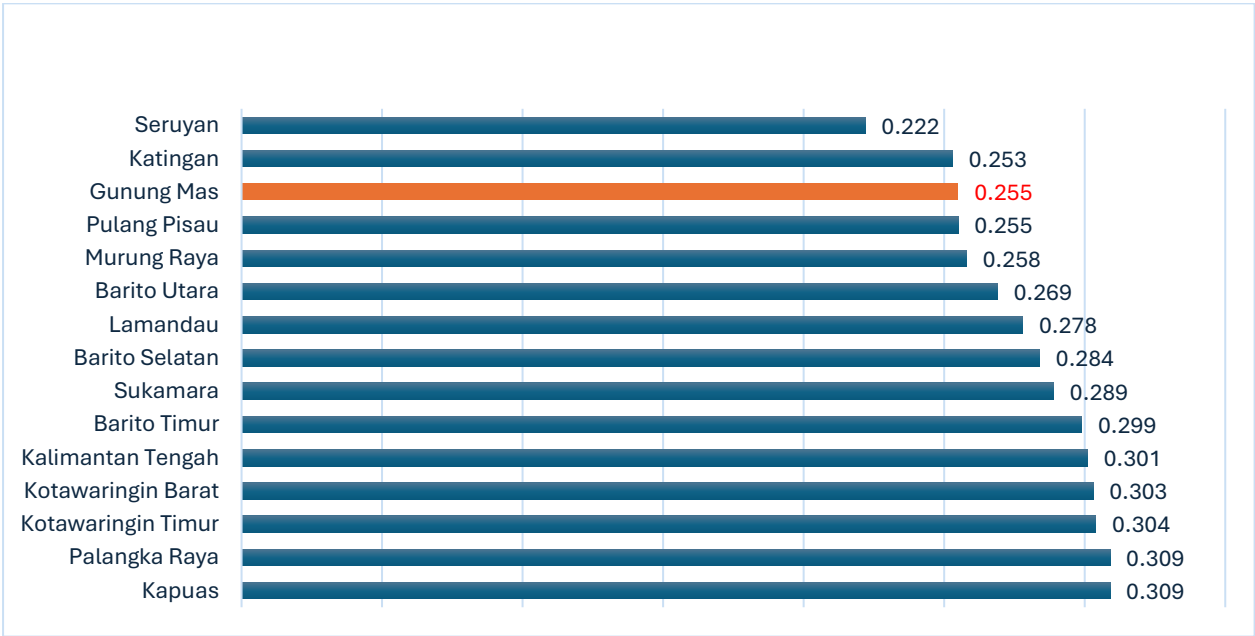
Gambar II.67
Tingkat Kemiskinan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 5,68%, menempatkannya di posisi menengah ke atas dibandingkan dengan kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di kisaran 5,17%, dan juga lebih tinggi dibanding beberapa daerah seperti Kabupaten Lamandau (3,25%) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (4,11%). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun telah terjadi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah, seperti penguatan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun-tahun mendatang.

Gambar II.68
Indeks Gini Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, nilai Indeks Gini di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 0,255, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Katingan yang memiliki Indeks Gini sebesar 0,253, Kabupaten Gunung Mas masih menunjukkan ketimpangan yang sedikit lebih tinggi. Angka ini mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi di Gunung Mas masih perlu diturunkan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan inklusif agar pemerataan kesejahteraan dapat terus ditingkatkan dan ketimpangan sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

Permasalahan kesenjangan/ketimpangan ini disebabkan oleh pekerja lokal yang belum mendapatkan harga yang adil untuk produknya, sementara akses ke pasar yang lebih luas terbatas. Selain itu, tingginya biaya produksi dan keterbatasan dalam teknologi pertanian membuat masyarakat kesulitan untuk meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin lebar, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas hidup. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkualitas dan berkeadilan, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan akses terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, maupun penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Selain itu, program-program yang mendukung ekonomi lokal, seperti bantuan untuk pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas produk lokal, perlu diperkuat. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Gunung Mas masih belum optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Banyak kebijakan yang diterapkan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Permasalahan ini dapat dilihat pada nilai akuntabilitas Kabupaten Gunung Mas di tahun 2024 yang mencapai 61,63 (B) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 62,14 dengan kategori B. Kemudian pada indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 mencapai 54,77 yang terpantau menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 60. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal akuntabilitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Proses administratif yang lambat dan tumpang tindihnya regulasi sering kali menghambat kelancaran pelayanan publik. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang maksimal juga menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Beberapa pejabat daerah kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas, perlu

ada reformasi birokrasi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas ASN. Selanjutnya pada sisi keamanan, berdasarkan data angka kriminalitas yang ditangani datahun 2024 mencapai 72,41, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan capaian di tahun 2023 sebesar 84,76. Dengan ini pemerintah daerah harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemerintahan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik harus lebih ditingkatkan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

2.3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dalam pembangunan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu daerah yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Global

Isu strategis internasional menjadi isu global dari RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas. Isu global ini akan menjadi *warning action* dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Geopolitik Dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi Kabupaten Gunung Mas memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas berada di posisi strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Keberadaan wilayah ini sebagai penghubung antara pusat provinsi dan daerah-daerah lainnya menjadikannya penting dalam peta politik dan ekonomi regional. Namun, tantangan geopolitik muncul ketika pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah pusat tidak selalu mempertimbangkan kepentingan lokal, yang menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan distribusi hasil pembangunan. Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi yang lebih luas, Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang untuk meningkatkan posisinya dengan penguatan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada kekayaan alam

dan budaya daerah juga bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Dampak Perubahan Iklim Global

Dampak perubahan iklim global mulai dirasakan di Kabupaten Gunung Mas, yang memiliki wilayah yang kaya akan hutan dan sumber daya alam. Perubahan pola cuaca yang semakin ekstrem, seperti curah hujan yang tinggi pada musim tertentu dan musim kemarau yang lebih panjang, berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Petani, khususnya di daerah pedesaan, sering kali kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, yang mengakibatkan kegagalan panen dan penurunan kualitas hasil pertanian. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim memperburuk ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Selain sektor pertanian, perubahan iklim juga berdampak pada kualitas dan keberlanjutan sumber daya air di Kabupaten Gunung Mas. Perubahan curah hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, yang mempengaruhi pasokan air bersih dan irigasi untuk pertanian. Kondisi ini memperburuk akses masyarakat terhadap air bersih, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Dengan berkurangnya pasokan air, kualitas hidup masyarakat juga terganggu, sementara kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi dan rumah tangga terus meningkat. Dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim, Kabupaten Gunung Mas perlu mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih serius. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti perlindungan hutan dan pengelolaan air yang efisien, harus menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti melalui penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan perbaikan sistem irigasi, juga sangat penting. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, demi menciptakan masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi Kabupaten Gunung Mas.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di Kabupaten Gunung Mas masih tergolong lambat, meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah ini. Akses terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di sebagian besar wilayah masih terbatas, terutama di daerah-daerah pedalaman. Infrastruktur internet yang belum merata dan kualitas sinyal yang buruk menghambat masyarakat, terutama di desa-desa terpencil, untuk memanfaatkan berbagai platform digital yang bisa mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Hal ini menyebabkan ketertinggalan dalam hal akses informasi dan keterbatasan peluang untuk mengembangkan potensi daerah. Teknologi dalam pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk juga masih sangat terbatas, padahal ini bisa meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Untuk mendorong perkembangan teknologi di Kabupaten Gunung Mas, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur digital, termasuk penyediaan akses internet yang

lebih luas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para petani, pelaku UMKM, serta masyarakat umum dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan yang mendukung sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan kualitas hidup di Kabupaten Gunung Mas.

d. Industri 5.0

Industri 5.0 merupakan tahap lanjutan dari revolusi industri yang berfokus pada integrasi teknologi canggih dengan sentuhan manusiawi. Berbeda dengan Industri 4.0 yang menekankan pada otomatisasi dan kecerdasan buatan, Industri 5.0 lebih menekankan pada kolaborasi antara manusia dan mesin, dengan tujuan untuk menciptakan produk yang lebih personal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Gunung Mas, penerapan konsep Industri 5.0 dapat membuka peluang baru untuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan lokal, dengan memanfaatkan teknologi tinggi yang mendukung kreativitas dan keterampilan masyarakat. Di sektor pertanian, misalnya, Industri 5.0 dapat diimplementasikan melalui penggunaan teknologi canggih yang dikendalikan oleh petani itu sendiri, seperti penggunaan robot pertanian yang bekerja bersama petani untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi tanaman, analisis tanah, dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih presisi dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara keahlian manusia dan teknologi, para petani di Kabupaten Gunung Mas dapat mengakses teknik pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi.

e. Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi

Pergeseran budaya akibat perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Gunung Mas mulai terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi, terutama melalui internet dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dulu, informasi sering kali disampaikan secara tatap muka atau melalui media tradisional seperti radio dan surat kabar, namun kini masyarakat lebih cenderung mengakses informasi secara langsung dan cepat melalui perangkat digital. Hal ini mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan pola kehidupan masyarakat.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut:

a. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Resiliensi dan prospek perekonomian Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi yang positif meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kabupaten

Gunung Mas, yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi fluktuasi pasar dan bencana alam. Masyarakatnya, yang sebagian besar bergantung pada sektor-sektor ini, telah terbiasa beradaptasi dengan perubahan cuaca dan kondisi pasar. Melalui penerapan praktik-praktik pertanian yang lebih modern dan berbasis pada teknologi, serta upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, perekonomian Kabupaten Gunung Mas dapat bertahan dan berkembang meskipun kondisi eksternal sering berubah.

Prospek perekonomian Kabupaten Gunung Mas ke depan juga cukup positif, terutama dengan adanya potensi pengembangan sektor-sektor unggulan yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Sektor pertanian dan perkebunan, seperti kopi, karet, dan produk rempah-rempah, dapat lebih berkembang jika ada peningkatan kualitas produk dan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, sektor pariwisata alam yang kaya juga dapat menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan, dengan adanya potensi untuk menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional. Dengan kebijakan yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur, Kabupaten Gunung Mas dapat membuka peluang baru untuk memperkuat perekonomiannya.

Keberlanjutan dan kemajuan perekonomian Kabupaten Gunung Mas sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan global dan lokal. Diversifikasi ekonomi yang mencakup pengembangan sektor-sektor baru seperti industri kreatif dan teknologi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan keterampilan akan semakin meningkatkan daya saing masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi untuk menjadi daerah yang lebih tangguh dan maju di masa depan.

b. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan

Keanekaragaman hayati di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki daerah ini, dengan beragam flora dan fauna yang tersebar di hutan tropisnya. Kabupaten ini merupakan bagian dari kawasan yang kaya akan keanekaragaman spesies, baik itu tumbuhan, hewan, maupun ekosistem yang mendukung kehidupan. Hutan yang luas, sungai-sungai yang mengalir jernih, serta berbagai jenis tanaman obat dan rempah-rempah memberikan potensi besar dalam bidang penelitian dan pengembangan produk alami. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya penting untuk keseimbangan ekosistem, tetapi juga berpotensi menjadi sumber daya yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seperti dalam pengembangan pariwisata alam, pertanian organik, dan produk berbasis alam. Selain itu, potensi lingkungan Kabupaten Gunung Mas juga terletak pada kemampuannya untuk menyediakan berbagai layanan ekosistem yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Hutan-hutan yang ada di daerah ini berperan penting dalam menyerap karbon, mengatur siklus air, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Sungai-sungai dan danau yang ada juga menyediakan sumber daya air yang esensial bagi kehidupan manusia dan kegiatan pertanian. Namun, potensi ini sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia yang

tidak ramah lingkungan, seperti pembalakan liar, perusakan habitat, dan konversi lahan yang tidak terkendali.

Untuk menjaga dan memanfaatkan keanekaragaman hayati serta potensi lingkungan secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan konservasi yang tegas dan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pengelolaan hutan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, pengembangan ekowisata, serta pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem adalah langkah penting yang perlu diambil. Pendidikan dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat setempat juga sangat penting untuk mendorong pelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, Kabupaten Gunung Mas dapat mengoptimalkan potensi alamnya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

c. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Potensi sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang besar untuk dikembangkan, mengingat mayoritas penduduknya masih tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat memiliki keterampilan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kerajinan tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun. Potensi ini dapat dioptimalkan dengan pemberian pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kewirausahaan. Selain itu, dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan dan teknologi, masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat mengembangkan kemampuan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, sehingga dapat mempercepat proses transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Modal manusia di Kabupaten Gunung Mas juga merupakan salah satu aspek penting untuk memajukan pembangunan daerah. Masyarakat yang terdidik dan terampil akan lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta berkontribusi dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih beragam dan lebih bernilai tambah. Oleh karena itu, penguatan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, terutama di daerah pedesaan, menjadi hal yang krusial. Pelatihan keterampilan yang lebih berfokus pada teknologi digital, pengelolaan usaha, dan pengembangan kapasitas di sektor industri kreatif dapat memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Pentingnya investasi pada pengembangan modal manusia juga terlihat dalam kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan di tingkat lokal. Agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, diperlukan para pemimpin daerah yang memiliki kapasitas untuk merencanakan dan mengelola pembangunan dengan pendekatan yang strategis dan berbasis data. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam menciptakan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan akan semakin memperkuat modal manusia di Kabupaten Gunung Mas. Dengan mengembangkan potensi SDM yang ada, Kabupaten Gunung Mas dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai

kekuatan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan.

d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pergeseran struktur kelas masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat terlihat seiring dengan perubahan dalam ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap teknologi. Sebagian besar masyarakat di daerah ini sebelumnya tergolong dalam kelas bawah dengan ketergantungan utama pada sektor pertanian dan perkebunan tradisional. Namun, dengan adanya perubahan dalam sektor ekonomi, terutama melalui urbanisasi dan perkembangan sektor-sektor ekonomi non-pertanian seperti perdagangan, pariwisata, dan industri kecil, mulai muncul kelas menengah yang lebih terdidik dan memiliki keterampilan di luar bidang pertanian. Perubahan ini secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peluang ekonomi dan kehidupan sosial.

e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Gunung Mas merupakan aspek krusial dalam memastikan tercapainya pembangunan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola yang baik harus menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta kejelasan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Namun, masih ada tantangan terkait dengan implementasi tata kelola yang baik, terutama di tingkat pemerintahan desa dan kecamatan, di mana pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan sering kali kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan yang berkelanjutan tentang manajemen keuangan, pengawasan, dan transparansi. Dalam rangka memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga independen seperti lembaga pengawas dan media sangat diperlukan. Penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi dan penyusunan anggaran yang lebih terbuka serta dapat diakses publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pembentukan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti forum musyawarah atau konsultasi publik, juga akan mempermudah proses evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang tinggi dapat tercapai, yang pada gilirannya akan mendorong keberhasilan pembangunan yang lebih adil dan merata di Kabupaten Gunung Mas.

f. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu tantangan utama yang menghambat kemajuan ekonomi daerah ini. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian tradisional yang belum sepenuhnya efisien. Meskipun potensi alam di Kabupaten Gunung Mas sangat besar, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, penerapan teknologi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas masih

terbatas. Sebagian besar petani dan pelaku usaha kecil di daerah ini masih menggunakan metode yang sudah usang, yang tidak hanya mengurangi hasil produksi tetapi juga meningkatkan biaya operasional. Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, keterampilan yang belum berkembang, serta keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor yang memperburuk rendahnya tingkat produktivitas. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas. Banyak tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk menjalankan usaha secara lebih efisien. Kurangnya pelatihan keterampilan teknis dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas membuat sebagian besar masyarakat kesulitan untuk berinovasi dalam mengelola sumber daya yang ada. Hal ini berakibat pada rendahnya daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Di sektor pertanian, misalnya, penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak efisien serta kurangnya pemahaman tentang manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan juga mengurangi hasil yang optimal.

Untuk mengatasi rendahnya produktivitas, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi dan pemanfaatan sistem pertanian modern yang lebih efisien harus menjadi fokus utama. Selain itu, penguatan infrastruktur dan sistem distribusi produk akan membantu petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Dengan memperbaiki akses terhadap teknologi, meningkatkan keterampilan SDM, serta membangun infrastruktur yang mendukung, Kabupaten Gunung Mas dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

RPJMD Kabupaten Gunung Mas, penting untuk melakukan telaahan isu regional secara menyeluruh. Telaah ini meliputi telaahan arahan RPJMN terhadap wilayah Provinsi, dan telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Gunung Mas, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Integrasi semua aspek ini akan memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Gunung Mas dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

A. Telaah Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam RPJMN tahun 2025-2029 memberikan arahan kebijakan kewilayahan pada tiap provinsi di Indonesia, khususnya pada Provinsi Kalimantan Tengah beberapa hal yang menjadi intervensi dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

Gambar II.69

Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah



Berdasarkan arahan pembangunan kewilayahan maka *Highlight* intervensi kebijakan secara umum dan khususnya pada Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.57

Highlight Intervensi dan lokasi Prioritas Kalimantan Tengah

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>):	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di Wilayah Kalimantan Tengah disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui:
• Kabupaten Katingan • Kabupaten Gunung Mas • Kabupaten Murung Raya • Kabupaten Barito Utara	• Pengendalian kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan, dengan output: penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
	• Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan output: pemulihan dan restorasi lahan gambut, pengelolaan data informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut
	• Rehabilitasi ekosistem mangrove, dengan output: pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove
	• Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan output: inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
	• Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Provinsi Kalimantan Tengah	Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah, melalui:
	Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri, dengan output: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral dan rekomendasi kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral
	Pengembangan industri hilir/antara olahan sumber daya mineral, dengan output: riset dan inovasi hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan, kebijakan penguatan industri logam, monitoring dan evaluasi perkembangan industri smelter/pemurnian/ pengolahan logam dasar beserta turunannya
	Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular, dengan output: fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya dan peningkatan manajemen energi dan air serta pemanfaatan EBT (<i>Renewable Energy</i>) dalam rangka efisiensi sumberdaya industri
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui:
	Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut, dengan output: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk Bandara Murung Raya, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut
	Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan output: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan koridor logistik, dan pembangunan jembatan koridor logistik



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui:
	• Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dengan output: pembangunan unit sekolah baru dan penyelenggaraan sekolah unggul
	• Revitalisasi prasarana pendidikan, dengan output: pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sekolah dasar, menengah, dan madrasah
	• Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan output: pelatihan vokasi di Provinsi Kalimantan Tengah
	• Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan output: peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri
	• Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan output: pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi pusat keunggulan, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu, dan pengembangan pengajaran berbasis pabrik (<i>teaching factory</i>)
Provinsi Kalimantan Tengah	Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal, melalui:
	• Penyediaan air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan kawasan terpencil, dengan output: pembangunan tampungan air dan prasarana air baku
	• Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal, dengan output: pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rehabilitasi/peningkatan prasarana



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal
Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertai pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi, melalui:
	• Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan output: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu
	• Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan, dengan output: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
	• Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat, dan layanan penyiaran digital disertai pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui:
	• Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan output: peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan Kesehatan Ibu dan Anak; pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan (SPA) untuk pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal di RS sesuai standar; pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS
	• Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan output: pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar, peningkatan ketrampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dan



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu
	• Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer
	• Penguatan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan output: pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis, pelaksanaan tindak lanjut kasus kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan kapasitas SDM untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis
Provinsi Kalimantan Tengah	Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif, melalui:
	• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dengan output: pengembangan dan pengelolaan SPAM
	• Peningkatan utilitas dasar perdesaan, dengan output: peningkatan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan setempat skala individu
	• Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan output: pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional, skala kota, skala kawasan, dan berbasis masyarakat
	• Fasilitasi pembangunan rumah baru, dengan output: bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan rehabilitasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM)
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, melalui:



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	Pengendalian penyakit malaria, dengan output: pemberian alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria
	Penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting, dengan output: Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock dan layanan imunisasi mendukung pencapaian stunting
Provinsi Kalimantan Tengah	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui:
	Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan output: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial
	Perlindungan sosial adaptif dan penguatan JKN, dengan output: penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah,

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran

B. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, terdapat sejumlah isu strategis Provinsi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Gunung Mas. Isu-isu dalam RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029 ialah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintah daerah belum optimal
2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM
3. Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur
4. Degradasi lingkungan
5. Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan
6. Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antarzona pembangunan
7. Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam
8. Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan
9. Komitmen pembangunan Kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau
10. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan
11. Perlunya peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan kebudayaan lokal

Sebagai bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah provinsi, terutama dalam menjawab isu-isu utama yang telah diidentifikasi dalam RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Kabupaten ini menyimpan potensi besar di sektor sumber daya alam, pertanian, dan energi terbarukan, yang dapat diarahkan untuk mendorong hilirisasi produk unggulan serta diversifikasi ekonomi daerah. Di sisi lain, posisi geografis Gunung Mas yang berada di zona tengah dengan karakteristik pedalaman menjadikannya kunci penting dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat konektivitas kawasan. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, meningkatkan kualitas SDM lokal melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, peran aktif Gunung Mas dalam merespons isu strategis provinsi akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pelestarian budaya dan lingkungan di Kalimantan Tengah. Adapun dalam penyelenggaraan RPJMD Kalimantan Tengah mengusung visi: "MENGANGKAT HARKAT MARTABAT MASYARAKAT DAYAK KHUSUSNYA, UMUMNYA

MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (MANGGATANG UTUS), DENGAN SPIRIT KEARIFAN LOKAL DAN BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG BERKAH, KALTENG MAJU, KALTENG BERMARTABAT UNTUK MENYAMBUT INDONESIA EMAS 2045” dengan menetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
2. Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial
5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

Dalam kerangka pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, Zona Tengah yang mencakup Klaster Palangkaraya diarahkan sebagai pusat pengembangan konservasi berskala internasional yang berkelanjutan, pusat perdagangan dan jasa, pusat riset dan pendidikan, serta sebagai sentra pangan terintegrasi. Klaster ini mencakup Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan, yang masing-masing memiliki keunggulan dan kontribusi strategis. Kota Palangkaraya berperan sebagai pusat pemerintahan, riset, dan jasa modern, sedangkan arah pembangunan di Kabupaten Gunung Mas difokuskan pada pemanfaatan potensi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara optimal melalui integrasi hulu–hilir berbasis food estate. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Gunung Mas sebagai pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan provinsi, sembari tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan yang luas di wilayahnya.

Lebih jauh, dalam kerangka besar “Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif,” Kabupaten Gunung Mas juga memainkan peranan penting dalam mendorong hilirisasi mineral dan sumber daya alam. Wilayah ini menjadi bagian dari rencana strategis pembangunan Kereta Api Palangkaraya–Gunung Mas–Katingan yang akan membuka konektivitas baru antarkabupaten, memperlancar distribusi barang, serta mempercepat tumbuhnya pusat-pusat ekonomi. Keberadaan Gunung Mas di koridor transportasi tersebut menjadikannya tidak hanya sebagai lumbung pangan dan sumber bahan mentah, tetapi juga sebagai simpul logistik baru di tengah Kalimantan Tengah. Sinergi ini menjadikan pembangunan Gunung Mas tak hanya berdampak lokal, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi dan konektivitas antarwilayah dalam skema pembangunan regional yang berkelanjutan.

C. Telaah RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045

Memahami bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD pada tahap I maka beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a) Visi RPJPD, Visi Kabupaten Gunung Mas 2045:

GUNUNG MAS Be SMART

(Berkelanjutan, Sejahtera dan Maju Berbasis *Agro Resources* dan *Tourism*)

Gunung Mas Be SMART (Berkelanjutan, Sejahtera dan Maju Berbasis *Agro Resources* dan *Tourism*) terdiri atas 5 (lima) pokok visi utama, yakni Berkelanjutan, Maju, Pembangunan Sektor Pertanian, Pembangunan Sektor Pariwisata, dan Sejahtera. Kabupaten Gunung Mas yang **maju** dapat diupayakan melalui peningkatan infrastruktur berkelanjutan termasuk di dalamnya akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas sehingga akan menghasilkan generasi dengan kualitas SDM unggulan. Topografi Kabupaten Gunung Mas yang meliputi daerah perbukitan membuat Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan melalui daya tarik **pariwisata** dan peningkatan sektor **pertanian**, hal tersebut akan meningkatkan perekonomian kreatif masyarakat dan iklim investasi di Kabupaten Gunung Mas semakin menguat yang mampu menciptakan **kesejahteraan** bagi masyarakat. Kabupaten Gunung Mas yang **berkelanjutan** dapat ditandai dengan pembangunan dan pengelolaan kota yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peran pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk bersinergi mengupayakan sistem tata kelola yang baik dan bersih akan menjadikan Kabupaten Gunung Mas dapat mencapai pokok visi yang dicita-citakan.

- b) Misi RPJPD, misi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Modern
- 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif, Maju, Kreatif, dan Berkelanjutan Berbasis Keanekaragaman Potensi Daerah
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif
- 4) Mewujudkan Keharmonisan dan Stabilitas Daerah
- 5) Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya
- 6) Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata
- 7) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkelanjutan
- 8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

- c) Arah Pembangunan Tahap I (Periode 2025-2029) Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Sosial Ekonomi yang Berkualitas dan Merata (2025-2029)

Pembangunan infrastruktur mengacu pada upaya untuk meningkatkan distribusi pembangunan yang lebih merata mejadi landasan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat memberikan akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dengan infrastruktur yang baik

maka dapat menciptakan **Smart City/Regency**, wilayah dapat menarik investasi, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus mengambil langkah-langkah konkret untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas secara lebih cepat daripada sebelumnya tidak hanya mencakup proyek-proyek konstruksi, perbaikan jalan namun juga pembangunan sarana air bersih, pembangunan pusat kesehatan, jaringan listrik dan upaya peningkatan infrastruktur digital dan telekomunikasi.

Untuk itu, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan infrastuktur pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas, memberikan dampak yang luas dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan lain-lain. Pembangunan Kabupaten Gunung Mas dapat di arahkan pada **“PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI YANG MEMADAI SEBAGAI PERCEPATAN AKSESIBILITAS WILAYAH”** yang dalam implementasinya perlu diperhatikan betul karena jika perencanaan sudah baik harus diikuti eksekusi yang matang juga agar dampaknya bisa dirasakan semua orang.

Dari arah kebijakan di atas, maka sasaran pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan indeks kepuasan layanan infrastruktur.
- b. Terwujudnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah dengan indeks ketahanan daerah.

D. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas, menyimpulkan bahwa pendekatan holistik dan integratif diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Studi pertanian berkelanjutan menunjukkan potensi signifikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui inovasi teknologi, praktik ramah lingkungan, dan pemberdayaan petani.

Berikut adalah poin-poin kesimpulan dari analisa yang dilakukan dalam KLHS ini:

1. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Gunung Mas menghadapi sejumlah isu prioritas, meliputi:

- Kerusakan hutan dan kehilangan biodiversitas akibat konversi lahan dan aktivitas tambang ilegal.
- Pertanian tidak berkelanjutan yang memicu degradasi lahan dan rendahnya produktivitas pertanian.
- Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik, industri, dan aktivitas ekstraktif ilegal.
- Ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya kapasitas masyarakat, dan akses layanan dasar.
- Dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan penurunan daya dukung lingkungan.

2. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)



- Pemulihan Ekosistem: Rehabilitasi lahan kritis melalui pendekatan agroforestri dan Konservasi.
- Optimalisasi Sumber Daya Air: Manajemen irigasi dan perlindungan daerah tangkapan air.
- Kualitas Lingkungan: Penegakan hukum terhadap pencemaran tambang ilegal serta pengelolaan sampah terpadu.

3. Studi Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan karakteristik 14 jenis tanah di Kabupaten Gunung Mas, studi menunjukkan potensi pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat. Beberapa poin penting meliputi:

- Jenis tanah dominan seperti *Typic Dystrudepts*, *Psammentic Dystrudepts*, dan *Typic Hapludults* cocok untuk tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman keras seperti karet dan kelapa sawit.
- Praktik agroforestri dan konservasi tanah direkomendasikan untuk memperbaiki lahan terdegradasi.
- Teknologi hemat air seperti irigasi tetes dan penggunaan PGPR (*Plant Growth Promoting Rhizobacteria*) dapat meningkatkan efisiensi lahan dan produktivitas pertanian.
- Penggunaan biochar dan pupuk organik: Teknologi ini mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, dan menyimpan karbon.
- Diversifikasi tanaman berupa penanaman tanaman tahan iklim seperti sorgum, millet, dan padi tahan salinitas dapat mendukung ketahanan pangan.

4. Rekomendasi Kebijakan Strategis

Melalui analisis *Driving Forces, Pressure, States, Impacts, Responses* (DPSIR) dan *Analytical Hierachy Process* (AHP), 8 (delapan) kebijakan strategis prioritas dirumuskan, antara lain:

1. Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
2. Penguatan Sistem Pertanian Berkelanjutan
3. Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas
4. Infrastruktur Berkelanjutan dan Transportasi Hijau
5. Manajemen Sampah dan Limbah Terpadu
6. Pengembangan Teknologi Hijau dan Digitalisasi
7. Konservasi Biodiversitas
8. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

5. Strategi Implementasi Tahapan 5 (lima) tahun

Implementasi kebijakan dan program dilakukan dalam tiga tahapan:

- Tahun 1-2: Pembangunan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur dasar.
- Tahun 3-4: Pelaksanaan program intensif di lapangan dengan evaluasi pertengahan jalan.
- Tahun 5: Konsolidasi hasil, evaluasi akhir, dan rencana keberlanjutan program.

6. Dampak Ekonomi dan Lingkungan

- Dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan teknologi hijau.
- Dampak lingkungan berupa penurunan laju deforestasi, pemulihan keanekaragaman hayati, dan peningkatan daya dukung lingkungan.
- Dampak sosial berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan program berbasis komunitas.

E. Telaah RTRW Kabupaten Gunung Mas

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014–2034 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomer 8 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014–2034. Penetapan perda ini bertujuan untuk terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang maju berbasiskan pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- I. RTRW Kabupaten Gunung Mas memiliki berbagai kebijakan penataan ruang yang terdiri atas:
 - a. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat memiliki strategi kebijakan ini adalah:
 - Membuka isolasi ke daerah yang belum terlayani sarana dan prasarana transportasi secara baik;
 - Mengembangkan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat;
 - Mengembangkan potensi sumbar daya lahan;
 - Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; dan
 - Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian dan pertambangan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
 - b. Peningkatan peluang investasi memiliki strategi kebijakan ini adalah:
 - Memberikan insentif penanaman modal di kawasan potensial untuk investasi;
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan investasi; dan
 - Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di tiap bidang usaha;
 - c. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki strategi kebijakan adalah:
 - Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;
 - Menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan;
 - Mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi

- d. Menjaga keseimbangan lingkungan memiliki strategi kebijakan ini adalah:
 - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya.
 - Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
 - Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.
 - Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi.
 - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan memiliki strategi kebijakan ini adalah:
 - Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- II. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhieraki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- a. Sistem pusat pelayanan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:
 - PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi yaitu Kota Kuala Kurun sebagai PKL
 - Sistem perkotaan Kabupaten Gunung Mas yaitu:
 - 1. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten, yaitu terdiri dari:
 - PPK meliputi:
 - 1) Kelurahan Tewah;
 - 2) Kelurahan Tumbang Talaken;
 - 3) Kelurahan Sepang Simin;
 - 4) Kelurahan Jakatan Raya;
 - 5) Kelurahan Tumbang Rahuyan;
 - 6) Kelurahan Tehang;
 - 7) Kelurahan Kampuri; dan
 - 8) Kelurahan Rabambang.
 - PPL meliputi:
 - 1) Kelurahan Tumbang Miri;
 - 2) Kelurahan Tumbang Marikoi; dan
 - 3) Kelurahan Tumbang Napoi.
 - b. Rencana Sistem jaringan prasarana utama kabupaten meliputi:
 - Sistem jaringan prasarana transportasi.
 - 1. Sistem transportasi darat;
 - 2. Sistem transportasi udara; dan
 - 3. Sistem transportasi perkereta apian.
 - Sistem jaringan prasarana energi.
 - 1. Pembangkit tenaga listrik; dan

2. Jaringan prasarana energi.
- Sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
 1. Penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
 2. Penyelenggaraan jaringan satelit.
- Sistem jaringan prasarana sumber daya air.
 1. Wilayah sungai;
 2. Danau/waduk;
 3. Daerah irigasi;
 4. Prasarana air baku untuk air bersih; dan
 5. Prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- Sistem jaringan prasarana lingkungan.
 1. Sistem jaringan air limbah; dan
 2. Sistem jaringan persampahan.

III. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas meliputi:

a. Rencana kawasan lindung.

Kawasan lindung ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi serta kawasan lindung sesuai perkembangan yang terdapat di wilayah Kabupaten. Kawasan lindung tersebut meliputi:

1. Kawasan hutan lindung terdiri dari:
 - Kecamatan Damang Batu;
 - Kecamatan Miri Manasa; dan
 - Kecamatan Kahayan Hulu Utara
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari:
 - Kawasan bergambut di daerah hulu sungai Rungan, sungai Miri dan sungai Manuhing yang telah menjadi hutan lindung; dan
 - Kawasan resapan air terdapat di kawasan hutan
3. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari:
 - Kawasan sempadan sungai; dan
 - Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari:
 - Kawasan taman hutan raya berada di kawasan hutan lindung;
 - Kawasan wisata alam;
 - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan kabupaten yaitu Rumah Adat Betang di Desa Tumbang Anoi; dan
 - Koridor satwa dan dataran tinggi di Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa.
5. Kawasan rawan bencana alam.

b. Rencana kawasan budidaya.

Kawasan Budidaya tersebut terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan pertambangan;
4. Kawasan peruntukan permukiman;
5. Kawasan peruntukan industri;

6. Kawasan peruntukan wisata; dan
 7. Kawasan peruntukan lainnya.
- IV. Rencana pengembangan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Gunung Mas meliputi:
- a. Kawasan Strategis Provinsi.
 1. Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi; dan
 2. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi.
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
 1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 2. Kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 3. Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- V. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat :
- a. Arahan perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. Arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap tantangan dan peluang pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Gunung Mas yang akan ditangani dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Gunung Mas menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat ini, banyak wilayah, terutama di daerah pedalaman, yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas dasar seperti jalan yang layak, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya menghambat mobilitas barang dan orang, tetapi juga membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus adalah pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya, yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan memudahkan distribusi hasil pertanian dan produk lokal lainnya ke pasar yang lebih luas, meningkatkan konektivitas antara wilayah, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Selain itu, penyediaan akses listrik dan air bersih yang merata akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan rumah tangga maupun usaha kecil dan menengah. Infrastruktur

telekomunikasi dan internet yang lebih baik juga penting untuk meningkatkan akses informasi dan membuka peluang baru dalam bidang pendidikan dan bisnis. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, penting bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mengintegrasikan perencanaan infrastruktur dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Gunung Mas dapat mempercepat proses pembangunan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

2) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka menciptakan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi yang akan datang. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan tropis, sungai, dan berbagai ekosistem lainnya, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat serta keberlanjutan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, sumber daya alam bisa mengalami kerusakan yang mengancam keseimbangan ekologis dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah perlindungan terhadap hutan dan kawasan konservasi. Deforestasi yang disebabkan oleh pembalakan liar, konversi lahan untuk pertanian, dan pembukaan lahan untuk perkebunan sering kali mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu meningkatkan penegakan hukum terkait perlindungan hutan, mengembangkan program reboisasi, dan mendorong penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, penting juga untuk mendorong masyarakat untuk beralih ke praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, yang dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan.

Selain perlindungan terhadap hutan, pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pencemaran sungai dan danau akibat limbah industri dan rumah tangga, serta buruknya pengelolaan sampah, dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, seperti program pengurangan sampah plastik dan peningkatan sistem daur ulang, serta memperbaiki sistem sanitasi dan pengelolaan air. Melalui upaya-upaya tersebut, Kabupaten Gunung Mas dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi lingkungan hidup dan potensi bencana alam memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan, secara signifikan dapat meningkatkan risiko dan dampak bencana alam. Hilangnya tutupan hutan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, memperbesar potensi banjir dan tanah longsor. Pencemaran lingkungan dapat memperburuk kualitas air dan tanah, mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem, serta melemahkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Gunung Mas, bencana yang berpotensi di Kabupaten Gunung Mas, yakni banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan dan cuaca ekstrim. Oleh karena itu, perangkat daerah bersama masyarakat sepakat menjadikan bencana dengan risiko tinggi tersebut sebagai prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunung Mas. Hasil pengkajian risiko bencana tersebut merupakan langkah untuk menentukan arahan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunung Mas yang lebih terfokus dan terarah untuk ke depannya. Berdasarkan hasil prioritas tersebut, maka dirumuskan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana untuk pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan untuk memperkecil tingkat bahaya dan mengurangi kerentanan penduduk terpapar. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengacu pada kajian kapasitas yang dihasilkan dari analisis kajian ketahanan daerah. Indeks ketahanan daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 0,42. Hal ini menunjukkan Kabupaten Gunung Mas memiliki tingkat kapasitas sedang. Upaya peningkatan kapasitas dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan kelembagaan serta pengembangan sistem penanggulangan bencana untuk meminimalisir risiko bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Gunung Mas.

3) Peningkatan pembangunan manusia sesuai mutu pelayanan dasar

Peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas, yang berfokus pada mutu pelayanan dasar, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta infrastruktur dan fasilitas umum lainnya sangat berperan dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera. Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses pelayanan dasar dengan kualitas yang memadai. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Di sektor pendidikan, peningkatan kualitas dan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama. Meskipun pendidikan telah tersedia di sebagian besar wilayah Kabupaten Gunung Mas, masih banyak daerah yang kekurangan tenaga pengajar berkualitas, fasilitas yang memadai, serta akses terhadap pendidikan tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan distribusi guru terlatih dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah. Selain itu, program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja,

seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan teknologi, dapat memberikan peluang bagi generasi muda untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Di sektor kesehatan, perbaikan mutu pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan puskesmas dan rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap serta peningkatan jumlah tenaga medis yang profesional akan sangat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan penyakit melalui program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi, sanitasi, dan edukasi hidup sehat, harus dilakukan secara masif untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Peningkatan kualitas pelayanan dasar harus disertai dengan pengelolaan yang efisien dan transparan agar pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas bisa berjalan dengan maksimal. Dengan memperbaiki mutu pelayanan dasar, Kabupaten Gunung Mas dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan produktif, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

4) Pemanfaatan potensi ekonomi unggulan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi

Pemanfaatan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Gunung Mas dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan langkah strategis untuk memacu perkembangan daerah yang berkelanjutan. Kabupaten ini memiliki sejumlah potensi unggulan yang belum dimaksimalkan secara optimal, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata alam. Salah satu contoh potensinya adalah hasil pertanian seperti kopi, karet, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas unggulan dengan pasar yang cukup besar. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan sektor-sektor ini melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan diversifikasi pasar. Melalui penerapan teknologi pertanian yang modern, serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, sektor pariwisata juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas. Keindahan alam dengan hutan tropis, danau, serta keberagaman budaya yang dimiliki daerah ini dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang mengundang pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Untuk memanfaatkan potensi pariwisata, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi yang lebih baik, fasilitas akomodasi yang nyaman, serta promosi yang gencar. Dengan pengelolaan yang baik dan berbasis pada keberlanjutan, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan utama yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Namun, untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi unggulan ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah,



sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha lokal, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberdayakan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui pemanfaatan potensi ekonomi unggulan secara optimal, Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisa *Location Quotient* (LQ) dan pembahasan potensi sektor pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi dan wisata Kabupaten Gunung Mas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun beberapa kesimpulan tersebut antara lain adalah:

1. Sektor yang menjadi potensi unggulan di Kabupaten Gunung Mas, yaitu: sektor pertanian (tanaman pangan, tanaman buah dan perkebunan), peternakan, perikanan dan ekowisata.
2. Tanaman pangan yang menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu: ubi kayu dan jagung.
3. Tanaman buah yang menjadi potensi unggulan adalah pisang.
4. Tanaman perkebunan potensi unggulan yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet.
5. Sektor peternakan, potensi unggulannya adalah ternak babi, sapi potong, ayam pedaging dan ayam petelur.
6. Sektor perikanan, potensi unggulannya adalah budidaya ikan patin dan nila.
7. Sektor ekonomi ditandai dengan jumlah UMKM yang terus berkembang terutama usaha mikro.
8. Potensi pariwisata di Kabupaten Gunung Mas cukup besar, namun belum banyak yang dikelola dengan baik.

Berdasarkan analisa di atas, beberapa rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengembangan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Mendirikan *Science Techno Park* untuk mendorong inovasi dan diversifikasi produk unggulan daerah.
2. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan deregulasi dan kemudahan izin serta membangun sistem informasi pelayanan terpadu.
3. Diperlukan pelatihan, pendampingan, seminar, lokakarya dan studi banding terhadap aparaturnya daerah dan masyarakat/pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keterampilan serta kreativitas.
4. Diperlukannya perbaikan infrastruktur jalan, irigasi dan pasar untuk menunjang dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan menggali potensi pariwisata.
5. Memfasilitasi sumber pembiayaan melalui pembentukan lembaga penjamin perkreditan daerah (Jamkrida).

6. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi mengenai kondisi dan lokasi potensi daerah.
7. Meningkatkan promosi dan pemasaran terkait melalui kegiatan expo, website, media sosial maupun kerjasama lintas daerah.

5) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan yang terstruktur

Optimalisasi penanggulangan kemiskinan yang terstruktur di Kabupaten Gunung Mas merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta ketergantungan pada sektor ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mengatasi kemiskinan. Kabupaten Gunung Mas perlu mengembangkan program-program yang mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan tradisional. Penyediaan akses permodalan, pelatihan keterampilan manajerial, dan peningkatan akses pasar menjadi hal yang sangat penting untuk membantu pelaku UMKM berkembang dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, terutama di daerah terpencil.

Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan yang terstruktur juga memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan. Program bantuan sosial harus tepat sasaran dan disertai dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Implementasi kebijakan yang berbasis pada data yang akurat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, akan mempercepat tercapainya tujuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, kemiskinan dapat ditanggulangi secara lebih efektif dan masyarakat dapat memperoleh peluang yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Percepatan implementasi reformasi birokrasi

Percepatan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Gunung Mas sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya pemerintah. Di Kabupaten Gunung Mas, implementasi reformasi birokrasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas kepada masyarakat, serta mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Salah satu langkah penting dalam percepatan reformasi birokrasi adalah dengan memperbaiki sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah perlu melakukan seleksi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pegawai negeri yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan tuntutan tugas dan pelayanan publik. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesionalisme ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan juga sangat penting untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi praktik-praktik birokrasi yang tidak efisien.

Di samping itu, percepatan implementasi reformasi birokrasi juga memerlukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan cara yang transparan dan terbuka. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan sistem pengaduan publik dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan, maka akuntabilitas pemerintah akan semakin terjaga. Percepatan reformasi birokrasi ini, jika dilaksanakan dengan baik, akan membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Identifikasi isu strategis Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui pendekatan yang mempertimbangkan potensi unggulan daerah, permasalahan aktual, serta dinamika isu pembangunan dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Kabupaten ini memiliki kekuatan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta posisi strategis dalam sistem pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pengembangan klaster ekonomi regional. Namun, masih dijumpai tantangan seperti belum meratanya infrastruktur dasar, degradasi lingkungan, kualitas SDM yang belum optimal, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang menghambat pertumbuhan inklusif. Telaah terhadap dokumen KLHS dan arah kebijakan global hingga regional menunjukkan bahwa Gunung Mas perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, mengelola lingkungan secara berkelanjutan, memperkuat pelayanan dasar yang inklusif, memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui hilirisasi, dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih akuntabel. Kelima isu strategis ini menjadi pondasi utama dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke depan. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel II.58
Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

POTENSI	PERMASALAHAN	TELAAH ISU DINAMIS				ISU STRATEGIS
		KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Terdapat pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW dan PKL) yang mengarah pada pemerataan infrastruktur jalan, transportasi, fasilitas perdagangan, dan layanan dasar. Direncanakan pembangunan rel kereta api Palangkaraya-Gunung Mas-Katingan untuk memperkuat konektivitas dan distribusi regional. Masih terdapat tantangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah dan sanitasi, namun ada potensi perbaikan melalui model sistem dinamis pengelolaan persampahan.	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah				Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
Daya dukung air tergolong tinggi, mendukung potensi pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	• Kerusakan hutan dan kehilangan biodiversitas akibat konversi lahan dan aktivitas tambang ilegal • Pertanian tidak berkelanjutan yang memicu degradasi lahan dan rendahnya produktivitas pertanian	Dampak Perubahan Iklim Global	b. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan	Degradasi lingkungan Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan



POTENSI	PERMASALAHAN	TELAAH ISU DINAMIS				ISU STRATEGIS
		KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(IKLH) cenderung stabil namun kualitas air masih menjadi isu, perlu intervensi khusus. Pencemaran dari limbah domestik, peternakan, dan sampah tidak terkelola menjadi tantangan utama, namun dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.		• Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik, industri, dan aktivitas ekstraktif ilegal • Dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan penurunan daya dukung lingkungan				
IPM Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan, dari 72,00 (2020) menjadi 73,88 (2024). Kinerja pendidikan membaik dengan harapan lama sekolah meningkat menjadi 12,1 tahun dan rata-rata lama sekolah menjadi 9,37 tahun (2024). Akses kesehatan meningkat dengan umur harapan hidup mencapai 73,58 tahun, meskipun masih ada tantangan dalam kualitas dan pemerataan layanan dasar.	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM		Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	c. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Rendahnya kualitas dan daya saing SDM Komitmen pembangunan Kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau	Peningkatan pembangunan manusia sesuai mutu pelayanan dasar
Potensi besar di sektor primer: pertanian, perkebunan, kehutanan, dan	Belum optimalnya pengembangan perekonomian	• Ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya kapasitas masyarakat, dan akses layanan dasar	Industri 5.0 Perkembangan Teknologi Geopolitik Dan Geoekonomi	a. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam	Pemanfaatan potensi ekonomi unggulan dalam akselerasi



POTENSI	PERMASALAHAN	TELAAH ISU DINAMIS				ISU STRATEGIS
		KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
perikanan, dengan kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 33,05% pada 2024. Potensi hilirisasi dan industrialisasi hasil pertanian dan perkebunan, termasuk dalam kawasan klaster ekonomi eksklusif Delta Kalteng. Pertumbuhan ekonomi positif pasca pandemi, serta adanya upaya diversifikasi ekonomi dari pertambangan menuju sektor pangan dan jasa.	pada sektor unggulan daerah				Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan	pertumbuhan ekonomi
Persentase penduduk miskin pada 2024 sebesar 5,68%, dengan tren sedikit menurun dari tahun sebelumnya, namun tetap membutuhkan intervensi komprehensif. Ketimpangan pendapatan menurun dengan Indeks Gini 0,255 (2024), menunjukkan perbaikan pemerataan ekonomi. Terdapat peluang pemanfaatan bonus demografi dengan	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antarzona pembangunan Perlunya peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan kebudayaan lokal	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan yang terstruktur



POTENSI	PERMASALAHAN	TELAAH ISU DINAMIS				ISU STRATEGIS
		KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
mayoritas penduduk usia produktif, yang perlu didukung dengan program peningkatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.						
Kabupaten Gunung Mas menjadi pusat pelayanan pemerintahan kabupaten dengan ibukota di Kuala Kurun, yang telah diarahkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW). Telah tersedia sistem pengembangan wilayah berdasarkan tiga SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) yang mempermudah tata kelola dan pelayanan publik berbasis wilayah. Komitmen terhadap pengakuan hak masyarakat adat dan pelestarian nilai-nilai lokal (Dayak Ngaju dan Ot Danum), mencerminkan tata kelola yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik		Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah		Tata kelola pemerintah daerah belum optimal	Percepatan implementasi reformasi birokrasi



2.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2025, memiliki 2 (dua) buah BUMD, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang maksudnya bertujuan untuk : a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;b). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c). memperoleh laba dan/atau keuntungan. Berikut data BUMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2025.

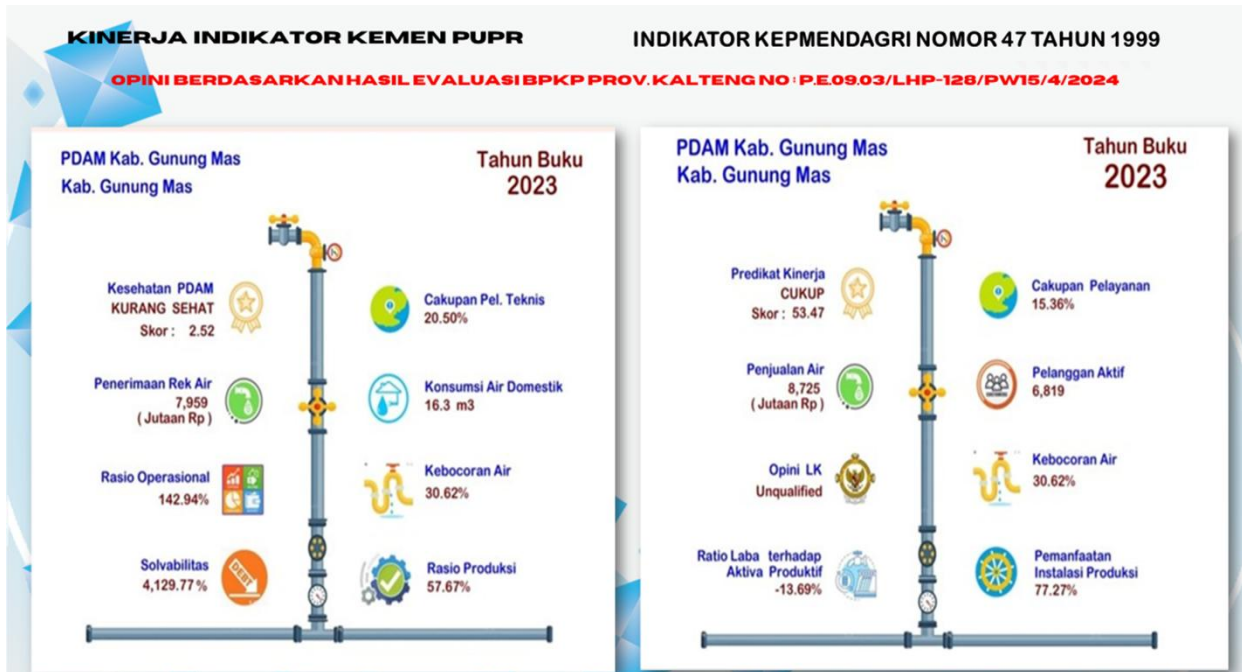
Tabel II.59
Data BUMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
sampai dengan Tahun 2025

No.	Nama BUMD	Dasar Hukum Pendirian/Penyertaan Modal	Total <u>Penyertaan</u> Modal s/d <u>Thn</u> 2025	Bagi Hasil Laba/ <u>Deviden</u>			Kondisi BUMD <u>Tahun 2025</u>		<u>Proporsi</u> <u>Kepemilikan</u>
				TAHUN 2023	<u>Keterangan</u>	TAHUN 2024	<u>Kondisi</u>	<u>Evaluator/Auditor</u>	
1	PERUMDAM "MARAUNG DUHUNG"	<u>Nomor 2 Tahun 2024</u>	101.324.380.327,00	TIDAK ADA	<u>Defisit</u>	BELUM ADA	KURANG SEHAT	BPKP Perwakilan Prov Kalteng No.PE.09.03/LHP- 128/PW15/4/2024	100%
2	PD. GUNUNG MAS PERKASA	<u>Nomor 3 tahun 2020</u>	6.934.963.635,00	TIDAK ADA	<u>Sebagai Laba</u> <u>ditahan</u>	BELUM ADA	KURANG SEHAT	Belum dilakukan Audit Oleh KAP	100%

1. Perumdam Maruang Duhung

Perusahaan Umum Daerah Maruang Duhung adalah BUMD yang bergerak dalam usaha menyediakan Air Bersih bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, dan terakhir dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan tersebut sehingga sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas. Gambaran kinerja Perumdam adalah sebagai berikut :

Gambar II.70
Gambaran Kinerja Perumdam Maruang Duhung



Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya adalah :

- ROE minus dan nilai RO di atas 1 yang diakibatkan biaya produksi masih lebih tinggi dari harga jual air atau Perumdam Maruang Duhung belum menerapkan FCR (full cost recovery). Selisih nilai produksinya adalah Rp. 3.580,04 per M3 air terjual. Penetapan tarifnya terakhir pada tahun 2012 dan belum dilakukan penyesuaian sampai dengan tahun 2025.
- Penyesuaian tarif pasca Covid-19 harus memperhatikan arahan Presiden dan Mendagri yang memerintahkan penundaan kenaikan tarif agar mencegah terjadinya inflasi.
- Tingkat kebocoran air masih di atas 25% yaitu di angka 30.63% serta cakupan layanan teknis baru mencapai 20.50%.

2. Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa

Kabupaten Gunung Mas memiliki Perusahaan Daerah (Perusda) yang bernama “Gunung Mas Perkasa” dan telah berdiri sejak tahun 2009. Perusda ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Gunung Mas kepada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa. Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dibentuk dalam rangka membantu Pemerintah Daerah untuk memacu Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas, di antaranya meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan turut membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah, sehingga juga memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Perusda Gunung Mas Perkasa merencanakan usaha berpedoman pada Visi yaitu menjadikan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagai badan usaha yang maju secara profesional, mandiri dan terbuka sehingga mampu

memberikan kontribusi positif bagi daerah terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemberdayaan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Adapun Misi Perusda Gunung Mas Perkasa sebagai berikut :

- a. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar sehingga membantu Pemerintah Daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya melalui pengembangan UMKM.
- c. Mengembangkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bidang usaha yang dikelola secara profesional, mandiri dan terbuka.

Dinamika organisasi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa periode 01 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2024 telah mengalami 4 kali restrukturisasi manajemen sebagai berikut : (1) Periode kepengurusan 31 Juli 2019 s.d. 31 Maret 2021 dengan Mochamad Ramdhan sebagai Direktur Utama; (2) Periode kepengurusan 1 April 2021 s.d. 28 Februari 2022 dengan Ali Imbron, ST sebagai Direktur Utama; (3) Periode kepengurusan 1 Maret 2022 s.d. 30 Juni 2023 dengan Ali Imbron, ST sebagai Direktur Utama tanpa adanya Badan Pengawas; dan (4) Periode kepengurusan 1 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2024 dengan Suradie H. Erang, SE selaku Plt. Direktur.

Pada awal periode kepengurusan Tahun 2019 manajemen Perusda Gunung Mas Perkasa mengajukan kajian penyertaan modal/investasi untuk usaha baru yaitu: a) Mengelola Sentra IKM milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas di Desa Sepang; b) Mengelola Hotel Gunung Mas; c) Pengurusan ijin Tambang Galian C. Dari hasil penilaian kajian penyertaan modal/investasi yang dilakukan Perusda Gunung Mas Perkasa memperoleh penyertaan modal (Perda No. 8 Tahun 2019) sebesar Rp2.232.000.000. Manajemen menggunakan dana Penyertaan Modal seefisien/seefektif mungkin sehingga dana untuk perbaikan Hotel Gunung Mas dan dana untuk pengurusan tambang galian C sebesar Rp583.361.933 dikembalikan ke Kas Daerah. Pada tahun 2020 Perusda Gunung Mas Perkasa mendapat dana penyertaan modal tambahan untuk modal mendirikan Pangkalan BBM dan Gas sebesar Rp1.184.561.933 (Perda No. 3 Tahun 2020). Sejak tahun 2009 hingga tahun 2020 tercatat bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Perusda Gunung Mas Perkasa total senilai Rp 6.934.963.635.

2.a. Unit Usaha Perusda Gunung Mas Perkasa

Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mengelola 3 Unit Usaha, sebagaimana yang sudah dibuatkan study kelayakan usaha yang dinilai oleh penasihat investasi sebagai berikut:

1. Unit Usaha Pengolahan Kayu Moulding dan Mebel di Sentra IKM Sepang Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas terletak di jalan lintas Palangka Raya-Kula Kurun di perbatasan Desa Tampelas dengan Sepang. Sentra IKM ini memiliki bangunan kantor, mes karyawan dan peralatan mebel. Perusda Gunung Mas Perkasa melakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas. Untuk

memulai kegiatan usaha ini Perusda Gunung Mas Perkasa melakukan pembenahan/pengurusan antara lain: (a) Mengurus perijinan; (b) Pembenahan/perbaikan; (c) Menambah daya listrik khusus premium silver skema biaya penyambungan natura; (d) Membeli mesin baru/menambah peralatan mesin lainnya; (e) Melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

2. Unit Usaha Hotel Gunung Mas

Hotel Gunung Mas terletak di Jalan Sangkurun No. 01 Kota Kuala Kurun, di mana hotel milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Eks Kantor Bupati) sudah lama tidak beroperasi sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 (3 tahun). Letak hotel ini sangat strategis dekat dengan pusat kuliner dan taman kota Kuala Kurun. Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mengelola Hotel Gunung Mas berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.100.3.7/135.a/PKS/D/BKAD/III/2023 dan Nomor:030/GMP-1/111/2023. Produk yang bisa dijual adalah penyewaan kamar dengan jumlah kamar sebanyak 15 kamar dengan kondisi kamar sebagai berikut: (a) Tujuh kamar dengan kamar mandi dalam; (b) Delapan kamar tanpa kamar mandi dalam; (c) Ruang rapat berkapasitas 50 orang, tanpa toilet.

3. Unit Usaha Pangkalan BBM dan Gas

Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mendirikan tempat pangkalan BBM di Jl. Yos Sudarso Kota Kuala Kurun. Bangunan fisik mulai dibangun pada bulan Februari tahun 2021 dan didirikan pada lahan milik Majelis Jemaat GKE Kuala Kurun dengan sistem sewa/bulan sebesar Rp1.000.000. Pendirian usaha ini dengan harapan untuk ikut ambil bagian dalam pengadaan BBM pada sektor industri Pertambangan, Perkebunan dan Pemerintahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

2.b. Kinerja Perusda Gunung Mas Perkasa

Berdasarkan Laporan Perkembangan Usaha Periode 1 Juli 2019 Sampai Dengan 31 Desember 2024, secara khusus laporan laba-rugi periode 2020 sampai dengan 2024 pada masing-masing unit usaha yang telah dikembangkan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, terlihat bahwa unit usaha Pengolahan Kayu di Sentra IKM Sepang dan unit usaha pangkalan BBM dan Gas selalu mengalami kerugian di tiap-tiap tahunnya. Berbeda dengan unit usaha Hotel Gunung Mas yang menunjukkan kinerja positif, di mana masih dapat memberikan laba di tiap tahunnya. Adapun yang menjadi penghambat kinerja pengelolaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Usaha Pengolahan Kayu di Sentra IKM Sepang sebagai Core Business Perusda Gunung Mas Perkasa sudah mulai beroperasi dan mulai melakukan kerja sama dengan pihak lain sejak Tahun 2020. Namun karena dampak Covid-19 yang melanda seluruh dunia maka kerja sama dengan pihak lain tidak bisa berjalan dengan baik.
2. Penyaluran BBM dan Gas tidak bisa berjalan dengan baik, karena ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai



distributor BBM terlalu panjang dan memerlukan modal yang lebih banyak.

3. Hotel Gunung Mas (eks Kantor Bupati) kondisi bangunan banyak yang sudah rusak antara lain: Atap bangunan banyak yang bocor; Gedung lantai dua kalau hujan lebat, banjir masuk ke dalam kamar di lantai dasar; Sebanyak 8 kamar masih menggunakan kamar mandi luar; Kamar terlalu besar, dampaknya biaya operasional listrik tinggi; Ruang rapat tidak bisa dijual karena kondisi instalasi listrik banyak yang rusak dan kabel induk listrik di ruangan terlalu kecil; Kosen pintu dan jendela kamar banyak yang rusak (dimakan usia) dampaknya kunci kamar tidak bisa berfungsi dengan baik; Plafon kamar tidur, kamar mandi dan teras banyak yang rusak; Septic Tank WC kamar tamu banyak yang sudah bocor dan mengeluarkan bau.
4. Usaha Perusda Gunung Mas Perkasa sampai sekarang ini hanya unit usaha Hotel Gunung Mas yang masih beroperasi, dari hasil pendapatan hotel Gunung Mas untuk membiayai operasional manajemen Perusda, dan unit usaha lain yang tidak beroperasi.
5. Belum ada pengganti Badan Pengawas, sehingga dalam persetujuan pengambilan keputusan, saran dan pertimbangan manajemen belum bisa dilakukan.



BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Gunung Mas memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam menyejahterakan masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan memiliki peran krusial dalam mengoperasionalkan visi dan misi ke dalam program pembangunan yang konkret. Penyusunan tujuan yang spesifik dan terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

3.1.1 Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, di mana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, visi yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025–2029 adalah:

“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Gunung Mas dijelaskan sebagai berikut:

1. **Maju**, terwujudnya pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang maju melalui peningkatan perekonomian daerah secara adil dan inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan hilirisasi.
2. **Berkelanjutan**, pokok visi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur

daerah yang handal dan berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar pembangunan yang berjalan dapat selaras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

3. **Berdaya Saing**, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang memiliki daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan budaya local.
4. **Sejahtera**, terwujudnya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat secara adil dan merata.
5. **Mandiri**, fokus pada visi ini adalah untuk menciptakan pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang bersih dan profesional.

Penyusunan Visi RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029 dilakukan secara selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Visi pembangunan nasional. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang berjalan di Kabupaten Gunung Mas dapat memberikan kontribusi bagi provinsi maupun nasional. Keselarasan visi Kabupaten Gunung Mas dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.1
Keselarasan Visi Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Nasional



3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi



pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan**, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, perumahan permukiman dan sanitasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan sarana prasarana pembangunan desa.
- 2) MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**, Mengembangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia agar semakin berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, serta memastikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
- 3) MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan yang dapat mendukung daya saing perekonomian daerah.
- 4) MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi**, Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas birokrasi pemerintahan Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik secara profesional, bersih, dan akuntabel.

Misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas juga dilakukan selaras dengan provinsi Kalimantan Tengah dan Misi Nasional (Asta Cita) seperti pada gambar berikut.

Gambar III.2
Keselarasan Misi Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Asta Cita





3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: “MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”.				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
			2025	2030
MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang	Tujuan 1: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	67,63	80,13



VISI: “MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”.				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
			2025	2030
Terintegrasi dan Berkelanjutan	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	761,073.91	1,384,322.50
	Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	74,17	76,53
MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	4,61	3,60
	Tujuan 5: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Wilayah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	6,00
MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		PDRB per kapita	70,00	75,00
MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi	Tujuan 6: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00	70,00
		Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,76

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Gunung Mas dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan berdasarkan



visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. T1. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman Masyarakat;
- Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah; dan
- Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah.

2. T2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
- Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah.

3. T3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas Pendidikan;
- Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
- Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan; dan
- Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas.

4. T4. Meningkatkan Pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah;
- Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi; dan
- Meningkatnya daya saing perekonomian daerah.

5. T5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya pemerataan kesejahteraan Masyarakat; dan
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas.

6. T6. Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;



- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas.

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : “MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI “ MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berk budaya dan Berdaya Saing	Tujuan 1. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas		Indeks Infrastruktur	Poin	67,63	70,13	72,63	75,13	77,63	80,13
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	52,55	53,65	54,75	55,85	56,95	58,05
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas wilayah	Poin	80,93	81,75	82,56	83,37	84,19	85,00
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Persentase desa mandiri	%	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04
	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Penurunan intensitas emisi GRK	%	761,073. 91	974,049. 19	974,049. 19	1,107,51 7.29	1,236,27 8.60	1,384,32 2.50



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	78,26	78,47	78,68	78,89	79,1	79,30
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks risiko bencana	Poin	123,56	121,85	120,14	118,42	116,71	115
	Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks pembangunan manusia	Poin	74,17	74,64	75,12	75,59	76,06	76,53
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Poin	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47
		Sasaran 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Poin	82,54	82,78	83,01	83,25	83,49	83,72
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks ketimpangan gender	Poin	0,560	0,555	0,546	0,54	0,534	0,530
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pembangunan SDM	Indeks pembangunan kebudayaan	Poin	58,53	58,82	59,12	59,41	59,71	60,00



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Poin	62,36	62,98	63,61	64,25	64,89	65,84
	Tujuan 4: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Wilayah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mendukung Tranformasi Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00
			PDRB per kapita	Juta Rp/Kapita	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
		Sasaran 4.1 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Poin	6,50	6,52	6,54	6,56	6,58	6,60
		Sasaran 4.2 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE kategori industri pengolahan	%	2,28	3,03	3,77	4,51	5,26	6,00
		Sasaran 4.3. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah*	%	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45	4,47
	Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	4,61	4,41	4,21	4,00	3,80	3,60



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini rasio	Poin	0,244	0,238	0,232	0,226	0,220	0,214
		Sasaran 5.2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,94	2,76	2,58	2,40	2,22	2,04
	Tujuan 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel		Indeks reformasi birokrasi	Poin	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
			Indeks daya saing daerah	Poin	3,35	3,43	3,52	3,60	3,68	3,76
		Sasaran 6.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Poin	63,03	64,42	65,82	67,21	68,61	70,00
		Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks pelayanan publik	Poin	2,50	2,62	2,75	2,87	3,00	3,12



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 6.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks integritas nasional	Poin	74,59	75,67	76,75	77,84	78,92	80,00



Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur.

Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.



Tabel III.3

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten	Persentase permukiman yang tertata	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
					Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW/ RTR	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Rasio rumah layak huni	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani 2. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Meningkatkan kapasitas serta kualitas konektivitas wilayah dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Konektivitas Wilayah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
				Meningkatnya layanan transportasi darat yang aman	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
					Tingkat penurunan jumlah kecelakaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya pengelolaan irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	-Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (Usulan baru dasar	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					Permendagri 18/2020 hal.118) -Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Usulan baru dasar Permendagri 18/2020 hal.118)	
				Meningkatnya penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	-Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Usulan baru dasar Permendagri 18/2020 hal.119) -Persentase jumlah Rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (Usulan baru dasar Permendagri 18/2020 hal.119)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jumlah bangunan beserta lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi daerah	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Rasio kepatuhan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya	Indeks Desa	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan
					Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
		pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah		transmigrasi, dan Meningkatkan kapasitas UMKM daerah, serta Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas		
				Meningkatnya pembinaan satuan pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
				Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Meningkatnya Upaya Pengentasan Desa Tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terbinanya Masyarakat Desa mendapat Pelatihan Ekonomi Produktif	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kapasitas serta kualitas konektivitas wilayah dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
				Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
					Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
						Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Menurunnya pelanggaran peraturan daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatkan cakupan layanan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya penanganan pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang merata	Harapan Lama Sekolah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
					Rata-rata Lama Sekolah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Iklim Keamanan SMP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Iklim Kebhinekaan SD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Iklim Kebinekaan SMP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Iklim Inklusivitas SD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Iklim Inklusivitas SMP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Iklim Keamanan SD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Kemampuan Literasi SD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Kemampuan Numerasi SD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kemampuan Literasi SMP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kemampuan Numerasi SMP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Pemuda	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Pemuda	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya prestasi keolahragaan daerah	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya prestasi keolahragaan daerah	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatkan budaya literasi masyarakat dan tata kelola pengarsipan dokumen daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
				Meningkatnya kegemaran membaca oleh masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
				Meningkatnya kunjungan perpustakaan daerah	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
		Meningkatnya derajat	Indeks Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
		kesehatan masyarakat		Menurunnya keluhan kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya ibu dan anak	Angka Kematian Bayi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
					Angka Kematian Ibu	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan Gender, Peran Perempuan, Perlindungan Anak dan terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Persentase ARG Pada belanja Langsung	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian warisan budaya Dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan	Persentase pelestarian warisan budaya	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
				Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
				Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama, stabilitas	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				ipoleksosbudhankam dan demokrasi daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Terselesaikannya konflik antar kelompok/umat beragama/suku dan lainnya	Angka Konflik yang Diselesaikan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
					Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
					Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya kesetaraan Gender, Peran Perempuan, Perlindungan Anak dan terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya perencanaan pembangunan keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun(Age Spesifik Fertility Rate/ASFR 15-19)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi(Unmet need)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
				Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Pertanian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
				Meningkatkan kualitas sektor ekonomi pada komoditas perikanan dan Meningkatkan ketahanan pangan daerah	LPE subkategori perikanan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
					Indeks Ketahanan Pangan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
				Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
				Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
					Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
	PDRB per Kapita	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
				Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi, dan Meningkatkan kapasitas UMKM daerah, serta Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	Persentase UMKM yang naik skala usaha	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan	Persentase Koperasi Sehat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Meningkatnya pertumbuhan Usaha Kecil Menengah	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten**	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Meningkatkan sektor hilirisasi komoditas potensial wilayah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
					Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
					Indeks Perkembangan Harga	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
				Meningkatnya kewirausahaan daerah	Jumlah Kewirausahaan IKM Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
				Meningkatnya perekonomian sektor Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
				Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Pertumbuhan nilai neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa) (INDIKATOR PROXY) :	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB	Meningkatkan pelestarian warisan budaya Dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
					Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
			Kalimantan Tengah	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Rata-rata Lama Tinggal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
				Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
				Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
				Meningkatkan penanaman modal pada aktivitas perekonomian daerah dan realisasi Investasi Daerah serta Nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
				Meningkatkannya realisasi Investasi Daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
				Meningkatnya Nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (TKI) dan (TKA) melalui Investasi Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
				Terlaksanannya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Rasio	Menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Gunung Mas	Tingkat penurunan jumlah PPKS	Dinas/Badan yang menangani Bidang Dinsos
				Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase penanganan PPKS	Dinas/Badan yang menangani Bidang Dinsos
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Dinas/Badan yang menangani Bidang Dinsos



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
				Terlaksanannya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang	Dinas/Badan yang menangani Bidang Dinsos
				Terkendalinya harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
					Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat kabupaten	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi, dan Meningkatkan kapasitas UMKM daerah, serta Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	Persentase penempatan tenaga kerja	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
					Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
				Terwujudnya seluruh usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMR	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
				Meningkatnya kesempatan kerja berkualitas bagi masyarakat	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
				Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
				Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
				Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
				Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN dan Meningkatkan kompetensi kinerja ASN	Indeks Merit Sistem	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
					Indeks Profesionalitas ASN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
				Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
				Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya (Mengikuti Diklat PIM dan/atau Assesment center)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
				Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
				Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
				Optimalisasi Kebutuhan Tenaga Keahlian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
				Optimalisasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai mendapat penghargaan Satya Lancana	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LPPD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya tata kelola hukum daerah	Persentase Reformasi Hukum	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN	Rasio Elektrifikasi (RE)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kinerja BUMD yang optimal	Return on Aset (ROA) BUMD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya nilai belanja pengadaan barang dan jasa	Rasio Nilai Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP elektronik	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya masyarakat yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase penduduk usia di bawah 17 tahun yang wajib memiliki KIA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Pengguna Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya masyarakat yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase Penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Profil Kependudukan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya administrasi catatan sipil	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi melaporkan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					Cakupan Profil Kependudukan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan budaya literasi masyarakat dan tata kelola pengarsipan dokumen daerah	Jumlah dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
				Meningkatnya kapasitas ASN dalam pengarsipan dokumen daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kearsipan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
				Meningkatnya pengelolaan arsip, menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
				Melestarikan informasi agar tetap utuh dan mudah diakses, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
				Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
					Indeks Pemerintah Digital	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
				Meningkatnya Infrastruktur dan Akses Layanan Publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
					Indeks SPBE	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
				Meningkatnya Cakupan Akses Internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					Cakupan Layanan Telekomunikasi	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
				Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
				Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
					Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
				Meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Gunung Mas	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
				Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
					Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
				Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
				Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
				Menurunnya temuan kesalahan tata kelola administrasi	Opini BPK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
				Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
				Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
				Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan pemerintah daerah	Persentase Lahan Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
				Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
				Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas pengawasan	Kapabilitas APIP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
					Peringkat LAKIP Inspektorat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
				Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Resiko	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
				Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam membiayai pembangunan daerah	Rasio PAD	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap anggaran dan Pendapatan daerah non migas	Persentase Realisasi PAD (Permintaan PD)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

Keterangan: Cascading OPD dalam proses diskusi

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kendal

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kendal, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta



mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Gambar III.3.
Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Gunung Mas



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Gunung Mas

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi	1. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi	1. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan public	1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup	1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup
2. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan public	2. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan public	2. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS
3. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul	3. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul	3. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat	3. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara	3. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara
4. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial	4. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial	4. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative	4. Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan	4. Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan
			5. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik,	5. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik,



budaya masyarakat	budaya masyarakat		bersih dan akuntabel	bersih dan akuntabel
5. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative	5. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative	5. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima		
6. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima	6. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima	6. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan akuntabel		

b. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kendal. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut:

Tabel III.5
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
MISI 1 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal
	Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
	Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan
	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan
	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim
MISI 2 : Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai
	Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas
	Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat
	Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi
	Peningkatan pendidikan dan partisipasi pembangunan bagi perempuan
	Penguatan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan kebudayaan yang tinggi
MISI 3 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran
	Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)
	Optimalisasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



	Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru
	Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal
	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas
MISI 4 : Peningkatan Reformasi Birokrasi	Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif
	Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah yang bebas korupsi

c. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan focus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan ialah sebagai berikut:

a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi

Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menitikberatkan pada pembangunan sarana prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, sistem drainase, air bersih, dan sanitasi yang layak guna menciptakan permukiman yang sehat dan tertata. Selain itu, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan serta jembatan menjadi prioritas untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Pada sektor perekonomian dan pelayanan publik, strategi difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi lokal seperti pasar rakyat, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:



- 1) Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

b. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik

Strategi optimalisasi pembangunan sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian, dan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas dapat dimulai dengan ****penyusunan perencanaan spasial yang terpadu dan berbasis data****. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan prioritas infrastruktur seperti jalan penghubung antar kecamatan, jaringan air bersih, sanitasi, dan listrik, terutama di wilayah terpencil dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Selain itu, pengembangan kawasan perekonomian seperti sentra UMKM, pasar rakyat, dan kawasan agrowisata perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, termasuk akses transportasi dan fasilitas logistik. Pemerintah daerah juga perlu membangun infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat, seperti rumah sakit pratama, sekolah terpadu, dan balai pelayanan publik. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipatif harus diterapkan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan guna memastikan kebermanfaatan jangka panjang serta pemberdayaan ekonomi lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
- 2) Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan

c. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

Strategi optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Strategi ini menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur yang memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghindari kawasan lindung, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam sistem sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah. Selain itu, ruang terbuka hijau dan infrastruktur hijau seperti taman kota dan sistem penyerapan air hujan menjadi bagian dari strategi untuk menekan degradasi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga menegaskan kebijakan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Langkah



ini mencakup pengawasan intensif terhadap wilayah rawan tambang ilegal, penindakan tegas terhadap pelaku, serta kerja sama lintas sektor dalam penegakan hukum lingkungan. Kebijakan ini juga mengarah pada pemulihan ekosistem melalui program rehabilitasi tambang yang mencakup reklamasi lahan bekas tambang serta pelibatan masyarakat lokal dalam upaya pemulihan lingkungan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan
- 2) Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim

MISI 2. Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing ialah dengan

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS

Strategi peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas difokuskan pada pemenuhan serta peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Dalam sektor kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen membangun dan merevitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga didorong melalui penyediaan transportasi rujukan medis dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan jarak jauh, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat
- 2) Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi

b. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul

Di bidang pendidikan, strategi diarahkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah dari jenjang dasar hingga menengah, termasuk penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah juga memperhatikan pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah pelosok agar tidak terjadi ketimpangan kualitas pembelajaran. Selain itu, digitalisasi sekolah melalui penyediaan jaringan internet dan perangkat pembelajaran modern menjadi bagian dari upaya mendorong pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:



- 1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai
- 2) Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas

c. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara

Strategi penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada penciptaan ruang-ruang publik yang inklusif dan fasilitas sosial budaya yang mampu menjadi wadah interaksi, edukasi, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur seperti balai adat, taman budaya, dan pusat kegiatan masyarakat yang representatif serta mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan. Infrastruktur ini berperan penting dalam memperkuat identitas budaya lokal, memfasilitasi dialog antar komunitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Selain itu, pemenuhan infrastruktur yang mendukung kesetaraan sosial juga menjadi fokus utama, seperti pembangunan fasilitas umum yang ramah difabel, ruang ibadah berbagai agama yang layak, serta tempat-tempat pelayanan sosial yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendidikan dan partisipasi pembangunan bagi Perempuan
- 2) Penguatan keluarga yang sehat dan Sejahtera
- 3) Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan kebudayaan yang tinggi

MISI 3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ialah melalui:

a. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

Strategi peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam (SDA) unggulan di Kabupaten Gunung Mas dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dalam sektor pertanian, pemerintah daerah mendorong pertanian berkelanjutan melalui kebijakan subsidi pupuk organik dan penerapan pengendalian hama alami, guna mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Untuk menunjang hal tersebut, infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan hasil panen, dan pusat pengolahan hasil pertanian terus ditingkatkan agar proses produksi hingga distribusi dapat berjalan efisien dan bernilai tambah tinggi bagi petani lokal.

Sementara itu, dalam sektor pariwisata, strategi diarahkan pada pengembangan destinasi yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan pengendalian daya dukung lingkungan



di kawasan wisata, seperti pengaturan jumlah pengunjung, pengelolaan sampah, dan pelestarian kawasan alami, menjadi prioritas untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata jangka panjang. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan ke objek wisata, fasilitas sanitasi, pusat informasi wisata, serta akomodasi ramah lingkungan dibangun dan ditata dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat sekitar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor hilir SDA unggulan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologis dan pelestarian budaya daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran
- 2) Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)

b. Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan

Penguatan kapasitas UMKM di Kabupaten Gunung Mas dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam aspek manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk lokal. Pemerintah daerah dapat menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk membina pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, digitalisasi UMKM menjadi langkah penting, seperti pelatihan penggunaan platform *e-commerce* dan aplikasi pencatatan keuangan. Penguatan kelembagaan melalui koperasi atau kelompok usaha bersama juga perlu ditingkatkan, disertai fasilitasi legalitas usaha agar UMKM lebih mudah mengakses pasar dan pembiayaan.

Dalam hal akses permodalan, strategi yang dapat diterapkan mencakup perluasan informasi dan pendampingan dalam pengajuan kredit usaha seperti KUR dan program pembiayaan dari lembaga keuangan mikro atau koperasi. Pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai fasilitator antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan agar tercipta kepercayaan dan kelayakan kredit. Selain itu, pembentukan dana bergulir atau dana bergotong royong berbasis desa bisa menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum *bankable*. Strategi-strategi ini perlu dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan agar UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh kuat dan mandiri. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 2) Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru

**c. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif**

Strategi pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif di Kabupaten Gunung Mas diarahkan untuk menjawab tantangan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur layanan sosial yang berkualitas, seperti pusat pelatihan keterampilan, balai latihan kerja desa, serta fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan terpadu yang mencakup teknik pertanian modern, penggunaan alat pertanian yang efisien, serta pengelolaan hasil pascapanen. Infrastruktur pendukung seperti demplot pertanian, gudang komunal, dan akses jalan ke sentra produksi juga ditingkatkan agar petani lebih siap menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, strategi ini juga mencakup rencana peningkatan kapasitas pelaku pariwisata lokal melalui pelatihan kewirausahaan, pelayanan prima, manajemen homestay, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran destinasi. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat informasi pariwisata, tempat pelatihan terpadu, dan akses transportasi menuju lokasi wisata dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar terlibat dalam rantai nilai pariwisata. Dengan pemanfaatan program perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat, Kabupaten Gunung Mas menyiapkan pondasi untuk memperluas kesempatan kerja, memperbaiki taraf hidup, dan menciptakan masyarakat yang tangguh serta mandiri. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marginal
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas.

MISI 4. Peningkatan Reformasi Birokrasi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi ialah melalui

a. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima

Strategi optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas dapat dimulai dengan digitalisasi sistem layanan agar masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan secara cepat dan efisien, tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan portal layanan satu pintu berbasis web dan aplikasi *mobile*, termasuk integrasi data kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat. Selain itu, penyediaan Pojok Pelayanan Publik di kecamatan



dan desa, lengkap dengan tenaga pendamping dan akses internet, akan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Peningkatan kualitas layanan juga perlu didukung oleh penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan layanan prima, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat sebagai dasar evaluasi kinerja layanan. Untuk memastikan keterjangkauan, pemerintah daerah dapat menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang berorientasi pada keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif

b. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan

Strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan di Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Pemerintah daerah menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil hingga ke tingkat kecamatan dan desa, serta sistem pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*). Dengan infrastruktur ini, proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur fisik kantor pemerintahan, fasilitas pelayanan publik seperti kantor kecamatan, kelurahan, dan unit layanan terpadu juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang optimal. Pemerintah daerah mendorong pembentukan ruang pelayanan yang ramah masyarakat, inklusif, serta mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik
- 2) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah yang bebas korupsi



Arah kebijakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari misi pembangunan daerah yang disusun untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah. Visi dan misi dalam RPJMD itu sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari proses perencanaan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan demikian, terdapat kesinambungan dan keterpaduan antara dokumen RPJPD dan RPJMD, yang terwujud melalui keterkaitan arah kebijakan di masing-masing dokumen tersebut.

Dalam konteks Kabupaten Gunung Mas, arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025–2045. Keterkaitan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar periode perencanaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa program-program jangka menengah benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian visi jangka panjang daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Berikut merupakan keselarasan antara arah kebijakan dalam RPJPD dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.6
Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

VISI RPJPD 2025-2045 GUNUNG MAS Be SMART (Berkelanjutan, Sejahtera dan Maju Berbasis Agro Resources dan Tourism)	
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul, Berkualitas dan Modern.	6. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta infrastruktur pendidikan
	7. Peningkatan akses pendidikan hingga perguruan tinggi
	8. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
	9. Penuntasan stunting dan pemenuhan gizi
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Inklusif, Inovatif dan Berkelanjutan berbasis keanekaragaman potensi lokal daerah	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan
	13. Sarana dan prasarana pertanian (produksi, pengolahan, pemasaran)
	14. Penguatan hilirisasi ekonomi berbasis potensi agro
	15. Perlindungan dan pemberdayaan UMKM
	16. Peran PMA/PMDN dalam pertumbuhan ekonomi baru
	18. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lapangan kerja
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	19. Digitalisasi pelayanan publik
	20. Peningkatan manajemen ASN
	21. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur



	22. Pengelolaan anggaran pembangunan bebas korupsi
4. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah dalam mendukung Ekonomi Daerah yang berkeadilan	5. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
	17. Perlindungan sosial untuk masyarakat rentan
5. Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Lokal	10. Peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan
	11. Penguatan keluarga sehat dan sejahtera
	12. Pengembangan karakter masyarakat toleran dan berbudaya
6. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik dan infrastruktur jalan dan jembatan
	2. Peningkatan akses perumahan dan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
7. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkelanjutan.	4. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon

3.2.2 Program Pembangunan Daerah

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Gunung Mas.



Tabel III.7

Program Prioritas Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Visi : “MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI” MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumahtangga dengan akses sanitasi layak	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
					Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
					Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana,sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program penyelenggaraan jalan
		Persentase jembatan dalam kondisi baik					
				Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan desa	Persentase Desa yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pertumbuhan Indeks Kualitas Air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
						Pertumbuhan Indeks Kualitas Udara	
						Pertumbuhan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	



Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
	Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyerahan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Program pengelolaan pendidikan
						Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Angka Morbiditas	
					Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Program pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan
			Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
					Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)		
	Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung tranformasi ekonomi			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya kualitas keluarga dalam pembangunan	Indeks Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian dan perkebunan rakyat	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
						Pertumbuhan Produksi Perkebunan			
			Meningkatnya pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
		PDRB per Kapita	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
					Meningkatnya kapasitas Industri Kecil dan Menengah yang mandiri	Pertumbuhan pengusaha Industri Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
					Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Pertumbuhan jumlah proyek penanaman modal daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
							Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Rasio	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan Pemberdayaan masyarakat setempat dengan menggunakan potensi sumber daya dan kearifan lokal	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program perlindungan dan jaminan sosial	
							Tingkat penurunan desa tertinggal	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	



Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya angkatan kerja yang kompeten dan produktif	Tingkat Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
					Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah
					Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	
		Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan pemerintah daerah	Persentase kesesuaian SOTK dengan program prioritas pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						Persentase Keselarasan Renstra dengan Renja	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah
					Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya tata kelola anggaran	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase penurunan temuan BPK	
					Menurunnya terjadinya penyelewengan atau	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan



Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
					penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		
					Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	



3.2.3 Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

Program unggulan Kepala Daerah dirancang dengan cermat, memadukan **kearifan lokal** dalam penamaannya agar selaras dengan semangat pembangunan kebudayaan. Program unggulan ini menggunakan idiom "**Tambun Bungai**", nama dua tokoh bersaudara legendaris yang dikenal cerdas, lemah lembut, ramah, suka menolong, banyak memberi, bijaksana, dan pantang menyerah membela kebenaran. Untuk mengenang kepahlawanan mereka, sebuah monumen berupa patung lengkap dengan riwayat dan profil Tambun dan Bungai telah dibangun di Desa Tumbang Pajangei Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Program Tambun Bungai ini terbagi menjadi lima pilar utama, yaitu:

- 1. Tambun Bungai Maju** berbicara tentang kemajuan infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Maju diperuntukan untuk mencapai misi pertama yaitu peningkatan pembangunan Infrastruktur, wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan program sebagai berikut:
 1. Jalan Kabupaten Fungsional dan mantap.
 2. Penyelesaian Jembatan Sepang Simin - Sepang Kota.
 3. Penyediaan Rumah Layak Huni.
 4. Pemenuhan kebutuhan Air bersih.
 5. Seluruh Desa di Gunung Mas Berlistrik.
 6. Penyediaan Jaringan Telekomunikasi di seluruh wilayah Gunung Mas.
 7. Peningkatan Runway Bandar Udara di Kurun.
- 2. Tambun Bungai Sehat** berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang sehat secara jasmani dan rohani serta diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Sehat diperuntukan untuk mencapai misi peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan program sebagai berikut:
 1. UHC untuk layanan kesehatan.
 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi Masyarakat.
 3. Penurunan Angka Prevalensi Stunting.
 4. Seluruh Kelurahan/Desa ODF.
 5. Fasilitasi Program 1 Desa 1 Ambulance.
 6. Revitalisasi dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan.
- 3. Tambun Bungai Cerdas** berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang memiliki kemampuan intelektual unggul yang diharapkan dapat



tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Sehat diperuntukan untuk mencapai misi peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan program prioritas sebagai berikut

1. PAUD,SD,SMP Gratis.
2. Beasiswa Tidak Mampu
3. Fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Fasilitas Sekolah Rakyat (SR)
5. Peningkatan Kompetensi Guru.
6. Peningkatan kemampuan literasi dan Numerasi

4. Tambun Bungai Mandiri berbicara tentang kemandirian ekonomi yang diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dengan dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Percepatan Pembangunan Kebun Sawit Plasma Masyarakat.
3. Optimalisasi LP2B, Peningkatan Produksi Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan.
4. Pembinaan Koperasi Merah Putih di 127 Desa/Kelurahan.
5. Rehabilitasi Lahan Kritis.

5. Tambun Bungai Bermartabat berbicara tentang peningkatan ekonomi kepariwisataan yang berbudaya dan diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dengan dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Napak Tilas Perdamaian Tbg. Anoi sebagai event tetap 2 tahunan.
2. Penguatan Kelembagaan MHA dan tata Kelola Hutan Adat.
3. Peningkatan Kapasitas Damang dan Mantir.

Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan senantiasa memerlukan visi yang kuat dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Di Kabupaten Gunung Mas, program-program unggulan Kepala Daerah dirancang sebagai upaya akseleratif untuk mencapai target pembangunan jangka menengah yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini secara cerdas mendasarkan diri pada potensi lokal serta kebutuhan riil masyarakat, sekaligus berupaya menyelaraskan diri dengan Asta Cita Presiden—delapan cita-cita utama pembangunan nasional.

Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang komprehensif. Ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai sektor. Program-program tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan



publik, pengembangan ekonomi lokal, dan beragam program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Implementasi janji-janji Kepala Daerah terpilih ini memegang urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan representasi nyata dari mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan yang konkret. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas ini, yang juga selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan. Ini adalah langkah fundamental untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang efektif, dan pencapaian target yang tepat sasaran.

Penyelarasan program unggulan daerah dengan Asta Cita Presiden adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Gunung Mas berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Meskipun Asta Cita memiliki cakupan nasional, prinsip-prinsip dasarnya dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara lokal:

1. **Mewujudkan Keamanan Nasional dan Stabilitas Politik:** Program-program yang menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan kehidupan masyarakat yang damai adalah cerminan dari cita-cita ini.
2. **Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia:** Program di bidang **kesehatan** dan **pendidikan** yang meningkatkan kualitas SDM Gunung Mas, seperti peningkatan layanan kesehatan, penurunan *stunting*, dan akses pendidikan gratis, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.
3. **Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan:** Fokus pada **pengembangan ekonomi lokal**, seperti peningkatan PAD, percepatan kebun sawit plasma, optimalisasi produksi pangan, dan pembinaan koperasi, adalah upaya nyata untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
4. **Memperkuat Ketahanan Pangan, Energi, dan Air:** Optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih, merupakan langkah konkret untuk mencapai ketahanan ini di tingkat lokal.
5. **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih:** Keselarasan janji kampanye dengan RPJMD dan nomenklatur Permendagri



Nomor 90 Tahun 2020 adalah wujud komitmen terhadap **tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel**.

6. **Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa:** Program yang mengangkat kearifan lokal dan budaya, seperti Napak Tilas Perdamaian Tbg. Anoi atau penguatan kelembagaan MHA, turut mempererat persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman sebagai kekayaan.
7. **Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan:** Rehabilitasi lahan kritis, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengelolaan hutan adat, adalah contoh nyata komitmen terhadap pembangunan yang menjaga keseimbangan lingkungan.
8. **Memperkuat Diplomasi Internasional dan Peran Indonesia dalam Tata Dunia:** Meskipun lebih relevan di tingkat nasional, pembangunan daerah yang maju dan bermartabat akan secara tidak langsung mendukung citra positif Indonesia di mata dunia.

Dengan demikian, program-program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tidak hanya menjadi jawaban atas kebutuhan lokal, tetapi juga merupakan kontribusi aktif dan selaras dengan visi besar pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden. Ini adalah model pembangunan yang holistik, partisipatif, dan berorientasi pada masa depan.

Berikut adalah aspek-aspek Asta Cita Presiden yang relevan dan tercermin dalam berbagai pilar Program Tambun Bungai di Kabupaten Gunung Mas:

1. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Asta Cita pertama ini selaras dengan pilar **Tambun Bungai Sehat** dan **Tambun Bungai Cerdas**.

- **Tambun Bungai Sehat:** Melalui program seperti UHC, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan angka *stunting*, dan fasilitasi program satu desa satu ambulans, Gunung Mas berkomitmen penuh pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani masyarakatnya. Ini adalah langkah fundamental untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, siap menghadapi tantangan.
- **Tambun Bungai Cerdas:** Dengan program PAUD, SD, SMP gratis, beasiswa tidak mampu, fasilitasi makan bergizi gratis, fasilitasi Sekolah Rakyat, serta peningkatan kompetensi guru dan literasi-numerasi, Gunung Mas berinvestasi besar pada pembangunan intelektual. Mencetak generasi cerdas adalah fondasi untuk kemajuan bangsa.



2. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

Aspek Asta Cita ini tercermin jelas dalam pilar **Tambun Bungai Mandiri** dan **Tambun Bungai Bermartabat**.

- **Tambun Bungai Mandiri:** Program ini fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pembangunan kebun sawit plasma, optimalisasi produksi pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan, serta pembinaan koperasi. Ini adalah upaya konkret untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang inklusif, memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- **Tambun Bungai Bermartabat:** Dengan mengangkat pariwisata berbasis budaya seperti Napak Tilas Perdamaian Tbg. Anoi, program ini tidak hanya meningkatkan ekonomi kepariwisataan tetapi juga memberikan nilai tambah yang berkeadilan. Pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat adat.

3. Memperkuat Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Pilar **Tambun Bungai Mandiri** secara langsung berkontribusi pada aspek Asta Cita ini.

- Optimalisasi LP2B, peningkatan produksi pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan, menunjukkan komitmen Gunung Mas untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.
- Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat juga menjadi prioritas, mendukung ketahanan air yang esensial.

4. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Pilar **Tambun Bungai Maju** dan **Tambun Bungai Mandiri** memiliki relevansi kuat di sini.

- **Tambun Bungai Maju:** Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti jalan fungsional dan mantap, serta penyediaan rumah layak huni, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- **Tambun Bungai Mandiri:** Rehabilitasi lahan kritis adalah contoh nyata komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemulihan ekosistem yang rusak.

5. Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pilar **Tambun Bungai Bermartabat** menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memperkuat persatuan.



- Program seperti Napak Tilas Perdamaian Tumbang Anoi, penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan tata kelola Hutan Adat, serta peningkatan kapasitas Damang dan Mantir, bukan hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memupuk toleransi di tengah keberagaman. Ini adalah fondasi penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Lebih lanjut bagaimana Asta Cita Presiden lainnya dapat dihubungkan dengan inisiatif pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Ini menunjukkan bagaimana visi nasional dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal.

1. Mewujudkan Keamanan Nasional dan Stabilitas Politik

Meskipun keamanan nasional dan stabilitas politik sering diasosiasikan dengan isu-isu makro dan pertahanan, inisiatif pembangunan daerah memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

- **Pembangunan Infrastruktur yang Merata:** Ketika **Tambun Bungai Maju** berhasil menyediakan jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi hingga ke pelosok, ini secara langsung meningkatkan konektivitas dan mengurangi isolasi. Aksesibilitas yang lebih baik mempermudah pengawasan keamanan, mempercepat respons terhadap potensi konflik, dan mengurangi kesenjangan sosial yang bisa menjadi pemicu ketidakstabilan.
- **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Program seperti **Tambun Bungai Sehat**, **Tambun Bungai Cerdas**, dan **Tambun Bungai Mandiri** yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, secara fundamental mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Masyarakat yang sejahtera, berpendidikan, dan memiliki akses terhadap layanan dasar cenderung lebih stabil dan kurang rentan terhadap pengaruh negatif atau provokasi yang dapat mengganggu keamanan.
- **Penguatan Toleransi dan Harmoni Sosial:** Pilar **Tambun Bungai Bermartabat** yang mendorong penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat dan acara budaya seperti Napak Tilas Perdamaian Tbg. Anoi, berperan besar dalam melestarikan kearifan lokal yang mengajarkan toleransi dan gotong royong. Ini adalah fondasi kuat untuk menjaga kerukunan antar suku, agama, dan kelompok masyarakat, yang esensial bagi stabilitas politik dan keamanan di tingkat lokal.

2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Asta Cita ini sangat relevan dengan keseluruhan kerangka kerja penyusunan program pembangunan daerah.

- **Penyelarasan RPJMD dengan Janji Kampanye dan Regulasi:** Proses penyusunan RPJMD yang akuntabel, di mana janji kampanye Kepala Daerah diterjemahkan secara sistematis dan selaras dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ini menunjukkan transparansi, partisipasi publik (melalui suara pada pemilu), dan kepatuhan terhadap regulasi.
- **Efektivitas dan Tepat Sasaran:** Desain program Tambun Bungai yang didasarkan pada potensi daerah dan kebutuhan riil masyarakat, serta memiliki target yang terukur, mengindikasikan komitmen terhadap pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Ini mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
- **Peningkatan Kapasitas Aparatur:** Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, keberhasilan program-program seperti Tambun Bungai memerlukan aparatur pemerintah yang kompeten dan berintegritas. Peningkatan kapasitas Damang dan Mantir dalam **Tambun Bungai Bermartabat** adalah contoh penguatan kapasitas kelembagaan yang lebih luas. Tata kelola yang baik juga mencakup aspek anti-korupsi dan pelayanan publik yang prima.

3. Memperkuat Diplomasi Internasional dan Peran Indonesia dalam Tata Dunia

Mungkin tampak jauh, namun kemajuan daerah turut berkontribusi pada citra dan posisi Indonesia di mata dunia.

- **Citra Positif Indonesia:** Ketika suatu daerah seperti Kabupaten Gunung Mas mampu menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kearifan lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, ini secara tidak langsung membangun citra positif bagi Indonesia di kancah global. Keberhasilan pembangunan domestik adalah fondasi bagi kekuatan diplomasi.
- **Potensi Investasi dan Kolaborasi Global:** Daerah yang maju dan stabil lebih menarik bagi investor asing dan organisasi internasional untuk menjalin kerja sama. Misalnya, keberhasilan dalam rehabilitasi lahan kritis atau pengembangan pariwisata berkelanjutan bisa menjadi daya tarik bagi kemitraan global yang mendukung agenda pembangunan Indonesia.



Dengan demikian, melalui Program Tambun Bungai, Kabupaten Gunung Mas berkomitmen bahwa pembangunan daerah yang berakar kuat pada kearifan lokal ini selaras dengan agenda nasional dan bagian integral dari pencapaian Asta Cita Presiden.

Selain selaras dengan Asta Cita Presiden, Program Tambun Bungai juga selaras dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan strategi pembangunan yang kokoh, berlandaskan pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang mengakar kuat yang terwujud dalam visi "Belom Bahadat"—suatu filosofi yang mendorong masyarakat untuk hidup beradat, berbudaya, dan menjunjung tinggi etika. Visi ini diwujudkan melalui serangkaian program yang dikelompokkan dalam berbagai inisiatif "Betang", yang secara esensial merefleksikan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Program-program ini tidak hanya menjadi panduan bagi pembangunan provinsi, tetapi juga memiliki relevansi kuat dan mendukung program unggulan seperti Program Tambun Bungai di Kabupaten Gunung Mas.

1. Kalteng Bermartabat: Mengukuhkan Identitas Budaya

Program **Kalteng Bermartabat** adalah inisiatif strategis yang berorientasi pada **pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya** untuk meneguhkan Provinsi Kalimantan Tengah yang "Belom Bahadat". Program ini merupakan pondasi untuk membangun martabat daerah melalui penguatan identitas dan budaya.

- **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Termasuk Menembus Keterisolasian Daerah Pedalaman dan Pesisir:** Pembangunan infrastruktur ini adalah langkah fundamental. Dengan membuka akses ke daerah-daerah terpencil, program ini tidak hanya meningkatkan konektivitas ekonomi, tetapi juga memungkinkan penyebaran nilai-nilai "Belom Bahadat" ke seluruh penjuru provinsi. Di Kabupaten Gunung Mas, program ini selaras dengan **Tambun Bungai Maju**, yang juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengatasi isolasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman.
- **Memperluas Sosialisasi di Berbagai Instansi dan Kalangan Masyarakat agar Menjiwai Spirit "Belom Bahadat" dalam Berkompetisi di Berbagai Bidang Guna Menumbuhkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang Berdaya Saing:** Sosialisasi masif ini krusial untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan integritas. Semangat "Belom Bahadat" akan mendorong masyarakat untuk

berkompetisi secara sehat dan etis, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Aspek ini sangat relevan dengan semangat **Tambun Bungai Cerdas** di Gunung Mas, yang bertujuan mencetak SDM yang memiliki kemampuan intelektual unggul dan berintegritas.

2. Betang Maju: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Program **Batang Maju** berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Inisiatif ini mencakup pembangunan jalan, revitalisasi lintas kota, dan pengembangan wilayah khusus seperti Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif, semuanya bertujuan meningkatkan konektivitas, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Program ini memiliki fokus pada hilirisasi mineral, pembangunan jalur kereta api, serta pembentukan zona distribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, prioritas juga diberikan pada peningkatan infrastruktur air bersih, akses listrik, serta sinyal dan internet di daerah pedalaman.

Program ini diwujudkan dalam:

1. **Pembangunan 1.000 km Jalan Desa:** Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antardesa serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini sangat sejalan dengan **Tambun Bungai Maju** di Gunung Mas, yang juga memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten fungsional dan mantap.
2. **Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kabupaten dan Kota:** Memperbaiki dan memperbarui infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Relevan dengan upaya peningkatan infrastruktur secara menyeluruh di Gunung Mas.
3. **Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif:** Mengembangkan wilayah khusus ekonomi dengan fokus pada hilirisasi mineral (untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja), transportasi (pembangunan Kereta Api Palangkaraya – Gunung Mas – Katingan), dan distribusi (Zona Distribusi Lintas Timur Sungai Kapuas). Inisiatif hilirisasi mineral ini sangat mendukung **Tambun Bungai Mandiri** di Gunung Mas, yang berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah dan kemandirian ekonomi. Pembangunan kereta api yang melintasi Gunung Mas juga akan memperkuat transportasi dan distribusi, sesuai dengan misi **Tambun Bungai Maju** dalam peningkatan infrastruktur terintegrasi.



4. **Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa:** Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap air bersih yang layak. Ini adalah prioritas utama yang langsung mendukung misi **Tambun Bungai Maju** di Gunung Mas dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
5. **Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar:** Menyediakan akses listrik bagi seluruh desa. Sejalan dengan program **Tambun Bungai Maju** di Gunung Mas untuk memastikan seluruh desa berlistrik.
6. **Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman:** Memperluas jangkauan sinyal telekomunikasi dan akses internet di daerah pedalaman. Ini sangat relevan dengan **Tambun Bungai Maju** yang juga mengupayakan penyediaan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah.

3. **Batang Makmur: Kesejahteraan dan Ekonomi Berdaya**

Program **Batang Makmur** berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah melalui berbagai inisiatif ekonomi dan sosial. Ini termasuk bantuan pangan, operasi pasar murah, asuransi untuk petani dan nelayan, serta program penciptaan miliarder muda dan inkubasi UMKM.

Program ini diwujudkan dalam:

1. **Rp2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan:** Menyediakan bantuan pangan tunai bagi keluarga, lansia, janda, dan penyandang disabilitas berat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun Program Tambun Bungai di Gunung Mas tidak menyebutkan bantuan tunai spesifik ini, semangatnya selaras dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diusung oleh **Tambun Bungai Mandiri**, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengurangi kemiskinan.
2. **Operasi Pasar Murah:** Menyelenggarakan pasar murah untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ini mendukung daya beli masyarakat, selaras dengan semangat **Tambun Bungai Mandiri** dalam meningkatkan perekonomian.
3. **250 Miliarder Muda Baru:** Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pengusaha muda sukses melalui dukungan modal dan bimbingan bisnis. Inisiatif ini sangat relevan dengan **Tambun Bungai Mandiri** yang berupaya meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi.
4. **Milenial Job Center:** Fasilitas pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi SDM berbasis wirausaha. Program ini secara langsung mendukung pengembangan SDM dan penciptaan lapangan kerja, yang merupakan tujuan inti dari **Tambun Bungai Mandiri**.



5. **Inkubasi UMKM:** Program pendampingan dan dukungan bagi pelaku UMKM. Ini memperkuat sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal, dan sangat mendukung **Tambun Bungai Mandiri** dalam peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar.
6. **Asuransi Petani dan Nelayan:** Memberikan perlindungan asuransi untuk menjamin kelangsungan usaha dari risiko alam dan ekonomi. Ini adalah langkah konkret untuk melindungi mata pencarian masyarakat, selaras dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dalam **Tambun Bungai Mandiri**.
7. **Bantuan Perahu dan Alat Tangkap:** Mendukung nelayan dengan menyediakan perahu dan alat tangkap modern untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Ini secara spesifik mendukung ekonomi pesisir dan perikanan, sejalan dengan optimalisasi produksi pangan dan perikanan di **Tambun Bungai Mandiri**.

4. Betang Cerdas: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Spiritual

Batang Cerdas bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Provinsi Kalimantan Tengah, memastikan akses yang merata dan mendorong pendidikan tinggi. Program ini juga menekankan penguatan spiritualitas dan nilai-nilai moral.

Program ini diwujudkan dalam:

1. **Sekolah/Kuliah Gratis:** Menyediakan akses pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi tanpa terkendala biaya. Ini adalah inti dari **Tambun Bungai Cerdas** di Gunung Mas, yang juga menyediakan PAUD, SD, SMP gratis dan beasiswa tidak mampu.
2. **Satu Keluarga Harus Ada Sarjana:** Mendorong setiap keluarga memiliki minimal satu lulusan perguruan tinggi. Ini memperkuat tujuan **Tambun Bungai Cerdas** dalam peningkatan taraf pendidikan dan kesejahteraan sosial-ekonomi.
3. **1.000 Rumah Guru:** Membangun rumah untuk guru sebagai apresiasi dan dukungan, meningkatkan kenyamanan dan kinerja pengajaran. Hal ini secara tidak langsung mendukung peningkatan kompetensi guru dalam **Tambun Bungai Cerdas**.
4. **Insentif Guru Agama (Mengaji, Sekolah Minggu, Balai Basarah, dll.):** Menghargai peran mereka dalam membentuk karakter dan moral anak-anak. Ini selaras dengan fokus **Tambun Bungai Cerdas** dalam membentuk SDM unggul yang berbudaya.



5. **Kalteng Mengaji:** Program untuk memperdalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama, memperkuat spiritualitas dan toleransi. Ini secara langsung mendukung pembentukan SDM yang berbudaya dan bermoral, sejalan dengan visi **Tambun Bungai Cerdas** yang lebih luas.

5. **Batang Sehat: Akses Layanan Kesehatan Prima**

Program **Batang Sehat** bertujuan memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik dan merata.

Program ini diwujudkan dalam:

1. **Berobat Gratis Berbasis KTP:** Memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat hanya dengan menunjukkan KTP. Ini adalah implementasi langsung dari UHC (Universal Health Coverage) yang menjadi fokus **Tambun Bungai Sehat** di Gunung Mas.
2. **Insentif Tenaga Kesehatan Desa:** Menyediakan insentif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga kesehatan di desa. Hal ini mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata, sesuai dengan **Tambun Bungai Sehat** dalam revitalisasi dan peningkatan fasilitas kesehatan.
3. **Revitalisasi Puskesmas Desa:** Memperbaiki dan memperbarui fasilitas puskesmas untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas. Sejalan dengan **Tambun Bungai Sehat** yang juga berfokus pada revitalisasi fasilitas kesehatan.
4. **Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil:** Program pendampingan komprehensif untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Ini mendukung penurunan angka *stunting* dan peningkatan kesehatan generasi masa depan, yang merupakan tujuan utama dari **Tambun Bungai Sehat**.
5. **1 Desa 1 Ambulans:** Menyediakan satu ambulans untuk setiap desa guna memastikan respon cepat dalam situasi darurat. Inisiatif ini langsung didukung fasilitasi program satu desa satu ambulans di **Tambun Bungai Sehat**.

6. **Batang Harmoni: Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Inklusif**

Program **Batang Harmoni** bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial melalui pemberdayaan desa wisata, alokasi anggaran merata, dan insentif bagi pemimpin masyarakat. Program ini juga memprioritaskan layanan cepat tanggap bencana.

Program ini diwujudkan dalam:

1. **Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata):** Mengembangkan 100 desa wisata untuk meningkatkan potensi pariwisata lokal, menciptakan lapangan



kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Inisiatif ini sangat relevan dengan **Tambun Bungai Bermartabat** yang berfokus pada peningkatan ekonomi kepariwisataan yang berbudaya, serta menciptakan peluang ekonomi baru.

2. **Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota:** Mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan dan program prioritas di seluruh kabupaten dan kota, memastikan pemerataan pembangunan. Hal ini secara umum mendukung seluruh pilar Program Tambun Bungai di Gunung Mas dengan menyediakan dukungan finansial untuk pembangunan.
3. **Rp250 Juta Stimulus Desa:** Memberikan stimulus kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Stimulus ini akan mempercepat pertumbuhan desa mandiri dan relevan dengan tujuan **Tambun Bungai Mandiri** dalam pengembangan ekonomi lokal.
4. **Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se-Provinsi Kalimantan Tengah:** Menyediakan insentif sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memimpin dan menjaga keharmonisan serta ketertiban di masyarakat. Peningkatan kapasitas Damang dan Mantir secara khusus juga menjadi bagian dari **Tambun Bungai Bermartabat**, menunjukkan apresiasi terhadap peran tokoh adat dalam menjaga harmoni.
5. **Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga:** Membentuk tim respon cepat untuk menangani kebakaran lahan dan memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dari bencana, mendukung lingkungan hidup yang stabil dan aman bagi pembangunan.

Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana setiap pilar dalam Program "Betang" Provinsi Kalimantan Tengah, dari "Kalteng Bermartabat" hingga "Betang Harmoni", memiliki keterkaitan erat dan saling mendukung dengan Program Tambun Bungai di Kabupaten Gunung Mas. Keduanya sama-sama berlandaskan pada semangat kearifan lokal, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, ekonomi, dan sosial masyarakat, serta berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan kewilayahan merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan potensi ruang, pemerataan pembangunan, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan struktur wilayah yang lebih seimbang, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat pertumbuhan kawasan-kawasan strategis melalui pengelolaan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterkaitan antarkawasan, serta potensi dan permasalahan yang spesifik di setiap wilayah. Kebijakan kewilayahan juga mengintegrasikan aspek potensi kewilayahan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

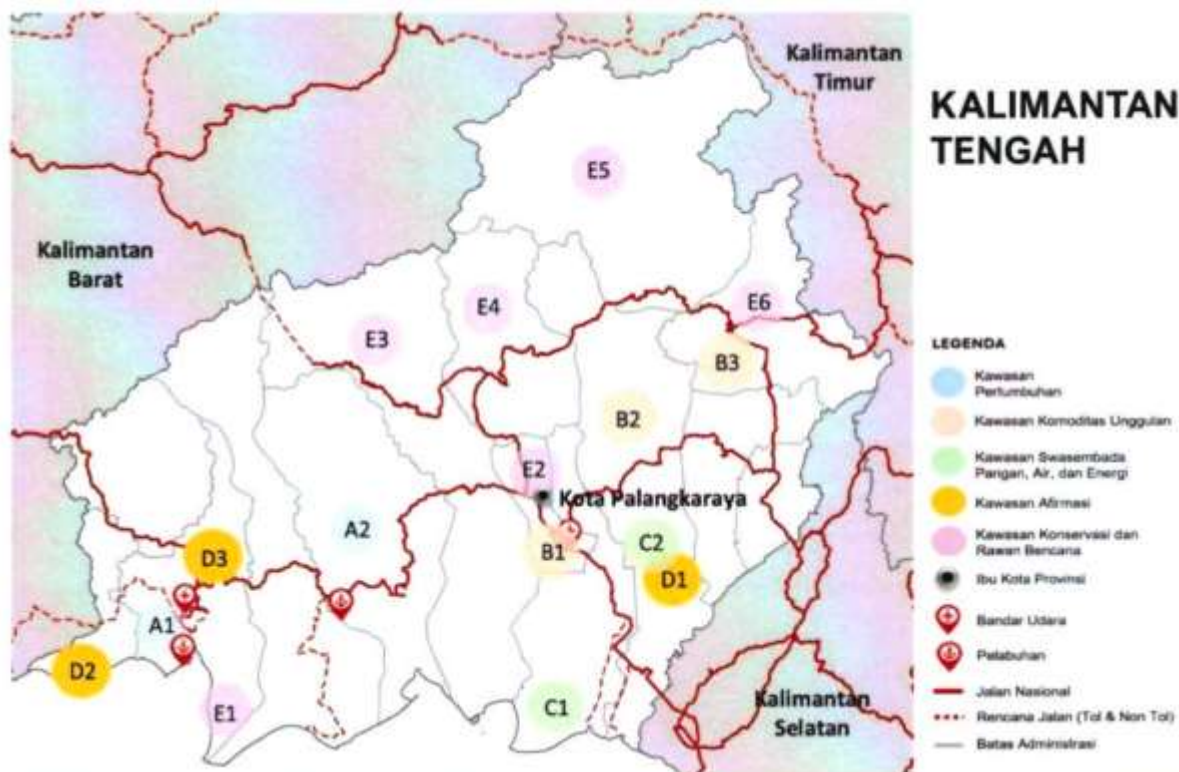
A. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Kabupaten Gunung Mas sebagai Kawasan Konservasi yakni khususnya Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk *Heart of Borneo* disertai mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui:

- Pengendalian kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan, dengan *output*: penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
- Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan *output*: pemulihan dan restorasi lahan gambut, pengelolaan data informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut
- Peningkatan kualitas ekosistem mangrove, dengan *output*: pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove, penguatan data dan informasi publik perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPE) Mangrove
- Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output*: inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
- Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi



Gambar III.4
Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Tengah Pada RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini membahas perencanaan pendanaan pembangunan serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Gunung Mas dalam rangka merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, anggaran belanja daerah dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah disusun. Program-program ini berfokus pada sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, pagu indikatif digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan besaran dana yang dapat digunakan untuk merancang serta melaksanakan program tahunan mereka.

Dalam menetapkan target kinerja berbagai sektor pemerintahan, aspek utama yang dipertimbangkan mencakup kapasitas keuangan daerah serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis dan berbasis data, pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan harus selaras dengan strategi peningkatan daya saing daerah, mengingat Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi faktor utama untuk memastikan setiap program dapat direalisasikan secara optimal.

Sistem pendanaan yang tertata dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan yang menyelaraskan kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, serta pelaksanaannya, Kabupaten Gunung Mas diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



Tabel IV.1

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					349.933.189.759,00		357.790.258.342,00		366.038.078.622,00		374.692.369.065,00		383.769.778.461,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					283.724.893.439,00		290.095.383.613,00		296.782.694.219,00		303.799.569.742,00		311.159.508.980,00	
Meningkatnya kinerja urusan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	283.724.893.439,00	100	290.095.383.613,00	100	296.782.694.219,00	100	303.799.569.742,00	100	311.159.508.980,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					66.025.883.065,00		67.508.365.740,00		69.064.575.988,00		70.697.479.598,00		72.410.217.881,00	
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	95.00	96.00	97.00	66.025.883.065,00	97.50	67.508.365.740,00	9.00	69.064.575.988,00	99.50	70.697.479.598,00	100	72.410.217.881,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					20.000.000,00		20.449.061,00		20.920.455,00		21.415.080,00		21.933.889,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	20.000.000,00	100	20.449.061,00	100	20.920.455,00	100	21.415.080,00	100	21.933.889,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					162.413.255,00		166.059.928,00		169.887.960,00		173.904.645,00		178.117.711,00	
Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	100	100	100	162.413.255,00	100	166.059.928,00	100	169.887.960,00	100	173.904.645,00	100	178.117.711,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					236.634.730.615,00		241.947.902.852,00		247.525.312.449,00		253.377.588.677,00		259.515.989.924,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					139.542.787.717,00		142.675.949.377,00		145.964.931.015,00		149.416.000.674,00		153.035.797.395,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Presentase Cakupan Layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	139.542.787.717,00	100	142.675.949.377,00	100	145.964.931.015,00	100	149.416.000.674,00	100	153.035.797.395,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					85.880.361.425,00		87.808.637.765,00		89.832.812.114,00		91.956.742.090,00		94.184.513.628,00	
Meningkatnyanya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	14.1	13.5	12.4	85.880.361.425,00	11.3	87.808.637.765,00	10.2	89.832.812.114,00	9.1	91.956.742.090,00	8.85	94.184.513.628,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 penduduk)	110	109	109		97		86		77		69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					9.622.844.928,00		9.838.907.179,00		10.065.714.746,00		10.303.699.875,00		10.553.320.390,00	
Meningkatkan mutu dan distribusii tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	9.622.844.928,00	100	9.838.907.179,00	100	10.065.714.746,00	100	10.303.699.875,00	100	10.553.320.390,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					516.078.904,00		527.666.451,00		539.830.276,00		552.593.560,00		565.980.857,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusisediaan farmasi,alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	516.078.904,00	100	527.666.451,00	100	539.830.276,00	100	552.593.560,00	100	565.980.857,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.072.657.641,00		1.096.742.080,00		1.122.024.298,00		1.148.552.478,00		1.176.377.654,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	1.072.657.641,00	100	1.096.742.080,00	100	1.122.024.298,00	100	1.148.552.478,00	100	1.176.377.654,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					198.453.534.931,00		202.909.422.745,00		207.586.913.012,00		212.494.919.978,00		217.642.885.458,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.896.549.541,00		25.455.553.096,00		26.042.357.298,00		26.658.080.465,00		27.303.907.091,00	
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	24.896.549.541,00	100	25.455.553.096,00	100	26.042.357.298,00	100	26.658.080.465,00	100	27.303.907.091,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.228.509.399,00		7.390.811.507,00		7.561.185.304,00		7.739.955.487,00		7.927.465.963,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	7,95	9,01	10,07	7.228.509.399,00	11,14	7.390.811.507,00	12,20	7.561.185.304,00	13,27	7.739.955.487,00	14,33	7.927.465.963,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	23,38	23,38	23,38		23,38		23,38		23,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					8.207.231.424,00		8.391.508.830,00		8.584.950.811,00		8.787.926.027,00		9.000.824.951,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	53.48	53.82	54.15	8.207.231.424,00	54.49	8.391.508.830,00	54.83	8.584.950.811,00	55.17	8.787.926.027,00	55.50	9.000.824.951,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST (%)	0	0	25	500.000.000,00	30	500.000.000,00	35	500.000.000,00	40	500.000.000,00	45	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.295.152.990,00		3.369.139.236,00		3.446.805.003,00		3.528.298.305,00		3.613.775.915,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	36,78	37,46	38,13	3.295.152.990,00	38,81	3.369.139.236,00	39,48	3.446.805.003,00	40,16	3.528.298.305,00	40,83	3.613.775.915,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					-		-		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan (Unit)	2	1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah Bangunan Beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (Unit)	2	2	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					153.235.947.548,00		156.699.015.511,00		160.334.310.514,00		164.148.760.603,00		168.149.703.871,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	34,65	36,00	37,62	153.235.947.548,00	39,65	156.699.015.511,00	41,68	160.334.310.514,00	43,04	164.148.760.603,00	44,39	168.149.703.871,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					277.421.804,00		283.650.771,00		290.189.519,00		297.050.511,00		304.246.946,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	12,20	12,20	18,18	277.421.804,00	24,16	283.650.771,00	30,14	290.189.519,00	36,12	297.050.511,00	42,11	304.246.946,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Ketersediaan Data layanan Jasa Konstruksi (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					312.722.225,00		319.743.794,00		327.114.563,00		334.848.580,00		342.960.721,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	95	95	95	312.722.225,00	95	319.743.794,00	95	327.114.563,00	95	334.848.580,00	95	342.960.721,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.797.389.828,00		8.994.918.090,00		9.202.269.929,00		9.419.840.509,00		9.648.048.382,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					174.044.126,00		177.951.948,00		182.054.116,00		186.358.448,00		190.873.223,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0,19	0,18	0,18	174.044.126,00	0,18	177.951.948,00	0,18	182.054.116,00	0,17	186.358.448,00	0,17	190.873.223,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.781.482.584,00		1.821.482.307,00		1.863.471.317,00		1.907.529.635,00		1.953.742.019,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman					1.781.482.584,00		1.821.482.307,00		1.863.471.317,00		1.907.529.635,00		1.953.742.019,00	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					6.841.863.118,00		6.995.483.835,00		7.156.744.496,00		7.325.952.426,00		7.503.433.140,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0,04	0,07	0,10	6.841.863.118,00	0,14	6.995.483.835,00	0,17	7.156.744.496,00	0,21	7.325.952.426,00	0,24	7.503.433.140,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					20.126.539.342,48		20.578.441.600,66		21.052.812.287,43		21.550.518.044,70		22.067.515.175,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.049.010.635,60		14.364.453.818,52		14.695.578.975,54		15.042.979.758,50		15.402.323.318,86	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.487.754.653,60	100	5.610.971.500,52	100	5.740.310.422,54	100	5.876.029.401,50	100	6.018.383.844,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentasi Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	8.561.255.982,00	100	8.753.482.318,00	100	8.955.268.553,00	100	9.166.950.357,00	100	9.383.939.474,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.726.072.491,00		3.809.734.194,00		3.897.556.605,00		3.989.707.092,00		4.086.362.929,00	
Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2.09	2.50	2.62	3.726.072.491,00	2.75	3.809.734.194,00	2.87	3.897.556.605,00	3.00	3.989.707.092,00	3.12	4.086.362.929,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.043.131.556,88		2.089.006.099,14		2.137.162.097,89		2.187.691.326,20		2.240.690.991,14	
Terlaksananya pemulihan Sarana dan prasarana umum pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, penanganan serta pemulihan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	100	100	100	2.043.131.556,88	100	2.089.006.099,14	100	2.137.162.097,89	100	2.187.691.326,20	100	2.240.690.991,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	100	100	10		100		100		100				
	Jumlah Aparatur BPBD Kab/Kota dan lintas perangkat daerah Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Orang)	100	100	100		100		100		100				
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					308.324.659,00		315.247.489,00		322.514.609,00		330.139.868,00		338.137.936,00	
Responsef Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	100	100	100	308.324.659,00	100	315.247.489,00	100	322.514.609,00	100	330.139.868,00	100	338.137.936,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100				
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					9.522.503.691,00		9.736.312.343,00		9.961.394.102,00		10.195.966.410,00		10.443.276.058,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.622.906.217,00		5.749.157.630,00		5.881.687.843,00		6.020.749.425,00		6.166.609.904,00	
Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					5.622.906.217,00		5.749.157.630,00		5.881.687.843,00		6.020.749.425,00		6.166.609.904,00	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					696.693.172,00		712.335.428,00		729.395.482,00		745.694.331,00		764.058.859,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial					696.693.172,00		712.335.428,00		729.395.482,00		745.694.331,00		764.058.859,00	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					501.454.904,00		512.714.099,00		524.533.240,00		536.934.856,00		549.942.799,00	
persentase penyadang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya					501.454.904,00		512.714.099,00		524.533.240,00		536.934.856,00		549.942.799,00	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.439.582.945,00		2.494.359.032,00		2.551.859.269,00		2.612.193.242,00		2.675.477.017,00	
Persentase Tercapainya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota					2.439.582.945,00		2.494.359.032,00		2.551.859.269,00		2.612.193.242,00		2.675.477.017,00	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					261.866.453,00		267.746.154,00		273.918.268,00		280.394.556,00		287.187.479,00	
Persentase KLB yang tertangani					261.866.453,00		267.746.154,00		273.918.268,00		280.394.556,00		287.187.479,00	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.635.386.003,00		6.784.370.680,00		6.940.764.738,00		7.104.866.228,00		7.276.990.842,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.320.807.278,00		6.462.728.702,00		6.611.708.234,00		6.768.029.794,00		6.931.994.108,00	
Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	6.320.807.278,00	100	6.462.728.702,00	100	6.611.708.234,00	100	6.768.029.794,00	100	6.931.994.108,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					17.852.148,00		18.252.983,00		18.673.753,00		19.115.259,00		19.578.351,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	17.852.148,00	100	18.252.983,00	100	18.673.753,00	100	19.115.259,00	100	19.578.351,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					166.051.748,00		169.780.117,00		173.693.907,00		177.800.577,00		182.108.027,00	
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1.31	1.35	1.38	166.051.748,00	1.40	169.780.117,00	1.45	173.693.907,00	1.48	177.800.577,00	1.5	182.108.027,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					4.055.624,00		4.146.685,00		4.242.275,00		4.342.576,00		4.447.781,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	98.68	96.70	96.81	4.055.624,00	96.85	4.146.685,00	96.90	4.242.275,00	96.95	4.342.576,00	96.99	4.447.781,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					126.619.205,00		129.462.193,00		132.446.569,00		135.578.022,00		138.862.575,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	11700	11800	12000	126.619.205,00	12200	129.462.193,00	12400	132.446.569,00	12600	135.578.022,00	12800	138.862.575,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.043.941.089,00		6.178.198.433,99		6.320.618.942,99		6.470.058.236,99		6.626.803.803,99	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.337.410.484,00		5.455.804.059,00		5.581.571.853,00		5.713.537.752,00		5.851.955.628,00	
Terpenuhinya Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.337.410.484,00	100	5.455.804.059,00	100	5.581.571.853,00	100	5.713.537.752,00	100	5.851.955.628,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
	Presentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					399.701.238,00		408.675.750,99		418.096.588,99		427.981.706,99		438.350.118,99	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan					399.701.238,00		408.675.750,99		418.096.588,99		427.981.706,99		438.350.118,99	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					43.102.678,00		44.070.465,00		45.086.382,00		46.152.366,00		47.270.467,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan					43.102.678,00		44.070.465,00		45.086.382,00		46.152.366,00		47.270.467,00	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					24.312.550,00		24.858.441,00		25.431.481,00		26.032.761,00		26.663.438,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak					24.312.550,00		24.858.441,00		25.431.481,00		26.032.761,00		26.663.438,00	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					97.986.337,00		100.186.429,00		102.495.938,00		104.919.264,00		107.461.069,00	
Meningkatnya peningkatan data gender dan anak					97.986.337,00		100.186.429,00		102.495.938,00		104.919.264,00		107.461.069,00	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					64.207.260,00		65.648.910,00		67.162.256,00		68.750.182,00		70.415.746,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif					64.207.260,00		65.648.910,00		67.162.256,00		68.750.182,00		70.415.746,00	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					77.220.542,00		78.954.379,00		80.774.444,00		82.684.205,00		84.687.337,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dam					77.220.542,00		78.954.379,00		80.774.444,00		82.684.205,00		84.687.337,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
perlakuan salah lainnya terhadap anak														
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					621.611.236,00		635.568.307,00		650.219.496,00		665.592.728,00		681.717.577,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					424.044.043,00		433.565.127,00		443.559.717,00		454.046.863,00		465.046.738,00	
Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	-	90	86.20	424.044.043,00	88.90	433.565.127,00	91.70	443.559.717,00	94.50	454.046.863,00	100	465.046.738,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					118.903.640,00		121.573.390,00		124.375.913,00		127.316.550,00		130.400.959,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (Kegiatan)	12	15	17	118.903.640,00	20	121.573.390,00	23	124.375.913,00	25	127.316.550,00	28	130.400.959,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					78.663.553,00		80.429.790,00		82.283.866,00		84.229.315,00		86.269.880,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	-	40	60	78.663.553,00	75	80.429.790,00	80	82.283.866,00	85	84.229.315,00	90	86.269.880,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					-		-		-		-		-	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					-		-		-		-		-	
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan					-		-		-		-		-	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					-		-		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee					-		-		-		-		-	
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					-		-		-		-		-	
Tersedianya dokumen fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi izin membuka tanah					-		-		-		-		-	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.060.433.691,00		14.376.133.358,00		14.707.533.559,00		15.055.265.872,00		15.419.999.246,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.215.583.705,00		9.422.501.695,00		9.639.710.238,00		9.867.623.282,00		10.106.679.276,00	
Meningkatnya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	99,67	100	100	9.215.583.705,00	100	9.422.501.695,00	100	9.639.710.238,00	100	9.867.623.282,00	100	10.106.679.276,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	98,18	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
	Persentasi Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	92,23	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	98,57	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99,81	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	88,69	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					92.686.178,00		94.767.266,00		96.951.851,00		99.244.097,00		101.648.414,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	79.03	80	85	92.686.178,00	90	94.767.266,00	95	96.951.851,00	100	99.244.097,00	100	101.648.414,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					172.204.279,00		176.070.791,00		180.129.593,00		184.388.423,00		188.855.472,00	
Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,90	74,70	74,90	172.204.279,00	75,10	176.070.791,00	75,30	180.129.593,00	75,50	184.388.423,00	75,70	188.855.472,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	83,75	79,50	79,80		80,10		80,40		80,70		81,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					19.643.163,00		20.084.212,00		20.547.195,00		21.032.995,00		21.542.547,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati					19.643.163,00		20.084.212,00		20.547.195,00		21.032.995,00		21.542.547,00	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					63.282.339,00		64.703.221,00		66.194.767,00		67.759.819,00		69.401.389,00	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	63.77	75	80	63.282.339,00	85	64.703.221,00	90	66.194.767,00	95	67.759.819,00	100	69.401.389,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					125.677.421,00		128.499.263,00		131.461.442,00		134.569.604,00		137.829.727,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	25	37	50	125.677.421,00	70	128.499.263,00	75	131.461.442,00	80	134.569.604,00	90	137.829.727,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					56.846.333,00		58.122.707,00		59.462.558,00		60.868.440,00		62.343.057,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	70	75	75	56.846.333,00	80	58.122.707,00	85	59.462.558,00	90	60.868.440,00	90	62.343.057,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					16.819.080,00		17.196.720,00		17.593.141,00		18.009.098,00		18.445.392,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	70	70	75	16.819.080,00	80	17.196.720,00	80	17.593.141,00	80	18.009.098,00	85	18.445.392,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.297.691.193,00		4.394.187.483,00		4.495.482.774,00		4.601.770.114,00		4.713.253.972,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	40	40	40	4.297.691.193,00	50	4.394.187.483,00	65	4.495.482.774,00	75	4.601.770.114,00	75	4.713.253.972,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.571.208.300,00		6.718.751.991,00		6.873.633.399,00		7.036.147.691,00		7.206.607.512,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.064.710.707,00		6.200.881.980,00		6.343.825.391,00		6.493.813.356,00		6.651.134.422,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	6.064.710.707,00	100	6.200.881.980,00	100	6.343.825.391,00	100	6.493.813.356,00	100	6.651.134.422,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					224.676.822,00		229.721.503,00		235.017.068,00		240.573.610,00		246.401.818,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	96.41	98.00	97.50	224.676.822,00	98.25	229.721.503,00	99	235.017.068,00	99.50	240.573.610,00	100	246.401.818,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk (Persentase)	67.56	70	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					173.948.870,00		177.854.554,00		181.954.477,00		186.256.453,00		190.768.758,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2	2	2	173.948.870,00	2	177.854.554,00	2	181.954.477,00	2	186.256.453,00	2	190.768.758,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98.89	99.00	99.05		99.25		99.50		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					97.016.414,00		99.194.728,00		101.481.376,00		103.880.715,00		106.397.361,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	97.016.414,00	100	99.194.728,00	100	101.481.376,00	100	103.880.715,00	100	106.397.361,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					10.855.487,00		11.099.226,00		11.355.087,00		11.623.557,00		11.905.153,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	100	100	100	10.855.487,00	100	11.099.226,00	100	11.355.087,00	100	11.623.557,00	100	11.905.153,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.268.497.346,92		8.478.761.283,77		8.674.214.615,17		8.879.300.309,88		9.094.412.897,21	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.191.775.546,00		5.292.224.105,00		5.428.414.210,00		5.597.632.664,00		5.739.575.035,00	
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana dalam kondisi pegawai aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat Minat Pengunjung Pameran Pembangunan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	5.191.775.546,00	100	5.292.224.105,00	100	5.428.414.210,00	100	5.597.632.664,00	100	5.739.575.035,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	95	95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	95	95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Presentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	0	0		100		0		100		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100				Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					40.000.000,00		50.000.000,00		36.959.429,00		55.000.000,00		-					
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	0	0	96	40.000.000,00	97	50.000.000,00	98	36.959.429,00	99	55.000.000,00	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					40.000.000,00		40.000.000,00		40.922.084,00		41.000.000,00		41.993.278,00					
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	95	95	96	40.000.000,00	97	40.000.000,00	98	40.922.084,00	99	41.000.000,00	100	41.993.278,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	0	0	114				114				114			114	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.571.721.800,92		2.663.117.285,77		2.724.507.757,17		2.736.923.681,88		2.803.229.214,21					
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	95	95	96	2.571.721.800,92	97	2.663.117.285,77	98	2.724.507.757,17	99	2.736.923.681,88	100	2.803.229.214,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	95	95	96				97				98			99		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	95	95	96				97				98			99		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					425.000.000,00		433.419.893,00		443.411.135,00		448.743.964,00		509.615.370,00					
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	95	95	96	425.000.000,00	97	433.419.893,00	98	443.411.135,00	99	448.743.964,00	100	509.615.370,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	95	95	96		97		98		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	95	95	96		97		98		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.659.440.553,00		3.741.606.166,00		3.827.858.082,00		3.918.360.677,00		4.013.288.056,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					307.213.542,00		314.111.423,00		321.352.355,00		328.950.135,00		336.919.380,00	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk					307.213.542,00		314.111.423,00		321.352.355,00		328.950.135,00		336.919.380,00	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.148.814.499,00		2.197.061.945,00		2.247.708.858,00		2.300.851.759,00		2.356.592.882,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)					2.148.814.499,00		2.197.061.945,00		2.247.708.858,00		2.300.851.759,00		2.356.592.882,00	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.203.412.512,00		1.230.432.798,00		1.258.796.869,00		1.288.558.783,00		1.319.775.794,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta massyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)					1.203.412.512,00		1.230.432.798,00		1.258.796.869,00		1.288.558.783,00		1.319.775.794,00	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					762.505.397,00		779.625.971,00		797.597.995,00		816.455.718,00		836.235.418,00	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					733.127.468,00		749.588.418,00		766.868.013,00		784.999.183,00		804.016.808,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat					733.127.468,00		749.588.418,00		766.868.013,00		784.999.183,00		804.016.808,00	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					29.377.929,00		30.037.553,00		30.729.982,00		31.456.535,00		32.218.610,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	0	0	0	29.377.929,00	0	30.037.553,00	0	30.729.982,00	0	31.456.535,00	0	32.218.610,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.385.331.620,00		13.685.873.191,00		14.001.361.439,00		14.332.397.625,00		14.679.597.899,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.705.749.577,00		5.833.861.081,00		5.968.343.883,00		6.109.454.291,00		6.257.443.081,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Adminsitrası dan Pelayanan Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100	5.675.388.025,00	100	5.802.817.818,00	100	5.936.585.009,00	100	6.076.944.536,00	100	6.224.166.411,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Mewujudkan Kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, relevan, dan dapat dievaluasi dengan hasil yang jelas dan terukur.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Predikat)	BB (&70)	BB (&70)	BB (&71)	30.361.552,00	BB (&72)	31.043.263,00	BB (&73)	31.758.874,00	BB (&74)	32.509.755,00	BB (&75)	33.276.670,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.455.343.141,00		3.532.926.146,00		3.614.367.548,00		3.699.822.555,00		3.789.455.562,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Pubik Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	3.455.343.141,00	100	3.532.926.146,00	100	3.614.367.548,00	100	3.699.822.555,00	100	3.789.455.562,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	87.50	87.60	87.70		87.80		87.90		88		88.10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	0	20		25		30		35		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.224.238.902,00		4.319.085.964,00		4.418.650.008,00		4.523.120.779,00		4.632.699.256,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.74	2.75	2.8	4.224.238.902,00	2.85	4.319.085.964,00	2.9	4.418.650.008,00	2.95	4.523.120.779,00	3	4.632.699.256,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	71	71	73.68		76.32		78.95		81.58		84.21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	96.70	96.70	97		97,10		97,30		97,40		97,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	26,3	35	45		55		65		75		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					223.894.805,00		228.921.927,00		234.199.060,00		239.736.261,00		245.544.183,00	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					53.569.643,00		55.221.506,00		56.955.520,00		58.774.990,00		60.683.416,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	5.4	8.5	10	53.569.643,00	15	55.221.506,00	20	56.955.520,00	25	58.774.990,00	30	60.683.416,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	0	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	5	5.5	6	10.000.000,00	6.5	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7.5	10.000.000,00	8	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					120.325.162,00		123.700.421,00		127.243.540,00		130.961.271,00		134.860.767,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0.35	0.4	0.5	120.325.162,00	0.6	123.700.421,00	0.7	127.243.540,00	0.8	130.961.271,00	0.9	134.860.767,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0.32	0.4	0.5	20.000.000,00	0.6	20.000.000,00	0.7	20.000.000,00	0.8	20.000.000,00	0.9	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.972.824.905,00		5.089.628.590,00		5.212.395.656,00		5.334.206.028,00		5.475.660.164,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.116.966.365,00		4.214.553.413,00		4.317.148.149,00		4.417.792.056,00		4.537.044.874,00	
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	91.81	92	92.90	4.116.966.365,00	93	4.214.553.413,00	93.50	4.317.148.149,00	94	4.417.792.056,00	94.50	4.537.044.874,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					40.322.234,00		41.227.591,00		42.177.974,00		43.175.194,00		44.221.169,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	90.84	91	91.90	40.322.234,00	92	41.227.591,00	92.50	42.177.974,00	93	43.175.194,00	93.50	44.221.169,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					377.528.577,00		386.005.246,00		394.903.482,00		404.240.242,00		414.033.487,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	92.97	93	93.98	377.528.577,00	94	386.005.246,00	94.50	394.903.482,00	95	404.240.242,00	95.50	414.033.487,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					232.305.653,00		237.521.624,00		242.996.998,00		248.742.210,00		254.768.313,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	89.56	89.70	89.98	232.305.653,00	90	237.521.624,00	90.50	242.996.998,00	91	248.742.210,00	91.50	254.768.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					177.018.065,00		180.992.661,00		185.164.924,00		189.542.805,00		194.134.725,00	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	96.20	96.90	97	177.018.065,00	97.50	180.992.661,00	98	185.164.924,00	98.50	189.542.805,00	98.90	194.134.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM					28.684.011,00		29.328.055,00		30.004.129,00		30.713.521,00		31.457.596,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	93.80	94	94.50	28.684.011,00	95	29.328.055,00	95.50	30.004.129,00	96	30.713.521,00	96.50	31.457.596,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.862.162.670,00		9.061.145.280,00		9.270.023.794,00		9.489.196.287,00		9.719.084.395,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.432.565.215,00		1.464.730.678,00		1.498.495.810,00		1.533.924.959,00		1.571.086.283,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	100	100	100	1.432.565.215,00	100	1.464.730.678,00	100	1.498.495.810,00	100	1.533.924.959,00	100	1.571.086.283,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					7.024.035.024,00		7.181.746.056,00		7.347.300.453,00		7.521.013.725,00		7.703.220.054,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	100	100	100	7.024.035.024,00	100	7.181.746.056,00	100	7.347.300.453,00	100	7.521.013.725,00	100	7.703.220.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					405.562.431,00		414.668.546,00		424.227.531,00		434.257.603,00		444.778.058,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	100	100	100	405.562.431,00	100	414.668.546,00	100	424.227.531,00	100	434.257.603,00	100	444.778.058,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					119.576.735,00		122.261.598,00		125.079.985,00		128.037.269,00		131.139.139,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					119.576.735,00		122.261.598,00		125.079.985,00		128.037.269,00		131.139.139,00	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.16	2.19	2.6	119.576.735,00	2.65	122.261.598,00	2.7	125.079.985,00	2.8	128.037.269,00	3	131.139.139,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					85.583.092,00		87.504.694,00		89.521.861,00		91.638.440,00		93.858.500,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					85.583.092,00		87.504.694,00		89.521.861,00		91.638.440,00		93.858.500,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	80	50	52	85.583.092,00	54	87.504.694,00	56	89.521.861,00	58	91.638.440,00	60	93.858.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					9.164.147.859,00		9.369.910.962,00		9.585.907.176,00		9.812.548.145,00		10.050.269.870,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.949.372.931,00		6.082.954.520,00		6.223.179.454,00		6.370.314.972,00		6.524.644.127,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					5.949.372.931,00		6.082.954.520,00		6.223.179.454,00		6.370.314.972,00		6.524.644.127,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.968.575.048,00		3.035.228.623,00		3.105.197.046,00		3.178.613.662,00		3.255.619.708,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	2.968.575.048,00	100	3.035.228.623,00	100	3.105.197.046,00	100	3.178.613.662,00	100	3.255.619.708,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					49.360.192,00		50.468.479,00		51.631.884,00		52.852.624,00		54.133.047,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional					49.360.192,00		50.468.479,00		51.631.884,00		52.852.624,00		54.133.047,00	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					191.253.022,00		195.547.236,00		200.055.012,00		204.784.941,00		209.746.122,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	100	100	100	191.253.022,00	100	195.547.236,00	100	200.055.012,00	100	204.784.941,00	100	209.746.122,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					5.586.666,00		5.712.104,00		5.843.780,00		5.981.946,00		6.126.866,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	100	100	100	5.586.666,00	100	5.712.104,00	100	5.843.780,00	100	5.981.946,00	100	6.126.866,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.690.584.834,00		6.840.808.896,00		6.998.503.972,00		7.163.970.599,00		7.337.527.093,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.578.484.233,00		5.703.738.237,00		5.835.221.438,00		5.973.184.409,00		6.117.892.560,00	
Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	5.578.484.233,00	100	5.703.738.237,00	100	5.835.221.438,00	100	5.973.184.409,00	100	6.117.892.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					994.263.851,00		1.016.588.113,00		1.040.022.612,00		1.064.612.016,00		1.090.403.626,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Program Pembinaan Perpustakaan (%)	100	100	100	994.263.851,00	100	1.016.588.113,00	100	1.040.022.612,00	100	1.064.612.016,00	100	1.090.403.626,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					117.836.750,00		120.482.546,00		123.259.922,00		126.174.174,00		129.230.907,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (%)	100	100	100	117.836.750,00	100	120.482.546,00	100	123.259.922,00	100	126.174.174,00	100	129.230.907,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					606.653.399,00		620.499.151,00		635.033.487,00		650.284.105,00		666.280.345,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					606.653.399,00		620.499.151,00		635.033.487,00		650.284.105,00		666.280.345,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Program Pengelolaan Arsip (%)	100	100	100	606.653.399,00	100	620.499.151,00	100	635.033.487,00	100	650.284.105,00	100	666.280.345,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					-		-		-		-		-	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.350.070.990,00		8.537.555.579,00		8.734.364.248,00		8.940.872.066,00		9.157.476.308,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.776.678.657,00		6.928.835.784,00		7.088.560.067,00		7.256.155.902,00		7.431.945.706,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	6.776.678.657,00	100	6.928.835.784,00	100	7.088.560.067,00	100	7.256.155.902,00	100	7.431.945.706,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					148.373.332,00		151.704.766,00		155.201.881,00		158.871.341,00		162.720.206,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah PUD (Ton)	170	175	180	148.373.332,00	190	151.704.766,00	200	155.201.881,00	210	158.871.341,00	220	162.720.206,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.201.751.691,00		1.228.734.686,00		1.257.059.613,00		1.286.780.453,00		1.317.954.381,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1312	1350	1330	1.201.751.691,00	1355	1.228.734.686,00	1380	1.257.059.613,00	1405	1.286.780.453,00	1430	1.317.954.381,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					223.267.310,00		228.280.343,00		233.542.687,00		239.064.370,00		244.856.015,00	
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	34.3	37	37	223.267.310,00	38	228.280.343,00	39	233.542.687,00	40	239.064.370,00	41	244.856.015,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					231.962.861,00		237.171.135,00		242.638.430,00		248.375.166,00		254.392.376,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					29.351.054,00		30.010.075,00		30.701.870,00		31.427.760,00		32.189.137,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	100	100	100	29.351.054,00	100	30.010.075,00	100	30.701.870,00	100	31.427.760,00	100	32.189.137,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					202.611.807,00		207.161.060,00		211.936.560,00		216.947.406,00		222.203.239,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100	100	100	202.611.807,00	100	207.161.060,00	100	211.936.560,00	100	216.947.406,00	100	222.203.239,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya					-		-		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					15.795.532.438,49		16.150.190.369,87		16.522.486.331,44		16.913.129.829,01		17.322.872.370,20	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.876.232.542,12		14.187.796.330,49		14.514.854.969,41		14.858.031.752,64		15.217.986.873,19	
TERPENUHINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	13.876.232.542,12	100	14.187.796.330,49	100	14.514.854.969,41	100	14.858.031.752,64	100	15.217.986.873,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					451.360.964,22		461.495.396,04		472.133.838,53		483.296.566,14		495.005.053,30	
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	1272,03	1284,68	1336,45	451.360.964,22	1390,31	461.495.396,04	1446,33	472.133.838,53	1504,63	483.296.566,14	1562,48	495.005.053,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	1353,00	356,55	420,71		497,10		588,18		696,83		826,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Peternakan (Ton)	1077.69	1092.60	1110.02		1143.32		1177.62		1212.95		1249.34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.099.268.843,49		1.123.950.785,50		1.149.860.222,29		1.177.046.531,36		1.205.562.012,66	
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	1298.04	1311.02	1324.13	1.099.268.843,49	1337.37	1.123.950.785,50	1350.75	1.149.860.222,29	1364.25	1.177.046.531,36	1377.90	1.205.562.012,66	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Terlaksananya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					54.789.633,88		56.019.828,45		57.311.203,68		58.666.220,64		60.087.486,05	
PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms) (%)	90	90	90	54.789.633,88	100	56.019.828,45	100	57.311.203,68	100	58.666.220,64	100	60.087.486,05	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	0	100		100			100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					55.960.033,51		57.216.507,13		58.535.468,33		59.919.430,75		61.371.056,80	
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	50	60	75	55.960.033,51	80	57.216.507,13	85	58.535.468,33	90	59.919.430,75	100	61.371.056,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	50	60	70		75		85		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					-		-		-		-		-	
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					257.920.421,27		263.711.522,26		269.790.629,20		276.169.327,48		282.859.888,20	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan (%)	100	100	100	257.920.421,27	100	263.711.522,26	100	269.790.629,20	100	276.169.327,48	100	282.859.888,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi (%)	50	50	75		80		85		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					815.205.123,00		833.508.966,00		852.723.106,00		872.884.161,00		894.030.913,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					815.205.123,00		833.508.966,00		852.723.106,00		872.884.161,00		894.030.913,00	
meningkatkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	100	100	100	815.205.123,00	100	833.508.966,00	100	852.723.106,00	100	872.884.161,00	100	894.030.913,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.374.278.453,00		3.450.041.309,00		3.529.572.038,00		3.613.022.213,00		3.700.552.369,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.139.603.451,00		3.210.097.136,00		3.284.096.646,00		3.361.743.011,00		3.443.185.602,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	3.139.603.451,00	100	3.210.097.136,00	100	3.284.096.646,00	100	3.361.743.011,00	100	3.443.185.602,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					17.714.959,00		18.112.714,00		18.530.250,00		18.968.364,00		19.427.897,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	17.714.959,00	100	18.112.714,00	100	18.530.250,00	100	18.968.364,00	100	19.427.897,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegritasi					-		-		-		-		-	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					216.960.043,00		221.831.459,00		226.945.142,00		232.310.838,00		237.938.870,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	216.960.043,00	100	221.831.459,00	100	226.945.142,00	100	232.310.838,00	100	237.938.870,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN					-		-		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG PERINDUSTRIAN														
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					-		-		-		-		-	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					105.327.524,00		107.692.448,00		110.174.986,00		112.779.870,00		115.512.108,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					51.203.070,00		52.577.265,00		54.019.803,00		55.533.433,00		57.121.065,00	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	75	75	75	51.203.070,00	75	52.577.265,00	75	54.019.803,00	75	55.533.433,00	75	57.121.065,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan di kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	75	75	75	10.000.000,00	75	10.000.000,00	75	10.000.000,00	75	10.000.000,00	75	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					44.124.454,00		45.115.183,00		46.155.183,00		47.246.437,00		48.391.043,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	75	75	75	44.124.454,00	75	45.115.183,00	75	46.155.183,00	75	47.246.437,00	75	48.391.043,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					38.612.086.619,00		39.715.877.425,00		40.631.412.190,00		41.592.066.455,00		42.599.688.301,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.163.655.886,00		31.077.753.626,00		31.794.161.413,00		32.545.875.299,00		33.334.341.413,00	
Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten					30.163.655.886,00		31.077.753.626,00		31.794.161.413,00		32.545.875.299,00		33.334.341.413,00	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.448.430.733,00		8.638.123.799,00		8.837.250.777,00		9.046.191.156,00		9.265.346.888,00	
Efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat					8.448.430.733,00		8.638.123.799,00		8.837.250.777,00		9.046.191.156,00		9.265.346.888,00	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					-		-		-		-		-	
Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					-		-		-		-		-	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					38.386.212.471,00		39.248.100.145,00		40.152.851.652,00		41.102.191.243,00		42.097.945.221,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.562.527.543,00		27.158.937.392,00		27.785.008.195,00		28.441.933.103,00		29.130.975.883,00	
Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	26.562.527.543,00	100	27.158.937.392,00	100	27.785.008.195,00	100	28.441.933.103,00	100	29.130.975.883,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					11.823.684.928,00		12.089.162.753,00		12.367.843.457,00		12.660.258.140,00		12.966.969.338,00	
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota (%)	33.33	83.33	83.33	11.823.684.928,00	85.71	12.089.162.753,00	85.71	12.367.843.457,00	85.71	12.660.258.140,00	85.71	12.966.969.338,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					10.613.508.408,00		10.851.814.079,00		11.101.971.288,00		11.364.456.776,00		11.639.775.505,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.832.717.664,00		8.008.586.093,00		8.193.200.899,00		8.386.913.913,00		8.590.097.798,00	
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	7.832.717.664,00	100	8.008.586.093,00	100	8.193.200.899,00	100	8.386.913.913,00	100	8.590.097.798,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.307.252.773,00		1.336.604.588,00		1.367.416.143,00		1.399.746.159,00		1.433.656.828,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah dan perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada selesai tepat waktu (Dokumen)	100	100	100	1.307.252.773,00	100	1.336.604.588,00	100	1.367.416.143,00	100	1.399.746.159,00	100	1.433.656.828,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.473.537.971,00		1.506.623.398,00		1.541.354.246,00		1.577.796.704,00		1.616.020.879,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.473.537.971,00	100	1.506.623.398,00	100	1.541.354.246,00	100	1.577.796.704,00	100	1.616.020.879,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					68.421.789.290,85		55.996.706.688,00		54.132.311.209,22		61.439.996.094,92		60.360.379.964,79	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.492.592.334,85		19.874.107.428,00		20.332.247.531,22		19.792.991.264,92		21.317.186.889,79	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	90	90	90	10.186.738.294,85	90	10.359.308.551,00	90	10.598.112.468,22	90	9.828.710.658,92	90	11.111.508.642,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam mendukung peningkatan PAD					9.305.854.040,00		9.514.798.877,00		9.734.135.063,00		9.964.280.606,00		10.205.678.247,00	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					46.741.446.934,00		33.885.727.571,00		31.511.627.377,00		39.304.462.704,00		36.643.899.821,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
.Meningktnya tata kelola keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	90	90	90	46.741.446.934,00	90	33.885.727.571,00	90	31.511.627.377,00	90	39.304.462.704,00	90	36.643.899.821,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	90	90	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.187.750.022,00		2.236.871.689,00		2.288.436.301,00		2.342.542.126,00		2.399.293.254,00	
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah					2.187.750.022,00		2.236.871.689,00		2.288.436.301,00		2.342.542.126,00		2.399.293.254,00	
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.812.316.336,00		7.967.971.998,00		8.176.462.917,00		8.372.144.510,89		8.577.393.218,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.867.298.935,00		6.005.624.648,00		6.142.913.859,00		6.290.549.334,00		6.445.402.376,00	
Terlaksananya Kebutuhan Adminitrasi Penunjang Pemerintah Daerah					5.867.298.935,00		6.005.624.648,00		6.142.913.859,00		6.290.549.334,00		6.445.402.376,00	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.945.017.401,00		1.962.347.350,00		2.033.549.058,00		2.081.595.176,89		2.131.990.842,00	
Terlaksananya Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas					1.945.017.401,00		1.962.347.350,00		2.033.549.058,00		2.081.595.176,89		2.131.990.842,00	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.558.868.327,00		3.638.775.787,00		3.722.657.246,00		3.810.672.562,00		3.902.991.055,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.558.868.327,00		3.638.775.787,00		3.722.657.246,00		3.810.672.562,00		3.902.991.055,00	
Terlaksananya program Pengembangan Sumber Daya Manusia					3.558.868.327,00		3.638.775.787,00		3.722.657.246,00		3.810.672.562,00		3.902.991.055,00	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					866.842.093,00		886.305.345,00		906.736.553,00		928.174.656,00		950.660.892,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					850.353.085,00		869.446.109,00		889.488.676,00		910.518.985,00		932.577.489,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil Penelitian yang di tindak lanjuti (%)	100	100	100	850.353.085,00	100	869.446.109,00	100	889.488.676,00	100	910.518.985,00	100	932.577.489,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					16.489.008,00		16.859.236,00		17.247.877,00		17.655.671,00		18.083.403,00	
Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Riset dan Inovasi Daerah yang di manfaatkan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	16.489.008,00	100	16.859.236,00	100	17.247.877,00	100	17.655.671,00	100	18.083.403,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					13.848.799.666,09		14.159.747.505,70		14.486.159.559,02		14.828.657.894,19		15.187.901.394,01	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.848.799.666,09		14.159.747.505,70		14.486.159.559,02		14.828.657.894,19		15.187.901.394,01	
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	95	100	100	13.848.799.666,09	100	14.159.747.505,70	100	14.486.159.559,02	100	14.828.657.894,19	100	15.187.901.394,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					-		-		-		-		-	
Menurutnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan					-		-		-		-		-	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					-		-		-		-		-	
7.01 - KECAMATAN					38.811.006.360,20		39.689.865.141,71		40.698.767.803,88		41.660.983.029,96		42.669.928.154,92	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.044.077.272,11		31.749.517.176,76		32.480.780.535,51		33.248.696.721,38		34.053.843.281,30	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	90	90	90	3.543.920.033,00	90	3.623.491.861,00	90	3.707.020.995,00	90	3.794.666.621,00	90	3.886.597.351,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0	0	0	22.313.436,00	0	22.814.441,00	0	23.340.362,00	0	23.892.202,00	0	24.471.021,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	3.459.552.840,00	100	3.537.230.354,00	100	3.618.770.986,00	100	3.704.330.105,00	100	3.794.072.318,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi (%)	100	100	100	3.072.861.614,00	100	3.141.856.741,00	100	3.214.283.166,00	100	3.290.278.922,00	100	3.369.990.201,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel					2.084.459.974,00		2.131.262.467,00		2.180.392.563,00		2.231.943.895,00		2.285.015.635,00	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0	98	98	3.311.813.793,89	98	3.395.376.202,66	98	3.473.016.787,51	98	3.555.774.415,12	98	3.641.917.974,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola administrasi kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	95	95	2.595.734.517,22	95	2.654.016.683,10	95	2.715.197.367,00	95	2.778.738.876,26	95	2.846.710.822,16	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola administrasi kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	90	90	90	2.615.675.639,00	90	2.674.405.545,00	90	2.736.056.233,00	90	2.800.745.201,00	90	2.868.596.891,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Presentase Meningkatkan Kesenagamaan dan SDM ASN (%)	95	100	100	4.457.906.752,00	100	4.558.000.371,00	100	4.663.071.896,00	100	4.773.321.567,00	100	4.888.961.485,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	80	0	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Presentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah					48.310.754,00		49.395.480,00		50.534.149,00		51.728.936,00		52.982.134,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	90	90	90	2.662.175.125,00	90	2.721.949.086,00	90	2.784.695.754,00	90	2.850.534.714,00	90	2.919.592.619,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	98	98	98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah (%)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	95	95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	98	98	98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	3.169.352.794,00	100	3.239.717.945,00	100	3.314.400.277,00	100	3.392.741.267,00	100	3.474.934.830,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					124.762.719,00		134.630.509,00		137.538.244,00		140.583.386,00		143.771.518,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (%)	90	90	90	25.423.290,00	90	25.994.121,00	90	26.593.340,00	90	27.222.090,00	90	27.881.581,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)	80	80	80	27.410.849,00	80	28.026.306,00	80	28.672.371,00	80	29.350.276,00	80	30.061.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik					46.669.286,00		47.717.154,00		48.817.135,00		49.971.325,00		51.181.945,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan PublikUrusan Pemerintah Umum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	98.00	98.00	17.500.000,00	98.00	17.892.928,00	98.00	18.305.398,00	98.00	18.738.195,00	98.00	19.192.152,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kahayan Hulu Utara					-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (%)	0	0	100	7.759.294,00	100	15.000.000,00	100	15.150.000,00	100	15.301.500,00	100	15.454.515,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.855.748.565,28		5.980.189.120,77		6.211.815.358,84		6.358.888.886,76		6.513.158.914,73	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	90	90	90	451.231.786,00	90	461.363.317,00	90	471.998.714,00	90	483.158.246,00	90	494.863.382,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial					643.227.985,00		657.698.023,00		672.859.349,00		688.767.859,00		705.454.155,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial					264.078.700,19		270.008.073,34		276.232.329,07		282.763.329,37		289.613.638,36	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	301.776.913,00	100	308.552.726,00	100	315.665.517,00	100	323.128.841,00	100	330.957.057,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	457.292.406,00	100	467.560.016,00	100	478.338.261,00	100	489.647.681,00	100	501.510.033,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	85.73	100	100	531.151.272,00	100	543.077.240,00	100	555.596.316,00	100	568.732.359,00	100	582.510.638,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Presentase Kegiatan Forum Musyawarah di Ttingkat Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	1.100.574.815,00	100	1.125.286.080,00	100	1.151.226.298,00	100	1.178.444.905,00	100	1.206.994.264,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Program Desa/Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Presentase Kinerja keterlibatan organisasi, kelompok, keagaman dan masyarakat dalam peningkatan kapasitas lembaga masyarakat (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					557.967.270,53		570.495.339,42		677.220.943,20		693.232.574,47		710.027.034,14	
Meningkatnya Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	368.781.089,00	100	377.061.351,00	100	385.753.411,00	100	394.873.834,00	100	404.440.165,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	527.321.413,00	100	532.094.903,00	100	544.556.595,00	100	557.638.317,00	100	571.365.514,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0	98.00	98.00	652.344.915,56	98.00	666.992.052,01	98.00	682.367.625,57	98.00	698.500.940,92	98.00	715.423.034,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					47.209.088,00		48.269.076,00		49.381.780,00		50.549.320,00		51.773.943,00	
Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0	98.00	98.00	12.450.000,00	98.00	12.729.540,00	98.00	13.022.983,00	98.00	13.330.887,00	98.00	13.653.845,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	19.515.867,00	100	19.954.058,00	100	20.414.041,00	100	20.896.693,00	100	21.402.943,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	11.122.043,00	100	11.371.767,00	100	11.633.910,00	100	11.908.972,00	100	12.197.482,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	4.121.178,00	100	4.213.711,00	100	4.310.846,00	100	4.412.768,00	100	4.519.673,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
terlaksanaknnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)					-		-		-		-		-	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.219.706.009,80		1.246.092.133,92		1.275.840.239,38		1.306.005.111,13		1.337.644.783,59	
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	90	90	108.860.966,00	90	111.305.227,00	90	113.871.047,00	90	116.563.316,00	90	119.387.214,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	222.828.714,00	100	227.831.899,00	100	233.083.905,00	100	238.594.741,00	100	244.375.009,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	112.565.404,00	100	115.092.841,00	100	117.745.974,00	100	120.529.858,00	100	123.449.851,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah					34.470.779,00		35.244.753,00		36.057.219,00		36.909.725,00		37.803.911,00	
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah					269.527.737,00		275.579.458,00		281.932.146,00		288.597.908,00		295.589.567,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	98.00	98.00	92.229.305,92	98.00	94.300.135,45	98.00	96.473.952,52	98.00	98.754.899,92	98.00	101.147.365,66	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum					161.829.908,88		164.463.484,47		169.277.766,86		173.280.025,21		177.477.958,93	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	147.298.471,00	100	150.605.771,00	100	154.077.552,00	100	157.720.430,00	100	161.541.413,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	70.094.724,00	100	71.668.565,00	100	73.320.677,00	100	75.054.208,00	100	76.872.494,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					519.502.706,01		531.167.125,26		543.411.646,15		556.259.604,69		569.735.714,30	
Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan	Presentase Efisiensi Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi, Koordinasi, dan Pembinaan yang tertib (%)	100	100	100	49.019.418,00	100	50.120.053,00	100	51.275.426,00	100	52.487.738,00	100	53.759.321,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	90	90	90	68.194.309,00	90	69.725.479,00	90	71.332.798,00	90	73.019.329,00	90	74.788.317,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	29.585.019,00	100	30.249.293,00	100	30.946.603,00	100	31.678.278,00	100	32.445.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	43.192.399,00	100	44.162.200,00	100	45.180.232,00	100	46.248.435,00	100	47.368.863,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	58.360.180,00	100	59.670.544,00	100	61.046.076,00	100	62.489.397,00	100	64.003.284,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					49.260.266,51		50.366.309,90		51.527.359,60		52.745.628,31		54.023.459,67	
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	73.543.930,00	100	75.195.215,00	100	76.928.623,00	100	78.747.457,00	100	80.655.216,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	77.856.377,00	100	79.604.490,00	100	81.439.540,00	100	83.365.027,00	100	85.384.653,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0	98.00	98.00	70.490.807,50	98.00	72.073.541,36	98.00	73.734.988,55	98.00	75.478.315,38	98.00	77.306.875,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.301.272.186,00		8.487.661.089,52		8.683.319.585,52		8.888.620.547,52		9.103.958.933,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.520.188.753,00		4.621.680.790,52		4.728.220.284,52		4.840.010.269,52		4.957.265.808,00	
Persentase kebutuhan Administrasi penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	4.520.188.753,00	100	4.621.680.790,52	100	4.728.220.284,52	100	4.840.010.269,52	100	4.957.265.808,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.397.048.761,00		1.428.416.771,00		1.461.344.791,00		1.495.895.574,00		1.532.135.588,00	
Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.397.048.761,00	100	1.428.416.771,00	100	1.461.344.791,00	100	1.495.895.574,00	100	1.532.135.588,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.582.266.541,00		1.617.793.256,00		1.655.086.804,00		1.694.218.257,00		1.735.262.896,00	
Persentase pendidikan Politik pada kader Partai Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	1.582.266.541,00	100	1.617.793.256,00	100	1.655.086.804,00	100	1.694.218.257,00	100	1.735.262.896,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Demokrasi Indonesia ((%))	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					195.787.068,00		200.183.085,00		204.797.727,00		209.639.789,00		214.718.586,00	
Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	100	100	100	195.787.068,00	100	200.183.085,00	100	204.797.727,00	100	209.639.789,00	100	214.718.586,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					134.865.899,00		137.894.050,00		141.072.799,00		144.408.204,00		147.906.681,00	
Persentase kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	100	100	100	134.865.899,00	100	137.894.050,00	100	141.072.799,00	100	144.408.204,00	100	147.906.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					471.115.164,00		481.693.137,00		492.797.180,00		504.448.454,00		516.669.374,00	
Persentase konflik sosial yang di selesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	471.115.164,00	100	481.693.137,00	100	492.797.180,00	100	504.448.454,00	100	516.669.374,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.172.106.750.848,03		1.184.715.811.463,22		1.208.995.856.801,67		1.243.608.291.978,06		1.271.177.969.481,12	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029.



Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD
INDIKATOR TUJUAN									
1	Indeks Infrastruktur	Indek	65.13	67.63	70.13	72.63	75.13	77.63	80.13
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2 eq		761,073.91	974,049.19	974,049.19	1,107,517.29	1,236,278.60	1,384,322.50
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indek	73.88	74.17	74.64	75.12	75.90	76.06	76.53
4	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00
5	PDRB per Kapita	Rp. Juta /Kapita	67.08	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00
6	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.61	4.41	4.21	4.00	3.80	3.60
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek	58.35	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indek	3.27	3.35	3.43	3.52	3.60	3.68	3.76
INDIKATOR SASARAN									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Indek	80.12	80.93	81.75	82.56	83.37	84.19	85.00
3	Persentase Desa Mandiri	%	8.77	14.04	14.04	14.04	14.04	14.04	14.04
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indek	69.33	78.26	78.47	78.68	78.89	79.1	79.30
5	Indeks Risiko Bencana	Indek	121.85	123.56	121.85	120.14	118.42	116.71	115
6	Indeks Pendidikan	Indek	64.84	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47
7	Indeks Kesehatan	Indek	82.43	82.54	82.78	83.01	83.25	83.49	83.72
8	Indeks Ketimpangan Gender	Indek	0.570	0.560	0.555	0.546	0.54	0.534	0.530
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indek	58.24	58.53	58.82	59.12	59.41	59.71	60.00
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indek	61.74	62.36	62.98	63.61	64.25	64.89	65.84
11	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2.18	6.50	6.52	6.54	6.56	6.58	6.60



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD
12	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	2.28	3.03	3.77	4.51	5.26	6.00
13	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	%	4.38	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.47
14	Gini Rasio	Poin	0.25	0.244	0.238	0.232	0.226	0.220	0.214
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	2.94	2.76	2.58	2.40	2.22	2.04
16	Nilai SAKIP	Poin	61.63	63.03	64.42	65.82	67.21	68.61	70.00
17	Indeks Pelayanan Publik	Indek	87.00	87.05	87.05	87.10	87.15	87.20	87.25
18	Indeks Integritas Nasional	Indek		74.59	75.67	76.75	77.84	78.92	80.00

Sumber : Tim Penyusun, 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indek	56.78	56.78	57,.42	58.07	58.71	59.36	60
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	(%)	5.81	5.43	5.08	4.75	4.42	4.1	3.79
3	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	35	35	36	37	38	39	40
4	% RT Pengguna Listrik PLN	%	82.27	83	83.45	85.75	89.5	90	95
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	3.32	4.24	5.15	6.07	6.98	7.89	8.81
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	69.33	78.26	78.47	78.68	78.89	79.1	79.3
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	%	14	14	15.2	16.4	17.6	18.8	20
8	Persentase jumlah Rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	%	53.48	53.82	54.15	54.49	54.83	55.17	55.5
9	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	-	3	2.9	2.8	2.7	2.6	0
10	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	52.55	52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05
11	Persentase kondisi mantap jalan	%	34.65	36	37.62	39.65	41.68	43.04	44.39



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2 eq	Na	761,073.91	974,049.19	974,049.19	1,107,517.29	1,236,278.60	1,384,322.50
13	Indeks Risiko Bencana	Indek	121.85	123.56	121.85	120.14	118.42	116.71	115
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.33	0.38	0.43	0.48	0.53	0.58	0.63
15	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	145.54	148.23	150.94	153.61	156.26	158.87	161.64
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.89	1.85	1.83	1.77	1.73	1.67	1.63
17	Rasio Penduduk	%	110.49	110.21	109.99	109.69	109.04	109.22	108.93
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6
2	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.61	4.41	4.21	4	3.8	3.6
3	PDRB Per Kapita	Rp. Juta /Kapita	67.08	70	71	72	73	74	75
4	Pengeluaran Per Kapita (Ribu/Tahun	Angka	11.9	11.98	12.06	12.14	12.22	12.3	12.38
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	2.94	2.76	2.58	2.4	2.22	2.04
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68.72	70.84	71.47	71.88	71.92	72.34	72.56
7	Indeks Gini	Poin	0.25	0.244	0.238	0.232	0.226	0.22	0.214
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	4.5	1.7	2	2.2	2.4	2.6	2.8
9	Indek Pembangunan Manusia	Indek	73.88	74.17	74.64	75.12	75.9	76.06	76.53
10	Indeks Kesehatan	Indek	82.43	82.54	82.78	83.01	83.25	83.49	83.72
11	Usia Harapan Hidup	tahun	73.58	73.65	73.80	73.96	74.11	74.27	74.42
12	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 kelahiran hidup)	110	109.65	109.3	108.95	108.6	108.25	107.9
13	Prevalensi Stunting	%	14.1	13.5	12.4	11.3	10.2	9.1	8.85
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	90	90	90.65	91.30	91.95	92.60	93.25



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	(%)	100	100	100	100	100	100	100
16	Indeks Pendidikan	Indek	64.84	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47
17	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.37	9.48	9.58	9.69	9.79	9.9	10
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.1	12.31	12.52	12.74	12.95	13.16	13.37
19	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka	75.59	82.56	85.52	88.49	91.46	94.01	96.56
20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka	98.97	99.32	99.66	100	100	100	100
21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Angka	2.3	2.81	3.32	3.83	4.33	4.84	5.35
22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek	51.07	60	60	62	64	66	67
23	Kemampuan Literasi SD	%	49.49	51.99	54.49	56.99	59.49	61.99	64.49
24	Kemampuan Literasi SMP	%	63.63	64.73	65.03	66.93	68.03	69.13	70.23
25	Kemampuan Numerasi SD	%	44.44	47.34	50.24	53.14	56.04	58.04	61.84
26	Kemampuan Numerasi SMP	%	57.55	59.04	60.55	62.05	63.55	65.05	66.55
27	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	33.97	41.47	52.38	66.94	85.13	100	100
28	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	48.45	48.45	49.45	50.45	51.45	52.45	53.45
29	Iklim Keamanan SD	Nilai	65.84	69.74	70.64	75.43	76.93	78.43	79.93
30	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70.93	72.43	73.93	75.43	76.93	78.43	79.93
31	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	67.47	68.47	69.47	70.47	71.47	72.47	73.47
32	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	71.37	72.37	73.37	74.37	75.37	76.37	77.37
33	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	53.81	56.31	58.81	61.31	63.81	66.31	68.81
34	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57.42	59.82	62.22	64.62	67.02	69.42	71.82
35	Indeks Literasi Digital								
36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	(%)	4.5	1.7	2	2.2	2.4	2.6	2.8
37	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	58.53	58.53	58.53	58.82	59.12	59.41	59.71
38	Indeks Harmoni Indonesia		6	6.2					



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58.53	58.53	58.82	59.12	59.41	59.71	60
40	Indeks Perlindungan Anak	Indek	51.37	55	55.1	56.1	57.1	58.1	60
41	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indek	61.74	62.36	62.98	63.61	64.25	64.89	65.54
42	Capaian Kabupaten Layak Anak	Angka	561						1000
43	Indeks Ketimpangan Gender	(%) Indeks	0.57	0.56	0.555	0.546	0.54	0.534	0.53
44	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.31	2.30	2.29	2.28	2.27	2.26	2.25
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	44.13	44.15	44.22	44.32	44.43	44.6	44.77
2	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	8.28	10.07	11.85	13.64	15.43	17.21	19
3	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9.98	9.98	9.99	9.99	9.99	10	10
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1.65	1.68	1.7	1.71	1.73	1.74	1.75
5	Skor dan Predikat Inovasi Daerah	Angka	50.54	60	60	60	60	70	70
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2.18	6.5	5.52	6.54	6.56	6.58	6.6
7	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	33.05	33.12	33.18	33.25	33.32	33.38	33.45
8	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	2.28	3.03	3.77	4.51	5.26	6
9	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	%	4.38	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.47
10	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	orang	25011	25843	26674	27506	28337	29169	30000
11	Ratio elektrifikasi	%	95.55	96	96.55	97.1	97.65	98.2	98.75
12	Indeks Infrastruktur	Indek	65.13	67.63	70.13	72.63	75.13	77.63	80.13



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase	52.55	52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05
14	Persentase Desa Mandiri	%	8.77	14.04	14.04	14.04	14.04	14.04	14.04
15	Indeks Konektivitas Wilayah	Indek	80.12	80.93	81.75	82.56	83.37	84.19	85
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.22						
17	Indeks Harga Konsumen	%							
IV	ASPEK LAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	%	87.36	87.5	87.5	87.5	87.5	90	90
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek	58.35	60	62	64	66	68	70
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Poin	61.63	63.03	64.42	65.82	67.21	68.61	70
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indek	2.74	2.75	Transisi ke IPD				
5	Indeks Pemerintah Digital	Indek	-	-	1.5	1.6	1.8	2	2.2
6	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan								
7	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda								
8	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	87	87.05	87.05	87.1	87.15	87.2	87.25
9	Indeks Integritas Nasional	%		74.59	75.67	76.75	77.84	78.92	80
10	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Daya Saing Daerah	Indek	3.27	3.35	3.43	3.52	3.6	3.68	3.76
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indek	76.589	76.789	81.789	87.089	92.489	97.989	100
13	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indek	3.23	3.31	3.34	3.38	3.42	3.46	3.48
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	75,59	82,56	85,52	88,49	91,46	94,01	98,56
2.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,30	2,81	3,32	3,83	4,33	4,84	5,35
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98.97	99.32	99.66	100	100	100	100
B	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
4.	Angka Kesakitan	Per 1000	401,1	402	403	405	406,2	407	409
5.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	4.9	11.63	11.63	10.97	10.46	9.96	9.29
C	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
6.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
7.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	36,78	37,46	38,13	38,81	39,48	40,16	40,83
8.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	3,32	4,24	5,15	6,07	6,98	7,89	8,81
9.	Rasio rumah layak huni	%	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
10.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	7,95	9,01	10,07	11,14	12,20	13,27	14,33
D	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
11.	Cakupan pelayanan kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
14.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
16.	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
17.	Terselesaikannya konflik antar kelompok/umat beragama/suku dan lainnya	Skor	81.68	81.68	81.68	82.00	81.36	81.68	82.00
18.	Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
19.	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
E	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
20.	Tingkat penurunan jumlah PPKS	%	90	90	90	90	90	90	90
21.	Persentase penanganan PPKS	%	81,42	90	90	90	90	90	90
22.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
F	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
23.	Persentase penempatan tenaga kerja	%	96.68	96.70	96.81	96.85	96.90	96.95	97.10
24.	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	%	0.35	0.37	0.39	0.40	0.42	0.44	0.46
25.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1.31	1.35	1.38	1.40	1.45	1.48	1.5
26.	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	8	3.7	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
G	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
27.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	89,43	89,56	89,62	89,74	89,81	89,95	90.02
28.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,049	0.060	0,065	0,076	0,086	0,097	0,108
29.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
30.	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
31.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68.72	70.84	71.47	71.88	71.92	72.34	72.56
32.	Persentase ARG Pada belanja Langsung	%	2,26	2.27	2,28	2,30	2,32	2,34	2,36
H	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
33.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
I	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
34.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.33	78.26	78.47	78.68	78.89	79.10	79.10
35.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,75	79,50	79,80	80,10	80,40	80,70	81,00
36.	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,90	74,70	74,90	75,10	75,30	75,50	75,70
37.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	72,48	82,06	82,13	82,20	82,27	82,34	82,41
38.	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	%	9,96	13	15	18	20	23	25,3
J	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl								
39.	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	85,39	0	90	92	94	96	98
40.	Persentase penduduk usia di bawah 17 tahun yang wajib memiliki KIA	%	67,56	70	80	85	90	95	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
41.	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	96,41	98,00	97,5	98,25	99	99,50	100
42.	Pengguna Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Angka	3	3	11	20	25	30	39
43.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	40	45	50	55	60	65	70
K	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
44.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	2.95	3.39	3.44	3.50	3.67	4.80	5.33
45.	Terbinanya Masyarakat Desa mendapat Pelatihan Ekonomi Produktif	Orang	50	50	55	75	85	95	100
46.	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	114	114	114	114	114	114	114
L	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
47.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun(Age Spesicifik Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	56	45,00	43,00	40,00	37,00	34,00	30,00
48.	Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi(Unmet need)	%	4,87	6,15	6,05	5,92	5,80	5,68	5,56
49.	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	49.05	51.72	53.33	56.25	56.45	57.57	58.82
50.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	73,18	74.83	73,46	73,60	73,74	73,88	74,02
51.	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,31	2,3	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25
M	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
52.	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	60	62	65	75	80	85	90
53.	Tingkat penurunan jumlah kecelakaan	%	40	52.5	65	70	75	80	85
N	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
54.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96.70	96.70	97	97.10	97.30	97.40	97.60
55.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	0	0	60	63	66	68	73
56.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
57.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.74	2.75	2.8	2.85	2.9	2.95	3
58.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96.70	96.70	97	97,10	97,30	97,40	97,60
59.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	87.50	87.60	87.70	87.80	87.90	88	88.10
60.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	26,3	35	45	55	65	75	85
O	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
61.	Persentase UMKM yang naik skala usaha	%	36	37	37.5	38	38.4	39	39.4
62.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100
P	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
63.	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Angka	5308800000	557424000	583968000	642364800	7066012800	777261408	854987548
			00	000	000	000	00	000	800
64.	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (TKI) dan (TKA) melalui Investasi Daerah	Orang	194	202	212	232	253	275	298
65.	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Kegiatan	379	387	397	417	438	460	483
Q	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
66.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.16	2.19	2.6	2.65	2.7	2.8	3
R	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
67.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	80	50	52	54	56	58	60
S	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
68.	Persentase pelestarian warisan budaya	%	17	15	15	15	15	15	15
69.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	4.60	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
T	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
70.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	51.07	60	60	62	64	66	67
71.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58.177	60	60	61	63	64	65
72.	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Orang	6704	7700	9250	10637	12232	13455	14800
U	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
73.	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	84,71	84,75	84,79	84,81	84,85	85,01	85,54
74.	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan	Angka	63.62	64.05	65.01	65.25	65.51	65.65	65.75
75.	Jumlah dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	Angka	8993	8998	9000	9200	9500	9600	9700
V	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
76.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1312	1305	1330	1355	1380	1405	1430
77.	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	170	175	180	190	200	210	220
W	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
78.	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
X	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
79.	LPE Sektor Pertanian	%	-8.88	-7.38	-5.88	-4.38	-2.88	-1.38	0.12
Y	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
80.	Indeks Perkembangan Harga	%	0,79	0,78	0,77	0,79	0,20	0,21	0,22



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
81.	Pertumbuhan nilai neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa)	%	1	1	1	1	1	1	1
82.	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	%	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10
Z	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
83.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Unit Usaha	402	404	436	456	476	496	516
84.	Jumlah Kewirausahaan IKM Daerah	Wirausaha	402	404	436	456	476	496	516
AA	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
85.	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	75	75	75	75	75	75	75
86.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kepala Keluarga	300	400	400	400	400	400	400
AB	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
87.	Capaian penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah	Nilai	90,84	90,85	90,87	90,92	91,00	91,05	91,10
88.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat	%	96,94	97,5	98	98,5	98,5	99	100
89.	Persentase Reformasi Hukum	Indeks	87.36	87.5	87.5	87.5	87.5	90	90
90.	Meningkatnya nilai belanja pengadaan barang dan jasa	%	91,03	93,0	95,0	96,0	96,0	97,0	98,0
91.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	87.00	87.05	87.05	87.10	87.15	87.20	87.25
AC	5.01 - PERENCANAAN								
92.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
93.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100
AD	5.02 - KEUANGAN								
94.	Rasio PAD	%	3.84	6.01	8.16	8.40	8.65	8.91	9.18
95.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
96.	Meningkatnya tata kelola aset daerah	%	0	3	3	3	4	4	4



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
97.	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	97,125	97,131	97,578	98,025	98,354	99,025	100
AE	5.03 - KEPEGAWAIAN								
98.	Indeks Merit Sistem	Angka	112,5	0	220	0	0	0	0
99.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40	0	40.53	58	60	65	70
AF	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
100.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0	0	0	0	0	0	0
101.	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	%	8,23	0	10	12	16	20	30
102.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Permintaan PD)	%	28	0	35	45	55	65	75
AG	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
103.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50.54	60	60	60	60	70	70
AH	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
104.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Skor	3.000	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
AI	7.01 - KECAMATAN								
105.	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
106.	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dipenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100
AJ	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
107.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	58.53	58.53	58.53	58.82	59.12	59.41	59.71
108.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	90	90	90	90	90	90	100
109.	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	90	90	90	90	90	90	90
110.	Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat	%	90	90	90	90	90	90	100

Sumber : Tim Penyusun, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas 5 (lima) tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Gunung Mas serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh perangkat daerah dalam koordinasi pemerintah daerah.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Gunung Mas maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini tahun 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Gunung Mas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas agar melaksanakan program-program dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan selanjutnya RKPD



- merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Pemenrintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD; dan
 8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI GUNUNG MAS

TTD

JAYA SAMAYA MONONG